

# 2018

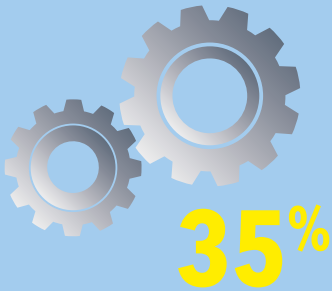


## **TRANSFORMASI LAYANAN MENUJU PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN**

Services Transformation Towards  
Sustainable Growth

**Market Share penugasan hingga tahun 2018**

Market Share of assignment until 2018



Melayani 176 Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN dengan dukungan 14.030 tenaga kerja (HP Group)

Serving 176 PLN Customer Service Units (ULP) supported by 14,030 workforce (HP Group)

**Pemberi Kerja belum sepenuhnya mengakomodir komponen DPLK sesuai UU No. 13/2003**

The employer is not completely accommodate DPLK components according to Law No. 13/2003



Berdampak pada Rasio Operasi, Rasio BPP, dan Net Margin

Impacted on Operating Ratio, BPP Ratio, and Net Margin

**Rata-rata Penyesuaian Margin atas Permintaan Beberapa Unit PLN**

Average Margin Adjustment as Expected by Several PLN Units



Berdampak pada Rasio Operasi, Rasio BPP, dan Net Margin

Impacted on Operating Ratio, BPP Ratio, and Net Margin

**SLA 97,37%**



1. Denda SLA 2,63%
2. Berdampak pada Rasio Operasi, Rasio BPP, dan Net Margin

1. SLA Penalty of 2.63%
2. Impacted on Operating Ratio, BPP Ratio, and Net Margin

**Kecelakaan Kerja di Pekanbaru dan Bangka**

Work Accidents Occurred in Pekanbaru and Bangka



Zero Accident tidak tercapai

Zero Accident was not achieved

# IKHTISAR KINERJA UTAMA

## Key Performance Highlights

## TRANSFORMASI LAYANAN MENUJU PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

### Services Transformation Towards Sustainable Growth

Tahun 2018 merupakan momentum penting dalam perjalanan usaha PT Haleyora Power. Sepanjang tahun, Perusahaan bergerak cepat menyelesaikan berbagai proses transisi sebagai dampak dari regulasi penataan zonasi. Di saat yang sama, kami harus menyelaraskan proses bisnis dan menjaga kesinambungan pertumbuhan kinerja yang positif di dalam perubahan lingkungan yang penuh tantangan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan.

Keunggulan kompetitif di bidang layanan operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi didukung oleh digitalisasi data operasional dan *supporting* serta utilisasi sumber daya yang optimal telah menghasilkan kinerja keuangan yang melampaui ekspektasi. Dengan fundamental yang kuat, kami melangkah pasti untuk bertransformasi menjadi aset operator berstandar kelas dunia dan meraih pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

The year 2018 was a crucial period in the business journey of PT Haleyora Power. Throughout the year, the Company moved swiftly to complete various transition processes as a result of zoning regulation. At the same time, we must align business processes and maintain sustainable positive growth in a dynamic and challenging environment, while seizing growth opportunity.

Competitive advantages in the sector of operations and maintenance services of transmission and distribution networks supported by digitalization of operational and supporting data and optimal utilization of resources have resulted in exceptional financial performance. With strong fundamentals, we are taking a bold step towards transforming into a world-class asset operator and achieving sustainable growth in the future.

# DAFTAR ISI

## Contents

### 01 PENDAHULUAN

#### Introduction

Transformasi Layanan Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan Services Transformation Towards Sustainable Growth	1
Daftar Isi Contents	2
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	4
Ikhtisar Pencatatan Saham Shares Listing Highlights	9
Peristiwa Penting Tahun 2018 Event Highlights 2018	10

### 02 LAPORAN MANAJEMEN

#### Management Report

Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	12
Laporan Direksi Report from the Board of Directors	22
Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 Statement Letter from the Board of Directors and the Board of Commissioners Relating to the Responsibility on the 2018 Annual Report	35

### 03 PROFIL PERUSAHAAN

#### Company Profile

Identitas Perusahaan Company Identity	38
Sekilas Perusahaan Company in Brief	40
Jejak Langkah Milestones	44
Bidang Usaha Business Sectors	46
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perusahaan Objective, Target, and Strategy of the Company	49
Struktur Organisasi Organizational Structure	54
Visi dan Misi Perusahaan Vision and Mission of the Company	56
Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture	58

Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners	60
Identitas dan Riwayat Singkat Direksi Identity and Brief Profile of the Board of Directors	63
Profil Sumber Daya Manusia Profile of Human Resources	66
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition	68
Struktur Grup Perusahaan Structure of Company Group	68
Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan The Company Supporting Institutions and Professions	69
Daftar Entitas Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi, dan Perusahaan Patungan List of Subsidiaries, Associated, and Joint Ventures Company	70
Wilayah Kerja Operational Map	72
Website Perusahaan The Company's Website	74

### 04 PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

#### Management Discussion and Analysis

Pembahasan dan Analisis Manajemen Management Discussion and Analysis	78
Uraian Atas Kinerja Keuangan Perusahaan Financial Performance Review	98
Pengelolaan <i>Human Capital</i> Human Capital Management	126
Teknologi Informasi Information Technology	83

### 05 TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### Corporate Governance

Komitmen Commitment	147
Pedoman dan Kebijakan GCG GCG Guidelines and Policies	147
Dewan Komisaris Board of Commissioners	149
Komisaris Independen Independent Commissioner	156



Direksi Board of Directors	156
Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi ( <i>Board Manual</i> ) Board Manual	160
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors	161
Penilaian Penerapan GCG GCG Assessment	168
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors	174
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings	175
Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholder	181
Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Affiliated Relationship among the Board of Directors and the Board of Commissioners and Major Controlling Shareholder	181
Komite Audit Audit Committee	182
Komite GCG & Manajemen Risiko GCG & Risk Management Committee	187
Corporate Secretary Corporate Secretary	192
Fungsi Audit Internal (Satuan Pengawasan Internal) Internal Audit Unit	195
Akuntan Publik Public Accountant	199
Manajemen Risiko Risk Management	200
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	208
Perkara Penting Legal Issues	209
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Corporate Information and Data	210
Pedoman Perilaku Code of Conduct	210

Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ) Whistleblowing System	212
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity Policy in Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors	215

## 06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Corporate Social Responsibility

Komitmen Commitment	219
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait Aspek Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility Program Related to Human Rights	222
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait Aspek Operasi yang Adil Corporate Social Responsibility Program Related to Fair Operations	222
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility Program Related to Environment	222
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Corporate Social Responsibility Program Related to Employment, Occupational Health and Safety	223
Rencana Kegiatan pada Tahun 2019 Activity Plan in 2019	227
Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (K3)	227
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Tanggung Jawab kepada Konsumen Corporate Social Responsibility Program Related to Consumer Protection	238
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Pengembangan Sosial dan Masyarakat Corporate Social Responsibility Program Related to Social and Community Development	241

## 07 LAPORAN KEUANGAN AUDIT

### Audited Financial Statements

# IKHTISAR KEUANGAN

## Financial Highlights

(dalam jutaan Rupiah kecuali disebutkan lain)

(in million Rupiah unless stated otherwise)

	2014*	2015	2016	2017	2018	
<b>Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>						<b>Profit or (Loss) and Other Comprehensive Income</b>
Pendapatan	882,532	1,047,093	1,343,560	1,696,226	2,073,318	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(817,914)	(907,881)	1,171,780)	(1,487,314)	(1,821,999)	Cost of Revenues
Beban Usaha	(33,550)	(34,718)	(46,180)	(49,566)	(56,618)	Operating Expenses
Laba sebelum Pajak	31,068	104,494	125,600	159,346	194,701	Income before Tax
Beban Pajak	(8,755)	(27,573)	(23,946)	(36,875)	(56,020)	Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	22,313	76,921	101,654	122,471	138,681	Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:						Profit for the Year Attributable to:
– Pemilik Entitas Induk	N/A	N/A	93,683	117,145	135,254	– Owners of the Parent
– Kepentingan Non-Pengendali	N/A	N/A	7,971	5,326	3,427	– Non-Controlling Interest
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:						Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:
– Pemilik Entitas Induk	N/A	N/A	152,186	126,183	129,827	– Owners of the Parent
– Kepentingan Non-Pengendali	N/A	N/A	7,971	5,326	3,427	– Non-Controlling Interest
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	N/A	N/A	160,157	131,509	133,254	Total Comprehensive Income for the Year
<b>Posisi Keuangan</b>						<b>Financial Position</b>
Aset Lancar	284,128	383,322	484,557	637,767	715,865	Current Assets
Aset Tidak Lancar	71,646	75,035	64,121	80,726	109,041	Non-Current Assets
Total Aset	355,774	458,357	548,678	718,493	824,906	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	55,538	63,639	62,655	89,129	93,214	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	135,309	147,646	78,479	90,735	118,382	Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	190,847	211,285	141,134	179,864	211,596	Total Liabilities
Total Ekuitas	164,927	247,072	407,544	538,629	613,310	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	355,774	458,357	548,678	718,493	824,906	Total Liabilities and Equity
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	N/A	N/A	38,093	42,698	47,476	Investment Associates and Joint Ventures
<b>Rasio Keuangan</b>						<b>Finance Ratio</b>
Rasio Beban Pokok Pendapatan (%)	92.68	86.70	87.21	87.68	87.88	Cost of Revenues Ratio (%)
Rasio Operasi (%)	96.48	90.02	87.68	90.61	90.61	Operating Ratio (%)
Rasio Kas (Kali)	2.92	3.07	4.25	3.44	4.11	Cash Ratio (Times)
Rasio Lancar (Kali)	5.12	6.02	7.73	7.16	7.68	Current Ratio (Times)
Rasio Utang terhadap Aset (%)	53.64	46.10	25.72	25.03	25.65	Debt to Asset Ratio (DAR) (%)
Rasio Utang terhadap Modal (%)	115.72	85.52	34.63	33.39	34.50	Debt to Equity Ratio (DER) (%)
Margin EBITDA (%)	3.82	9.54	8.92	9.19	9.42	EBITDA Margin (%)
Margin Operasi (%)	2.94	9.70	9.61	9.41	9.64	Operation Margin (%)
Margin Bersih (%)	2.53	7.35	7.57	7.22	6.69	Net Margin (%)
Tingkat Pengembalian Aset (%)	6.27	16.78	18.53	17.05	16.81	Return on Assets (ROA) (%)
Tingkat Pengembalian Modal (%)	13.53	31.13	24.94	22.74	24.94	Return to Equity (ROE) (%)
Umur Piutang (Hari)	44	36	32	38	40	Collection Period (Day)

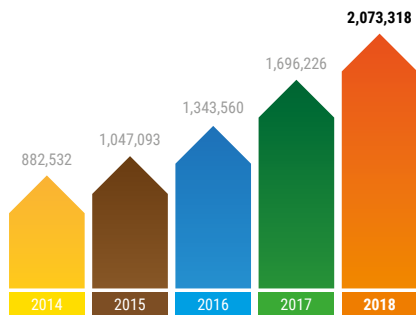
\* Disajikan Kembali

\* Restated

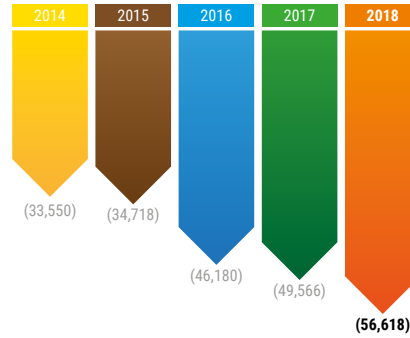
**INTRODUCTION**

- Management Report
- Company Profile
- Management Discussion and Analysis
- Corporate Governance
- Corporate Social Responsibility
- Financial Statement

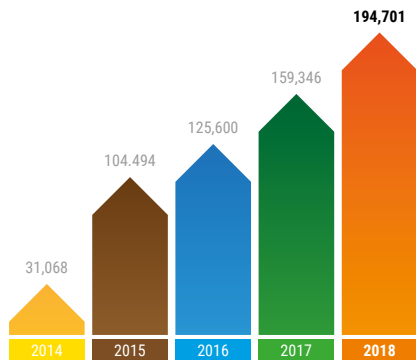
**PENDAPATAN (Rp juta)**  
Revenues (Rp million)



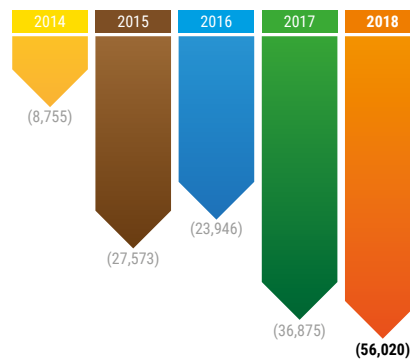
**BEBAN USAHA (Rp juta)**  
Operating Expenses (Rp million)



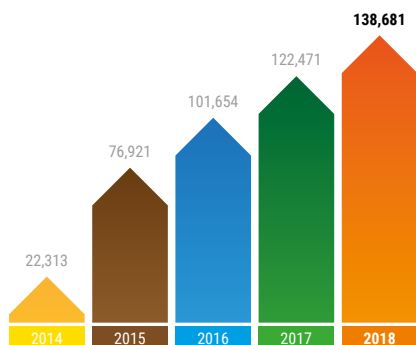
**LABA SEBELUM PAJAK (Rp juta)**  
Income before Tax (Rp million)



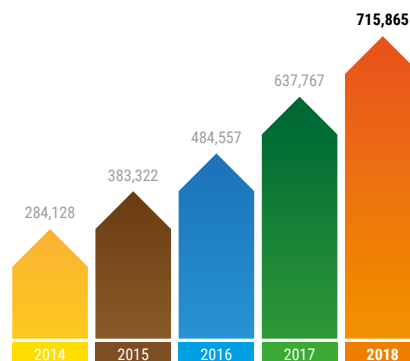
**BEBAN PAJAK (Rp juta)**  
Tax Expenses (Rp million)

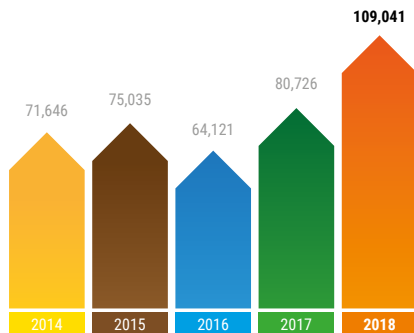
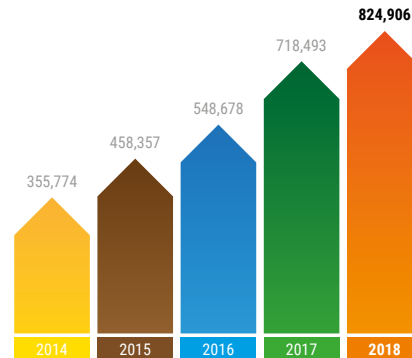
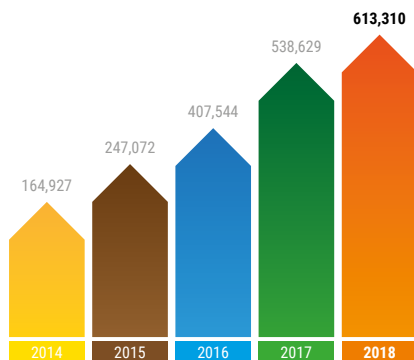
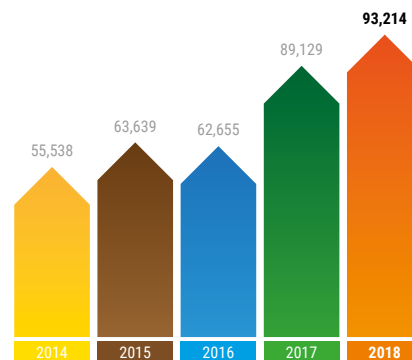
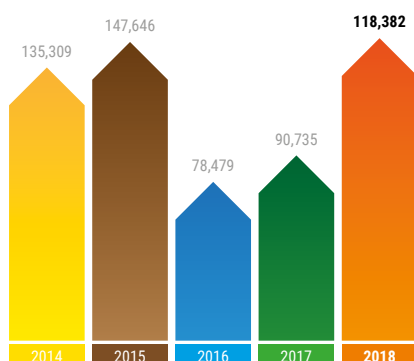
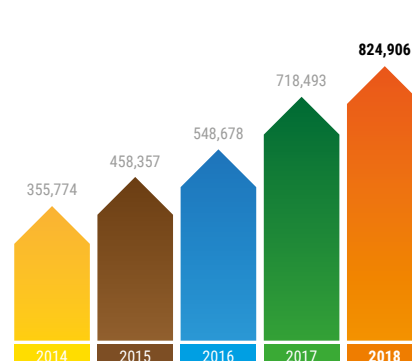


**LABA TAHUN BERJALAN (Rp juta)**  
Income for the Year (Rp million)



**ASET LANCAR (Rp juta)**  
Current Assets (Rp million)



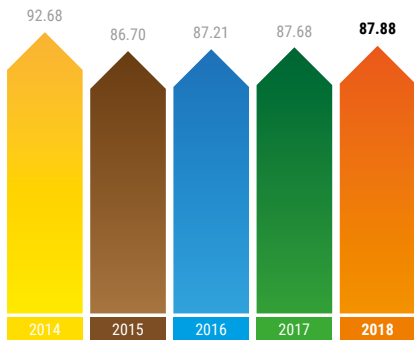
**IKHTISAR KEUANGAN**  
Financial Highlights**ASET TIDAK LANCAR** (Rp juta)  
Non-Current Assets (Rp million)**TOTAL ASET** (Rp juta)  
Total Assets (Rp million)**TOTAL EKUITAS** (Rp juta)  
Total Equity (Rp million)**LIABILITAS JANGKA PENDEK** (Rp juta)  
Current Liabilities (Rp million)**LIABILITAS JANGKA PANJANG** (Rp juta)  
Non-Current Liabilities (Rp million)**TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** (Rp juta)  
Total Liabilities and Equity (Rp million)

**INTRODUCTION**

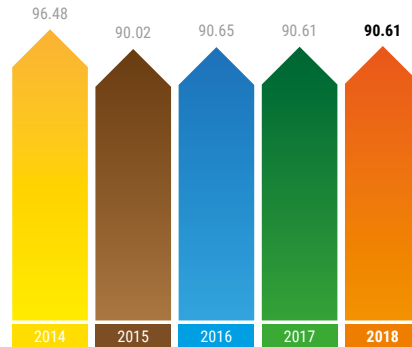
Management Report  
Company Profile  
Management Discussion and Analysis  
Corporate Governance  
Corporate Social Responsibility  
Financial Statement

**IKHTISAR KEUANGAN**  
Financial Highlights

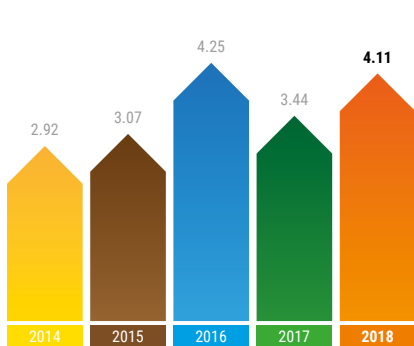
**RASIO BEBAN POKOK PENDAPATAN (%)**  
Cost of Revenues Ratio (%)



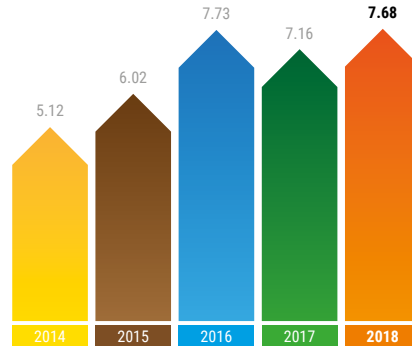
**RASIO OPERASI (%)**  
Operating Ratio (%)



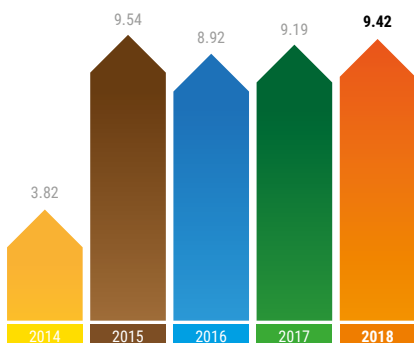
**RASIO KAS (Kali)**  
Cash Ratio (Times)



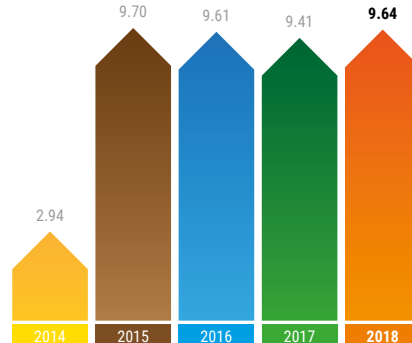
**RASIO LANCAR (Kali)**  
Current Ratio (Times)



**MARJIN EBITDA (%)**  
EBITDA Margin (%)

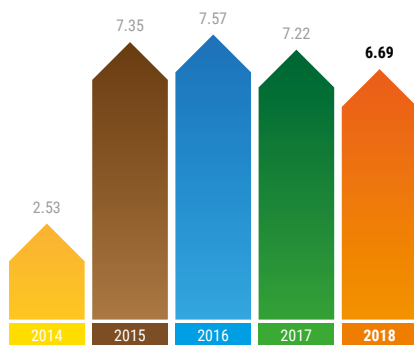


**MARJIN OPERASI (%)**  
Operating Margin (%)

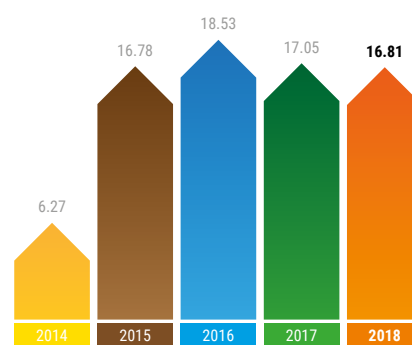


**IKHTISAR KEUANGAN**  
 Financial Highlights

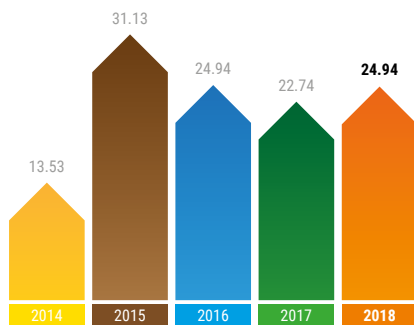
**MARJIN LABA BERSIH (%)**  
 Net Profit Margin (%)



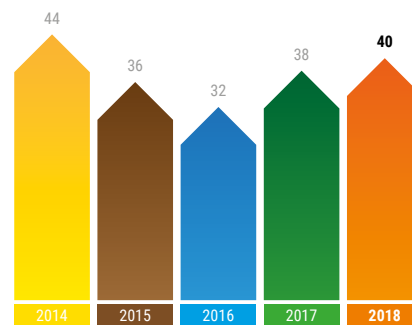
**TINGKAT PENGEMBALIAN ASET (%)**  
 Return on Assets (ROA) (%)



**TINGKAT PENGEMBALIAN MODAL (%)**  
 Return on Equity (ROE) (%)



**UMUR PIUTANG (Hari)**  
 Collection Period (Day)



## INTRODUCTION

Management Report  
Company Profile  
Management Discussion and Analysis  
Corporate Governance  
Corporate Social Responsibility  
Financial Statement

## IKHTISAR PENCATATAN SAHAM

### Shares Listing Highlights

Hingga tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan dan memperdagangkan sahamnya kepada publik dan tidak terdaftar di bursa efek.

Up to 2018, the Company did not issued or publicly trade its shares and is not listed on the stock exchange.

## IKHTISAR EFEK LAINNYA

### Other Shares Highlights

Hingga tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan dan/atau mencatatkan efek lainnya di bursa manapun.

Up to 2018, the Company did not issued or listed other securities on any stock exchange.

# PERISTIWA PENTING TAHUN 2018

## Event Highlights in 2018

**JANUARI** January



**11** Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dengan keputusan menyetujui dan mengesahkan RKAP 2018 dan Kontrak Manajemen/KPI 2018.

The Company held General Meeting of Shareholders (GMS) of 2018 Work Plan and Budget (RKAP) with the resolution to approve and ratify 2018 RKAP and 2018 Management Contract/KPI.

**JANUARI** January



**26** Perusahaan meluncurkan *tagline* "SPS4" (Sikap, Senyum, Salam, Sapa) sebagai pedoman Komitmen Pelayanan Teknik Era 2018.

The company launched "SPS4" *tagline*: Sikap (Attitude), Senyum (Smile), Salam (Regards), Sapa (Greeting) as a guideline for the Commitment of Technical Services in 2018 Era.

**FEBRUARI** February



**26-27** Rapat Kerja PT HALEYORA Power Semester I 2018 dalam rangka penyampaian informasi rencana dan strategi jangka panjang dan jangka pendek dan *Workshop Upskilling* Manajer Region dan Manajer Area dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan pelayanan yang optimal.

PT HALEYORA Power Work Meeting on Semester I 2018 regarding information on long-term and short-term plans and strategies, and upskilling workshop for Regional and Area Manager in order to support optimal performance and service achievement.

**MARET** March



**26-27** Pertemuan dengan Divisi Perencanaan Korporat, Divisi Organisasi, Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis, dan Divisi Manajemen Risiko PT PLN (Persero) untuk membahas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2018-2022.

Meeting with Corporate Planning Division, Organization Division, Electricity Transaction and Business Partnership Division, and Risk Management Division of PT PLN (Persero) to discuss the Company's Long Term Plan (RJPP) 2018-2022.

**APRIL** April



**12-13** Studi banding ke PT PJB dan PT PJBS mengenai *Asset Management Contract*, Pengelolaan SDM dan Keselamatan Ketenagakerjaan.

Comparative study to PT PJB and PT PJBS concerning *Asset Management Contract*, HR Management and Labor Safety.

**MEI** May



**16** RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

AGMS of Approval and Ratification of 2017 Financial Statements.

**MEI** May-JUNI June



Safari Ramadhan 1439H Direksi ke area kerja Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Pekanbaru, Lampung, dan Bangka.

The Company's Board of Directors conducted Safari Ramadhan 1439H to work areas of Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Pekanbaru, Lampung and Bangka.

**JULI** July



**4** Studi banding mengenai *Asset Management Contract*, Pengelolaan SDM, dan Keselamatan Ketenagakerjaan ke Kantor Pusat PT KAI (Persero) Bandung.

Comparative study of *Asset Management Contract*, HR Management, and Labor Safety to PT KAI (Persero) Head Office, Bandung.



## INTRODUCTION

Management Report  
Company Profile  
Management Discussion and Analysis  
Corporate Governance  
Corporate Social Responsibility  
Financial Statement

### JULI July

**12** Pembahasan Perjanjian Jasa Pemborongan Kebersihan Gedung dan Instalasinya di PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung.

Discussion on Building Cleaning and Installation Services Agreement in PT PLN (Persero) Region of Bangka Belitung.

### AGUSTUS August



**2-3** Forum Bisnis PT Haleyora Power sebagai wadah *Voice of Customer* dan penyusunan *Quick Win* pencapaian kinerja Semester II 2018.

PT Haleyora Power Business Forum as Voice of Customer forum and preparation of performance achievement Quick Win for Semester II 2018.

### SEPTEMBER September

**21** Pembahasan kontrak *multiyears* pelayanan dan *knowledge sharing* *commad center* bertempat di ruang rapat Tangkuban Perahu, PLN Distribusi Jawa Barat.

Discussion of multiyears service contract and knowledge sharing command center at Tangkuban Perahu meeting room, PLN Distribution of West Java.

### SEPTEMBER September

**28** Penandatanganan perjanjian kerja sama vokasi SMK dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Signing of vocational cooperation agreement with Office of Education and Culture of Central Java Province in Semarang.

### OKTOBER October



**18** Peringatan HUT ke-7 PT Haleyora Power ditandai dengan komitmen Perusahaan untuk melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan keandalan dan integritas layanan kepada pelanggan PLN.

The commemoration of PT Haleyora Power's 7<sup>th</sup> Anniversary marked by the Company's commitment to provide the best in carrying out assignment to contribute significantly in improving reliability and integrity of services to PLN customers.

### NOVEMBER November



**2** Kegiatan Haleyora Fair 2018 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman PT Haleyora Power dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi/Wilayah tentang Pemanfaatan Fasilitas Simulator Jaringan Distribusi.

Haleyora Fair 2018 and Signing Memorandum of Understanding between PT Haleyora Power and PT PLN (Persero) Parent Unit/Regional concerning Utilization of Distribution Network Simulator Facilities.

### NOVEMBER November

**23** Pembahasan rencana sosialisasi implementasi arah dan strategi pengembangan portofolio bisnis PLN bertempat di Kantor Pusat PT PLN (Persero).

Discussion on socialization plan for implementation of direction and strategy for developing the PLN business portfolio at PT PLN (Persero) Head Office.

### DESEMBER December



**15** *Employee Gathering* PT Haleyora Power Kantor Pusat sebagai bentuk *worklife balance* antara bekerja, bersuka cita dan membangun kerja sama tim.

Employee Gathering of PT Haleyora Power Head Office as a balanced worklife between working, having fun and building teamwork.

# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners



Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil menjaga konsistensi pertumbuhan Perusahaan dengan kinerja keuangan yang sehat sehingga menumbuhkan optimisme terhadap kemampuan Perusahaan untuk mengeksekusi rencana pengembangan usaha ke depan.

Board of Commissioners considers that Board of Directors has managed to maintain the Company's consistent growth with sound financial performance so as to create optimism about the Company's ability to execute its future business development plans.

**Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,**

Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, PT Haleyora Power ("HP atau "Perusahaan") dapat mencapai kinerja positif yang terus meningkat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan dan pengelolaan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

**Pandangan atas Kondisi Eksternal**

Kondisi perekonomian dunia yang belum menunjukkan prospek membaik tentu berimbas pada kondisi perekonomian domestik sepanjang tahun 2018. Sebagaimana nilai mata uang di banyak negara yang berguguran akibat penguatan indeks dolar Amerika Serikat (AS) dampak kebijakan moneter Bank Sentral AS, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun terus melemah sejak awal tahun. Di pasar komoditas global, harga komoditas utama turut bergejolak akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Harga energi primer terutama minyak mentah dan batu bara terus bergerak fluktuatif dengan tren meningkat.

Ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga energi primer tentu berdampak substansial bagi kinerja operasional dan keuangan grup PT PLN (Persero). Di sisi lain, Pemerintah dan PLN telah menetapkan kebijakan untuk tidak

**Dear Valued Shareholders and Stakeholders,**

First of all, we would like to praise God the Almighty for His blessings, so that PT Haleyora Power ("HP" or the "Company") could achieve an increasingly positive performance. On this occasion, please allow us to deliver this supervisory report of Board of Commissioners on development and management of the Company for the year ended December 31, 2018.

**External Environment Overview**

The world economy that did not show improved outlook affected the domestic economy throughout 2018. As the exchange rate of currencies in many countries fell due to the strengthening of US dollar index as an impact of the Fed monetary policy, the exchange rate of rupiah against US dollar also weakened since the beginning of the year. In the global commodity markets, prices of major commodities were also volatile due to imbalances in supply and demand. The prices of primary energy, especially crude oil and coal, continued to fluctuate with an upward trend.

The uncertainty of rupiah exchange rate against US dollar and the price of primary energy certainly had a substantial impact on the operational and financial performances of PT PLN (Persero) group. On the other hand, the Government and

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners

menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk semua golongan hingga tahun 2019 demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri.

Untuk menjaga kesinambungan usaha yang sehat dan tingkat profitabilitas yang positif, PLN sebagai perusahaan induk mendorong seluruh unit bisnis dan anak usaha untuk melakukan efisiensi di semua lini dan meningkatkan inovasi layanan. Setiap anak usaha diminta untuk menyelaraskan dan menyesuaikan strategi dan rencana kerja perusahaan dengan misi portofolio grup PLN yang terangkum dalam SOLID (*Securing business sustainability, Optimizing cost efficiency, Leading industries capabilities, Increasing profit contribution, Developing new edge*).

Sebagai salah satu anak usaha, HP yang menjadi mitra strategis PLN yang bertugas melaksanakan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance/O&M*) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, berkomitmen untuk mengoptimalkan sinergi antar anak perusahaan dan dengan unit-unit PLN baik dalam hal investasi, memaksimalkan pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) melalui keandalan operasi, serta mengelola margin keuntungan yang rasional demi mendukung upaya efisiensi biaya operasi unit-unit PLN yang menjadi pelanggan Perusahaan.

### Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Direksi terutama berdasarkan pencapaian target kinerja yang telah disepakati yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 dan pencapaian indikator kinerja utama (KPI) Manajemen. Selain itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan konsistensi dan kepatuhan Direksi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Pada tahun 2018, Perusahaan telah menandatangani 70 kontrak penugasan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi yang meliputi perluasan dan penambahan kontrak eksisting di bidang Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan, penugasan baru di bidang Niaga, serta kontrak Operator Gardu Induk (GI) 150 kV dan Petugas Ground Patrol (PGP). Jumlah pelanggan *end-to-end* bertambah sebanyak 15 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) mencakup 73 Unit Layanan Pelanggan (ULP) sehingga secara keseluruhan, jumlah ULP yang dilayani Perusahaan hingga akhir tahun 2018 telah mencapai 176 ULP.

PLN adopted a policy of not raising the basic electricity tariff (TDL) for all groups until 2019 in order to maintain people's purchasing power and industrial competitiveness.

To maintain sound business continuity and positive profitability, PLN as a holding company encourages all business units and subsidiaries to increase efficiency in all business lines and to improve service innovation. Each subsidiary is asked to align and adjust their strategies and work plans with PLN group's portfolio missions which are summarized in SOLID (*Securing business sustainability, Optimizing cost efficiency, Leading industry capabilities, Increasing profit contribution, Developing new edge*).

As one of its subsidiaries, HP, as PLN's strategic partner in charge of carrying out operation and maintenance (O&M) services in power transmission and distribution networks, is committed to optimizing the synergy among subsidiaries and with PLN units, in terms of investment, maximization of Service Level Agreements (SLAs) achievement through operational reliability and rational profit margins in order to support efficient operating costs of PLN units that become the Company's customers.

### Performance Assessment of Board of Directors

Board of Commissioners assessed performance of Board of Directors primarily based on achievement of the agreed upon performance targets set out in 2018 Work Plan and Corporate Budget (RKAP) and Management's key performance indicators (KPI). In addition, Board of Commissioners also considered consistency and compliance of Board of Directors in good corporate governance (GCG) implementation.

In 2018, the Company signed 70 assignment contracts to secure operation and maintenance services for distribution and transmission covering expansion and addition of the existing contracts in Technical and Maintenance Services, new assignments in Commerce sector, 150 kV substation (GI) operator contract and Ground Patrol Officer (PGP). The number of end-to-end customers increased by 15 Customer Service Executive Units (UP3) including 73 Customer Service Units (ULP); hence, overall, the number of ULP served by the Company at end of 2018 reached 176 ULP.

**LAPORAN DEWAN KOMISARIS**  
Report from the Board of Commissioners

Perusahaan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.073,32 miliar, tumbuh 22,2% dibandingkan Rp1.343,56 miliar pada tahun 2017. Upaya efisiensi biaya di setiap lini menghasilkan pertumbuhan laba kotor sebesar Rp251,32 miliar, naik 20,3% dibandingkan Rp208,91 miliar pada tahun 2017. Sedangkan Laba bersih naik 13,2% dari Rp122,47 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp138,68 miliar.

Hasil penilaian KPI Manajemen tahun 2018 mencapai skor 92,16 di mana berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk pada kategori "AA" atau kondisi "SEHAT".

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil menjaga konsistensi pertumbuhan Perusahaan dengan kinerja keuangan yang sehat. Hal ini menumbuhkan optimisme terhadap kemampuan Perusahaan untuk mengeksekusi rencana pengembangan usaha ke depan.

### **Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi**

Dewan Komisaris telah mempelajari rencana pengembangan usaha Perusahaan yang dijabarkan dalam rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022 sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Terhadap rancangan RJPP tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan antara lain sebagai berikut:

1. Direksi agar melakukan analisis eksternal dan internal, termasuk mengacu pada RJPP PLN dan kondisi lingkungan bisnis terkini sehingga memperoleh perspektif yang lengkap dalam merumuskan visi, misi, arah strategi dan program kerja strategis RJPP dengan target waktu yang spesifik.
2. Direksi agar memastikan bahwa visi dan misi Perusahaan telah mencakup pelaksanaan penugasan sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengamanan Layanan Bidang Transmisi dan Distribusi.
3. Direksi dalam menyusun *roadmap* RJPP yang terdiri dari 4 fase yaitu: *improvement*, *stabilization*, *excellence performance* dan *trend setter*, agar mencermati kesesuaian antara tingkat kematangan organisasi dan proses bisnis dengan setiap fase yang hendak dicapai.

The Company managed to record operating revenues of Rp2,073.32 billion, increased by 22.2% compared to Rp1,343.56 billion in 2017. Efforts to improve cost efficiency in each line resulted in gross profit growth of Rp251.32 billion, up 20.3% compared to Rp208.91 billion in 2017. While net income rose by 13.2% from Rp122.47 billion in 2017 to Rp138.68 billion.

The results of Management's KPI assessment in 2018 reached a score of 92.16. According to Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Assessment of Corporate Soundness Level, such score is under "AA" or "SOUND" category.

In general, Board of Commissioners considers that Board of Directors has managed to maintain the Company's consistent growth with sound financial performance. This creates optimism about the Company's ability to execute its future business development plans.

### **View on Business Prospects Prepared by Board of Directors**

Board of Commissioners reviewed the Company's business development plans outlined in draft 2018-2022 Long-Term Corporate Plan (RJPP) before submission to GMS for approval and ratification. With regard to draft RJPP, Board of Commissioners provided the following responses:

1. Board of Directors to prepare external and internal analysis, including reference to PLN's RJPP and the current business environment so as to obtain a comprehensive perspective in formulating the vision, missions, strategic directions and strategic work programs of RJPP with a specific target time.
2. Board of Directors to ensure that the Company's vision and missions include implementation of assignments in accordance with Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017 dated April 18, 2017 concerning Safeguarding Services in Transmission and Distribution.
3. Board of Directors to prepare RJPP roadmap consisting of 4 phases: *improvement*, *stabilization*, *excellence performance* and *trend setter*, in order to examine compatibility between organizational maturity level and business processes with each phase to be achieved.

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners

4. Direksi agar mengevaluasi struktur organisasi sehingga mampu mendukung fase pengembangan yang membutuhkan tingkat kematangan organisasi dan proses bisnis yang tinggi.
5. Direksi dalam menetapkan proyeksi pasar dan pendapatan 2018-2022 agar sekurang-kurangnya memperhatikan target penguasaan 50% pangsa pasar bisnis O&M transmisi dan distribusi sesuai arahan RUPS RKAP Perusahaan tahun 2017 dan implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017 tentang Kebijakan Zonasi/Regionalisasi Wilayah Operasi HP dan PLN Tarakan.
6. Direksi agar mengidentifikasi dan memasukkan pelanggan non-PLN yang potensial sebagai prospek pasar baru ke dalam RJPP.

Pada dasarnya, Dewan Komisaris mendukung setiap upaya Direksi untuk mengembangkan peluang-peluang pengembangan usaha agar dapat meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Sesuai fungsinya, Dewan Komisaris telah mengkaji dengan seksama semua potensi risiko dari rencana bisnis yang diajukan, dan memberikan nasihat agar Direksi melakukan perencanaan yang matang dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

### Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris dibantu komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja Pengawasan tahun 2018 yang berpedoman pada Anggaran Dasar, *Board Manual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memantau dan memberikan arahan kepada Direksi, menelaah dan memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen, Laporan Manajemen Risiko, Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) PLN, SPI Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan semua tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi dan atau persetujuan Dewan Komisaris, serta kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018 antara lain adalah:

- Pengawasan atas efektivitas dan efisiensi operasi dan investasi, termasuk pengawasan atas efektivitas pengelolaan organisasi dan *human capital*, rancangan RKAP dan RJPP, dan manajemen risiko.
- Pengawasan atas keandalan pelaporan keuangan, termasuk pengawasan atas prosedur penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian, sistem informasi serta temuan audit oleh auditor eksternal.

4. Board of Directors to evaluate organizational structure so that it can support the development phase that requires a high level of organizational maturity and business processes.
5. Board of Directors in setting 2018-2022 market and revenue projections to, at least, consider the target of 50% of O&M market share for transmission and distribution business according to the directives in GMS on the Company's 2017 RKAP and implementation of Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017 concerning Operational Areas Zoning/Regionalization Policy for HP and PLN Tarakan.
6. Board of Directors to identify and include potential non-PLN customers as new market prospects in RJPP.

Basically, Board of Commissioners supports Board of Directors in every effort to develop business development opportunities in order to increase value for Shareholders and all stakeholders. In accordance with its function, Board of Commissioners carefully reviewed all potential risks in the proposed business plan and advised Board of Directors to conduct thorough planning while continuously prioritizing the principle of prudence.

### Implementation of Supervisory Duties

Board of Commissioners is assisted by committees of Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties in accordance with 2018 Supervisory Work Plan which referred to the Articles of Association, Board Manual and the applicable laws and regulations. Board of Commissioners monitored and provided advices to Board of Directors, reviewed and responded to Management Reports, Risk Management Reports, Audit Reports (LHA) of PLN Internal Audit Unit (SPI), the Company's SPI and Public Accounting Firm (KAP) and all measures of Board of Directors which required recommendation and or approval of Board of Commissioners, as well as other supervisory activities. Board of Commissioners' duties in 2018 included, among others:

- Supervision of effectiveness and efficiency of operations and investments, including supervision of effectiveness of organizational management and human capital, the draft RKAP and RJPP and risk management.
- Supervision of financial reporting reliability, including supervision of procedures for Consolidated Financial Statements preparation, information system and audit findings of external auditors.



**LAPORAN DEWAN KOMISARIS**  
Report from the Board of Commissioners

- Pengawasan atas pelaksanaan RKAP berupa Laporan Manajemen dan Realisasi KPI Manajemen triwulanan dan tahunan, serta pengawasan atas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
- Pengawasan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengawasan atas efektivitas audit internal, pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal, serta pengawasan atas penerapan GCG.

Secara berkala, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan kepengurusan Perusahaan. Pada tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 16 (enam belas) kali rapat, baik rapat internal, rapat dengan Komite Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi. Melalui mekanisme rapat, Dewan Komisaris telah memberikan arahan, pendapat, nasihat, tanggapan maupun meminta perhatian Direksi agar kepengurusan Perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga KPI Manajemen dapat tercapai.

Produk kegiatan pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018, baik yang disampaikan di dalam forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dalam bentuk surat Dewan Komisaris, maupun melalui komunikasi digital antara lain mengenai: penyempurnaan struktur organisasi; tantiem dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi; pembagian laba bersih tahun 2017; penunjukan KAP; rancangan RKAP 2018 dan RJPP 2018-2022; Laporan Manajemen dan Laporan Manajemen Risiko triwulanan dan tahunan; Laporan pencapaian KPI Manajemen; tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal; persetujuan pengambilalihan saham minoritas perorangan di HPI; dan isu-isu lainnya.

Sebagai pertanggungjawaban tugas Dewan Komisaris kepada RUPS, Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2018, serta usulan dan pendapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang membutuhkan persetujuan dan pengesahan RUPS.

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 4 kali yaitu ke unit kerja Bandung, Bogor, Pangkalpinang, dan Surabaya. Kunjungan kerja Dewan Komisaris bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, dan

- Supervision of RKAP implementation in the form of Management Reports and quarterly and annual Management's KPI Realization, as well as supervision of audit conducted by external auditor.
- Supervision of the Company's compliance with the applicable laws and regulations, including supervision of effectiveness of internal audit, follow-up on external audit findings and GCG implementation.

Periodically, Board of Commissioners holds meetings to evaluate management measures of the Company. In 2018, Board of Commissioners held 16 (sixteen) meetings, including internal meetings, meetings with Committees of Board of Commissioners and joint meetings with Board of Directors. Through meeting mechanism, Board of Commissioners provided guidances, opinions, advices and responses and requested attention of Board of Directors so that the management of the Company could run well so that Management's KPI could be achieved.

Supervisory products of Board of Commissioners during 2018 were delivered in Board of Commissioners and Board of Directors joint meetings, in the form of letters of Board of Commissioners and digital communication, including improvement of organizational structure; bonuses and remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors; distribution of net income for 2017; appointment of Public Accounting Firm; draft 2018 RKAP and 2018-2022 RJPP; quarterly and annual Management Reports and Risk Management Reports; Report on achievement of Management's KPI; follow-up on findings of internal and external auditors; approval for acquisition of individual minority shares in HPI; and other issues.

As an accountability of Board of Commissioners to GMS, Board of Commissioners submitted a Supervisory Report of Board of Commissioners and realization of Board of Commissioners' KPI in 2018, as well as proposals and opinions of Board of Commissioners on matters that required approval and ratification of GMS.

In 2018, Board of Commissioners performed 4 work visits to Bandung, Bogor, Pangkalpinang and Surabaya. Board of Commissioners' work visits aims to monitor and evaluate effectiveness of work implementation, to identify the existing problems and to ensure that management took corrective actions properly. Based on the visit results, Board

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners

memastikan bahwa manajemen telah melakukan tindakan koreksi dengan baik. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti Direksi.

Kinerja Dewan Komisaris secara kuantitatif diukur melalui pencapaian KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh pemegang saham dan menjadi bagian dari Kontrak Kinerja Manajemen tahun 2018 disepakati dan disahkan pada RUPS Pengesahan RKAP pada tanggal 11 Januari 2018. KPI Dewan Komisaris pada tahun 2018 mencapai skor 98.

### Penerapan Tata Kelola dan Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan dan praktik tata kelola yang baik termasuk mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian internal. Dewan Komisaris dibantu oleh komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite GCG & Manajemen Risiko (GCG & MR) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit dan Komite GCG & MR telah menelaah dokumen RKAP 2019, RJPP 2018-2022, serta Laporan Manajemen dan pencapaian KPI Manajemen triwulanan dan tahunan 2018 sesuai lingkup tugas masing-masing komite. Komite-komite Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil kajiannya sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam penyusunan arahan, rekomendasi, nasihat dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi baik secara tertulis maupun yang disampaikan di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Atas dasar kajian Komite Audit dan Komite GCG & MR, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan/tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS.

Komite Audit telah melaksanakan tugasnya untuk mengawasi tindak lanjut temuan hasil audit internal dan eksternal yang hasilnya telah didiskusikan dengan SPI dan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris. Terkait dengan Piagam SPI yang disusun pada tahun 2014, Komite Audit telah memberikan pendapatnya agar Piagam SPI dievaluasi dan dimutakhirkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan proses bisnis Perusahaan saat ini. Selain itu, Komite Audit juga telah melaksanakan tugas khusus yaitu melakukan kajian atas rencana aksi korporasi pengambilalihan saham minoritas perorangan di HPI.

of Commissioners provided several recommendations to be followed up by Board of Directors.

Performance of Board of Commissioners is measured quantitatively through achievement of Board of Commissioners' KPI that were approved by shareholders and were part of 2018 Management Performance Contract agreed and ratified in GMS on RKAP Approval on January 11, 2018. Board of Commissioners' KPI in 2018 reached a score of 98.

### Governance Implementation and Performance of Committees of Board of Commissioners

Board of Commissioners continues to improve quality and effectiveness of its supervisory function and good governance practices, including monitoring of internal control system implementation. Board of Commissioners is assisted by committees of Board of Commissioners, namely Audit Committee and GCG & Risk Management (GCG & MR) Committee to optimize its supervisory function and to formulate Board of Commissioners' policies.

During 2018, Audit Committee and GCG & MR Committee reviewed 2019 RKAP, 2018-2022 RJPP, as well as quarterly and annual Management Reports and Management's KPI achievement reports in 2018 according to the scope of duties of each committee. Committees of Board of Commissioners submitted their review results as input for Board of Commissioners in preparing guidance, recommendations, advices and responses of Board of Commissioners for Board of Directors, both in writing and in joint meeting of Board of Commissioners and Board of Directors. Based on review of Audit Committee and GCG & MR Committee, Board of Commissioners subsequently submitted reports/responses of Board of Commissioners to GMS.

Audit Committee performed its duties to monitor follow-up on internal and external audit findings. The results were discussed with SPI and submitted in Board of Commissioners meeting. Related to SPI Charter which was compiled in 2014, Audit Committee provided its opinion so that SPI Charter is evaluated and updated according to current changes and developments in the Company's business processes. In addition, Audit Committee also performed a special task which was to review corporate action plan for acquisition of individual minority shares in HPI.



**LAPORAN DEWAN KOMISARIS**  
Report from the Board of Commissioners

Komite GCG & MR telah melaksanakan tugasnya mengawasi, menguji, dan mengevaluasi strategi, sistem dan kebijakan Perusahaan di bidang manajemen risiko, GCG, nominasi dan remunerasi, pengembangan *human capital*, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Komite GCG & MR telah melakukan kajian atas usulan besaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2017 dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018. Usulan dan rekomendasi terkait tantiem dan remunerasi tersebut telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Realisasi kinerja komite Dewan Komisaris secara kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk pencapaian KPI komite. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit dan Komite GCG & MR pada tahun 2018 sangat memuaskan berdasarkan capaian KPI Komite Audit dan Komite GCG & MR di mana seluruh program kerja telah terpenuhi seluruhnya dengan skor 100.

**Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)**

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah mendeklarasikan pembentukan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) untuk mendukung implementasi GCG dan praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. WBS berperan untuk mengelola setiap laporan yang masuk berkaitan dengan kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan kecurangan, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran Pedoman Perilaku.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, penerapan WBS yang dikelola oleh Komite Pelaporan Pelanggaran belum menunjukkan peran yang signifikan dalam melakukan upaya preventif (pencegahan) dan kuratif (penindakan) dalam rangka mengamankan aset Perusahaan. Hal ini perlu menjadi perhatian Direksi untuk memperkuat fungsi dan peran WBS di Perusahaan. Ke depan, sesuai tugas dan tanggung jawab Komite Audit di dalam sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris dapat menugaskan Komite Audit untuk memberikan konsultasi bagi Komite Pelaporan Pelanggaran dalam menjalankan tugasnya menangani pengaduan.

GCG & MR Committee performed its duties to monitor, test and evaluate the Company's strategies, systems and policies in the areas of risk management, GCG, nomination and remuneration, human capital development and other tasks assigned by Board of Commissioners. In performing its nomination and remuneration function, GCG & MR Committee conducted a review of proposed amount of tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2017 and remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2018. Proposals and recommendations related to tantiem and remuneration were submitted by Board of Commissioners to GMS for approval.

Realized performance of committees of Board of Commissioners was quantitatively demonstrated in achievement of the committees' KPI. Board of Commissioners considers that performance of Audit Committee and GCG & MR Committee in 2018 was very good based on KPI achievements of Audit Committee and GCG & MR Committee with all work programs were performed with a score of 100.

**View on *Whistleblowing System* (WBS) Implementation**

In 2014, the Company declared establishment of *whistleblowing system* (WBS) to support GCG implementation as well as clean and responsible business practices. WBS manages every incoming report related to events suspected of being related to fraud, criminal act, violation of the Company's policies and Code of Conduct.

In the view of Board of Commissioners, WBS implementation managed by *Whistleblowing Committee* has not shown a significant impact on preventative and curative efforts in order to safeguard the Company's assets. This should be a concern of Board of Directors to strengthen the function and role of WBS in the Company. Going forward, in accordance with duties and responsibilities of Audit Committee within internal control system, Board of Commissioners shall assign Audit Committee to provide consultation to *Whistleblowing Committee* in carrying out its duties in handling complaints.

## DEWAN KOMISARIS

Board of  
Commissioners



Dari kiri ke kanan  
From left to right

**Purnama T. Sianturi**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

**Fahmi El Amruzi**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

**Karyawan Aji**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

**LAPORAN DEWAN KOMISARIS**  
Report from the Board of Commissioners

**Perubahan Komposisi Dewan Komisaris**

Keputusan RUPS Sirkuler PT Haleyora Power tanggal 1 September 2018 menetapkan pemberhentian Okto Rinaldi sebagai Komisaris PT Haleyora Power dan mengangkat serta menetapkan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris PT Haleyora Power. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per 1 September 2018 hingga 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Changes in Composition of Board of Commissioners**

CircularGMS resolution of PT Haleyora Power dated September 1, 2018 stipulated dismissal of Okto Rinaldi as Commissioner of PT Haleyora Power and appointment of Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioners of PT Haleyora Power. Accordingly, composition of the Company's Board of Commissioners as of September 1, 2018 to December 31, 2018 was as follows:

JABATAN	NAMA   Name	Position
Komisaris Utama	Fahmi El Amruzi	President Commissioner
Plt. Komisaris	Karyawan Aji	Act. Commissioner
Plt. Komisaris	Purnama T. Sianturi	Act. Commissioner

Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Okto Rinaldi atas kontribusi tenaga, pemikiran dan waktunya selama bertugas sebagai Komisaris Perusahaan. Kami juga menyambut baik bergabungnya Bapak Karyawan Aji dan Ibu Purnama T. Sianturi sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

We acknowledge Mr. Okto Rinaldi's contribution of energy, thought and time while serving as a Commissioner of the Company. We also welcome the joining of Mr. Karyawan Aji and Mrs. Purnama T. Sianturi as members of the Company's Board of Commissioners.

**Apresiasi**

Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan PT Haleyora Power. Kami sampaikan penghargaan kepada Direksi, tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah menunjukkan kerja keras, loyalitas dan dedikasinya sehingga Perusahaan dapat melewati tahun 2018 dengan pencapaian kinerja yang baik. Semoga Perusahaan dapat terus memberikan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

**Appreciations**

Finally, on behalf of Board of Commissioners, I express my gratitude for the support and trust given by Shareholders and all stakeholders of PT Haleyora Power. We extend our appreciation to Board of Directors, management team and all employees who have shown their hard work, loyalty and dedication so that the Company could go through the year 2018 with a solid performance. Hopefully, the Company will continue to provide the best results to all stakeholders in the future.

**Fahmi El Amruzi**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

# LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors



Tahun 2018 adalah tahun kritikal bagi HP untuk menjaga kontinuitas pertumbuhan kinerja di dalam perubahan lingkungan pasca penerapan kebijakan penataan zonasi wilayah operasi dari Direksi PLN. Namun demikian, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp2.073,32 miliar, meningkat 22,2% dari Rp1.343,56 miliar pada tahun 2017 dan tercapai 117,4% dari target.

2018 was a critical year for HP in maintaining performance growth sustainability amid the changing environment after the implementation of the Directors of PLN on zoning policy in the area of operation. However, the Company successfully recorded revenue of Rp2,073.32 billion, an increase of 22.2% from Rp1,343.56 billion in 2017 and reached 117.4% of the target.

#### **Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, PT Haleyora Power ("HP" atau "Perusahaan") dapat melalui tahun 2018 dengan sejumlah pencapaian penting. Dengan dukungan seluruh pegawai dan tenaga kerja yang tersebar di 6 wilayah kerja di Jawa dan Sumatera, Perusahaan berhasil menjaga kesinambungan pertumbuhan pendapatan usaha yang semakin mengukuhkan optimisme kami untuk bertransformasi menjadi *asset operator* berstandar kelas dunia di masa mendatang. Mewakili Direksi, perkenankanlah saya melaporkan ringkasan kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

#### **Kebijakan Strategis**

Pada tahun 2018, Perusahaan fokus pada penguatan kompetensi inti, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas dan cakupan layanan operasi dan pemeliharaan jaringan (*operation and maintenance/O&M*) distribusi tenaga listrik dari kontrak-kontrak pekerjaan yang sudah diperoleh sampai akhir tahun 2018, baik oleh HP maupun anak perusahaan; PT Haleyora Powerindo (HPI).

#### **Dear Valued Shareholders and Stakeholders,**

We would like to praise God the Almighty for His blessings, so that PT Haleyora Power ("HP" or the "Company") could go through the year 2018 with a number of significant achievements. With the support of all employees and workforce spread across 6 work areas in Java and Sumatera, the Company managed to maintain sustainable operating revenue growth that strengthened our optimism to transform into a world-class asset operator in the future. On behalf of Board of Directors, please allow me to report a summary of the Company's performance for the financial year ending December 31, 2018.

#### **Strategic Policies**

In 2018, the Company focused on strengthening core competencies, developing human resources (HR) and improving the quality and scope of operation and maintenance (O&M) services for power distribution stipulated in work contracts that had been obtained until the end of 2018, either by HP or its subsidiaries; PT Haleyora Powerindo (HPI).



## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

Selain itu, untuk meningkatkan dan menyempurnakan model operasi dan kualitas layanan, saat ini Perusahaan mulai mengimplementasi “*best practice O&M end-to-end process distribusi*” dan penyempurnaan proses bisnis dengan berpedoman pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk menempatkan posisi HP sebagai pemimpin di dalam industri O&M jaringan transmisi dan distribusi yang mampu memberikan diferensiasi dan peningkatan kualitas layanan, pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) dan nilai tambah layanan kepada perusahaan induk (PLN). Selain itu, Perusahaan juga telah berkomitmen untuk mencapai kinerja keselamatan “*zero accident*” melalui pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang konsisten, penerapan budaya *safety, integrity and quality* serta implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3).

### Tantangan dan Peluang

Pada tanggal 18 April 2017, Direksi PT PLN (Persero) menerbitkan Peraturan Direksi No. 0030.P/DIR/2017 tentang Perubahan Peraturan Direksi No. 734.K/DIR/2013 tentang Kebijakan Zonasi/Regionalisasi Wilayah Operasi PT Haleyora Power dan PT PLN Tarakan (“Perdir 0030.P”) di mana HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatera, Jawa, dan Bali, sedangkan PT PLN Tarakan mengelola wilayah kerja Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sebagai implikasi dari penataan zonasi, HPI harus menyerahkan kontrak pekerjaan eksisting di wilayah timur kepada PT PLN Tarakan yang berdampak pada hilangnya potensi pendapatan usaha konsolidasi yang cukup bermakna. Proses transisi telah dimulai sejak pertengahan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah masa yang kritis bagi Perusahaan untuk menjaga kontinuitas pertumbuhan kinerja operasi dan keuangan di dalam perubahan lingkungan. Regulasi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi HP untuk menata ulang rencana kerja dan anggaran serta rencana jangka panjang perusahaan secara menyeluruh dengan memperhatikan zonasi wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Wilayah kerja yang relatif berdekatan dalam satu zonasi memberikan peluang untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya yang lebih efektif dan efisien, utilisasi tenaga kerja yang lebih optimal, serta mobilisasi sumber daya dalam cakupan yang lebih luas sehingga berpeluang untuk

In addition, to improve and refine operations model and service quality, the Company implements “*best practice O&M end-to-end process for distribution*” and improves business processes based on ISO 9001:2015 on quality management system standard.

The strategic initiatives aim to place HP’s position as a leader in the O&M industry for transmission and distribution networks capable of providing differentiation and improving service quality, achieving Service Level Agreement (SLA) and services value added to the parent company (PLN). In addition, the Company is also committed to achieving zero accident safety performance by fostering consistent Occupational Health and Safety (K3) and Electricity Safety (K2), implementing a culture of safety, integrity and quality as well as implementing K3 Management System (SMK3).

### Challenges and Opportunities

On April 18, 2017, Board of Directors of PT PLN (Persero) issued Board of Directors Regulation No. 0030.P/DIR/2017 concerning Amendment to Regulation of Board of Directors No. 734.K/DIR/2013 concerning Zoning/Regionalization Policy of PT Haleyora Power and PT PLN Tarakan Operational Areas (“Perdir 0030.P”) where HP was appointed to manage operational areas in Sumatera, Java, and Bali, while PT PLN Tarakan managed operational areas in Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua.

As implication of the zoning arrangement, HPI had to hand-over the existing work contracts in the eastern region to PT PLN Tarakan which resulted in a significant loss of potential consolidated operating revenues. The transition process taking place in mid-2017 and 2018 was a critical period for the Company in maintaining growth sustainability in operational and financial performances amid the changing environment. The regulation is a challenge as well as an opportunity for HP to comprehensively restructure its work plan and budget as well as corporate long-term with due regard to zoning of the designated operational areas.

Operational areas that are relatively close in one zone provide opportunities to develop work plan and budget that are more effective and efficient, more optimal workforce utilization and resources mobilization in a wider scope so that there is an opportunity to implement borderless operations and to

## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

mengimplementasikan *borderless operation* dan menyediakan layanan *end-to-end* melalui kontrak manajemen aset (*asset management contract/AMC*).

Tantangan lain yang dihadapi adalah pengelolaan SDM dalam menghadapi tuntutan perubahan dan pertumbuhan usaha. Per 31 Desember 2018, Perusahaan mengelola 25.187 pegawai dan tenaga kerja dengan rentang usia, kompetensi, dan karakter kerja yang sangat beragam. Menjadi tantangan tersendiri untuk mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi tersertifikasi di bidang O&M distribusi dalam waktu cepat. Di sisi lain, lingkungan usaha menuntut HP untuk memastikan kesiapan kapasitas dan kapabilitas Perusahaan untuk menjadi *trend setter* dalam jasa O&M.

### Perbandingan antara Realisasi dan Target

#### Pertumbuhan Kontrak dan Pelanggan

Hingga akhir tahun 2018, jumlah penugasan pekerjaan HP mencapai 70 kontrak pengamanan layanan O&M distribusi dan transmisi yang meliputi perluasan dan penambahan kontrak eksisting di bidang Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan, penugasan baru di bidang Niaga, serta kontrak Operator Gardu Induk (GI) 150 kV dan Petugas *Ground Patrol* (PGP). Kontrak-kontrak tersebut berasal dari 6 Unit Induk Distribusi (UID), 4 Unit Induk Wilayah (UIW), 1 Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban (UIP3B), dan 1 Unit Induk Transmisi (UIT) yang meliputi 43 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), 4 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), 13 Unit Pelaksana Transmisi (UPT), dan 283 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang terbagi dalam 9 wilayah kerja Perusahaan, yaitu 6 region dan 3 area khusus yang melingkupi 60 area/APP/UPT.

Jumlah pelanggan untuk layanan *end-to-end* bertambah 15 UP3 dari target penambahan 30 unit PLN setingkat rayon atau tercapai 26,25% dari target. Penambahan 15 UP3 tersebut mencakup 73 Unit Layanan Pelanggan (ULP) sehingga jumlah ULP yang dilayani Perusahaan hingga akhir tahun 2018 menjadi 176 ULP.

#### Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA)

Realisasi pencapaian SLA rata-rata dari seluruh region tercapai 97,37% dari target 100%. Pencapaian SLA tertinggi di Region 5 DKI Jakarta & Banten yaitu 99,26% dan terendah di Region 4 Sumatera Barat yaitu 95,00%. Di tingkat area layanan, SLA tertinggi dicapai Area Layanan Rantau Prapat dengan pencapaian 99,58% dan terendah di Area Layanan Tanjung Karang dengan pencapaian 94,18%.

provide end-to-end services through asset management contract (AMC).

The other challenge is HR management in facing the demands of change and business growth. As of December 31, 2018, the Company managed 25,187 employees and workforce with a very diverse range of ages, competencies and work characteristics. It is a challenge to prepare the existing HR with certified competencies in O&M distribution within a short period. On the other hand, business environment requires HP to ensure capacity and capability of the Company to become a trend setter in O&M services.

### Comparison of Realization and Target

#### Growth of Contracts and Customers

At end of 2018, the number of HP's work assignments reached 70 O&M service security contracts for distribution and transmission which included expansion and addition of the existing contracts in Technical and Maintenance Services, new assignments in Commerce, as well as 150 kV Substation (GI) Operator contracts and Ground Patrol Officer (PGP). Those contracts came from 6 Distribution Main Units (UID), 4 Regional Main Units (UIW), 1 Load Distribution and Management Main Unit (UIP3B) and 1 Transmission Main Unit (UIT) which included 43 Customer Service Executive Units (UP3), 4 Distribution Management Executive Units (UP2D), 13 Transmission Executive Units (UPT) and 283 Customer Service Units (ULP) which are divided into 9 operational areas, consisting of 6 regions and 3 special areas which cover 60 areas/APP/UPT.

The number of customers of end-to-end services increased by 15 UP3 from the target of additional 30 PLN units at rayon level or reached 26.25% of the target. The addition of 15 UP3 included 73 Customer Service Units (ULP) so that the number of ULP served by the Company at end of 2018 was 176 ULP.

#### *Service Level Agreement* (SLA) Achievement

Realization of average SLA achievement in all regions reached 97.37% of the target of 100%. The highest SLA was achieved in DKI Jakarta & Banten Region 5 with 99.26% and the lowest was in Region 4 West Sumatra with 95.00%. At service area level, the highest SLA was achieved in Rantau Prapat Service Area with 99.58% and the lowest was in Tanjung Karang Service Area with 94.18%.

## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

Di tingkat *project*, pencapaian SLA tertinggi 100% terjadi di OGI–Disjatih; Transmisi–JBTB; Manbill–Banyuwangi; Manbill–Jember; Deteksi Kabel–Disjaya; Deteksi Kabel–Disbanten; *Assesment* Kabel HP; *Assesment* Kabel PLN; OGI–Disjaya; DRC; COMMAND CENTER; OPKIT–Tanjung Pinang; PGP; dan OPGI P3BS. Sedangkan *project* dengan pencapaian SLA terendah 91,25% terjadi di Manbill Solok Region 4 Sumatera Barat.

### Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan, Perusahaan secara berkala mengadakan survei kepuasan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan dan memperoleh umpan balik. Tujuan akhir dari pelaksanaan survei adalah evaluasi dan perbaikan kualitas layanan dan kinerja.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan 2 kali survei, yaitu pada semester I dan II. Survei dilakukan kepada 41 responden (pelanggan). Aspek yang diukur meliputi aspek layanan secara umum, tingkat harga (*billing rate*), administrasi keuangan, ketepatan waktu layanan, dan mutu pelayanan yang diberikan. Survei semester I menghasilkan peningkatan indeks kepuasan pelanggan dari 75,36 pada semester I menjadi 76,19. Pencapaian tersebut masih di bawah target sebesar 87,5. Hal ini menjadi bahan evaluasi manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

### Kinerja Keuangan

Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp2.073,32 miliar, meningkat 22,2% dari Rp1.343,56 miliar pada tahun 2017 terutama didorong oleh pertumbuhan jumlah pelanggan baru *end-to-end*. Realisasi pendapatan tercapai 117,4% dari target sebesar Rp1.765,67 miliar. Pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan O&M dan pendapatan lainnya. Pendapatan O&M mencakup pekerjaan Pelayanan Jasa Teknik dan Pelayanan Jasa Non Teknik. Pelayanan Jasa Teknik menjadi kontributor terbesar dari struktur pendapatan Perusahaan.

Beban Pokok Pendapatan (BPP) mencapai Rp1.822,00 miliar, naik 22,5% dibandingkan Rp1.487,31 miliar pada tahun 2017 dan tercapai 115,0% dari target sebesar Rp1.583,83 miliar. Peningkatan BPP terutama disebabkan adanya penambahan proyek-proyek baru yang tidak tercakup di dalam RKAP yang berdampak pada kenaikan biaya subkontraktor, denda operasional, dan jasa tenaga kerja langsung.

At project level, the highest SLA achievement of 100% occurred in OGI–Disjatih; Transmission–JBTB; Manbill–Banyuwangi; Manbill–Jember; Cable Detection–Disjaya; Cable Detection–Disbanten; HP Cable Assessment; PLN Cable Assessment; OGI–Disjaya; DRC; COMMAND CENTER; OPKIT–Tanjung Pinang; PGP; and OPGI P3BS. While project with the lowest SLA achievement of 91.25% was in Manbill Solok Region 4 West Sumatra.

### Customer Satisfaction Survey

To improve service quality for customers, the Company regularly conducts customer satisfaction survey to measure customer satisfaction level of the provided services and to obtain feedback. The final purpose of the survey is to evaluate and improve service quality and performance.

In 2018, the Company conducted 2 surveys, in semester I and II. The surveys were conducted on 41 respondents (customers). The aspects measured included services in general, (billing rate), financial administration, timeliness of services and quality of provided services. The second semester survey resulted in an increase in customer satisfaction index from 75.36 in semester I to 76.19. This achievement was still below the target of 87.5. The result is subject to management evaluation to improve service quality going forward.

### Financial Performance

The Company recorded revenue of Rp2,073.32 billion, an increase of 22.2% from Rp1,343.56 billion in 2017 mainly driven by growth in the number of new end-to-end customers. Realization of revenue reached 117.4% of the target of Rp1,765.67 billion. The Company's revenues consist of O&M income and other income. O&M income includes Technical Services and Non-Technical Services. Technical Services is the largest contributor to the Company's revenues.

Cost of Revenues (BPP) reached Rp1,822.00 billion, up 22.5% compared to Rp1,487.31 billion in 2017 and reached 115.0% of the target of Rp1,583.83 billion. The increase in BPP was mainly due to the addition of new projects not included in RKAP which resulted in an increase in subcontractor costs, operational fines and direct labor.



## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp138,68 miliar, meningkat 13,2% dari Rp122,47 miliar pada tahun 2017 dan tercapai 98,5% dari target sebesar Rp143,72 miliar. Pencapaian laba bersih di bawah target terutama disebabkan kebijakan Perusahaan untuk menyesuaikan tingkat marjin laba demi mendukung upaya efisiensi biaya operasi unit-unit PLN yang menjadi pelanggan. Hal ini menunjukkan dukungan maksimal HP sebagai anak usaha terhadap strategi efisiensi di semua lini yang dicanangkan PLN sebagai perusahaan induk.

### Pembagian Dividen

Berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 34 tanggal 16 Mei 2018 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp58,57 miliar dan telah dibagikan pada tanggal 1 November 2018 dan 22 November 2018 kepada Pemegang Saham Perusahaan yaitu PT PLN (Persero) dan YPK PLN.

### Tingkat Kesehatan Perusahaan

Di awal tahun, Direksi bersama Dewan Komisaris telah menandatangani Kontrak Manajemen sebagai besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP 2018. KPI Manajemen menjadi indikator tingkat kesehatan perusahaan penyusunannya mengacu Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan dan Surat Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) No. 0015/SKK.00.01/SPKK/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Penyampaian Kontrak Manajemen Tahun 2018.

Hasil penilaian KPI Manajemen tahun 2018 mencapai skor 92,16 di mana berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk pada kategori "AA" atau kondisi "SEHAT".

### Kinerja Anak Perusahaan

Jumlah kontrak yang dikelola HPI pada tahun 2018 adalah 194 kontrak yang terdiri dari 66 kontrak pekerjaan teknik, 8 kontrak pekerjaan manajemen *billing* dan 120 kontrak pekerjaan non teknik. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 terutama disebabkan adanya penggabungan (*repacking*) pekerjaan dalam satu kontrak dan peralihan pekerjaan di wilayah Indonesia Timur kepada PT PLN Tarakan sehubungan dengan Perdir 0030.P.

Net income for the year amounted to Rp138.68 billion, an increase of 13.2% from Rp122.47 billion in 2017 and reached 98.5% of the target of Rp143.72 billion. The net income was below the target due to the policy to adjust profit margin rate in order to support operating cost efficiency efforts of PLN units as the Company's customers. This showed HP's maximum support as a subsidiary for efficiency strategy in all lines launched by PLN as the holding company.

### Dividends Distribution

Based on Annual Shareholders Meeting resolution as stated in deed No. 34 dated May 16, 2018 of Muhammad Hanafi, SH, a notary in Jakarta, the Shareholders approved dividends distribution from retained earnings as of December 31, 2017 amounting to Rp58.57 billion and were distributed on November 1 and 22, 2018 to the Company's Shareholders namely PT PLN (Persero) and YPK PLN.

### Corporate Soundness Level

At the beginning of the year, Board of Directors and Board of Commissioners signed Management Contract as a qualitative and quantitative measure of 2018 RKAP. Management's KPI becomes an indicator of corporate soundness level according to Circular of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2018 concerning Implementation Guidelines for Calculation of Organizational Performance Score for Units and Subsidiaries and Letter of Head of Corporate Performance Control Unit of PT PLN (Persero) No. 0015/SKK.00.01/SPKK/2018 dated January 26, 2018 concerning Submission of 2018 Management Contracts.

The results of Management's KPI assessment in 2018 reached a score of 92.16. According to Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Assessment of Corporate Soundness Level, such score falls under "AA" or "SOUND" category.

### Subsidiary Performance

The number of contracts managed by HPI in 2018 was 194 contracts consisting of 66 technical work contracts, 8 billing management work contracts and 120 non-technical work contracts. This number decreased compared to 2017 mainly due to works repacking in one contract and works shift in the Eastern Indonesia region to PT PLN Tarakan in connection with Perdir 0030.P.

## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

Realisasi pendapatan usaha mencapai Rp944,1 miliar, meningkat 8,0% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp874,3 miliar dan tercapai 119,80% dari RKAP 2018. Kontributor pendapatan usaha berasal dari pekerjaan jasa teknik, jasa manajemen *billing*, dan jasa non teknik.

Realisasi BPP mencapai Rp864,3 miliar, tercapai 124,5% dari RKAP 2018 karena adanya peningkatan pada komposisi biaya tenaga kerja langsung dan kendaraan operasional. Realisasi laba usaha pada tahun 2018 sebesar Rp56,4 miliar, tercapai 81,6% dari RKAP 2018 sebesar Rp69,1 miliar.

### Prospek dan Rencana ke Depan

Prospek usaha Perusahaan sangat berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur kelistrikan PLN dalam rangka meningkatkan kualitas dan keandalan sistem serta memenuhi kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028, data historis pertumbuhan kebutuhan daya listrik adalah 5,9% per tahun atau diproyeksikan akan mencapai 433 terrawatt *hours* (TWh) pada tahun 2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, PLN menyusun rencana penambahan pembangkit, transmisi dan gardu induk (GI) serta distribusi yang dituangkan di dalam RUPTL 2019-2028 di mana dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, pengembangan infrastruktur kelistrikan akan mencakup penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 56.395 megawatt (MW).

Terkait sistem jaringan transmisi dan gardu induk yang menjadi *captive market* bagi kompetensi inti Perusahaan, pengembangan sistem penyaluran pada periode 2019-2028 akan mencakup pengembangan tegangan transmisi 500 kilovolt (kV) dan 150 kV di sistem Jawa-Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur dan Sumatera yang meliputi penambahan kapasitas gardu induk sebesar 124.341 megavolt amper (MVA), jaringan distribusi sepanjang 472.795 kilometer sirkuit (kms), dan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA. Atas dasar proyeksi tersebut, PLN telah memberikan target kepada HP untuk menguasai pangsa pasar sebesar 50% pada tahun 2021 untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Pada tahun 2018, Perusahaan menginisiasi proses transformasi yang berorientasi jangka panjang untuk mengoptimalkan peran HP dalam mendukung keberlanjutan bisnis PLN.

Realized operating revenues reached Rp944.1 billion, an increase of 8.0% compared to Rp874.3 billion in 2017 and reached 119.80% of 2018 RKAP. Contributors to operating revenues are technical services, billing management services and non-technical services.

BPP realization reached Rp864.3 billion, reaching 124.5% of 2018 RKAP due to an increase in direct labor and operational vehicles. Realized operating income in 2018 amounted to Rp56.4 billion, reaching 81.6% of 2018 RKAP of Rp69.1 billion.

### Prospects and Future Plans

The Company's business prospects are closely related to PLN's power infrastructure development plan in order to improve quality and reliability of the system and to meet customer needs.

Based on 2019-2028 Power Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero), historical data on power demand growth is 5.9% per year or is projected to reach 433 terrawatt hours (TWh) in 2028. To meet the power needs, PLN prepared a plan to add plants, transmissions, substations (GI) and distributions as outlined in 2019-2028 RUPTL which states that in the next 10 years, power infrastructure development will include an increase in power plant capacity of 56,395 megawatts (MW).

Regarding transmission network system and substations that become the captive market for the Company's core competencies, distribution system development in 2019-2028 period will include development of 500 kilovolt (kV) and 150 kV transmission voltages in Java-Bali system and 500 kV, 275 kV, 150 kV and 70 kV in Eastern Indonesia and Sumatra systems which include additional substation capacity of 124,341 megavolt amperes (MVA), distribution networks along 472,795 kilometer circuits (kms) and distribution substations of 33,730 MVA. On the basis of these projections, PLN set a target for HP to dominate 50% market share by 2021 in Sumatra, Java and Bali regions.

In 2018, the Company initiated a long-term oriented transformation process to optimize HP's role in supporting PLN's business sustainability. The main targets of this

## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

Sasaran utama dari transformasi ini adalah kualitas, reliabilitas, efektivitas biaya dan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan analisis atas tantangan dan peluang yang dihadapi, Perusahaan menetapkan *Roadmap* Transformasi HP dalam 5 tahun ke depan untuk menjadi asset manager melalui penyesuaian portofolio usaha. Saat ini Perusahaan telah mengklasifikasi portofolio usaha menjadi 10 paket, di antaranya adalah paket layanan O&M distribusi *end-to-end*, dan 2 paket O&M distribusi *asset management contract* (AMC) yaitu AMC sebagai *asset operator* dan AMC sebagai *asset manager*.

Sesuai *Roadmap* Transformasi HP, tahun 2018 adalah momentum untuk membangun fondasi untuk menjadi *asset operator* yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan akan terus diperkuat hingga tahun 2022. Mulai semester kedua 2018, Perusahaan telah memulai proyek percontohan di beberapa area terpilih untuk menemukan model pengelolaan aset terbaik yang akan diduplikasi pada area lainnya.

Sebagai *asset operator*, Perusahaan akan menjalankan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebagai *service provider*. *Asset operator* harus menjadi mitra pelanggan yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara *end-to-end* demi mengamankan kesinambungan operasi pelanggan. Oleh karena itu, strategi Perusahaan untuk bertransformasi menjadi *leading asset operator* adalah dengan melakukan *business process re-engineering*, di mana HP akan lebih proaktif dalam memelihara aset tanpa menunggu terjadinya gangguan atau keluhan dari pelanggan. Pemeliharaan yang dilakukan lebih menekankan kepada *condition based* dan *predictive maintenance*.

Dalam upaya menjaga efektivitas dan efisiensi biaya, Perusahaan akan mengembangkan sistem teknologi informasi yang lebih kuat untuk mendukung kegiatan operasional, serta melakukan digitalisasi informasi. Perusahaan akan mengoptimalkan fasilitas *mobility* menggunakan aplikasi internal yang disebut "HOME" dan melakukan digitalisasi informasi sehingga kualitas pengelolaan aset akan lebih baik.

Proses transformasi juga membutuhkan dukungan peningkatan dan standarisasi kompetensi SDM. Oleh karena itu Perusahaan akan mengelola Akademi Pelayanan Teknik serta mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai *revenue assurance* (Revass), pengelolaan gardu distribusi, pengelolaan asesmen kabel yang lebih baik, hingga peningkatan kinerja K3.

transformation are quality, reliability, cost effectiveness and customer satisfaction.

Based on an analysis of threats and opportunities, the Company prepared HP Transformation Roadmap for the next 5 years to become an asset manager by harmonizing business portfolios. Currently, the Company classifies its business portfolio into 10 packages, including O&M service package for end-to-end distribution and 2 O&M packages for asset management contract (AMC), consisting of AMC as an asset operator and AMC as an asset manager.

In accordance with HP Transformation Roadmap, 2018 was a momentum to build a foundation to become an asset operator that will be implemented in 2019 and will continue to be strengthened until 2022. Starting in the second semester of 2018, the Company has begun pilot projects in selected areas to find the best asset management model which will be duplicated in other areas.

As an asset operator, the Company will carry out greater responsibilities than as a service provider. Asset operator must become customer partner who have initiatives to carry out end-to-end maintenance and repairs to secure continuity of customer operations. Therefore, the Company's strategy to transform into a leading asset operator is to conduct business process re-engineering, where HP will be more proactive in maintaining assets without waiting for interference or complaints from customers. The maintenance will emphasize condition based and predictive maintenance.

In an effort to maintain cost effectiveness and efficiency, the Company will develop a stronger information technology system to support operations, as well as information digitalization. The company will optimize mobility facilities using internal application called "HOME" and information digitalization in order to improve asset management quality.

Transformation process also requires support of improvement and standardization of HR competencies. Therefore, the Company will manage Technical Service Academy and conduct trainings on revenue assurance (Revass), distribution substations management, better management of cable assessments and K3 performance improvement.

## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

### Perkembangan Tata Kelola

HP telah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) untuk membangun citra korporasi yang berintegritas dan terpercaya. Integritas sudah menjadi bagian dari tata nilai Perusahaan "Believe" di mana setiap insan Perusahaan wajib mengedepankan integritas perilaku serta integritas penyampaian data dan proses bisnis dalam melaksanakan tugasnya.

Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pedoman bagi seluruh insan HP dalam menjalankan setiap aktivitasnya sesuai etika bisnis dan etika kerja yang berlaku. Secara berkala, Perusahaan mengevaluasi dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman terkait GCG dan proses bisnis, termasuk prosedur operasi standar yang mengacu pada kaidah-kaidah K3.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kepatuhan penerapan GCG, setiap tahun Perusahaan melakukan penilaian GCG yang dilakukan oleh pihak independen. Pada tahun 2018, penilaian GCG dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor 80,359%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 76,009%.

Hasil penilaian GCG menjadi acuan bagi Perusahaan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG secara terukur. Seluruh rekomendasi tim penilai GCG tahun 2018 sedang dalam proses tindak lanjut perbaikan. Salah satu yang menjadi fokus pembenahan adalah aspek transparansi informasi dan pelaporan. Saat ini, Perusahaan menyediakan akses informasi untuk pemangku kepentingan dan masyarakat melalui situs *web*: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id) yang berisi berbagai informasi seperti: profil perusahaan, produk dan layanan, dan komunikasi berkelanjutan (berita, dokumentasi, kegiatan CSR, procurement, Laporan Tahunan, dan majalah 4 bulanan Media Haleyora) serta laman "Kontak" untuk permintaan informasi, penyampaian pendapat, kritik, keluhan maupun pertanyaan. Selain itu, Perusahaan juga memiliki akun di platform media sosial facebook, twitter dan instagram. Perusahaan terus mengevaluasi dan menyempurnakan sarana dan kualitas informasi dari waktu ke waktu.

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) untuk mengelola setiap laporan mengindikasikan tindakan kecurangan, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran Pedoman Perilaku. Berdasarkan rekomendasi

### Corporate Governance Development

HP is committed to implementing good corporate governance (GCG) to build a corporate image with integrity and trust. Integrity has become a part of the "Believe" corporate values in which every personnel of the Company is required to prioritize the integrity of conduct and the integrity of the delivery of data and business processes in carrying out their duties.

The Company has Code of Conduct as a guide for all HP personnel in carrying out their activities in accordance with business and work ethics. The Company periodically evaluates and updates policies and guidelines related to GCG and business processes, including standard operating procedures that refer to K3 principles.

To obtain an overview of GCG compliance level, the Company conducts annual GCG assessment by an independent party. In 2018, GCG assessment was carried out by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) with a score of 80.359%, an increase compared to the previous year of 76.009%.

The results of GCG assessment become a reference for the Company to measurably improve GCG quality. All improvement recommendations from GCG assessment team in 2018 are currently being followed up. One focus of improvement is the aspect of information and reporting transparency. Presently, the Company provides access to information for stakeholders and the public on its website: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id) which contains various information such as: company profile, products and services, as well as ongoing communication (news, documentation, CSR activities, procurement, Annual Reports and Media Haleyora magazine which is issued every 4 months) and "Contact" page to request for information and to post opinions, criticisms, complaints and questions. In addition, the Company also has facebook, twitter and instagram accounts. The Company continues to evaluate and improve the means and quality of information from time to time.

In 2014, the Company established whistleblowing system (WBS) to manage each report indicating fraud, criminal act, violation of the Company's policies and Code of Conduct. Based on recommendations of GCG assessment team, the Company will strengthen the role and authority of WBS management

## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

tim penilai GCG, Perusahaan akan memperkuat peran dan wewenang tim pengelola WBS serta menyempurnakan mekanisme penanganan pengaduan. Penguatan WBS diyakini dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan meminimalkan potensi pelanggaran.

### Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di HP difokuskan pada pembenahan dan penguatan kompetensi SDM untuk mendukung implementasi strategi korporasi menjadi *asset operator* di bidang transmisi, distribusi, dan retail ketenagalistrikan. Sebagai organisasi yang didukung oleh lebih dari 25 ribu tenaga kerja (*workforce*), tantangan utama dalam mengelola SDM adalah kesenjangan (*gap*) antara kompetensi tenaga kerja yang dimiliki dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan tertentu. Untuk meminimalkan *gap* tersebut, Perusahaan melaksanakan program-program peningkatan kompetensi secara intensif berupa pelatihan, *workshop* atau *upscaling* kapabilitas pegawai sesuai bidang kerjanya masing-masing.

Program pelatihan dan pengembangan diberikan secara berjenjang, mulai dari tingkat tenaga kerja, supervisor, hingga manajer. Program pelatihan yang diberikan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 1) Pelatihan *hard skill* seperti pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U), Pengelolaan Gardu Induk, Gardu Distribusi dan Asesmen Kabel, 2) Pelatihan *soft skill/leadership* seperti pelatihan *Supervisory Education*, 3) Pelatihan di luar masalah ketenagalistrikan seperti *Awareness ISO 9001:2015*, dan 4) Sertifikasi Kompetensi yang merupakan prasyarat *mandatory* bagi tenaga kerja teknik Perusahaan.

Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja, Perusahaan memfasilitasi proses untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Perusahaan memberikan pembekalan berupa pelatihan bagi tenaga kerja yang akan menempuh uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Himpunan Ahli Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (Gema PDKB). Perusahaan menargetkan seluruh tenaga kerja teknik telah 100% tersertifikasi pada akhir tahun 2018. Dari 8.125 tenaga kerja teknik yang tersebar di seluruh region, sampai akhir tahun 2018 sertifikasi telah terealisasi untuk 6.704 orang atau tercapai 82,5% dari target.

Program kerja lainnya di bidang SDM yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 di antaranya adalah penyalarsan dan penyetaraan jenjang jabatan, nomenklatur jabatan, dan

team and improve the complaint handling mechanism. WBS strengthening is believed to enhance effectiveness of internal control system and to minimize potential for violation.

### Human Resources Development

HP's human resources (HR) management strategy is focused on enhancing and strengthening HR competencies to support implementation of corporate strategies to become asset operator in power transmission, distribution and retail. As an organization supported by more than 25 thousand workforce, the main challenge in HR management is the competency gap between the existing competencies and the required competencies to handle certain works. To minimize this gap, the Company implements intensive competency improvement programs in the form of trainings, workshops or upscaling employee capabilities according to their respective fields of work.

Training and development programs are provided in stages, for workforce, supervisor and manager levels. The training programs provided are divided into 4 groups, namely: 1) Hard skill training, such as General Occupational Health and Safety Expert (AK3U), Substation Management, Distribution Substation and Cable Assessment; 2) Soft skill/leadership training, such as Supervisory Education; 3) Non-power training, such as ISO 9001:2015 Awareness; and 4) Competency Certification which is a mandatory prerequisite for the Company's technical workforce.

In line with the efforts to improve technical competency of the workforce, the Company facilitates competency certification process. The Company provides training for workers who will take competency tests conducted by external institutions, such as National Professional Certification Board (BNSP) and Association of Experts in High Voltage Electrical Work (Gema of PDKB). The Company targeted all technical workforce to be 100% certified by end of 2018. Of the total 8,125 technical workforce spread across regions, at end of 2018, 6,704 technical workforce were already certified or reached 82.5% of the target.

Other HR work programs that were implemented in 2018 included alignment and equalization of rank, position nomenclature and staffing regulations of the Company

## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

peraturan kepegawaian Perusahaan dengan perusahaan induk (PLN); penyusunan basis data pegawai yang terintegrasi dalam Sistem Informasi SDM (HRIS) grup HP; pengembangan sistem pengelolaan kinerja hingga ke pengukuran kinerja (KPI) individu; pengembangan *training center* dengan modul-modul yang sesuai kebutuhan untuk mengisi kesenjangan kompetensi; serta sosialisasi dan internalisasi budaya korporasi "Believe".

### Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

HP menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses bisnis Perusahaan. Melalui program CSR di bidang pendidikan yang bertajuk "Haleyora Mengajar", Perusahaan dapat mengaplikasikan kompetensi inti di bidang ketenagalistrikan untuk ikut meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme anak-anak muda. Program Haleyora Mengajar juga mendukung program Pemerintah yang mendorong kesiapan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang "link and match" dengan kebutuhan sektor industri di era revolusi industri 4.0 yang berbasis digital.

Program Haleyora Mengajar ditujukan kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan teknik tenaga listrik di sekitar lingkungan 6 region/wilayah operasi Perusahaan. Program ini berawal dari kegiatan CSR "Kelas Haleyora" yang diadakan di Region 1, yaitu di SMKN 6 dan SMKN 4 Bandung pada 2016. Setelah dievaluasi dan dinilai dapat menjadi program yang berkelanjutan, program diperluas ke 6 region, yaitu di Cibubur untuk region Jakarta, Bandung untuk region Jawa Barat, Surabaya untuk region Jawa Timur, dan Semarang untuk region Jawa Tengah. Program dilaksanakan serentak mulai tanggal 22 Juni 2018 di 9 SMK, di antaranya di SMKN 4 Bandung, SMKN 5 Padang, dan SMKN 2 Pekanbaru. Kuota untuk setiap region adalah 30 orang di satu kelas, di mana peserta boleh berasal dari sekolah yang sama ataupun dari SMK lainnya.

Haleyora Mengajar diadakan selama seminggu penuh. Materi yang diajarkan terutama adalah bidang transmisi dan distribusi listrik sesuai bidang kerja Perusahaan dengan tenaga pengajar adalah Manajer Region dan Manajer Area setempat. Selama program berlangsung, siswa diberikan berbagai pengetahuan mengenai distribusi listrik termasuk praktik menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagai perlengkapan wajib saat melakukan pekerjaan sesuai SOP. Selanjutnya,

and the parent company (PLN); preparation of integrated employee database in HR Information System (HRIS) of HP Group; development of performance management system up to individual performance measurement (KPI); development of training centers with necessary modules to fill competency gap; and socialization and internalization of the "Believe" corporate culture.

### Corporate Social Responsibilities

HP considers corporate social responsibility (CSR) as an integrated part of the Company's business processes. Through CSR program in education entitled "Haleyora Teaching," the Company applied its core competencies in the power sector to help improve capabilities and professionalism of young people. Haleyora Teaching Program also supports the Government's program that encourages readiness of vocational education and training institutions to create a "link and match" workforce with the needs of the industrial sector in the digital-based industrial revolution 4.0 era.

Haleyora Teaching Program is aimed at Vocational High School (SMK) students who are majoring in electrical power engineering in the environment around the Company's 6 operational regions/areas. The program began with CSR activity "Haleyora Class" held in Region 1, at SMKN 6 and SMKN 4 Bandung in 2016. After being evaluated and considered to be a sustainable program, the program was expanded to 6 regions, in Cibubur for Jakarta region, Bandung for West Java region, Surabaya for East Java region and Semarang for Central Java region. The program was held simultaneously on June 22, 2018 in 9 SMK, including SMKN 4 Bandung, SMKN 5 Padang and SMKN 2 Pekanbaru. Quota for each region was 30 students per class coming from the respective schools or from other vocational schools.

Haleyora Teaching was held for a full week. The provided material was mainly in power transmission and distribution aligned with the Company's field of work with Region Managers and Local Area Managers as the teachers. During the program, students were given knowledge in power distribution, including the use of personal protective equipment (APD) as a mandatory equipment when doing work according to SOP. Subsequently, one month after the program, the students



## LAPORAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

satu bulan setelah program, siswa akan mendapat sertifikat dan mengikuti psikotes sesuai standar rekrutmen HP. Hasil psikotes menjadi bank data Perusahaan. Setelah lulus sekolah, para siswa tersebut sudah memenuhi spesifikasi siap kerja dan dapat menjadi kandidat tenaga kerja Perusahaan.

### Perubahan Komposisi Direksi

Tidak ada perubahan komposisi Direksi Perusahaan pada tahun 2018.

### Apresiasi

Mewakili Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan dukungan, arahan dan nasihat penting sepanjang tahun 2018, serta kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh insan Perusahaan yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan integritas menghadapi berbagai tantangan yang ada. Semoga PT Haleyora Power dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi Pemegang Saham, pegawai, dan masyarakat luas.

received certificates and took psychological test according to HP's recruitment standard. The psychological test results became the Company's data bank. After graduating from school, the students who meet the job-ready specifications will become candidates for the Company's workforce.

### Changes in Composition of Board of Directors

There were no changes in composition of the Company's Board of Directors in 2018.

### Appreciations

On behalf of Board of Directors, I would like to thank Board of Commissioners for providing insightful supports, guidances and advices during 2018, as well as to Shareholders for their trust. My highest appreciation goes to all personnel of the Company who work hard with high dedication and integrity in facing various challenges. Hopefully, PT Haleyora Power will continue to provide optimal benefits to Shareholders, employees and the community.



**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director

## DIREKSI

The Board of Directors



Dari kiri ke kanan  
From left to right

**Sutrisno Samad**  
Direktur Keuangan & SDM  
Director of Business & Human Resources

**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director

**Sinung Triwulandari**  
Direktur Operasi  
Director of Operations



## SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018

### Statement Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners Relating to the Responsibility on the 2018 Annual Report

Laporan Tahunan 2018 PT Haleyora Power menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Direksi dan Dewan Komisaris PT Haleyora Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2018 PT Haleyora Power.

The 2018 Annual Report of PT Haleyora Power presents information regarding performance of the company, corporate governance practices, corporate social responsibility implementation, Financial Statements for the year ended December 31, 2018, and other relevant and significant information for the stakeholders.

We, the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Haleyora Power the undersigned, are fully responsible for the accuracy of the contents of the 2018 Annual Report of PT Haleyora Power.

Jakarta, 31 Agustus 2019  
Jakarta, August 31, 2019

#### DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners



**Fahmi El Amruzi D.**  
Komisaris Utama  
President Commissioner



**Karyawan Aji**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner



**Purnama Tioria Sianturi**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

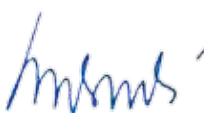
#### DIREKSI Board of Directors



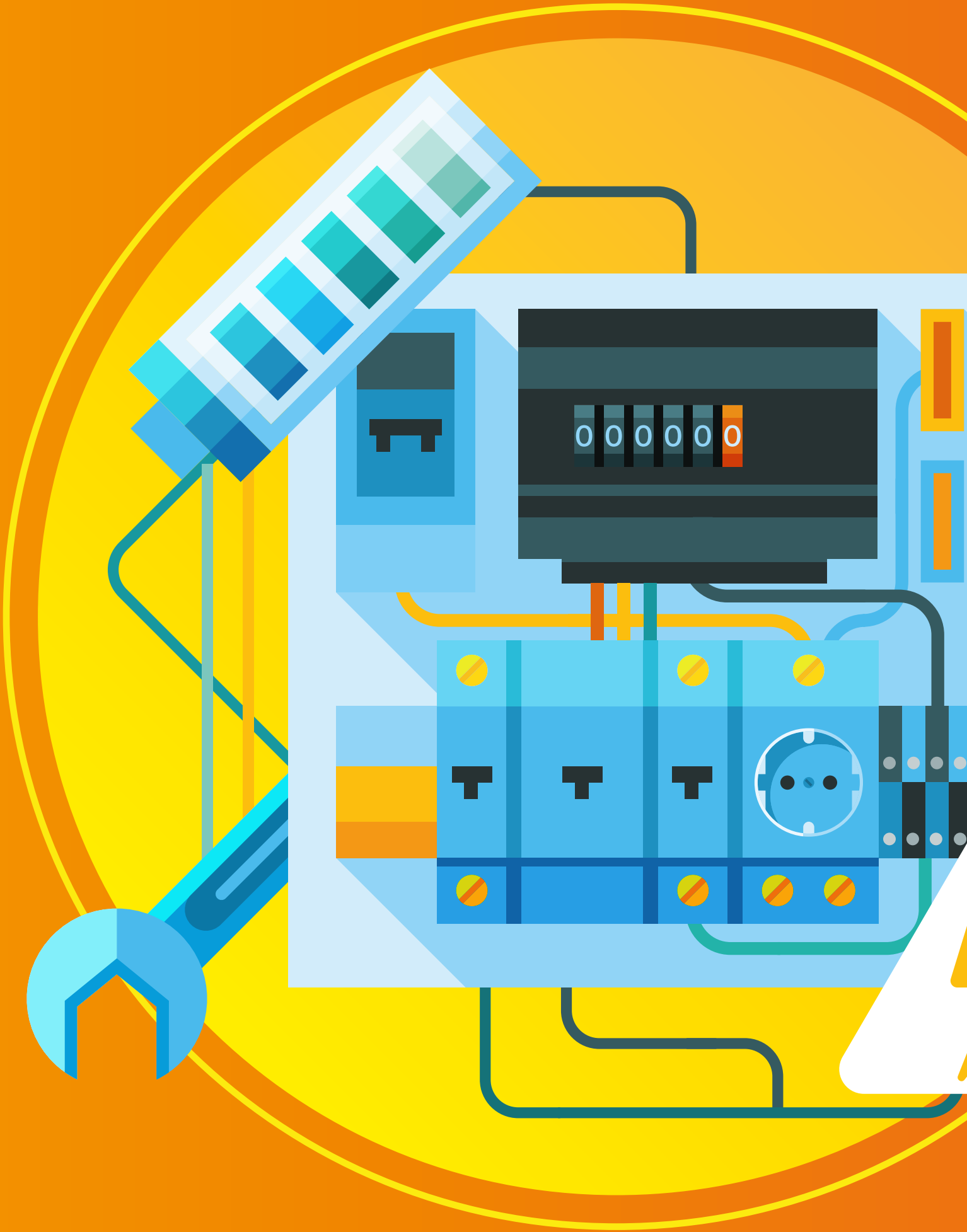
**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director

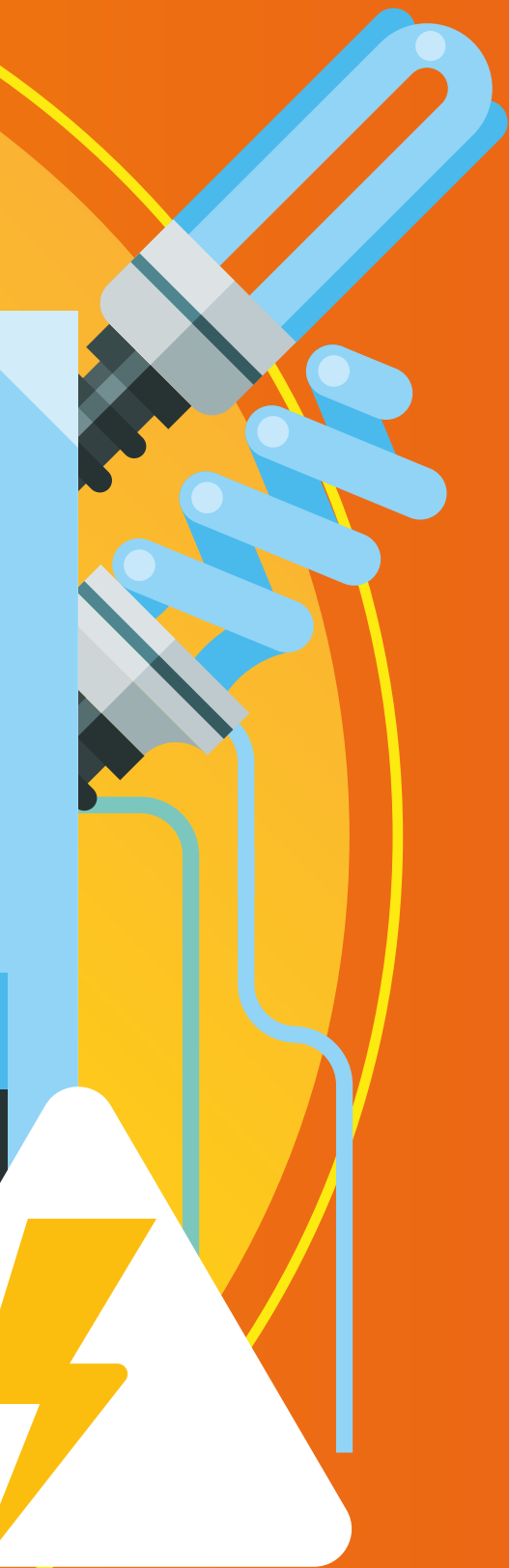


**Sutrisno Samad**  
Direktur Keuangan & SDM  
Director of Finance & HR



**Sinung Triwulandari**  
Direktur Operasi  
Director of Operations





# PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

# IDENTITAS PERUSAHAAN

## Company Identity

<b>Nama Name</b>	PT Haleyora Power	PT Haleyora Power
<b>Nama Panggilan Nickname</b>	HP	HP
<b>Bidang Usaha Business Sectors</b>	Menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan yang meliputi: 1. Survei Teknis Perluasan Jaringan Distribusi, Pelayanan Pelanggan, Pembangunan dan Updating Data Jaringan Distribusi. 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Transmisi dan Distribusi, yang mencakup: a. Gardu Induk b. Gardu Distribusi c. Jaringan Tegangan Tinggi (JTT) d. Jaringan Tegangan Menengah (JTM) e. Jaringan Tegangan Rendah (JTR) f. Sambungan Rumah (SR) g. Alat Pengukur dan Pembatas (APP) h. Penyediaan Material Pemeliharaan	Providing operation and maintenance services including: 1. Technical survey of distribution networks expansion, customer service, construction and updating of distribution network data. 2. Operation and maintenance of transmission and distribution installations, including: a. Substation b. Distribution Substation c. High-Voltage Network (JTT) d. Medium-Voltage Network (JTM) e. Low-Voltage Network (JTR) f. Household Connection (SR) g. Metering and Limiting Device (APP) h. Maintenance Materials Provision
<b>Status Perusahaan Company Status</b>	Anak Perusahaan PT PLN (Persero)	Subsidiary of PT PLN (Persero)
<b>Kepemilikan Saham Shareholders</b>	1. PT PLN (Persero) sebanyak 99.999 lembar saham atau sebanyak 99,99% saham dan 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar saham atau sebesar 0,01%	1. PT PLN (Persero) with 99,999 shares or 99.99% shares, and 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan of PT PLN (Persero) with 1 shares or 0.01%
<b>Tanggal Pendirian Date of Establishment</b>	18 Oktober 2011	October 18, 2011
<b>Dasar Hukum Pendirian Establishment Legal Basis</b>	Akta Pendirian No. 36, tertanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar HP telah mengalami perubahan beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 104 tanggal 27 November 2017 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan kepengurusan Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0196200 tanggal 30 November 2017.	Deed of establishment No. 36, dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta. The Articles of association of HP have been amended several times, recently by notarial deed No. 104 dated November 27, 2017 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta related to changes of the company's management composition. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH. 01.03-0196200 dated November 30, 2017.
<b>Modal Dasar Authorized Capital</b>	Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 100.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 (satu rupiah)	Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) which is divided into 100,000 shares, per shares with nominal of Rp1 (one rupiah)

<b>Jaringan Kantor</b> Office Network	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Region</li> <li>• 38 Area</li> <li>• 4 APD (Area Pengatur Distribusi)</li> <li>• 231 Rayon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Regions</li> <li>• 38 Areas</li> <li>• 4 APDs</li> <li>• 231 Rayons</li> </ul>
<b>Kantor Pusat</b> Head Office	Kindo Square, Blok A15–A16 Jalan Duren Tiga Raya No. 101, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan Tel. : (021) 7919 2517 Fax. : (021) 7919 2516	Kindo Square, Block A15–A16 Jalan Duren Tiga Raya No. 101, Duren Tiga, Pancoran, South Jakarta Tel. : (021) 7919 2517 Fax. : (021) 7919 2516
<b>Website</b> Website	<a href="http://www.haleyorapower.co.id">www.haleyorapower.co.id</a>	<a href="http://www.haleyorapower.co.id">www.haleyorapower.co.id</a>
<b>Email</b> Email	<a href="mailto:kontak@haleyorapower.co.id">kontak@haleyorapower.co.id</a>	<a href="mailto:kontak@haleyorapower.co.id">kontak@haleyorapower.co.id</a>
<b>Contact Center Instagram</b> Contact Center Instagram	@haleyorapower	@haleyorapower



# SEKILAS PERUSAHAAN

Company in Brief



PT HALEYORA POWER (“HP”) adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 2011. Pada awalnya, HP dibentuk untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik 260 MW (PLTU 3x30 MW dan PLTD 10x17 MW) untuk memasok listrik bagi kegiatan penambangan dan smelter PT Aneka Tambang (Antam) yang akan dibuka di Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara. Pada perkembangannya, rencana kerja sama tersebut tidak terealisasi karena berbagai sebab sehingga HP berstatus non-aktif.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi dinamika perubahan bisnis yang dihadapi PLN, HP diarahkan untuk mengelola bisnis penjualan tenaga listrik (ritel) yang diperkirakan akan semakin kompetitif di masa mendatang melalui pengembangan penyediaan tenaga listrik dengan layanan dan tarif khusus, sehingga dapat menekan subsidi.

PT HALEYORA POWER (“HP”) is a subsidiary of PT PLN (Persero) which was established on October 18, 2011. Initially, HP was incorporated to build and operate 260 MW power plant (PLTU 3x30 MW and PLTD 10x17 MW) to supply power to mining and smelter activities of PT Aneka Tambang (Antam) to be opened in Buli, East Halmahera, North Maluku. In its development, the cooperation plan was not realized due to various reasons so that HP was then inactive.

Subsequently, to anticipate the dynamic business faced by PLN, HP was directed to manage power sales (retail) which was expected to be increasingly competitive in the future through development of power supply with special services and tariffs, so as to reduce subsidies.

Saat ini, HP memiliki wilayah operasional yang terdiri dari 6 region dan 3 area khusus mencakup 60 area/APP/UPT tersebar di Sumatera dan Jawa.

Currently, HP’s operational areas consisting of 6 regions and 3 special areas covering 60 areas/APP/UPT spread across Sumatra and Java.

Sebagai tahap awal, HP ditunjuk untuk mewakili PLN menjalin kerja sama dengan PT Pelindo II dengan mendirikan perusahaan patungan PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) di mana HP menjadi pemegang 45%. Perjanjian pendirian perusahaan No. 001/041/HP/2012 ditandatangani pada 4 Oktober 2012. Bidang usaha EPI adalah menyalurkan dan menjual listrik kepada *tenant* di kawasan Pelindo II dengan skema penjualan listrik secara *bulk* dan tarif premium B2B (*business to business*).

As an initial step, HP was appointed to represent PLN in cooperation with PT Pelindo II by establishing a joint venture company PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) in which HP holds 45%. The company establishment agreement No. 001/041/HP/2012 was signed on October 4, 2012. EPI’s business line is to distribute and sell power to tenants in Pelindo II area with a bulk power sales scheme and B2B (business to business) premium rates.



## SEKILAS PERUSAHAAN

Company in Brief

Pada tanggal 14 September 2012, HP menerima penugasan untuk menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance/O&M*) transmisi dan distribusi tenaga listrik, bekerja sama dengan unit-unit PLN Wilayah berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 459.K/DIR/2012 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2013, HP mengakuisisi PT Mitra Insan Utama (MIU), perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Kesejahteraan (YPK) PLN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja. MIU kemudian berubah nama menjadi PT Haleyora Powerindo (HPI) berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 17 tanggal 23 Januari 2013. Bidang usaha HPI meliputi layanan Teknik untuk operasi dan pemeliharaan pembangkit dan distribusi, layanan non-teknik (*buliding management, billing management*), *industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), enterprise asset management (EAM)*.

Pada tanggal 18 April 2017, Direksi PLN menerbitkan Peraturan Direksi No. 0030.P/DIR/2017 tentang Perubahan Peraturan Direksi No. 734.K/DIR/2013 tentang Kebijakan Zonasi/Regionalisasi Wilayah Operasi PT Haleyora Power dan PLN Tarakan di mana HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatera, Jawa dan Bali, sedangkan PT PLN Tarakan mengelola wilayah kerja Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Proses transisi telah dimulai sejak pertengahan tahun 2017 di mana HP telah menata ulang rencana kerja dan anggaran serta rencana jangka panjang perusahaan secara menyeluruh dengan memperhatikan zonasi wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Saat ini, HP memiliki wilayah operasional yang terdiri dari 6 region dan 3 area khusus mencakup 60 area/APP/UPT tersebar di Sumatera dan Jawa.

On September 14, 2012, HP was assigned to provide operation and maintenance (O&M) services for transmission and distribution of power, in cooperation with Regional PLN units based on the Decision of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 459.K/DIR/2012 concerning Security of Operation and Maintenance of Power Transmission and Distribution Services.

In 2013, HP acquired PT Mitra Insan Utama (MIU), a company whose majority shares are owned by Yayasan Pendidikan Kesejahteraan (YPK) PLN engaged in workforce supply. MIU then changed its name to PT Haleyora Powerindo (HPI) based on Meeting Deed No. 17 dated January 23, 2013. HPI's business areas include technical services for plant operations and maintenance and distribution, non-technical services (*building management, billing management*), *industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), enterprise asset management (EAM)*.

On April 18, 2017, PLN's Board of Directors issued Regulation of Board of Directors No. 0030.P/DIR/2017 concerning Amendment to Board of Directors Regulation No. 734.K/DIR/2013 concerning Zoning/Regionalization Policy of Operational Areas of PT Haleyora Power and PLN Tarakan with HP appointed to manage operational areas covering Sumatera, Java and Bali, while PT PLN Tarakan manages operational areas consisting of Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua.

The transition process has begun since mid-2017 with HP reorganizing its work plan and budget as well as the Company's long-term plan comprehensively with due regard to the predetermined zoning of the operational areas.

Currently, HP's operational areas consisting of 6 regions and 3 special areas covering 60 areas/APP/UPT spread across Sumatera and Java.



**SEKILAS PERUSAHAAN**  
Company in Brief

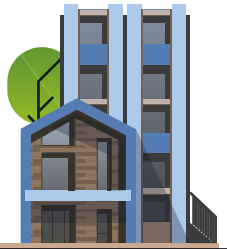


# JEJAK LANGKAH

## Milestones



### 2011



- Didirikan pada tanggal 18 Oktober 2011.
- Established on October 18, 2011

### 2012



- Penugasan bidang O&M Transmisi dan Distribusi berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) (Perdir) No. 459.K/DIR/2012.
- Mendirikan perusahaan patungan PT EPI dengan PT Pelindo II
- Assignment in the field of O&M Transmission and Distribution based on the Directors of PT PLN (Persero) Regulation No. 459.K/DIR/2012.
- Established a joint venture company named PT EPI with PT Pelindo II

### 2013



- Mengakuisisi PT MIU
- Mengerjakan proyek di Salatiga (*Pilot Project 2 Layer*), SBU, Majalaya, dan Padang
- Menerima Perdir No. 734.DIR/2013 tentang Penugasan Layanan O&M Transmisi dan Distribusi
- Acquired PT MIU
- Carried out projects in Salatiga (*Pilot Project 2 Layers*), SBU, Majalaya, and Padang
- Accepted the Directors of PT PLN (Persero) Regulation No. 734.DIR/2013 on Assignment of O&M Transmission and Distribution Services

Pada tahun 2013, HP mengakuisisi PT Mitra Insan Utama (MIU) dan merubah namanya menjadi PT Haleyora Powerindo (HPI). Bidang usaha HPI meliputi layanan Teknik untuk operasi dan pemeliharaan pembangkit dan distribusi, layanan non-teknik (*buliding management, billing management*), *industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), enterprise asset management (EAM)*.

In 2013, HP acquired PT Mitra Insan Utama (MIU) and changed its name to PT Haleyora Powerindo (HPI). HPI's business areas include technical services for plant operations and maintenance and distribution, non-technical services (*building management, billing management*), *industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), enterprise asset management (EAM)*.



- Perubahan nama dari MIU menjadi HPI
- Mengerjakan proyek eksisting di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua
- Change name from MIU to HPI
- Carried out existing projects in Kalimantan, Java, Sumatra, and Papua

2014



- Perjanjian kerja sama (PKS) antara PLN dan HP (037.P.J.040/DIR/2014)
- Implementasi Perdir 734.DIR/2013
- Implementasi PKS di Jawa Timur dan DKI
- Migrasi proyek eks HPI di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten
- Cooperation agreement (PKS) between PLN and HP (037.P.J.040/DIR/2014)
- Implementation of the Directors of PT PLN (Persero) Regulation No. 734.DIR/2013
- Implementation of PKS in East Java and DKI
- Migration of ex HPI projects in PLN Distribution of West Java and Banten

2015



- Perluasan di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI
- Persiapan layanan *end-to-end*
- Business expansion in PLN Distribution of West Java and Banten, Central Java, East Java, and Jakarta
- Preparation to provide end-to-end service

2016-2018



- Perluasan di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, dan Banten
- Proyek percontohan layanan *end-to-end* distribusi di Sidoarjo, Semarang, dan Sumatera
- Sosialisasi layanan *end-to-end* di Jawa dan Sumatera
- Business expansion in Central Java, East Java, Jakarta, and Banten
- Pilot project of end-to-end distribution service in Sidoarjo, Semarang, and Sumatera
- Socialization of end-to-end service in Java and Sumatera



- Proyek di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten dimigrasi ke HP
- Menjalankan proyek eksisting (lelang/ penunjukan)
- Projects in PLN Distribution of West Java and Banten were migrated to HPI
- Carried our existing projects (tender/ appointment)



- Menjalankan proyek eksisting (lelang/ penunjukan)
- Perluasan di Sulawesi dan Nusa Tenggara
- Carried our existing projects (tender/ appointment)
- Business expansion in Sulawesi and Nusa Tenggara



- Menjalankan proyek eksisting (lelang/ penunjukan)
- Perluasan di Ambon, Kalimantan, dan Sulawesi
- Migrasi proyek ke penugasan HP dan PT PLN Tarakan
- Zonasi penugasan
- Carried our existing projects (tender/ appointment)
- Business expansion in Ambon, Kalimantan, Sulawesi
- Project migration to the assignment of HP and PT PLN Tarakan
- Zoning of assignment

# BIDANG USAHA

## Business Sectors

### BIDANG USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

#### Business Sectors According to the Articles of Association

Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan, dan jasa, yaitu terdiri dari:

1. Menjalankan usaha di bidang industri pembangkitan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran, serta usaha-usaha lain terkait ketenagalistrikan; industri mesin listrik dan perlengkapannya; fabrikasi peralatan listrik dan elektronik; daur ulang peralatan listrik dan elektronik; pembangkitan listrik tenaga batu bara, minyak bumi, gas, air, panas bumi dan *co-generation*; serta kegiatan usaha terkait.
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat; dan bertindak sebagai pemasok, leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, yang meliputi pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik; serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; sertifikasi layak operasi sistem kelistrikan (gardu induk listrik, transmisi, dan distribusi); sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri; sertifikasi sistem manajemen mutu; konsultasi bidang kelistrikan, antara lain meliputi perencanaan perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana; konsultasi bidang listrik elektronika, pengujian dan penerapan alat listrik, serta kegiatan usaha terkait lainnya.

The purpose and objectives of the Company based on Article 3 of the Articles of Association are business in the fields of industry, trade, construction, and services, which consist of:

1. Performing business in the electricity generation industry, which includes for power plant, sales, distribution, and other ventures related to electricity; electrical machinery industry and its equipment; fabrication of electrical and electronic equipment; recycling of electrical and electronic equipment; coal power plant, petroleum, gas, water, geothermal, and cogeneration; and related business activities.
2. Performing business in trade sector, including import and export and trade in electrical and electronic equipment, covering import and export trade between island/region and local and inter-port (interinsulair), either on their own account and for the calculation of other person or legal entity on the basis of commission or by mandate; and acting as a supplier, wholesaler, distributor, commissioner, representative, or agency, both domestically and abroad
3. Performing business in the sector of construction, which is including the installation, maintenance of electricity equipment and the development of technologies that support the supply of electricity; management and utilization of natural resources and other energy sources for the benefit of electricity, in accordance with applicable laws and regulations.
4. Performing business in the sector of inspection and testing of electric power installations services; certification of feasible operation of the electricity system (substation, transmission, and distribution); electrical product quality certification by domestic products; quality management system certification; consultation in the sector of electrical electronic, including planning of housing, office buildings and facilities, and infrastructure; consultation in the sector of electrical electronic, testing and electrical appliances, and the other related business activities.

## KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN SAAT INI

### Current Business Activities

Menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan yang meliputi:

1. Survei teknis perluasan jaringan distribusi, Pelayanan pelanggan, Pembangunan dan updating data jaringan distribusi.
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Transmisi dan Distribusi, yang mencakup:
  - a. Gardu Induk
  - b. Gardu Distribusi
  - c. Jaringan Tegangan Tinggi (JTT)
  - d. Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
  - e. Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
  - f. Sambungan Rumah (SR)
  - g. Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
  - h. Penyediaan Material Pemeliharaan

Providing operation and maintenance services including:

1. Technical survey of distribution network expansion, customer service, construction and updating of distribution network data.
2. Operation and Maintenance of Transmission and Distribution Installation, including:
  - a. Substation
  - b. Distribution Substation
  - c. High-Voltage Network (JTT)
  - d. Medium-Voltage Network (JTM)
  - e. Low-Voltage Network (JTR)
  - f. Household Connection (SR)
  - g. Metering and Limiting Device (APP)
  - h. Maintenance Materials Provision

## PRODUK DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN

### Product and Services

HP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan wilayah operasional Jawa dan Sumatera. Dalam menjalankan operasional tersebut HP menyusun *catalogue service* sebagai panduan kepada pelanggan sebagai berikut:

HP has a major business segment as a service provider for the operation and maintenance of electricity transmission and distribution with operational areas of Java and Sumatera. In performing these operations, HP compiles the catalogue service as a guide to the customer are as follows:

DISTRIBUSI Distribution		NIAGA Commerce		TRANSMISI Transmission	
PROBIS	SERVICES	PROBIS	SERVICES	PROBIS	SERVICES
OPERASI Operation	OPERATOR/COMMAND CENTRE	YANBUNG	MCB ON	OPHAR	OP SEL 20 KV
	YANDAL & PATROL	MANBILL	PDIL		HAR SEL 20 KV
	CORRECTIVE ACTION		CATER		HAR INSTRUMEN
HAR	PRAKONDISI ROW Precondition Row	REVASS GARDU	PENAGIHAN Billing	OPHAR TT	OP SEL 150 KV
	HAR ROW		PDP & REKON ENERGI		GROUND PATROL TRANS
	HAR JTM		HAR GARDU, JTR & SR HAR Substation, SVN & HW		HAR SEL 150 KV
	HAR JAR & GARDU		HAR METER		HAR INSTRUMENT
	HAR KUBIKEL Har Meter Solution		P2TL		HAR SWITCHYARD 150 KV





# TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PERUSAHAAN

## Objective, Target, and Strategy of the Company

### TUJUAN PERUSAHAAN

#### Objectives of the Company

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah “untuk berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan dan jasa”.

In accordance with the Articles of Association, purpose and objective of this Company is “to strive in the sector of industry, trade, development, and services”.

### SASARAN PERUSAHAAN

#### Target of the Company

Sasaran yang ingin dicapai Perusahaan dalam rangka menuju Visi Perusahaan yang ditetapkan merupakan sasaran utama yang pencapaiannya dilakukan dengan tahapan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Target that the Company wants to achieve towards the Company Vision is the main target that the achievement is performed by phase in the long-term company plan (RJPP)

Adapun sasaran setiap tahun yang akan dicapai HP dijabarkan lebih lanjut dalam *Roadmap* Menuju Visi Perusahaan, sebagaimana uraian berikut:

The annual target that HP will achieve are further described in the *Roadmap* to the Corporate Vision, are as follow:

	VISI Vision	MISI Mission
High Level Strategy Roadmap	<p>Menjadi <i>Asset Operator</i> sistem Ketenagalistrikan yang terkemuka dengan standar dunia</p> <p>Become the Leading Asset of the Electricity System Operator with World-Class Standards</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamankan, menyederhanakan, dan mempercepat proses bisnis layanan O&amp;M di bidang Ketenagalistrikan.</li> <li>2. Menjalankan bisnis <i>Asset Operator</i> sistem ketenagalistrikan yang berkualitas dan efisien.</li> <li>3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme <i>Human Capital</i> untuk menjamin kepuasan pelanggan.</li> <li>4. Meningkatkan daya saing dan <i>sustainability</i> perusahaan melalui pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secure, simplify and accelerate the O&amp;M service business process in the electricity sector</li> <li>2. Run an efficient and high quality electricity system Operator Asset business</li> <li>3. Develop competence and Professionalism of Human Capital to ensure customer satisfaction</li> <li>4. Increase competitiveness and sustainability company through business development in the electricity sector</li> </ol>

## TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Objective, Target, and Strategy of the Company

PERSPEKTIF BSC BSC Perspective	PANDANGAN INDUSTRI Industry Foresight	GAP AS IS GAP as is	SASARAN STRATEGIS Strategic Target	PROGRAM PRIORITAS Priority Program	KPI
Pelanggan Customers	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan pelanggan akan kecepatan dan kualitas layanan semakin tinggi</li> <li>Daya tawar pelanggan akan semakin tinggi seiring dengan UU perlindungan konsumen</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Customer demands for speed and quality of service are increasingly high</li> <li>Customer bargaining power will increase along with the Law of Consumer Protection</li> </ol>	CSI HP < CSI LEADING PRACTICE	CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun standar perilaku layanan</li> <li>Membangun <i>Customer Relationship Management</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Build Service Behavior Standards</li> <li>Build Customer Relationship Management</li> </ol>	CSI
Produk dan Layanan Produk and Services	<ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan O&amp;M Ketenagalistrikan tumbuh seiring dengan 35.000 MW</li> <li>Tuntutan kualitas produk O&amp;M Ketenagalistrikan berbasis K3</li> <li>Terbukanya layanan jasa O&amp;M Ketenagalistrikan <i>Non Captive Market</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>O&amp;M electricity service grow along with 35.000 MW</li> <li>K3-based demand for product quality O&amp;M electricity</li> <li>The opening of electricity O&amp;M services Non Captive Market</li> </ol>	Bersifat Reaktif Kolektif Collective Reactive	PRODUCT DEVELOPMENT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan produk baru dengan optimalisasi <i>resource</i> dan pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>Pengembangan <i>End to End Services</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>New product development with optimization resource and utilization of information technology</li> <li>Development End to End Services</li> </ol>	End to End Services
Proses Bisnis Internal Internal Bisnis Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan Layanan berbasis IT semakin meningkat</li> <li>Tuntutan <i>Zero Accident</i></li> <li>Tuntutan standarisasi layanan berdasarkan <i>best practice</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Demands for IT-based services are increasing</li> <li>Demands of Zero Accident</li> <li>Demands of standardization services based of best practice</li> </ol>	<i>Business as Usual</i> Business as Usual	PROBIS EXCELLENT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan pada <i>Work Service Resource Management</i></li> <li>Standarisasi Bisnis Proses O&amp;M Ketenagalistrikan</li> <li>Membangun layanan modern berbasis <i>Mobility</i>.</li> <li>Menyusun <i>Service Catalogue</i> dan <i>Costing Model O</i></li> <li>Menyusun perencanaan kerja berbasis <i>Asset Management</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reinforcement at Work Service Resource Management</li> <li>Standardization of Business Processes O&amp;M Electricity</li> <li>Build mobility-based modern services</li> <li>Set Service Catalogue and Costing Model O</li> <li>Compile asset based management work plant</li> </ol>	HP Go Mobile



**TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PERUSAHAAN**  
Objective, Target, and Strategy of the Company

PERSPEKTIF BSC BSC Perspective	PANDANGAN INDUSTRI Industry Foresight	GAP AS IS GAP as is	SASARAN STRATEGIS Strategic Target	PROGRAM PRIORITAS Priority Program	KPI
Sumber Daya Manusia Human Resources	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan Kompetensi dan Profesionalisme SDM</li> <li>Tuntutan sikap dan perilaku layanan yang ekselen</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Demands of Competence and Professionalism Human Resources</li> <li>Demand for excellent service attitudes and behaviors</li> </ol>	Bersifat secara Personalia Personnel	HCM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan pengembangan Organisasi melalui alignment dengan Organisasi Induk dan Anak Perusahaan</li> <li>Pengembangan <i>leadership</i> training</li> <li>Pengembangan kompetensi pengelolaan SDM</li> <li>Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reinforcement and development organization through alignment with Main Organization and Subsidiaries</li> <li>Development of Leadership training</li> <li>Development competence of management human resources</li> <li>Conducting labor training and certification</li> </ol>	Sertifikasi HCR & OCR Certification HCR & OCR
Keuangan dan Pasar Finance and Market	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasar semakin terbuka dan persaingan industri O&amp;M semakin ketat</li> <li>Tuntutan efisiensi dan peningkatan laba dari <i>non captive market</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Market is increasingly open and O&amp;M industry competition is increasingly tigh</li> <li>Demands for efficiency and profit growth from non-captive market</li> </ol>	Fokus di Pasar Captive Focus on Market Captive	PENETRASI PASAR MARKET PENETRATION	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>business intelligence</i> potensi <i>non captive</i></li> <li>Pengukuran Kinerja berbasis <i>leading industry</i></li> <li>Implementasi EDP terkait pada perbaikan SCM</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do the business intelligence potency non captive</li> <li>Leading industry based performance measurement</li> <li>Implementation EDP related to repair SCM</li> </ol>	End to End Services
Kepemimpinan Leadership	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan transparansi dan GCG dalam pengelolaan bisnis</li> <li>Diperlukan pemimpin masa depan yang kompeten, visioner, berintegritas dan menjadi <i>role model</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Transparency and GCG demands in business management</li> <li>Future leaders who are competent, visionary, integrity and be a role model</li> </ol>	Kepemimpinan <i>Grass Road</i> belum tumbuh <i>Grass Road</i> leadership hasn't grow yet	VISIONARY INTEGRITY LEADERSHIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan kepemimpinan di seluruh level</li> <li>Pelatihan <i>teamwork</i></li> <li>Pembinaan <i>Mental Workforce</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Leadership coaching at all stages</li> <li>Teamwork coaching</li> <li>Mental Workforce coaching</li> </ol>	GCG KPKU

## TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Objective, Target, and Strategy of the Company

	STABILIZATION		EXCELLENT PERFORMANCE		TREND SETTER
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>High Level Strategy Roadmap</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Training Leaders Competencies</li> <li>2. End to end 50%</li> <li>3. Revenue Growth 15%</li> <li>4. GCG = 85</li> <li>5. OFI KPKU = SA 376</li> <li>6. HP Go Mobile 50%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Training Leaders Competencies</li> <li>2. End to end 50%</li> <li>3. Revenue Growth 20%</li> <li>4. GCG = 87</li> <li>5. KPKU = 425</li> <li>6. HP Go Mobile 50%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innovation</li> <li>2. End to end 100%</li> <li>3. Revenue Growth 15%</li> <li>4. GCG = 88</li> <li>5. OFI KPKU = SA 476</li> <li>6. HP Go Mobile 100%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innovation</li> <li>2. Sertifikasi TK 100%</li> <li>3. Revenue Growth 15%</li> <li>4. GCG = 90</li> <li>5. KPKU = 500</li> <li>6. HP Go Mobile 100%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innovation</li> <li>2. Sertifikasi TK 100%</li> <li>3. Revenue Growth 15%</li> <li>4. GCG = 91</li> <li>5. OFI KPKU = SA 576</li> <li>6. HP Go Mobile 100%</li> </ol>

## STRATEGI PERUSAHAAN

Strategy of the Company

Berdasarkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT) yang dituangkan dalam matriks *Threat, Opportunity, Weakness, Strength* (TOWS) maka HP menetapkan 7 (tujuh) Strategi Utama sesuai dengan RJP di atas yaitu:

1. *Performance Improvement*, dalam rangka menjawab tantangan yang terkait tuntutan profesionalisme dalam standar layanan dan penerapan MEA.
2. *Product Development and Diversification*, dalam rangka mengoptimalkan kekuatan internal untuk meraih peluang pasar *non captive*.
3. *Human Capital Management Excellent*, dalam rangka memenuhi HCR & OCR guna meningkatkan profesionalisme dan kepuasan tenaga kerja.
4. *Penetrasi Market Non Captive*, dalam rangka peningkatan laba Perusahaan.
5. *Business Process Excellent*, dalam rangka menyiapkan diri untuk menjadi *leader practice* di bidang O&M sistem ketenagalistrikan dan serta pengelolaan *management building* dan *back office*.
6. *Customer Service Excellent*, dalam rangka memenuhi tuntutan profesionalisme standar layanan dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Based on the analysis results of *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT) as stated in the matrix *Threat, Opportunity, Weakness, Strength* (TOWS) that HP stipulates 7 (seven) Main Strategies in accordance with the RJP above, which are:

1. *Performance Improvement*, in answering the challenges related to the demands of professionalism in service standards and MEA application.
2. *Product Development and Diversification*, in optimizing the internal power to reach non-captive market opportunities.
3. *Human Capital Management Excellent*, in order to meet HCR & OCR in improving professionalism and job satisfaction.
4. *Non-Captive Market Penetration*, in order to increase profit of the Company.
5. *Business Process Excellent*, in order to prepare to be the leader practice in the sector of O&M in the electricity system and management building and back office management.
6. *Customer Service Excellent*, in order to meet the demands of professional service standards in encountering free market competition.



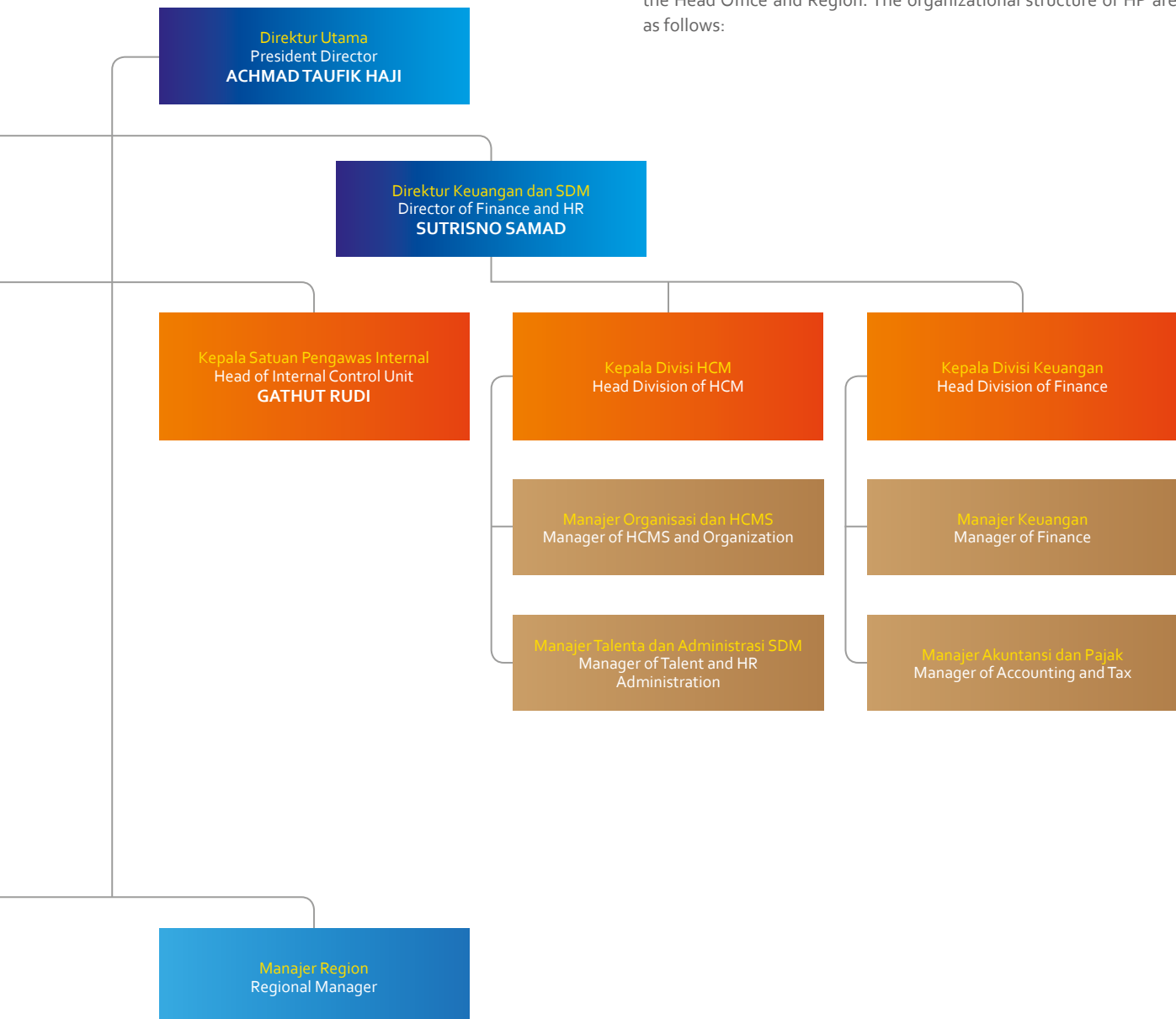
# STRUKTUR ORGANISASI

## Organizational Structure

HP telah melakukan restrukturisasi organisasi yang selaras dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perusahaan secara berkelanjutan dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi No. 008 .P/ DIR-HP/2017 tentang Struktur Organisasi HP tanggal 30 Desember 2017. Saat ini, HP memiliki 3 (tiga) Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan & SDM, serta Direktur Operasi dengan dibantu oleh organ di Kantor Pusat maupun Region. Adapun struktur organisasi HP adalah sebagai berikut:



HP has performed organizational restructuring that is in line with the sustainable business development and necessity with the issuance of Decree of the Board of Directors No. 008. P/DIR-HP/2017 regarding Organizational Structure of HP dated December 30, 2017. Currently, HP has 3 (three) Directors which are President Director, Director of Finance & HR, and Director of Operations and assisted by organs in the Head Office and Region. The organizational structure of HP are as follows:



# VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Vision and Mission of the Company

## VISI Vision

Menjadi *Asset Operator*  
Sistem Ketenagalistrikan  
yang Terkemuka dengan  
Standar Kelas Dunia.

Becoming the Leading Electricity System  
Operator Assets with the World-Class Standards.

### PENJELASAN VISI Vision Explanation

#### **ASSET OPERATOR**

Perusahaan mampu mengoperasikan aset ketenagalistrikan secara efisien dan standar keandalan kelas dunia.

#### **Asset Operator**

The company is able to operate electricity asset efficiently and world-class reliability standards.

#### **TERKEMUKA**

Perusahaan mampu menjadi yang terkemuka di ASEAN.

#### **Leading**

The company is able to become the leading in ASEAN.

#### **KELAS DUNIA**

Perusahaan mampu memberikan pelayanan dengan kualitas standar 25% terbaik dunia, dari sisi keselamatan ketenagalistrikan, kecepatan pelayanan gangguan, dan keandalan pasokan listrik.

#### **World-Class**

The company is able to provide services with the 25% best standard quality in the world, in terms of electricity safety, interruptions service rapidity, and electricity supply reliability.



1. Mengamankan, menyederhanakan dan mempercepat proses bisnis layanan O&M di bidang ketenagalistrikan.
2. Menjalankan bisnis *asset operator system* ketenagalistrikan yang berkualitas dan efisien.
3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme *Human Capital* untuk menjamin kepuasan pelanggan.
4. Meningkatkan daya saing dan *sustainability* Perusahaan melalui pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan.

# MISI

## Mission

1. Securing, simplifying and accelerating the O&M service business process in the electricity sector.
2. Performing a quality and efficient asset business of electricity system operator.
3. Developing Human Capital competency and professionalism to ensure customer satisfaction.
4. Improving the competitiveness and sustainability of the company through business development in the electricity sector.

### PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Pernyataan Visi dan Misi Perusahaan telah di-review dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pengesahan RJP 2018-2022.

### Approval of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Vision and Mission of the Company

Vision and mission statement of the company has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with RJP ratification 2018-2022.

# TATA NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

## Corporate Values and Culture

HP telah merumuskan pedoman tata nilai Perusahaan yang berperan dalam pembentukan karakter insan HP. Perumusan tata nilai tersebut sejalan dengan perkembangan bisnis dan mengedepankan strategi terutama pada sumber daya manusia dengan harapan lebih mudah dipahami, dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh insan HP.



### BE Committed

Sikap perhatian dan kesediaan untuk selalu berkomitmen terhadap *Safety, Integrity and Quality* layanan terhadap pelanggan (internal dan eksternal) maupun citra Perusahaan.

- **Safety**  
Perusahaan memastikan tercapainya *zero accident* dalam seluruh lingkup pekerjaan.
- **Integrity**  
Perusahaan memastikan integritas/kejujuran setiap insan HP melakukan kegiatan yang mengedepankan integritas perilaku, Integritas penyampaian data dan proses bisnis yang senantiasa berdasarkan *Good Corporate Governance (GCG)*.
- **Quality**  
Perusahaan memastikan pengelolaan project berbasis kepada *Work Service Resource Management* dan menjamin tercapainya kualitas pekerjaan berdasarkan proses bisnis yang *excellence* berbasis teknologi informasi, sehingga Perusahaan menjadi *trend setter* dan *quality setter*.

Attention and willingness behavior to always be committed into *Safety, Integrity and Quality* services to the customer (internal and external) and the company's image.

- **Safety**  
The company ensures the achievement of zero accidents in the entire occupations.
- **Integrity**  
The company ensures the integrity/honesty for every person in HP in performing activities which prioritize integrity of behavior, Integrity of data delivery and business processes that are always based on *Good Corporate Governance (GCG)*.
- **Quality**  
The company ensures the project management based on *Work Service Resource Management* and ensuring the achievement of work quality based on business processes that are excellence based on information technology, so the company becomes a trend setter and quality setter.

### Learners

Sifat yang secara berkelanjutan memperluas ilmu pengetahuan untuk meningkatkan *knowledge, skill, dan attitude* dalam bekerja yang disesuaikan dengan perubahan yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Has the nature of continuously learning to improve knowledge, skills, and attitude in work that is adapted to changes in order to provide the best service to customers.

HP has formulated corporate values governance guidelines which play a role in developing the characters of HP professionals. That Corporate values formulation is in line with the business development and prioritizing strategies especially on human resources by expected that it will understandable, knowable, and implemented by the entire of HP person.

## Innovative

Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam mengembangkan ide, gagasan dan *best practice* untuk dapat mempermudah/menunjang proses bisnis demi kepentingan Perusahaan dan peningkatan pelayanan pelanggan.

An activity that is perform continuously and sustainably in developing idea, concept and best practices to be able to facilitate/support the business processes in the interests of the company and customer service improvement.

## Enthusiastic

Sikap bersemangat yang berapi-api dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menjadi motivasi yang luar biasa untuk melayani pelanggan.

Fiery spirit attitude in performing the work to be an extraordinary motivation in serving the customer.

## Visioner

Sikap yang menciptakan visi dan tujuan yang jelas berkenaan dengan pemahaman masa depan yang lebih baik dan usaha-usaha dalam peningkatan kualitas pelayanan pelanggan.

An attitude in creating clear vision and purpose in relation by understanding a better future and efforts in improving customer service quality.

## Emphaty

Kemampuan untuk merasakan kondisi emosional (perasaan) yang dimiliki pegawai dan pelanggan.

The ability to feel the emotional condition (feeling) own by the employees and customer.

# IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS

## Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners



**FAHMI EL AMRUZI**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	50 tahun 50 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993)</li> <li>• Master of Business Administration dari University of Missouri Saint Louis, Amerika Serikat (2006)</li> <li>• Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1993)</li> <li>• Master of Business Administration from the University of Missouri Saint Louis, USA (2006)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum</b> Penunjukan Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan atau Pergantian Anggota Dewan Komisaris tanggal 18 September 2017 Circular GMS on Dismissal and Appointment or Substitution of the Board of Commissioners' Member dated September 18, 2017
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EVP Supply Chain Management, Direktorat Pengadaan Strategis 1, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-sekarang)</li> <li>• Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis PT PLN (Persero) (2015-2017)</li> <li>• Wakil Direktur Utama PT Unindo (2013-2015)</li> <li>• Direktur Perencanaan PT PLN Batam (2010-2013)</li> <li>• Manajer Senior Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010)</li> <li>• Manajer Area Jaringan Gambir PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2008-2010)</li> <li>• EVP Supply Chain Management, Directorate of Strategic Procurement 1, PT PLN (Persero) Head Office (2017-present)</li> <li>• Division Head of Power Transaction and Business Partnership of PT PLN (Persero) (2015-present)</li> <li>• Vice President Director of PT Unindo (2013-2015)</li> <li>• Director of Planning of PT PLN Batam</li> <li>• Senior Manager of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office (2010)</li> <li>• Manager of Network Area of Gambir, PLN Distribution of Jakarta Raya and Tangerang (2008-2010)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	EVP Supply Chain Management, Direktorat Pengadaan Strategis 1, PT PLN (Persero) Kantor Pusat EVP Supply Chain Management, Directorate of Strategic Procurement 1, PT PLN (Persero) Head Office
<b>Pelatihan dan Pengembangan</b> Kompetensi Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan Kerja ke Area Bandung (26 Januari)</li> <li>• Kunjungan Kerja ke Area Bogor (26 Februari)</li> <li>• <i>Leadership Course</i>, London – UK (25 April)</li> <li>• Kunjungan Kerja ke Area Pangkalpinang (11 Juni)</li> <li>• <i>Expand Leadership</i>, Bali (9 Agustus)</li> <li>• Working Visit to Area of Bandung (January 26)</li> <li>• Working Visit to Area of Bogor (February 26)</li> <li>• <i>Leadership Course</i>, London – UK (April 25)</li> <li>• Working Visit to Area of Pangkalpinang (June 11)</li> <li>• <i>Expand Leadership</i>, Bali (August 9)</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	51 tahun 51 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)</li> <li>• Master of Electrical Engineering dari Curtin University of Technology, Australia (2007)</li> <li>• Bachelor of Nuclear Engineering from University of Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)</li> <li>• Master of Electrical Engineering from Curtin University of Technology, Australia (2007)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum</b> <b>Penunjukan</b> Appointment Legal References	<p>RUPS Sirkuler Pemberhentian Okto Rinaldi dan Pengangkatan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris tanggal 1 September 2018</p> <p>Circular GMS on Dismissal of Okto Rinaldi and Appointment of Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioner dated September 1, 2018</p>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EVP Talent Management, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-sekarang)</li> <li>• EVP Organization Development, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</li> <li>• General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017)</li> <li>• Manajer Eksekutif Direksi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)</li> <li>• Manajer Senior Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)</li> <li>• EVP Talent Development at Directorate of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Head Office (2018-present)</li> <li>• EVP Organization Development at Directorate of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</li> <li>• General Manager of PLN Region of West Nusa Tenggara (2016-2017)</li> <li>• Manager of Board Executive, PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)</li> <li>• Senior Manager of Power Plant Operation and Maintenance, PT PLN (Persero) Head Office (2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	<p>EVP Talent Development, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat</p> <p>EVP Talent Development at Directorate of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Head Office</p>
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program induksi Komisaris baru</li> <li>• Induction program for new Commissioner</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham</p> <p>Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders</p>



**KARYAWAN AJI**  
 Plt. Komisaris  
 Act. Commissioner

## IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS

Identity and Brief History of the Board of Commissioners



**PURNAMA T. SIANTURI**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	50 tahun 50 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1990)</li> <li>• Magister Humaniora dari Universitas Sumatera Utara (2002)</li> <li>• Doktor dari Universitas Sumatera Utara (2007)</li> <li>• Bachelor of Law from Padjadjaran University, Bandung (1990)</li> <li>• Master of Humanities from University of North Sumatra (2002)</li> <li>• Doctoral Degree from University of North Sumatra (2007)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<p>RUPS Sirkuler Pemberhentian Okto Rinaldi dan Pengangkatan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris tanggal 1 September 2018</p> <p>Circular GMS on Dismissal of Okto Rinaldi and Appointment of Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioner dated September 1, 2018</p>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Departemen Keuangan (2015-sekarang)</li> <li>• Direktur Lelang DJKN, Kementerian Keuangan (2012-2015)</li> <li>• Direktur Hukum dan Humas DJKN, Kementerian Keuangan (2011-2012)</li> <li>• Director of State Receivables and Other State Assets, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance (2015-present)</li> <li>• Director of Auction, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance (2012-2015)</li> <li>• Director of Law and Public Relations, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance (2011-2012)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	<p>Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN, Departemen Keuangan</p> <p>Director of State Receivables and Other State Assets, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance</p>
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program induksi Komisaris baru</li> <li>• Induction program for new Commissioner</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham</p> <p>Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders</p>



# IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI

## Identity and Brief Profile of the Board of Directors

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	58 tahun 58 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1983)</li> <li>• Magister Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2001)</li> <li>• Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1983)</li> <li>• Master of Electrical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (2001)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum</b> <b>Penunjukan</b> Appointment Legal References	<p>RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017</p> <p>Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated May 26, 2017</p>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa dan Bali, Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatera, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)</li> <li>• Kepala Divisi Distribusi Jawa dan Bali, Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatera, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)</li> <li>• General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2010-2012)</li> <li>• Deputi Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Direktorat Jawa, Madura, dan Bali, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2008-2009)</li> <li>• General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (2002-2008)</li> <li>• Division Head of Distribution and Customer Service of Jawa and Bali, Directorate of Operations of Jawa-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)</li> <li>• Division Head of Distribution of Jawa and Bali, Directorate of Operations of Jawa-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)</li> <li>• General Manager of PLN Distribution of West Java and Banten (2010-2012)</li> <li>• Deputy Director of Commerce and Customer Service, Directorate of Jawa, Madura, and Bali, PT PLN (Persero) Head Office (2008-2009)</li> <li>• General Manager of PLN Region of Riau and Riau Islands (2002-2008)</li> <li>• Head of Branch Office of Kuala Kapuas, PLN Region VI (1994-1997)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak ada None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directorship Program: Corporation Merger &amp; Acquisition , and Managing Subsidiaries - Prasetya Mulya</li> <li>• Leadership for Director - London, UK</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham</p> <p>Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commisisoners, and Shareholders</p>



**ACHMAD TAUFIK HAJI**  
 Direktur Utama  
 President Director

## IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI

Identity and Brief History of the Board of Directors



**SUTRISNO SAMAD**  
Direktur Keuangan & SDM  
Director of Finance & Human Resources

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	55 tahun 55 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Semarang, Jawa Tengah Semarang, Central Java
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1983)</li> <li>• Magister Manajemen dari STIKUBANK (2001)</li> <li>• Bachelor of Accounting Economics from Diponegoro University, Semarang (1983)</li> <li>• Master of Management from STIKUBANK (2001)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017 Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated May 26, 2017
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajer Keuangan, PLN Distribusi Jawa Timur (2013-2016)</li> <li>• Manajer Keuangan, PLN Wilayah Sumatera Barat (2010-2013)</li> <li>• Deputy Manajer Akuntansi, PLN Distribusi Jawa Tengah (2009-2010)</li> <li>• Deputy Manajer Pengelolaan Biaya, PLN Distribusi Jawa Tengah (2006-2009)</li> <li>• Asisten Manajer Keuangan Cabang Yogyakarta, PLN Distribusi Jawa Tengah (2003-2006)</li> <li>• Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan Cabang Magelang, PLN Distribusi Jawa Tengah (2001-2003)</li> <li>• Kepala Bagian Administrasi Cabang Salatiga, PLN Distribusi Jawa Tengah (1997-2000)</li> <li>• Manager of Finance at PLN Distribution of East Java (2013-2016)</li> <li>• Manager of Finance at PLN Region of West Sumatera (2010-2013)</li> <li>• Deputy Manager of Accounting at PLN Distribution of Central Java (2009-2010)</li> <li>• Deputy Manager of Cost Management at PLN Distribution of Central Java (2006-2009)</li> <li>• Assistant Manager of Finance at Yogyakarta Branch, PLN Distribution of Central Java (2003-2006)</li> <li>• Section Head of Customer Service at Magelang Branch, PLN Distribution of Central Java (2001-2003)</li> <li>• Section Head of Administration at Salatiga Branch, PLN Distribution of Central Java (1997-2000)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak ada None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executive Education Program: Corporation Merger &amp; Acquisition, and Managing Subsidiaries - Prasetya Mulya</li> <li>• Expand Leadership Program For BOD/BOC – CLDI</li> <li>• Cultivating Determination To Success – PPM</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

**IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI**  
 Identity and Brief History of the Board of Directors

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	47 tahun 47 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah (1995)</li> <li>• Master of Science in Information Technology dari University of Abertay Dundee, Inggris (2007)</li> <li>• Bachelor of Electrical Engineering from Muhammadiyah University (1995)</li> <li>• Master of Science in Information Technology from the University of Abertay Dundee, UK (2007)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum</b> <b>Penunjukan</b> Appointment Legal References	<p>RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017</p> <p>Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated November 7, 2017</p>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Haleyora Power (2014-2017)</li> <li>• Senior Specialist II Kinerja (TK) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (tugas karya ke PT Haleyora Power) (2013-2014)</li> <li>• Manajer Area Metro, PLN Distribusi Lampung (2012-2013)</li> <li>• Manajer Cabang Kotabumi, PLN wilayah Lampung (2011-2012)</li> <li>• Division Head of Operations and Business Development at PT Haleyora Power (2014-2017)</li> <li>• Senior Specialist II Performance (work assignment) of PT PLN (Persero) Head Office (seconded to PT Haleyora Power) (2013-2014)</li> <li>• Manager of Metro Area, PLN Distribution of Lampung (2012-2013)</li> <li>• Manager of Kotabumi Branch, PLN region of Lampung (2011-2012)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak ada None
<b>Pelatihan dan</b> <b>Pengembangan</b> <b>Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executive Education Program: Leader as Marketer Program, Corporation Merger &amp; Acquisition, and Managing Subsidiaries, Prasetya Muliya</li> <li>• Expand Leadership Program For BOD/BOC – CLDI</li> <li>• Cultivating Determination To Success – PPM</li> <li>• LeadersTalk “Winning Strategy” - PTC</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commisioners, and Shareholders



**SINUNG TRIWULANDARI**  
 Direktur Operasi  
 Director of Operations

# PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

## Profile of Human Resources

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pekerja grup HP mencapai 25.185 orang yang terdiri dari 23 pegawai tugas karya, 228 pegawai organik dan 24.936 tenaga kerja (*workforce*) proyek. Jumlah tersebut naik 5,6% dari 23.844 orang pada tahun 2017 seiring dengan peningkatan kontrak pekerjaan di tahun 2018.

As of December 31, 2018, HP group had 25,185 employees consisting of 23 work assignees, 228 organic employees and 24,936 project workforce. The number increased by 5.6% from 23,844 employees at end of 2017, in line with the increasing work contracts in 2018.

### BERDASARKAN STATUS TENAGA KERJA Composition based on Employment Status

ORGANISASI Organization	TUGAS KARYA Seconded			ORGANIK Organic			PROYEK Project			JUMLAH Total		
	2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%
HP	16	17	6.3	34	41	20.6	11,741	12,469	6.2	11,791	12,527	6.2
HPI	3	4	33.3	226	187	-17.3	11,822	12,467	5.5	12,051	12,658	5.0
EPI	2	2	0.0	-	-	-	-	-	-	2	2	0.0
<b>Jumlah Total</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>39.6</b>	<b>260</b>	<b>228</b>	<b>3.3</b>	<b>23,563</b>	<b>24,936</b>	<b>11.7</b>	<b>23,844</b>	<b>25,187</b>	<b>5.6</b>

Demografi pegawai (tugas karya dan organik) pada tahun 2018 dengan pembandingan tahun 2017 dan persentase pertumbuhannya adalah sebagai berikut:

Employee demographics (work assignment and organic) in 2018 with 2017 comparison and growth percentage are as follows:

### BERDASARKAN Gender Composition based on Gender

Gender	2017	2018	Gender
Laki-laki	44	58	Male
Perempuan	6	8	Female
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

### BERDASARKAN TINGKAT JABATAN Composition based on Position Level

JABATAN	2017	2018	Position
Manajemen Atas	-	-	Top Management
Manajemen Menengah	3	6	Middle Management
Manajemen Dasar	5	10	Basic Management
Supervisor Atas	10	16	Top Supervisor
Supervisor Dasar	11	11	Basic Supervisor
Fungsional 1	-	-	Functional 1
Fungsional 2	-	-	Functional 2
Fungsional 3	-	-	Functional 3
Fungsional 4	-	-	Functional 4
Fungsional 5	16	16	Functional 5
Fungsional 6	5	7	Functional 6
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

**BERDASARKAN USIA**

Composition based on Age

USIA	2017	2018	Age
< 20 Tahun	-	-	< 20 Years Old
21-30 Tahun	18	29	21-30 Years Old
31-40 Tahun	17	24	31-40 Years Old
41-50 Tahun	8	8	41-50 Years Old
51-55 Tahun	6	5	51-55 Years Old
≥ 56 Tahun	1	-	≥ 56 Years Old
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

**BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

Composition based on Education

JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	Educational
S3	-	-	PhD
S2	10	10	Masters
S1	35	47	Bachelors
Diploma	5	9	Diploma
SMA/SMK/SMP	-	-	Junior High/High School/Vocational School
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

# STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

## Shareholders Structure and Composition

Struktur dan komposisi kepemilikan saham HP per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

HP shareholders structure and composition as of December 31, 2017 are as follows:

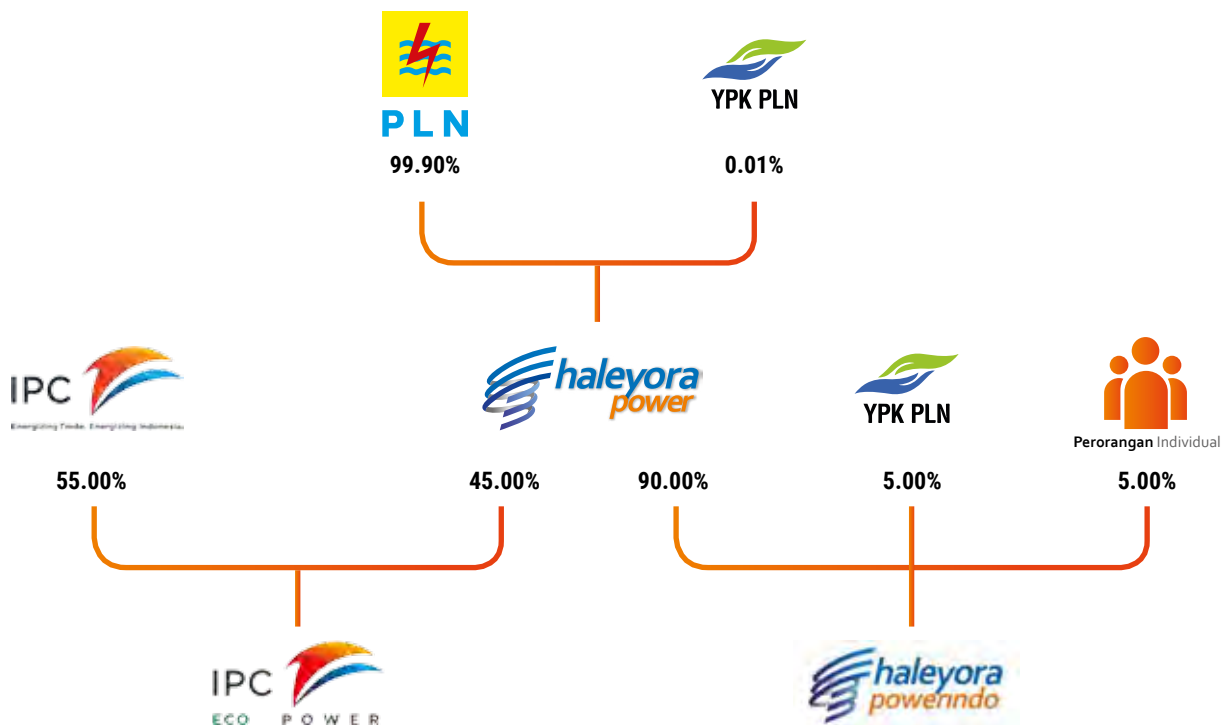


Komposisi Saham HP tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.

There is no shares composition of HP owned by the Board of Commissioners or Directors of the Company.

# STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

## Structure of Company Group



# LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

## The Company Supporting Institutions and Professions

<b>Nama Name</b>	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	
<b>Alamat Address</b>	Plaza Asia Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190	Plaza Asia 10 <sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
<b>Jasa yang Diberikan Services</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa audit umum Laporan Keuangan</li> <li>2. Jasa audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal</li> <li>3. <i>Review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. General audit of financial statements</li> <li>2. Audit compliance with the laws and regulations and internal control</li> <li>3. Performance Evaluation review</li> </ol>



# DAFTAR ENTITAS ANAK PERUSAHAAN, ENTITAS ASOSIASI, DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures  
Company

## ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

Subsidiary Entity

Sampai dengan akhir tahun 2018, HP memiliki 1 (satu) anak perusahaan, yaitu:

As of 2018, HP has 1 (one) subsidiary, are as follow:

NO	NAMA PERUSAHAAN Company Name	TANGGAL PENDIRIAN Establishment Date	STATUS OPERASI PERUSAHAAN Operation Status of Company	ALAMAT PERUSAHAAN Address	KEPEMILIKAN SAHAM Shareholders	BIDANG USAHA Business Sector
1	PT HPindo (HPI)	17 Januari 2013	Beroperasi	Jl. PHH Mustopha No. 45, Bandung, Jawa Barat 40124 T. (022) 727 8420 F. (022) 727 9468 www.hapindo.co.id	1. PT HP (90%) 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (5%) 3. Perseorangan (5%)	1. Pelayanan Teknik 2. Management Billing 3. Non Teknik
	PT HPindo (HPI)	January 17, 2013	Operating	Jl. PHH Mustopha No. 45, Bandung, West Java 40124 T. (022) 727 8420 F. (022) 727 9468 www.hapindo.co.id	1. PT HP (90%) 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (5%) 3. Individual (5%)	1. Technical Services 2. Management Billing 3. Non -Technical

## ENTITAS ASOSIASI

Association Entity

Sampai dengan akhir tahun 2018, HP tidak memiliki Entitas Asosiasi tetapi memiliki sejumlah entitas berelasi yaitu perusahaan yang berada di bawah grup PT PLN (Persero).

As of 2018, HP does not have an association entity but has a number of related entities, that is the company under PT PLN (Persero) group.

## PERUSAHAAN PATUNGAN

### Joint Venture

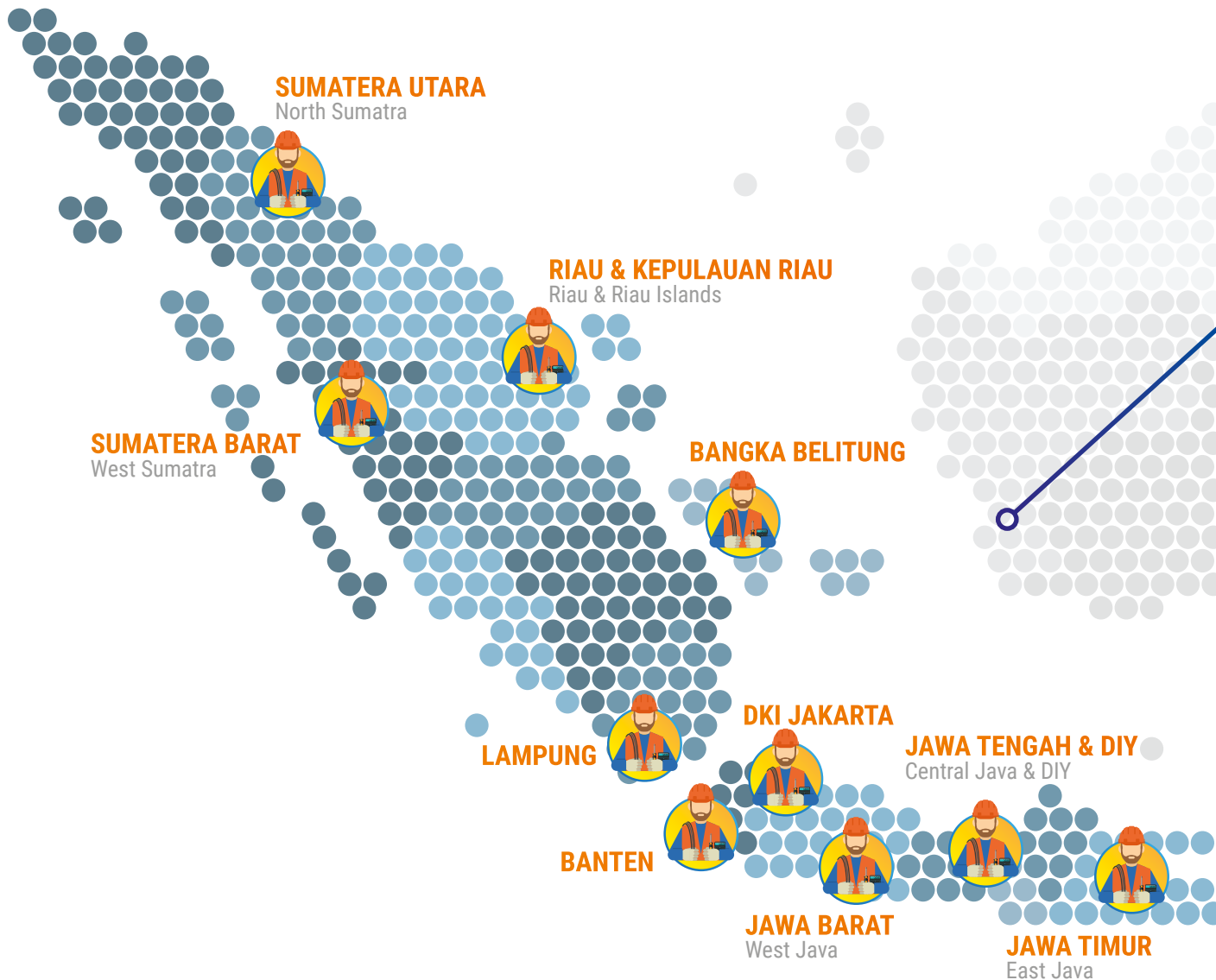
Sampai dengan akhir tahun 2018, HP memiliki 1 (satu) Perusahaan Patungan yang dibentuk hasil kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu:

As of 2018, HP has 1 (one) joint venture company that set as collaboration result with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), are as follow:

NO	NAMA PERUSAHAAN Company Name	TANGGAL PENDIRIAN Establishment Date	STATUS OPERASI PERUSAHAAN Operation Status of Company	ALAMAT PERUSAHAAN Address	KEPEMILIKAN SAHAM Shareholders	BIDANG USAHA Business Sector
1	PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	5 November 2012	Beroperasi	Jl. Yos Sudarso No. 30 T. 430 5047 F. 430 5052	1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (55%) 2. PT HP (45%)	Menyalurkan dan menjual listrik di kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia II
	PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	November 5, 2012	Operating	Jl. Yos Sudarso No. 30 T. 430 5047 F. 430 5052	1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (55%) 2. PT HP (45%)	Distributing and selling electricity in the port area owned by PT Pelabuhan Indonesia II

# WILAYAH KERJA

## Operational Map



### REGION 1 (JAWA BARAT)

Region 1 (West Java)

### REGION 2 (JAWA TENGAH & DIY)

Region 2 (Central Java & DIY)

### REGION 3 (JAWA TIMUR)

Region 3 (East Java)

### REGION 4 (SUMATERA BARAT)

Region 4 (West Sumatra)

### REGION 5 (DKI JAKARTA & BANTEN)

Region 5 (DKI Jakarta & Banten)

### REGION 6 (RIAU & KEPULAUAN RIAU)

Region 6 (Riau & Riau Islands)



**PELANGGAN UTAMA** Main Customer

1. PLN DISJABAR

2. PLN DISJATENG

3. PLN DISJATIM

4. PLN DISJAYA

5. PLN DISBANTEN

6. PLN WIL RKR

7. PLN WIL SUMBAR

8. PLN DIS LAMPUNG

9. PLN WIL SUMUT

10. PLN WIL BABEL

# WEBSITE PERUSAHAAN

## The Company's Website

Perusahaan memiliki *corporate website* dengan alamat <https://www.haleyorapower.co.id>. Perusahaan selalu berupaya menyempurnakan *corporate website* secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses.

*Website* Perusahaan menggunakan bahasa Indonesia dan secara garis besar dibagi menjadi 5 (lima) bagian besar yang terdiri dari:

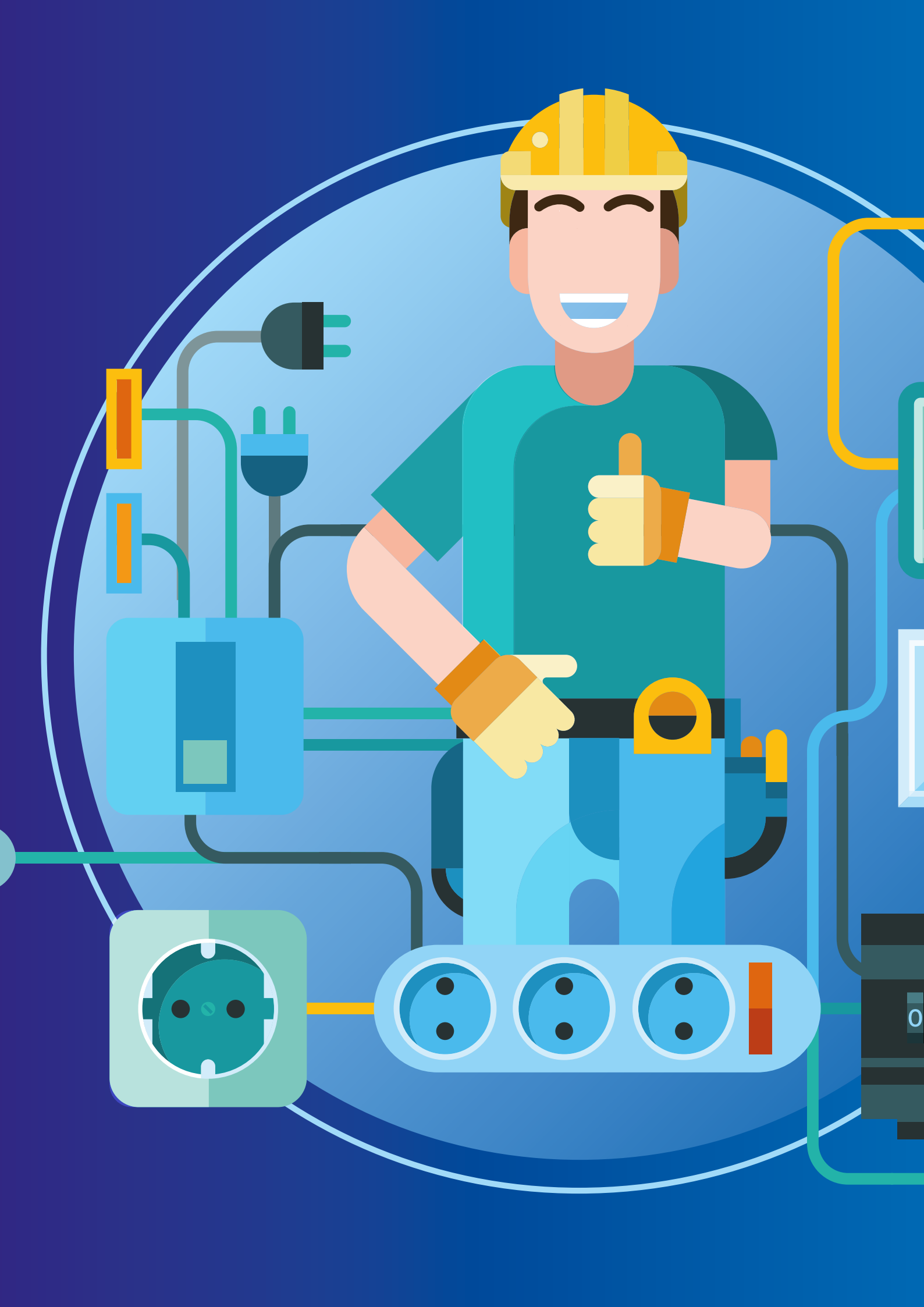
1. Profil, berisi informasi mengenai profil perusahaan, manajemen, struktur organisasi, struktur grup Perusahaan, peta wilayah kerja serta anak perusahaan dan afiliasi.
2. Produk dan Layanan, berisi informasi mengenai layanan transmisi, distribusi, komersial, dan *e-commerce*.
3. Tata kelola, berisi informasi mengenai praktik tata kelola, pedoman, *whistleblowing system*, pengendalian gratifikasi, LHKPN, penilaian GCG, Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kebijakan Sistem Pengendalian Internal, Laporan Tahunan, Kebijakan IT, dan Kebijakan CSR.
4. Komunikasi Berkelanjutan, berisi informasi berita kegiatan Perusahaan, dokumentasi, kegiatan Haleyora Peduli, pengadaan, dan majalah 4 bulanan Media Haloyora.
5. Kontak, berisi informasi alamat kontak Kantor Pusat Perusahaan, Kantor Region, anak perusahaan dan afiliasi.

The Company has a corporate website at <http://www.haleyorapower.co.id>. The Company continually updates its corporate website to be more informative and convenient to access.

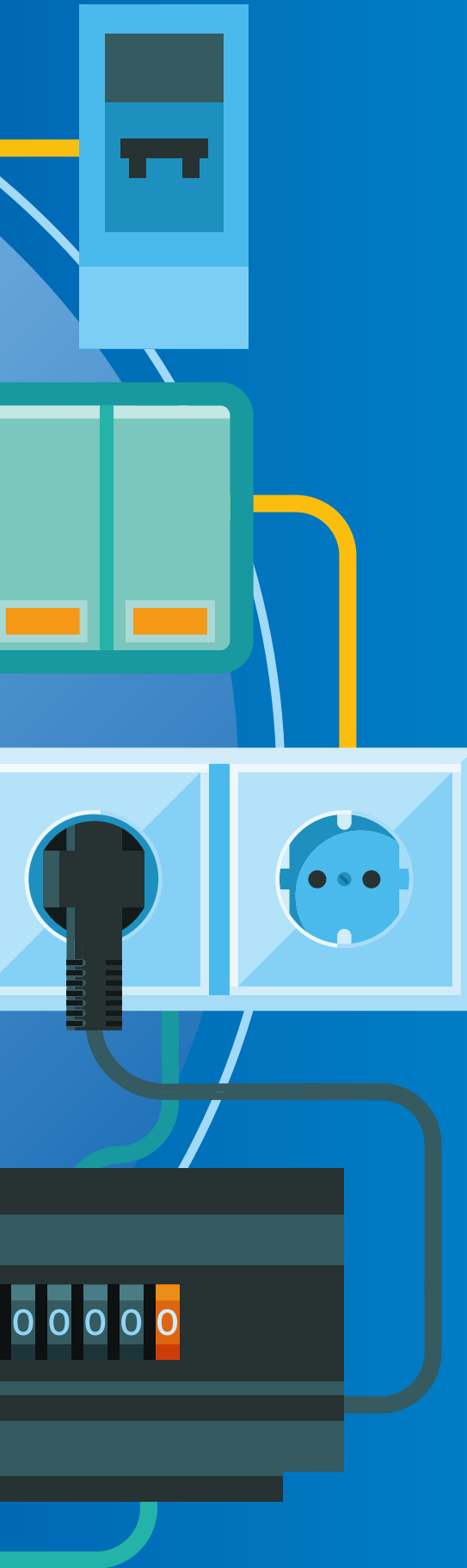
The Company's Website is Indonesian and is categorized into 5 (five) major sections consisting of:

1. Profile, containing information about the company profile, management, organizational structure, structure of the Company group, map of working areas as well as subsidiaries and affiliates.
2. Products and Services, containing information about transmission, distribution, commercial, and e-commerce services.
3. Governance, containing information on corporate governance practices, guidelines, *whistleblowing system*, gratification control, LHKPN, GCG assessment, Public Information Disclosure (KIP), Internal Control System Policy, Annual Reports, IT Policy, and CSR Policy.
4. Sustainable Communication, containing information on Company's activities, documentation, Haleyora Cares activities, procurement, and four monthly magazine Media Haloyora.
5. Contact, containing address of the Company's Head Office, Regional Office, subsidiaries and affiliates.









# PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Management Discussion  
and Analysis

# PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis



Pada tahun 2018, Perusahaan menandatangani 70 kontrak penugasan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi yang meliputi perluasan dan penambahan kontrak eksisting di bidang Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan, penugasan baru di bidang Niaga, serta kontrak Operator Gardu Induk (GI) 150 kV dan Petugas *Ground Patrol* (PGP).

In 2018, the Company entered into 70 assignment contracts to safeguard operation and maintenance of distribution and transmission services covered expansion and addition of the existing contracts in Technical and Maintenance Services, new assignments in the Commerce sector, as well as 150 kV Substation (GI) Operator and Ground Patrol Officer (PGP).

### TINJAUAN MAKROEKONOMI

Ekonomi global tahun 2018 diwarnai berbagai sentimen negatif yang menahan pertumbuhan, terutama kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan eskalasi perang dagang antara AS dengan China. Ketegangan perdagangan antara AS dan China telah menimbulkan dampak yang meluas ke banyak negara karena terganggunya rantai pasokan global. Perang dagang tersebut telah menyebabkan ekonomi China melambat dan langsung berdampak pada perekonomian negara-negara *emerging market* di kawasan Asia Timur dan Pasifik (*East Asia and Pacific/EAP*) yang menjadi mitra dagang utama China.

Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral AS, The Fed, mengakibatkan pengetatan kondisi finansial di sejumlah negara *emerging market* karena terjadinya arus modal asing yang keluar (*capital outflow*). Spekulasi para pelaku pasar keuangan mengakibatkan depresiasi mata uang yang tajam di sejumlah negara, termasuk rupiah. Nilai tukar rupiah sempat menembus batas psikologis Rp15.000 per dolar AS dan mencapai titik terendah Rp15.253 per dolar AS (kurs tengah BI) pada 11 Oktober 2018 seiring penguatan indeks dolar AS. Tetapi pada bulan November rupiah mulai menguat

### MACROECONOMIC REVIEW

The global economy in 2018 faced various negative sentiments that held back growth, especially the monetary policy of the United States (US) and the escalation of trade war between the US and China. Trade tensions between the US and China have had a widespread impact on many countries due to disrupted global supply chains. The trade war has caused the Chinese economy to slow down and directly impacted the economies of emerging market countries in the East Asia and Pacific (EAP) region as China's main trading partner.

The increase in The Fed Fund Rate (FFR), resulted in tightening financial conditions in a number of emerging market countries due to capital outflows. Speculation by financial market players triggered sharp currency depreciation in a number of countries, including the rupiah. Rupiah exchange rate exceeded the psychological limit of Rp15,000 per USD and reached its lowest point at Rp15,253 per USD (BI middle rate) on October 11, 2018 in line with the strengthening of the US dollar index. However, in November, the rupiah began to strengthen by 5.9% point-to-point compared to the previous month to around Rp14,300 per USD. Throughout 2018, the

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

### Management Discussion and Analysis

hingga 5,9% *point-to-point* dibandingkan bulan sebelumnya hingga di kisaran Rp14.300 per dolar AS. Sepanjang tahun 2018, rupiah telah terdepresiasi sebesar 6,9% dengan nilai tukar rata-rata Rp14.246 per dolar AS.

Faktor lain yang mempengaruhi ekonomi global adalah harga minyak dunia yang masih terus berfluktuasi. Hingga Oktober 2018, kenaikan harga minyak telah mencapai USD85 per barel. Bagi Indonesia yang menjadi importir bersih minyak sejak tahun 2004, tingginya nilai impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) hampir sepanjang tahun 2018 menjadi penyebab utama defisit transaksi berjalan. Pada akhir November, harga minyak berangsur terkoreksi menjadi USD60 per barel (Brent) dan USD50 per barel (WTI) karena para produsen terbesar dunia: AS, Arab Saudi, dan Rusia terus menaikkan produksinya yang mengakibatkan dunia kelebihan pasokan.

Dinamika perekonomian global yang terjadi sepanjang tahun 2018 menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian domestik. Tetapi fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk meredam dampak-dampak jangka pendek. Ketahanan ekonomi Indonesia terlihat dari berbagai indikator makroekonomi seperti tren pertumbuhan triwulanan yang masih terjaga di level 5%, inflasi terkendali di bawah 4%, dan kondisi perbankan nasional yang sehat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,17%, lebih baik dari 5,07% pada 2017.

## TINJAUAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009), penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta dan swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

rupiah depreciated by 6.9% with an average exchange rate of Rp14,246 per USD.

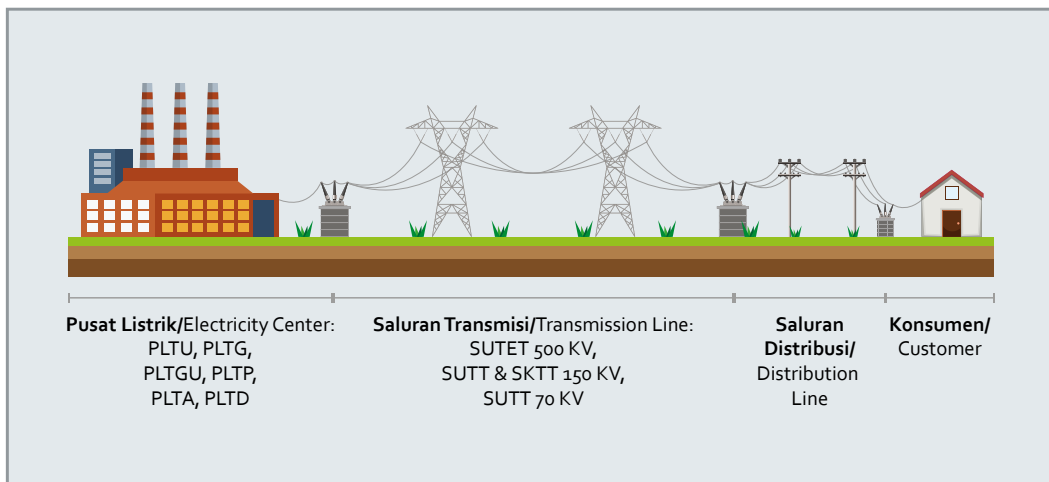
Another factor affecting the global economy was that the world's oil prices continued to fluctuate. Up to October 2018, the increase in oil prices reached USD85 per barrel. For Indonesia, which has been a net oil importer since 2004, the high value of imports of crude oil and fuel oil (BBM) for most of 2018 became a major cause of the current account deficit. At the end of November, oil prices were gradually corrected to USD60 per barrel (Brent) and USD50 per barrel (WTI) as the world's largest producers: the US, Saudi Arabia and Russia continued to increase their production which resulted in the world's over supply.

The dynamics of the global economy throughout 2018 became a challenge for the domestic economy. Nevertheless, Indonesia's economic fundamentals were strong enough to reduce short-term impacts. The resilience of the Indonesian economy was reflected on various macroeconomic indicators, such as quarterly growth trend that was maintained at 5%, controlled inflation below 4%, and sound national banking conditions. Based on Central Statistics Agency (BPS) data, Indonesia's economic growth in 2018 reached 5.17%, better than 5.07% in 2017.

## ELECTRICITY SECTOR REVIEW

Based on Law No. 30 of 2009 concerning Power (Law 30/2009), electricity supply is controlled by the State, which is carried out by the Government and Regional Governments based on the principle of regional autonomy, implemented by State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), cooperatives, the private sector and non-governmental organizations, including power plants, transmissions, distributions, sales and integrated electricity supply businesses.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
 Management Discussion and Analysis



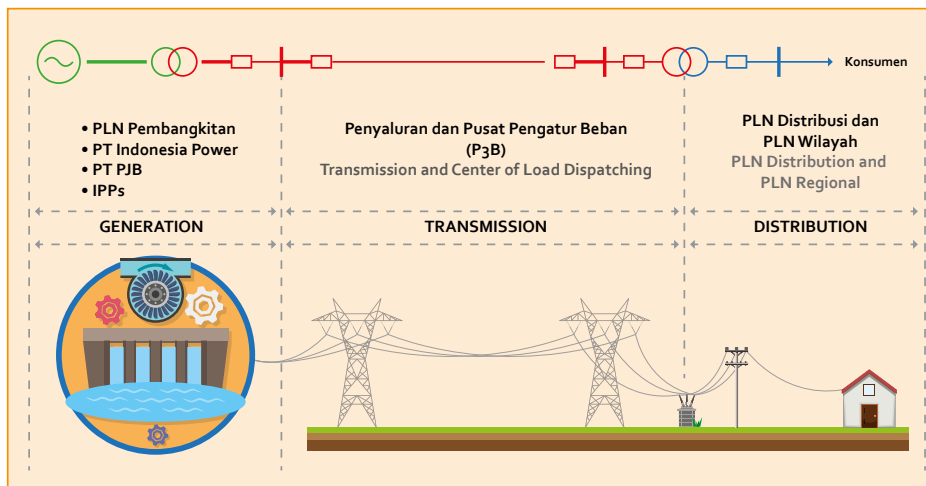
PT PLN (Persero) adalah satu-satunya BUMN penyelenggara ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PT PLN (Persero) is the only state-owned electricity supplier for public purposes that was incorporated based on Government Regulation No. 23 of 1994 concerning Transformation of General Company of State electricity (Perum) to State Power Company (Persero).

Peran PLN sebagai penyelenggara ketenagalistrikan mengalami perubahan setelah diterbitkannya UU 30/2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, PLN tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL). Pemegang IUPPTL adalah pelaku usaha yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Walaupun demikian, PLN sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, diberikan prioritas pertama (*first right of refusal*) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

The role of PLN as the power supplier underwent changes after issuance of Law 30/2009. According to this law, PLN no longer holds a monopoly on power supply in Indonesia and no longer plays the role of Authorized Power Business (PKUK), but as a Holder of Electricity Supply Business License (PIUPTL). IUPPTL holder is a business player that obtained a license to conduct power supply business for public purposes which includes power plants, transmissions, distributions and sales to consumers. Nevertheless, PLN as an extension of the Government in supplying electricity for public purposes, is given the first right of refusal in electricity supply for public purposes.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
Management Discussion and Analysis



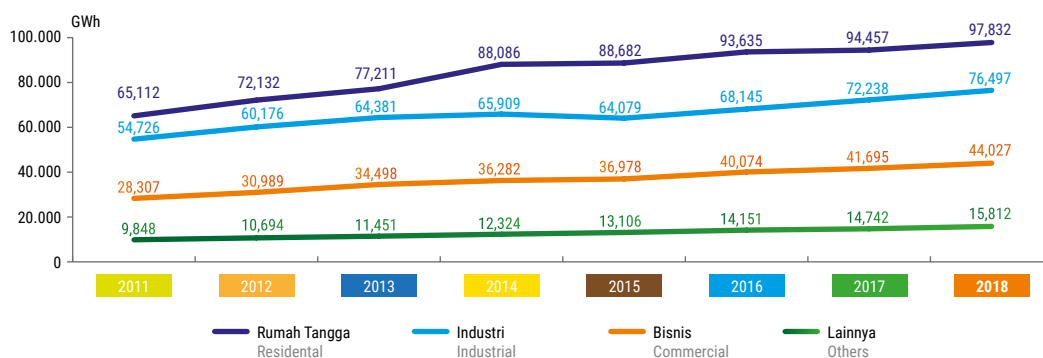
**Kebutuhan Tenaga Listrik**

Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk dan pengembangan infrastruktur yang memicu tumbuhnya kawasan industri, bisnis dan permukiman baru mendorong peningkatan kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data realisasi penjualan listrik PLN menunjukkan peningkatan hingga 48,21% dalam 10 tahun terakhir dari 157.993 GWh di 2009 menjadi 234.618 GWh di akhir 2018.

**Power Needs**

Economic growth, population growth and infrastructure development that triggered the growth of new industrial, commercial and residential estates encouraged an increasing growth in electricity demand from year to year. PLN's power sales realization data showed an increase of up to 48.21% in the last 10 years from 157,993 GWh in 2009 to 234,618 GWh in 2018.

**PERTUMBUHAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK (2011-2018)**  
Electricity Sales Growth (2011-2018)





## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

### Management Discussion and Analysis

#### Jumlah Pelanggan PLN

Pada tahun 2018, pelanggan PLN mencapai 71,92 juta pelanggan dengan jumlah terbesar pada segmen Rumah Tangga sebanyak 66,07 juta pelanggan. Berdasarkan wilayah, jumlah pelanggan terbesar berada di Regional Jawa Bagian Tengah sebesar 25,21 juta pelanggan. Sedangkan pelanggan di Regional Sumatera berjumlah 14,50 juta pelanggan, dan Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara berjumlah 14,93 juta pelanggan. Secara akumulasi, jumlah pelanggan di Jawa, Bali & Nusa Tenggara mencapai 47,67 juta pelanggan, atau 66,29% dari jumlah pelanggan PLN secara nasional. Sedangkan wilayah regional Sumatera tercatat sebesar 14,50 juta (20,17% dari total pelanggan).

#### TINJAUAN USAHA

PT Haleyora Power (HP) merupakan salah satu anak perusahaan sekaligus mitra strategis PT PLN (Persero) yang mendukung bisnis perusahaan induk dengan melaksanakan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance/O&M*) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan. Sebagai dasar penugasannya adalah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 459.K/DIR/2012 yang diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 734.K/DIR/2013.

Dalam operasinya, Perusahaan berperan sebagai *operating holding* yang memiliki bisnis internal yang dilakukan sendiri dan bisnis yang dikelola melalui anak perusahaan, yaitu PT Haleyora Powerindo (HPI). Kompetensi inti HP adalah memberi jasa kepada PLN berupa manajemen proyek untuk pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi tegangan menengah, tegangan rendah, dan jaringan distribusi. Layanan ini dibutuhkan PLN untuk menjamin kualitas, kontinuitas dan keandalan operasi PLN dalam memberikan jasanya kepada pelanggan.

#### Program Kerja, Tantangan dan Peluang

Di tahun 2018, Perusahaan fokus pada penguatan kompetensi, pengembangan *human capital*, serta peningkatan kualitas layanan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik dari kontrak-kontrak pekerjaan yang sudah diperoleh sampai akhir tahun 2018, baik oleh HP maupun HPI.

Selain itu, untuk meningkatkan dan menyempurnakan model operasi dan kualitas layanan, saat ini Perusahaan mulai mengimplementasi "*best practice O&M end-to-end process distribusi*" dan perbaikan proses bisnis dengan berpedoman pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

#### Number of PLN Customers

At end of 2018, PLN had 71.92 million customers with the largest number in the Household segment of 66.07 million customers. By region, the largest number was in Central Java Region of 25.21 million customers. While Sumatra Region had 14.50 million customers, and East Java, Bali & Nusa Tenggara Region had 14.93 million customers. Accumulatively, the number of customers in Java, Bali & Nusa Tenggara reached 47.67 million, or 66.29% of the total number of PLN customers nationwide. While Sumatra region had 14.50 million customers (20.17% of total customers).

#### BUSINESS REVIEW

PT Haleyora Power (HP) is a subsidiary and strategic partner of PT PLN (Persero) that supports the parent company's business by securing operations and maintenance (O&M) for power transmission and distribution network services. The assignment is based on Decision of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 459.K/DIR/2012 which was amended with Regulation of Board of Directors No. 734.K/DIR/2013.

In its operations, the Company acts as an operating holding that has its own internal business and other business managed by a subsidiary, namely PT Haleyora Powerindo (HPI). HP's core competency is to provide services to PLN in the form of project management for the operation and maintenance works for medium and low voltage transmission networks and distribution networks. These services are needed by PLN to ensure the quality, continuity and reliability of PLN's operations in providing services to customers.

#### Work Programs, Challenges and Opportunities

In 2018, the Company focused on strengthening competencies, developing human capital and improving service quality in the field of operation and maintenance for power distribution network of work contracts obtained until the end of 2018, both by HP and HPI.

In addition, to improve and to refine the operations model and service quality, the Company is currently implementing "*best practice O&M end-to-end process for distribution*" and improving business processes according to ISO 9001:2015 quality management system standards.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
Management Discussion and Analysis

Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk menempatkan posisi HP sebagai pemimpin dalam industri operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang mampu memberikan diferensiasi dan peningkatan kualitas layanan, pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) dan nilai tambah layanan kepada perusahaan induk. Selain itu, Perusahaan juga telah berkomitmen untuk mencapai kinerja keselamatan “zero accident” melalui pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang konsisten, penerapan budaya *safety, integrity and quality* serta implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3).

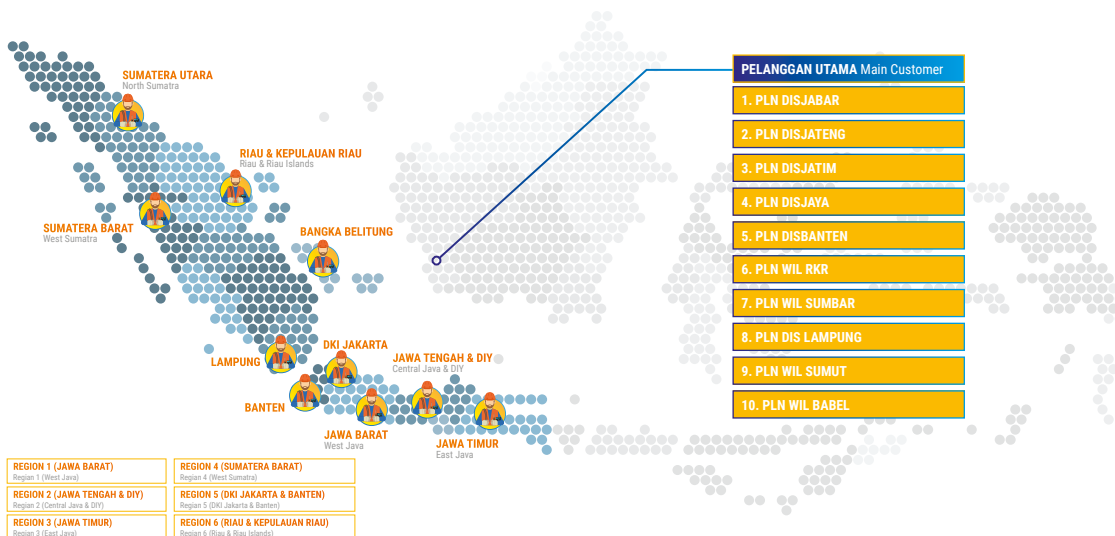
The strategic initiative aims to secure HP’s position as a leader in the operation and maintenance for transmission and distribution networks that is able to provide differentiation and service quality improvement, *Service Level Agreement* (SLA) achievement and value added services to the parent company. In addition, the Company is also committed to achieving zero accident safety performance by encouraging consistent Occupational Health and Safety (K3), implementing a culture of safety, integrity and quality, as well as OHS Management System (SMK3).

Pada tanggal 18 April 2017 Direksi PT PLN (Persero) menerbitkan Peraturan Direksi No. 0030.P/DIR/2017 tentang Perubahan Peraturan Direksi No. 734.K/DIR/2013 (“Perdir 0030.P”). Regulasi baru tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Perusahaan untuk menata kembali seluruh rencana kerja dengan memperhatikan zonasi wilayah kerja yang ditetapkan dalam Perdir 0030.P tersebut, di mana HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatera, Jawa, dan Bali.

On April 18, 2017, Board of Directors of PT PLN (Persero) issued Regulation of Board of Directors No. 0030.P/DIR/2017 concerning Amendment to Regulation of Board of Directors No. 734.K/DIR/2013 (“Perdir 0030.P”). The new regulation becomes a challenge as well as an opportunity for the Company to reorganize its entire work plans by considering zonation of operational areas specified in Perdir 0030.P, where HP is appointed to manage Sumatera, Java and Bali operational areas.

Penataan zonasi menyebabkan anak perusahaan (HPI) harus menyerahkan kontrak pekerjaan di wilayah timur kepada PT PLN tarakan. Proses transisi telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2017 dan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan usaha konsolidasi yang cukup bermakna. Berdasarkan Perdir 0030.P, PT PLN Tarakan membawahi wilayah kerja Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Selanjutnya, Perusahaan fokus pada wilayah kerja Sumatera dan Jawa, serta mulai menjajaki potensi pekerjaan di wilayah Bali.

Zonation caused the subsidiary (HPI) to transfer a work contract in the eastern region to PT PLN Tarakan. The transition process has been ongoing since mid-2017 and has had a significant impact on the loss of potential consolidated operating revenues. Based on Perdir 0030.P, PT PLN Tarakan oversees Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua operational areas. Subsequently, the Company focused on Sumatera and Java operational areas, and began exploring the potential operations in Bali region.



**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
 Management Discussion and Analysis

Wilayah kerja yang relatif berdekatan dalam satu zonasi setidaknya memberikan kemudahan dalam hal perencanaan kerja dan anggaran biaya yang lebih efisien, utilisasi tenaga kerja yang lebih optimal, mobilisasi alat kerja (Alker) dan alat pelindung diri (APD) yang lebih cepat, serta peluang untuk mengimplementasikan *borderless operation* dan menyediakan layanan *end-to-end* melalui kontrak manajemen aset (*asset management contract/AMC*).

**Kinerja Operasi**

Pada tahun 2018, Perusahaan telah menandatangani 70 kontrak penugasan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi. Kontrak-kontrak tersebut berasal dari 6 Unit Induk Distribusi (UID), 4 Unit Induk Wilayah (UIW), 1 Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban (UIP3B), dan 1 Unit Induk Transmisi (UIT) yang meliputi 43 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), 4 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), 13 Unit Pelaksana Transmisi (UPT), dan 283 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang terbagi dalam 9 wilayah kerja Perusahaan, yaitu 6 region dan 3 area khusus yang meliputi 60 Area Layanan

The operational areas that are relatively close together in one zone at least provide convenient work planning, more efficient budget costs, more optimal workforce utilization, faster mobilization of work equipment (Alker) and personal protective equipment (PPE), as well as opportunities to implement borderless operations and to provide end-to-end services through an asset management contract (AMC).

**Operational Performance**

In 2018, the Company entered into 70 assignment contracts to safeguard operation and maintenance of distribution and transmission services. These contracts came from 6 Distribution Main Units (UID), 4 Regional Main Units (UIW), 1 Main Unit of Load Transfer and Regulation (UIP3B), and 1 Transmission Main Unit (UIT) which included 43 Customer Service Provider Units (UP3), 4 Distribution Management Implementing Units (UP2D), 13 Transmission Implementing Units (UPT), and 283 Customer Service Units (ULP) which were divided into 9 operational areas of the Company, including 6 regions and 3 special areas covering 60 Service Areas.

No.	WILAYAH KERJA	JUMLAH AREA LAYANAN Number of Service Area	JUMLAH KONTRAK Number of Contract	Working Area
1	Region 1 Jawa Barat	11	15	Region 1 Jawa Barat
2	Region 2 Jawa Tengah dan DIY	5	7	Region 2 Central Java and DIY
3	Region 3 Jawa Timur	17	15	Region 3 East Java
4	Region 4 Sumatera Barat	4	8	Region 4 West Sumatra
5	Region 5 DKI Jakarta & Banten	6	15	Region 5 DKI Jakarta & Banten
6	Region 6 Wilayah Riau & Kepulauan Riau	13	6	Region 6 Area Riau & Riau Islands
7	Area Bangka	1	1	Area Bangka
8	Area Tanjung Karang	2	2	Area Tanjung Karang
9	Area Rantau Prapat	1	1	Area Rantau Prapat
	<b>JUMLAH</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>TOTAL</b>

Kontrak tersebut baru meliputi perluasan dan penambahan kontrak eksisting di bidang Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan (5 kontrak), penugasan baru di bidang Niaga (13 kontrak), serta kontrak Operator Gardu Induk (GI) 150 kV dan Petugas *Ground Patrol* (PGP) sebagai berikut:

1. Perluasan kontrak Penugasan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Area Pekanbaru menjadi Area Pekanbaru dan Dumai PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau;

The new contract covered expansion and addition of the existing contracts in Technical and Maintenance Services (5 contracts), new assignments in the Commerce sector (13 contracts), as well as 150 kV Substation (GI) Operator and Ground Patrol Officer (PGP) Contracts as follows:

1. Expansion of Assignment of Technical and Maintenance Services in Pekanbaru Area to become Pekanbaru and Dumai PLN Area in Riau Region and Riau Islands;

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

### Management Discussion and Analysis

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kontrak Penugasan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan PLN UID Jawa Timur di wilayah Bojonegoro, Mojokerto, Pamekasan (2 Zone), dan Pasuruan, dengan pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 1 Januari 2019;</li> <li>3. Kontrak penugasan baru Pekerjaan manajemen <i>billing</i> pada Area Kota Bumi PLN Distribusi Lampung dan PLN UID Jawa Timur di wilayah Bojonegoro, Mojokerto, Pamekasan (2 Zone), dan Pasuruan dengan pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 1 Januari 2019;</li> <li>4. Penambahan kontrak penugasan Pelayanan Teknik Premium di PLN Distribusi DKI dengan pelaksanaan pekerjaan mulai bulan Maret 2018;</li> <li>5. Kontrak Penugasan Operator GI 150 kV dan Kontrak Penugasan Pekerjaan Pemeliharaan Sel 20 kV pada Area Pengatur Distribusi Jakarta Raya dengan pelaksanaan pekerjaan mulai bulan Agustus 2018;</li> <li>6. Pekerjaan Operator Gardu Induk pada P3B Sumatera dengan pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 15 Agustus 2018 di wilayah Palembang, Tanjungkarang, Medan, Pematangsiantar, dan Pekanbaru;</li> <li>7. Pekerjaan Inspeksi <i>Ground Patrol</i> pada P3B Sumatera dengan pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 15 Agustus 2018 di wilayah Palembang, Tanjung Karang, Medan, Pematangsiantar, Medan, dan Pekanbaru.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Technical and Maintenance Services Contract for PLN UID East Java in Bojonegoro, Mojokerto, Pamekasan (2 Zones), and Pasuruan regions, with work commencement on January 1, 2019;</li> <li>3. New assignment contract for billing management in Kota Bumi Area PLN Distribution Lampung and PLN UID East Java in Bojonegoro, Mojokerto, Pamekasan (2 Zones), and Pasuruan regions, with work commencement on January 1, 2019;</li> <li>4. Additional assignment contract for Premium Technical Services in PLN DKI Distribution, with work commencement in March 2018;</li> <li>5. Substation Operator Assignment Contract 150 kV and Cell Maintenance Assignment Contract 20 kV in the Greater Jakarta Distribution Regulatory Area with work commencement in August 2018;</li> <li>6. Substation Operator Work in P3B Sumatra with work commencement on August 15, 2018 in the areas of Palembang, Tanjungkarang, Medan, Pematangsiantar, and Pekanbaru;</li> <li>7. Ground Patrol Inspection Work in P3B Sumatra with work commencement on August 15, 2018 in Palembang, Tanjung Karang, Medan, Pematangsiantar, and Pekanbaru.</li> </ol> |
|--|---|

No.	JENIS LAYANAN	JUMLAH KONTRAK Number of Contract	Line of Service
1	<i>Billing Management (Cater/Tusbung/Update Data Pelanggan)</i>	20	Billing Management (Meter Recording/Connecting-Disconnecting/Updating Customer Data)
2	Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik – Pelayanan Teknik (Yantek: Pelayanan Keandalan, Inspeksi, dan Pemeliharaan)	36	Operation and Maintenance of Power Distribution – Technical Services (Reliability, Inspection and Maintenance Services)
3	Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik – Area Pengatur Distribusi (APD)/Operasional Gardu Induk (OGI) Sel 20 kV	5	Operation and Maintenance of Power Distribution - Distribution Management Area (APD)/Substation Operation (OGI) 20 kV Cell
4	Penyambungan Baru dan Perubahan Daya	1	New Connection and Capacity Change
5	Pemeliharaan Transmisi Tenaga Listrik - Operasional Gardu Induk (OGI)	3	Maintenance of Power Transmission - Substation Operation (OGI)
6	Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik – Deteksi Kabel	2	Maintenance of Power Transmission – Cable Detection
7	Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik – <i>Meter Solution</i>	1	Maintenance of Power Transmission – Meter Solution
8	Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik – Asesmen Kabel	2	Maintenance of Power Transmission – Cable Assessment
	<b>JUMLAH</b>	<b>70</b>	<b>TOTAL</b>

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
 Management Discussion and Analysis

**Pertumbuhan Pelanggan**

Jumlah pelanggan *end-to-end* pada tahun 2018 meningkat sebanyak 15 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dari target penambahan 30 unit PLN setingkat rayon. Penambahan 15 UP3 tersebut mencakup 73 Unit Layanan Pelanggan (ULP) sehingga jumlah ULP yang dilayani Perusahaan hingga akhir tahun 2018 sebanyak 176 ULP.

**Customer Growth**

The number of end-to-end customers at end of 2018 increased by 15 Customer Service Provider Units (UP3) of the targeted additional 30 units of PLN at rayon level. The additional 15 UP3 included 73 Customer Service Units (ULP) so that the number of ULPs served by the Company at end of 2018 was 176 ULP.

No.	UP3	JUMLAH ULP Number of ULP	JENIS KONTRAK Type of Contract			
			DISTRIBUSI Distribution		NIAGA Commerce	
			Opdist	Hardist	Manbill	PENYAMBUNGAN Connection
1	Pekanbaru	5				
2	Dumai	2				
3	Kotabumi	6				
4	Bojonegoro	6				
5	Surabaya Selatan	4				
6	Surabaya Barat	3				
7	Surabaya Utara	6				
8	Gresik	4				
9	Banyuwangi	5				
10	Situbondo	3				
11	Jember	6				
12	Malang	8				
13	Mojokerto	5				
14	Pamekasan Zona 1	5				
15	Pamekasan Zona 2	5				
<b>JUMLAH PERTUMBUHAN PELANGGAN</b> Total Customer Growth		73				

**Catatan**

- UP3: Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan
- ULP: Unit Layanan Pelanggan
- Opdist: Operasi Distribusi
- Hardist: Pemeliharaan Distribusi
- Manbill: *Manajemen Billing*

**Note:**

- UP3: Executive Customer Service Unit
- ULP: Customer Service Unit
- Opdist: Distribution Operation
- Hardist: Maintenance of Distribution Line
- Manbill: Billing Management

**Service Level Agreement (SLA)**

Pada tahun 2018, manajemen telah menyepakati *Service Level Agreement (SLA)* pekerjaan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi yang ditetapkan pada Kontrak Manajemen dengan target 100%.

**Service Level Agreement (SLA)**

In 2018, management agreed on a *Service Level Agreement (SLA)* for operation and maintenance services for distribution as stipulated in Management Contract with a target of 100%.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi pencapaian SLA di 6 Region rata-rata sebesar 97,37%. Pencapaian SLA tertinggi sebesar 99,26% di Region 5 DKI Jakarta & Banten dan terendah sebesar 95,00% di Region 4 Sumatera Barat. Sedangkan di tingkat area layanan, SLA tertinggi dicapai Area Layanan Rantau Prapat dengan pencapaian 99,58% dan terendah di Area Layanan Tanjung Karang dengan pencapaian 94,18%.

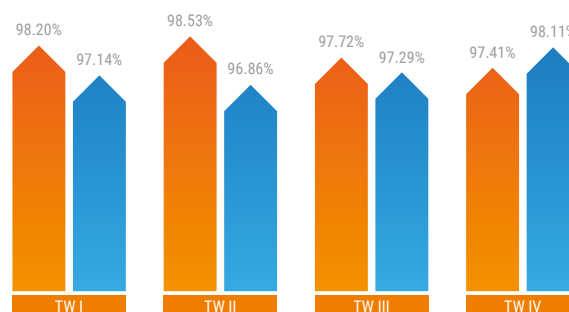
Di tingkat *project*, pencapaian SLA tertinggi 100% terjadi di Operasi Gardu Induk (OGI) – Distribusi Jawa Timur (Disjatim); Transmisi – Jawa Bagian Timur & Bali (JBTB); Manbill – Banyuwangi; *Manajemen Billing* (Manbill) – Jember; Deteksi Kabel – Distribusi Jakarta Raya (Disjaya); Deteksi Kabel – Distribusi Banten (Disbanten); *Assesment* Kabel HP; *Assesment* Kabel PLN; OGI – Disjaya; *Disaster Recovery Center* (DRC); *COMMAND CENTER*; Operasi Pembangkit (OPKIT) - Tanjung Pinang; Petugas *Ground Patrol* (PGP); dan Operator Gardu Induk (OPGI) Pusat Pengatur dan Penyalur Beban Sumatera (P3BS). Sedangkan *project* dengan pencapaian SLA terendah adalah Manbill Solok Region 4 Sumatera Barat sebesar 91,25%.

At end of 2018, average SLA realization in 6 Regions was 97.37%. The highest SLA was 99.26% in Region 5 of DKI Jakarta & Banten and the lowest was 95.00% in Region 4 of West Sumatra. Whereas at service area level, the highest SLA was achieved by Rantau Prapat Service Area with 99.58% and the lowest was achieved by Tanjung Karang Service Area with 94.18%.

At project level, the highest SLA was 100% achieved by Substation Operation (OGI) – Distribution of East Java (Disjatim); Transmission – Eastern Java & Bali (JBTB); Billing Management (Manbill) - Banyuwangi; Manbill - Jember; Cable Detection – Distribution of Jakarta Raya (Disjaya); Cable Detection – Distribution of Banten (Disbanten); HP Cable Assessment; PLN Cable Assessment; OGI - Disjaya; Disaster Recovery Center (DRC); COMMAND CENTER; Power Plant Operator (OPKIT) - Tanjung Pinang; Ground Patrol Officer (PGP); and Substation Operator (OPGI) Transmission and Load Dispatching Center of Sumatra P3BS. While the project with the lowest SLA achievement was Manbill Solok Region 4 West Sumatra at 91.25%.

## PEMBAHAIAN SLA GROUP HP 2017-2018

SLA Achievement of HP Group 2017-2018



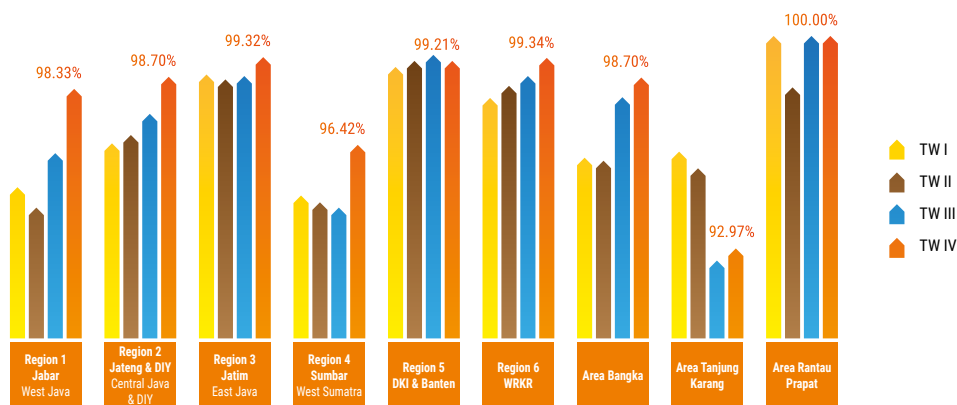
Secara triwulanan, SLA triwulan IV tercapai sebesar 98,11%, lebih baik dibandingkan pada triwulan III sebesar 97,29%. Perbaikan pencapaian SLA pada triwulan IV terjadi pada hampir semua region kecuali Region 5 DKI Jakarta dan Banten yang turun dari 99,60% ke 99,21%.

On a quarterly basis, SLA in the fourth quarter reached 98.11%, better than in the third quarter of 97.29%. Improved SLA in the fourth quarter was achieved by almost all regions except for Region 5 of DKI Jakarta & Banten, which decreased from 99.60% to 99.21%.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
 Management Discussion and Analysis

**PENCAPAIAN SLA PER REGION PER TRIWULAN 2018**

Quarterly SLA Achievement per Region in 2018



Membbaiknya SLA pada triwulan IV berdampak pada turunnya denda bulanan dari rata-rata Rp2,5 miliar per bulan pada triwulan III menjadi Rp1,5 miliar per bulan pada triwulan IV. Akumulasi denda seluruh *project* dari bulan Januari hingga Desember 2018 mencapai Rp30,7 miliar dengan nominal terbesar berasal dari Region 1 Jawa Barat sebesar Rp12 miliar dan Region 4 Sumatera Barat sebesar Rp5,1 miliar.

**Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu**

Perusahaan telah menerapkan standar operasi tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 sebagai jaminan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan mengacu pada standar global. Sejak tahun 2014, HP telah memperoleh Sertifikat ISO 9001 dari LMK-Certification/PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi dan saat ini HP telah mengadopsi ISO 9001 versi terbaru yaitu ISO 9001:2015 yang lebih menekankan pemikiran berbasis risiko (*risk based thinking*) dengan keluaran (*output*) yang diharapkan adalah kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Hingga akhir tahun 2018, seluruh proses bisnis di Perusahaan yang mencakup 9 proses bisnis telah tersertifikasi SNI ISO 9001:2015 setelah melalui proses asesmen oleh PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi dengan lingkup bisnis sebagai berikut:

The improved SLA in the fourth quarter resulted in a decrease in monthly penalty from an average of Rp2.5 billion per month in the third quarter to Rp1.5 billion per month in the fourth quarter. The accumulated penalty of all projects from January to December 2018 reached Rp30.7 billion with the largest nominal coming from Region 1 West Java at Rp12 billion and Region 4 West Sumatra at Rp5.1 billion.

**Quality Management System Certification**

The Company has adopted ISO 9001 Quality Management System certified operating standards as a guarantee that service quality provided to customers is based on global standards. Since 2014, HP has obtained ISO 9001 Certificate from LMK-Certification/PT PLN (Persero) Certification Center and now HP has adopted the latest version of ISO 9001, namely ISO 9001:2015 which emphasizes risk-based thinking with expected output is customer satisfaction and corporate performance improvement.

At end of 2018, all business processes in the Company which include 9 business processes have obtained ISO 9001:2015 certificate undertaking assessment process held by PT PLN (Persero) Certification Services with the following business scope:



## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

### Management Discussion and Analysis

No.	LINGKUP BISNIS	JUMLAH PROSES BISNIS Number of Business Process	Business Scope
1	Operasi Pemeliharaan Jaringan Distribusi (Ophardist)	3	Distribution Line Maintenance Operation
2	Manajemen <i>Billing</i> (Manbill)	1	Billing Management
3	Jasa Operator dan Pemeliharaan Gardu Induk	2	Substation Operator and Maintenance Service
4	Penyambungan Pelanggan	1	Customer Connection
5	Deteksi Kabel	1	Cable Detection
6	Asesmen Kabel	1	Cable Assessment
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>TOTAL</b>

Audit survailen yang dilakukan oleh Pusat Sertifikasi PLN pada tanggal 27 November hingga 4 Desember 2018 memperoleh 12 temuan minor yang telah ditindaklanjuti.

Surveillance audit conducted by PLN Certification Center on November 27 to December 4, 2018 identified 12 minor findings that have been followed up on.

UNIT	JUMLAH TEMUAN Finding	STATUS
Kantor Pusat Head Office	3 temuan kategori minor 3 minor findings	Closed
Region 3	4 temuan kategori minor 4 minor findings	Closed
Region 4	5 temuan kategori minor 5 minor findings	Closed

Berdasarkan Surat PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi No. 0341/SER.00.03/PS/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Hasil Verifikasi Audit Survailen SNI ISO 9001:2015 PT Haleyora Power, status sertifikat No. 0542-M dapat dipertahankan sesuai lingkup sertifikasi.

Based on Letter of PT PLN (Persero) Certification Center No. 0341/SER.00.03/PS/2018 dated December 19, 2018 concerning Surveillance Audit Verification Results of SNI ISO 9001:2015 of PT Haleyora Power, the status of certificate No. 0542-M can be maintained according to the certification scope.

Dengan perkembangan bisnis dan perubahan organisasi di lingkungan Perusahaan, Direksi telah mengeluarkan Keputusan Direksi No. 0139.K/DIR-HP/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Proyek Penyusunan dan Implementasi Proses Bisnis PT Haleyora Power yang bertujuan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap proses bisnis dan standarisasi dokumen yang ada di lingkungan Perusahaan.

To align with business developments and organizational changes within the Company, Board of Directors issued Decision of Board of Directors No. 0139.K/DIR-HP/2018 dated December 14, 2018 concerning Formulation Project and Implementation of PT Haleyora Power's Business Process which aims to make various necessary adjustments to business process and documents standardization within the Company.

### Aspek Pemasaran

#### A. Strategi Pemasaran

Saat ini, pelanggan utama Perusahaan adalah PLN. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu mengedepankan misinya mendukung PLN dalam merealisasikan pelayanan sistem distribusi yang andal dan berkualitas dengan secara konsisten memberikan standar layanan tertinggi dan mendukung PLN dalam menerapkan sistem *revenue assurance* (REVASS) dan efisiensi jaringan distribusi tenaga listrik.

### Marketing

#### A. Marketing Strategy

Currently, the Company's main customer is PLN. In running its business, the Company always prioritizes its mission to support PLN in realizing reliable and quality distribution system services by consistently providing the highest service standards and supporting PLN in revenue assurance (REVASS) system implementation and efficiency of power distribution network.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

### Management Discussion and Analysis

Pada bulan November 2018, Perusahaan menyelenggarakan Haleyora Power Fair, sebagai ajang temu seluruh pemangku kepentingan HP. Pada acara tersebut, Perusahaan memberikan paparan mengenai portofolio bisnis HP dan berbagai informasi lainnya agar seluruh pemangku kepentingan lebih mengenal HP.

#### B. Pangsa Pasar

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017, HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatera, Jawa, dan Bali. Saat ini, Perusahaan memiliki 6 region dan 3 area khusus yang berada di Sumatera dan Jawa. Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan menguasai 32% pangsa pasar dan ditargetkan menjadi 50% pada tahun 2020.

#### C. Inovasi Layanan

Pada tahun 2018, Perusahaan memperkenalkan aplikasi ListriQu, sebuah aplikasi layanan jasa berbasis *mobile* yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat telepon pintar. Masyarakat dapat mengakses ListriQu dan melaporkan jenis gangguan yang terjadi pada instalasi milik pelanggan. Aplikasi ListriQu juga menginformasikan besaran tarif dari setiap jenis perbaikan sehingga pelanggan dapat mengetahui secara transparan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Setelah melakukan order, petugas HP akan merespons dan melakukan perbaikan. Nilai tambah dari aplikasi ini adalah layanan yang cepat, petugas yang bersertifikat, material pengganti yang sesuai standar dan berkualitas, kepastian harga dan transparansi, serta adanya garansi pekerjaan. Saat ini ListriQu sedang uji coba keandalan di ciracas dan cilegon.

Sebagaimana aplikasi layanan berbayar lainnya, ListriQu menjajaki kolaborasi dengan beberapa lembaga perbankan atau perusahaan pengelola sistem pembayaran digital untuk memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan.

#### Profitabilitas

Perusahaan tidak menerapkan segmentasi pasar ataupun segmentasi produk layanan. Pada tahun 2018, pendapatan usaha tumbuh 22,3% dari Rp1,70 triliun menjadi Rp2,07 triliun. Sedangkan beban usaha mencapai Rp1,87 triliun, tumbuh 21,9% dari Rp1,54 triliun pada tahun 2017. Sedangkan laba bersih sebesar Rp138,68 miliar, naik 13,2% dibandingkan Rp122,47 miliar pada tahun 2017.

In November 2018, the Company held Haleyora Power Fair, a meeting forum for all HP's stakeholders. At the event, the Company presented HP's business portfolio and other information so that all stakeholders were more familiar with HP.

#### B. Market Share

Based on Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017, HP is appointed to manage operational areas of Sumatera, Java and Bali. Currently, the Company has 6 regions and 3 special areas located in Sumatera and Java. At end of 2018, the Company had 32% market share and is targeted to reach 50% by 2020.

#### C. Service Innovation

In 2018, the Company introduced ListriQu application, a mobile-based service application that can be accessed by the public through smartphone devices. The public can access ListriQu and report problem types that occur in customers' installations. ListriQu application also informs the rate of each repairment type so that customers can transparently know the amount of costs to be incurred. After placing an order, HP officer will respond and make necessary repairs. Value added of this application is fast service, certified staff, quality and standard replacement materials, price certainty and transparency, as well as job guarantees. Currently, ListriQu is undergoing reliability testing in Ciracas and Cilegon.

Similar to other paid service applications, ListriQu is exploring collaboration with several banking institutions or digital payment system management companies to provide easy payment for customers.

#### Profitability

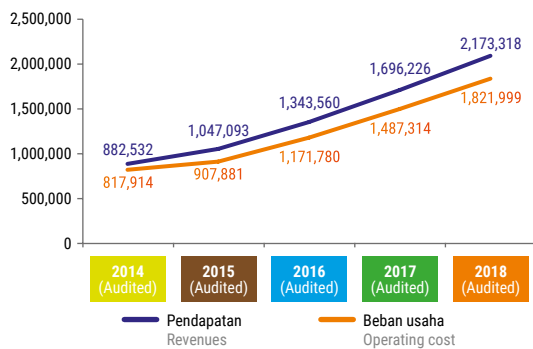
The Company does not apply market segmentation or service product segmentation. In 2018, operating revenues increased by 22.3% from Rp1.70 trillion to Rp2.07 trillion. While operating expenses reached Rp1.87 trillion, grew by 21.9% from Rp1.54 trillion in 2017. Whereas net income was Rp138.88 billion, up 13.2% compared to Rp 122.47 billion in 2017.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
Management Discussion and Analysis

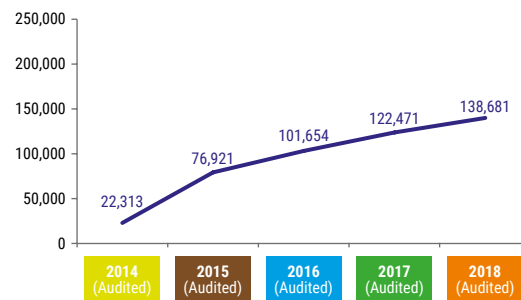
Grafik berikut menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan, beban usaha dan laba bersih dalam 5 tahun terakhir. Jarak antara pertumbuhan pendapatan dan beban usaha yang semakin lebar dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam melakukan efisiensi dan optimalisasi pengendalian biaya.

The following graph shows trends in revenues, operating expenses and net income for the last 5 years. The widening growth gap between revenues and operating expenses from year to year shows that the Company successfully manages its efficiency and cost optimization.

**PENDAPATAN-BEBAN USAHA (2014-2018)** (dalam jutaan Rupiah)  
**Revenues-Operating Cost (2014-2018)** (in million Rupiah)



**LABA BERSIH (2014-2018)** (dalam jutaan Rupiah)  
**Net Profit (2014-2018)** (in million Rupiah)



**Prospek Usaha**

Prospek usaha Perusahaan sangat berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur kelistrikan PLN dalam rangka meningkatkan kualitas dan keandalan sistem serta memenuhi kebutuhan pelanggan. PLN sebagai perusahaan listrik milik negara berkewajiban menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara terus-menerus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

**Business Prospects**

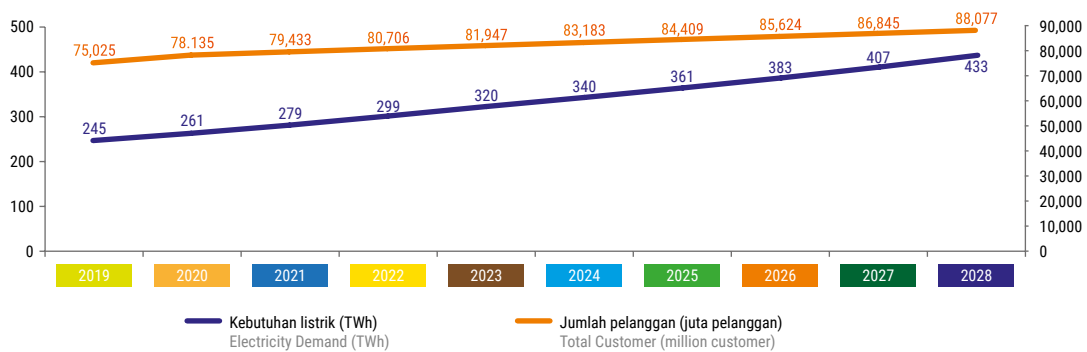
The Company's business prospects are closely related to PLN's power infrastructure development plan in order to improve the quality and reliability of the system and to meet customer needs. PLN as a state-owned power company is obliged to provide power in sufficient quantities to the public across Indonesia continuously, both in the short and long terms.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028, proyeksi pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate/CAGR*) pelanggan adalah 1,6% per tahun sehingga pada tahun 2028 jumlah pelanggan PLN diperkirakan mencapai 88,01 juta pelanggan. Sedangkan proyeksi CAGR kebutuhan daya listrik sebesar 5,9% per tahun, sehingga proyeksi kebutuhan daya listrik pada tahun 2028 diperkirakan akan mencapai 433 terrawatt hours (TWh).

Based on 2019-2028 Power Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero), the projected compound annual growth rate (CAGR) of number of customers is 1.6% per year; so that in 2028, the number of PLN customers is expected to reach 88.01 million customers. Whereas the projected CAGR of power needs is 5.9% per year; so that the projected power demand in 2028 is estimated to reach 433 terrawatt hours (TWh).

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
 Management Discussion and Analysis

**PROYEKSI PERTUMBUHAN PELANGGAN VS KEBUTUHAN DAYA LISTRIK**  
 Projected Growth of Customer vs Electricity Power Demand



Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, PLN menyusun rencana penambahan pembangkit, transmisi dan gardu induk (GI) serta distribusi yang dituangkan di dalam RUPTL 2019-2028 di mana dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, pengembangan infrastruktur kelistrikan akan mencakup penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 56.395 megawatt (MW).

To meet the power needs, PLN is preparing the plan to add plants, transmissions, substations (GI) and distributions as outlined in 2019-2028 RUPTL which states that in the next 10 years, development of power infrastructure will include an increase in power plant capacity by 56,395 megawatts (MW).

Terkait sistem jaringan transmisi dan gardu induk yang menjadi *captive market* bagi kompetensi inti Perusahaan, pengembangan sistem penyaluran pada periode 2019-2028 akan mencakup pengembangan tegangan transmisi 500 kilovolt (kV) dan 150 kV di sistem Jawa-Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur dan Sumatera yang meliputi penambahan kapasitas gardu induk sebesar 124.341 megavolt ampere (MVA), jaringan distribusi sepanjang 472.795 kilometer sirkuit (kms), dan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.

Regarding transmission network system and substations that become the captive market for the Company's core competencies, distribution system development in 2019-2028 period will include development of 500 kilovolt (kV) and 150 kV transmission voltages in Java-Bali system as well as 500 kV, 275 kV, 150 kV and 70 kV in Eastern Indonesia and Sumatra systems which include additional substation capacity of 124,341 megavolt amperes (MVA), distribution networks along 472,795 kilometer circuits (kms) and distribution substations of 33,730 MVA.

**Informasi Kelangsungan Usaha**

Pada 2018 Perusahaan menginisiasi proses transformasi yang berorientasi jangka panjang untuk mengoptimalkan peran HP dalam mendukung keberlanjutan bisnis PLN. Sasaran utama dari transformasi ini adalah kualitas, reliabilitas, efektivitas biaya dan kepuasan pelanggan.

**Business Sustainability**

In 2018, the Company initiated a long-term oriented transformation process to optimize HP's role in supporting PLN's business sustainability. The main targets of this transformation are quality, reliability, cost effectiveness and customer satisfaction.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
Management Discussion and Analysis



Berdasarkan analisis atas tantangan dan peluang sepanjang tahun 2018, maka Perusahaan menetapkan *Roadmap* Transformasi HP dalam 5 tahun ke depan untuk menjadi *asset manager* melalui penyelarasan portofolio usaha. Saat ini Perusahaan telah mengklasifikasi portofolio usaha menjadi 10 paket, di antaranya adalah paket layanan O&M distribusi *end-to-end*, dan 2 paket O&M distribusi *asset management contract* (AMC) yaitu AMC sebagai *asset operator* dan AMC sebagai *asset manager*. Tabel berikut menunjukkan 10 portofolio HP dan HPI dan target waktu implementasinya dalam 5 tahun ke depan.

Based on an analysis of 2018 challenges and opportunities, the Company prepared HP Transformation Roadmap for the next 5 years to become an asset manager through business portfolios harmonization. Currently, the Company classifies its business portfolios into 10 packages, including end-to-end distribution O&M service package and 2 distribution O&M for asset management contract (AMC) packages, consisting of AMC as an asset operator and AMC as an asset manager. The following table shows 10 portfolios of HP and HPI and the respective implementation timelines in the next 5 years.

No.	PORTOFOLIO BISNIS GRUP HP Business Portfolio of HP Group	JANGKA MENENGAH Medium-Term		JANGKA PANJANG Long-Term		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Operasi & Pemeliharaan (Ophar) Distribusi - <i>End-to-End</i> End-to-End - Distribution Operation & Maintenance (O&M) Services	5				
2	Ophar Distribusi - <i>Asset Operator</i> (AMC) Asset Operator - Distribution O&M Services (AMC)	2				
3	Ophar Distribusi - <i>Asset Manager</i> (AMC) Asset Manager - Distribution O&M Services (AMC)	6				
4	Layanan ListriQu ListriQu Service	6				
5	Layanan Niaga <i>End-to-End</i> End-to-End Commercial Service	4				

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**  
 Management Discussion and Analysis

No.	PORTOFOLIO BISNIS GRUP HP Business Portfolio of HP Group	JANGKA MENENGAH Medium-Term		JANGKA PANJANG Long-Term		
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Ophar Transmisi Transmission O&M Services	3				
7	Industrial Cleaning*	6				
8	Pengelolaan Gedung Building Management*	4				
9	Back Office Supporting*	5				
10	Pengelolaan Arsip Digital Digital Archive Management*	3				

\* Portofolio HPI  
 HPI Portfolio

Hingga tahun 2018, Perusahaan masih berperan sebagai *service provider* yang menyediakan jasa sesuai kebutuhan pelanggan. Namun demikian, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Roadmap* Transformasi HP, tahun 2018 adalah momentum untuk membangun fondasi untuk menjadi *asset operator* yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan akan terus dikuatkan hingga tahun 2022. Mulai semester kedua 2018, Perusahaan telah memulai proyek percontohan di beberapa area terpilih untuk menemukan model pengelolaan aset terbaik yang akan diimplementasikan pada area lainnya juga.

Sebagai *asset operator* Perusahaan akan menjalankan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebagai *service provider*. *Asset operator* harus menjadi mitra pelanggan yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara *end-to-end* demi mengamankan keberlanjutan usaha pelanggan. Oleh karena itu, strategi Perusahaan untuk bertransformasi menjadi *leading asset operator* adalah dengan melakukan *business process re-engineering*, di mana HP akan lebih proaktif dalam memelihara aset tanpa menunggu terjadinya gangguan atau keluhan dari pelanggan. Pemeliharaan yang dilakukan lebih menekankan kepada *condition based* dan *predictive maintenance*.

Dalam upaya menjaga biaya (*cost*) agar tetap efektif dan efisien, Perusahaan akan mengembangkan sistem teknologi informasi (TI) yang lebih kuat untuk mendukung operasional perusahaan, serta melakukan digitalisasi data. Perusahaan akan mengoptimalkan fasilitas *mobility* menggunakan aplikasi internal yang disebut "HOME" dan melakukan digitalisasi data sehingga kualitas pengelolaan aset akan lebih baik.

Keahlian dan kompetensi *human capital* juga menjadi perhatian di dalam proses transformasi ini. Untuk meningkatkan

At end of 2018, the Company still acted as a service provider to meet customer needs. However, as determined in HP Transformation Roadmap, 2018 became the momentum to build a foundation to become an asset operator to be implemented in 2019 and will continue to be strengthened until 2022. Starting in the second semester of 2018, the Company has begun pilot projects in selected areas to find the best asset management model that will be implemented in other areas as well.

As an asset operator, the Company will carry out greater responsibilities than as a service provider. Asset operator must be customer partners that initiate end-to-end maintenance and repairs to ensure the customer's business sustainability. Therefore, the Company's strategy to transform into a leading asset operator is to conduct business process re-engineering, where HP will be more proactive in assets maintenance without preceding interference or complaints from customers. The maintenance carried out emphasizes condition based and predictive maintenance.

In an effort to maintain effective and efficient costs, the Company will develop a more reliable information technology (IT) system to support the Company's operations, as well as data digitalization. The Company will optimize mobility facilities using an internal application called "HOME" and data digitalization; so as to improve asset management quality.

Human capital expertise and competence are also a concern in this transformation process. To enhance human capital

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**

## Management Discussion and Analysis

kompetensi *human capital*, Perusahaan akan mengelola Akademi Pelayanan Teknik serta mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai *revenue assurance* (Revass), pengelolaan gardu distribusi, pengelolaan asesemen kabel yang lebih baik, hingga peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dengan transformasi bisnis berkelanjutan, Perusahaan dapat melakukan diferensiasi layanan dan meningkatkan pangsa pasar.

competencies, the Company manages Technical Service Academy and conducts trainings on revenue assurance (Revass), management of distribution substations, better cable management, as well as improvement in occupational health and safety (K3). With sustainable business transformation, the Company will be able to differentiate its services and to increase its market share.





# URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review



Pertumbuhan pelanggan *end-to-end* di tahun 2018 berdampak pada kenaikan pendapatan sebesar 22,2% dari Rp1.343,56 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp2.073,32 miliar.

End-to-end customer growth in 2018 resulted an increase in revenue of 22.2% from Rp1,343.56 billion in 2017 to Rp2,073.32 billion.

Pembahasan kinerja keuangan berikut ini disusun berdasarkan data-data keuangan dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Haleyora Power dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following financial performance review is based on financial data from the Consolidated Financial Statements of PT Haleyora Power and Subsidiaries for the years ended December 31, 2018 and 2017 audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) with unqualified opinion, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

## LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

### Pendapatan

Pada tahun 2018, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp2.073,32 miliar, meningkat 22,2% dari Rp1.343,56 miliar pada tahun 2017. Pertumbuhan pendapatan terutama disebabkan pertumbuhan jumlah pelanggan baru *end to end* sebanyak 15 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN yang terdiri dari 73 Unit Layanan Pelanggan (ULP).

## CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL PERFORMANCE

### Revenue

In 2018, the Company recorded revenue of Rp2,073.32 billion, an increase of 22.2% from Rp1,343.56 billion in 2017. The revenue growth was mainly due to the growth in the number of new end-to-end customers by 15 PLN Customer Service Provider Units (UP3) consisting of 73 Customer Service Units (ULP).

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

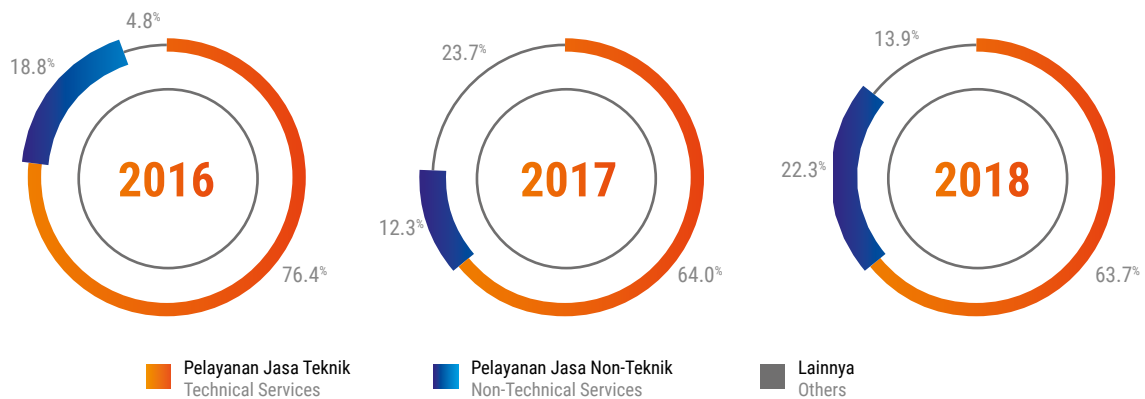
PENDAPATAN	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Revenues
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Operasi dan pemeliharaan						Operation and maintenance services
Pelayanan jasa teknik	1,026,391	1,086,278	1,321,188	234,910	21.6%	Technical services
Pelayanan jasa non-teknik	252,632	208,047	463,358	255,311	122.7%	Non-technical services
Lainnya	64,537	401,901	288,772	(113,129)	-28.1%	Others
<b>JUMLAH</b>	<b>1,343,560</b>	<b>1,696,226</b>	<b>2,073,318</b>	<b>377,092</b>	<b>22.2%</b>	<b>TOTAL</b>

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Financial Performance Review

Pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan Operasi dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) dan pendapatan lainnya. Pendapatan O&M mencakup pekerjaan Pelayanan Jasa Teknik dan Pelayanan Jasa Non Teknik. Pelayanan Jasa Teknik menjadi kontributor terbesar dari struktur pendapatan Perusahaan. Komposisi pendapatan Perusahaan ditunjukkan dalam diagram berikut:

The Company's revenue consists of Operation and Maintenance (O&M) income and other income. O&M income includes Technical Services and Non-Technical Services. Technical Services is the largest contributor to the Company's revenue. Composition of the Company's revenue is shown in the following diagram:



### Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan (BPP) mencapai Rp1.822,00 miliar, naik 22,5% dibandingkan Rp1.487,31 miliar pada tahun 2017. Peningkatan BPP terutama disebabkan adanya penambahan proyek-proyek baru yang berdampak pada:

- Biaya subkontraktor naik 172,1% dari Rp7,08 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp19,27 miliar.
- Denda operasional naik 71,7% dari Rp14,26 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp24,49 miliar.
- Jasa tenaga kerja langsung naik 26,5% dari Rp1.185,36 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp1.498,98 miliar.

### Cost of Revenue

Cost of Revenue (BPP) reached Rp1,822.00 billion, increased by 22.5% compared to Rp1,487.31 billion in 2017. The increase in BPP was mainly due to new projects that affected:

- Cost of subcontractor up 172.1% from Rp7.08 billion in 2017 to Rp19.27 billion.
- Work penalty up 71.7% from Rp14.26 billion in 2017 to Rp24.49 billion.
- Cost of direct labor up 26.5% from Rp1,185.36 billion in 2017 to Rp1,498.98 billion.



**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

BEBAN POKOK PENDAPATAN	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Cost of Revenues
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Jasa tenaga kerja langsung	941,029	1,185,362	1,498,983	313,621	26.5%	Direct labour
Kendaraan operasional	91,772	123,485	114,473	(9,012)	-7.3%	Operational vehicles
Pemakaian alat kerja dan material	44,737	62,772	57,775	(4,997)	-8.0%	Labour and material usage tool
Imbalan kerja	35,913	37,032	31,386	(5,646)	-15.2%	Employee benefits
Denda operasional	20,877	14,265	24,494	10,229	71.7%	Operational penalty
Subkontraktor	6,275	7,076	19,256	12,180	172.1%	Subcontractor
Pemeliharaan dan penunjang operasional	29,143	8,235	3,082	(5,153)	-62.6%	Maintenance and overhead
Lainnya	2,034	49,087	72,550	23,463	47.8%	Others
<b>JUMLAH</b>	<b>1,171,780</b>	<b>1,487,314</b>	<b>1,821,999</b>	<b>334,685</b>	<b>22.5%</b>	<b>TOTAL</b>

### Laba Kotor

Pertumbuhan pendapatan Perusahaan pada tahun 2018 menghasilkan laba kotor sebesar Rp251,32 miliar, naik 20,3% dibandingkan Rp208,91 miliar pada tahun 2017.

### Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi mencapai Rp51,30 miliar, naik 4,5% dibandingkan Rp49,10 miliar pada tahun 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penyusutan naik 97,8% dari Rp3,94 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp7,80 miliar seiring dengan bertambahnya aset tetap.
- Pemeliharaan yang terdiri dari beban pemeliharaan material dan jasa borong yang terjadi di kantor pusat seperti pemakaian material peralatan kerja dan material inventaris kantor, renovasi/perbaikan sarana dan prasarana kantor pusat, jasa borong kendaraan dan lainnya naik 22,5% dari Rp3,68 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp5,15 miliar.
- Honorarium naik 22,5% dari Rp13,35 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp16,36 miliar

Sebaliknya, terjadi penurunan yang signifikan pada biaya kepegawaian yang turun sebesar Rp5,45 miliar atau 20,5% dari Rp26,59 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp21,14 miliar terutama disebabkan reklasifikasi pos biaya kepegawaian PT Haleyora Powerindo (HPL) ke dalam pos jasa tenaga kerja langsung.

### Gross Profit

The Company's revenue growth in 2018 generated a gross profit of Rp251.32 billion, increased by 20.3% compared to Rp208.91 billion in 2017.

### General and Administration Expenses

General and administration expenses amounted to Rp51.30 billion, up 4.5% compared to Rp49.10 billion in 2017. The increase was mainly due to:

- Depreciation rose by 97.8% from Rp3.94 billion in 2017 to Rp7.80 billion in line with the rising fixed assets.
- Maintenance consisting of material maintenance and stocking services incurred at the head office, such as the use of work equipment and office inventory, renovation/repair of head office facilities and infrastructure, vehicle stocking and other services increased by 22.5% from Rp3.68 billion in 2017 to Rp5.15 billion.
- Honorarium grew by 22.5% from Rp13.35 billion in 2017 to Rp16.36 billion.

On the contrary, there was a significant decrease in employee expenses which decreased by Rp5.45 billion or 20.5% from Rp26.59 billion in 2017 to Rp21.14 billion, mainly due to reclassification of PT Haleyora Powerindo (HPL)'s employee expenses to direct labor account.

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		General and Administration Expenses
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Kepegawaian	22,414	26,588	21,142	(5,446)	-20.5%	Personnel
Honorarium	11,587	13,351	16,358	3,007	22.5%	Honorarium
Pemeliharaan	3,653	3,679	5,151	1,472	40.0%	Maintenance
Imbalan kerja	360	314	68	(246)	-78.3%	Employee benefits
Penyusutan		3,942	7,797	3,855	97.8%	Depreciation
Lainnya	4,471	1,223	789	(434)	-35.5%	Others
<b>JUMLAH</b>	<b>42,485</b>	<b>49,097</b>	<b>51,305</b>	<b>2,208</b>	<b>4.5%</b>	<b>TOTAL</b>

In million Rupiah

### Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Pendapatan (beban) lain-lain yang merupakan pendapatan dan beban di luar usaha naik 1.032,8% dari negatif Rp469 juta pada tahun 2017 menjadi negatif Rp5,31 miliar terutama karena pendapatan (beban) lain-lain-bersih naik 43,9% dari negatif Rp13,75 miliar pada tahun 2017 menjadi negatif Rp19,80 miliar yang disebabkan oleh kenaikan signifikan pada beban pajak dan rugi percepatan penghapusan aset.

Sebaliknya, bagian laba bersih entitas asosiasi naik 23,3% dari Rp5,73 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp7,07 miliar. Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan laba PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI).

### Other Income (Expenses)

Other income (expenses) which are non-operating income and expenses rose by 1,032.8% from net non-operating expenses (negative balance) of Rp469 million in 2017 to Rp5.31 billion mainly due to net other expenses (negative balance) up 43.9% from Rp13.75 billion in 2017 to Rp19.80 billion due to a significant increase in tax expenses and loss of accelerated asset write off.

Conversely, net income portion of associated entities increased by 23.3% from Rp5.73 billion in 2017 to Rp7.07 billion which represented realized net income of PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI).

Dalam jutaan Rupiah

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Other Revenue (Expense)
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Penghasilan keuangan	8,290	7,765	7,475	(290)	-3.7%	Financial income
Bagian laba bersih entitas asosiasi	5,639	5,733	7,071	1,338	23.3%	Share of profit in associate
Beban keuangan	(162)	(214)	(63)	151	-70.6%	Financial costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(17,462)	(13,753)	(19,796)	(6,043)	43.9%	Other revenue (expense) - net
<b>JUMLAH</b>	<b>(3,695)</b>	<b>(469)</b>	<b>(5,313)</b>	<b>(4,844)</b>	<b>1,032.8%</b>	<b>TOTAL</b>

In million Rupiah

### Laba sebelum Pajak

Perusahaan mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp194,70 miliar, naik 22,2% dari Rp159,35 miliar pada tahun 2017.

### Beban Pajak

Beban pajak tahun berjalan sebesar Rp56,02 miliar, naik 51,9% dibandingkan Rp36,87 miliar pada tahun sebelumnya.

### Income before Tax

The Company recorded income before tax of Rp194.70 billion, up 22.2% from Rp159.35 billion in 2017.

### Tax Expenses

Tax expenses for the year amounted to Rp56.02 billion, increased by 51.9% compared to Rp36.87 billion in the previous year.

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
Financial Performance Review

**Laba Tahun Berjalan**

Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp138,68 miliar, meningkat 13,2% dari Rp122,47 miliar pada tahun 2017.

**Income for the Year**

Net income for the year amounted to Rp138.68 billion, grew by 13.2% from Rp122.47 billion in 2017.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Income for the Year</b>
Distribusikan kepada:				Attributable to:
Pemilik entitas induk	93,683	117,145	135,254	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	7,971	5,326	3,427	Non-controlling interests
<b>JUMLAH</b>	<b>101,654</b>	<b>122,471</b>	<b>138,681</b>	<b>TOTAL</b>

**Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan**

Penghasilan komprehensif lain berasal dari pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi yaitu pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan beban pajak terkait. Pada tahun 2018 Perusahaan mencatat rugi komprehensif lain sebesar Rp5,43 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 Perusahaan memperoleh penghasilan komprehensif lain sebesar Rp9,04 miliar.

**Other Comprehensive Income for the Year**

Other comprehensive income comes from items that are not classified as profit or loss, including re-measurement of defined benefit plan and the related tax expenses. In 2018, the Company recorded other comprehensive loss of Rp5.43 billion. Whereas in 2017, the Company obtained other comprehensive income of Rp9.04 billion.

**Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan**

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp133,35 miliar, naik 1,3% dari Rp131,51 miliar pada tahun sebelumnya.

**Total of Comprehensive Income for the Year**

Total comprehensive income for the year amounted to Rp133.35 billion, up 1.3% from Rp131.51 billion in the previous year.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Comprehensive Income for the Year</b>
Distribusikan kepada:				Attributable to:
Pemilik entitas induk	152,186	126,183	129,827	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	7,971	5,326	3,427	Non-controlling interests
<b>JUMLAH</b>	<b>160,157</b>	<b>131,509</b>	<b>133,254</b>	<b>TOTAL</b>



## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

### Aset

Pada akhir tahun 2018, jumlah aset Perusahaan tercatat sebesar Rp824,91 miliar, naik 14,8% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2017 sebesar Rp718,49 miliar. Kenaikan aset terutama didorong oleh aset lancar yang bertambah Rp78,10 miliar atau naik 12,2% dari Rp637,77 miliar pada akhir tahun 2017 menjadi Rp715,87 miliar pada periode yang sama tahun 2018. Sedangkan aset tidak lancar bertambah sebesar Rp28,31 miliar atau naik 35,1% dari Rp718,49 miliar pada tahun 2017.

## CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

### Assets

At end of 2018, total assets of the Company were recorded at Rp 824.91 billion, up 14.8% compared to the position at end of 2017 which amounted to Rp718.49 billion. The increase in assets was mainly driven by current assets that grew by Rp78.10 billion or 12.2% from Rp637.77 billion at end of 2017 to Rp715.87 billion at end of 2018. Meanwhile non-current assets rose by Rp28.31 billion or 35.1% from Rp 718.49 billion at end of 2017.

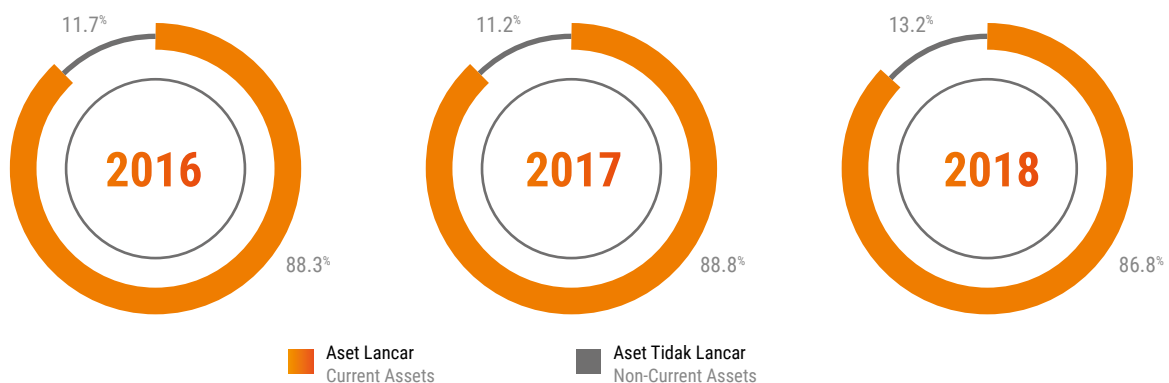
Dalam jutaan Rupiah

ASET	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Asset
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Aset lancar	484,557	637,767	715,865	78,098	12.2%	Current assets
Aset tidak lancar	64,121	80,726	109,041	28,315	35.1%	Non-current assets
<b>JUMLAH</b>	<b>548,678</b>	<b>718,493</b>	<b>824,906</b>	<b>106,413</b>	<b>14.8%</b>	<b>TOTAL</b>

In million Rupiah

Seiring dengan pertumbuhan Perusahaan, jumlah aset Perusahaan terus meningkat. Komposisi aset lancar dan aset tidak lancar dalam tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam diagram berikut:

As the Company grows, its assets continue to increase. The composition of current assets and non-current assets in the last three years is shown in the following diagram:



### Aset Lancar

Aset lancar sebesar Rp715,86 miliar, naik 12,2% dibandingkan Rp637,77 miliar pada tahun 2017. Kenaikan aset lancar terutama karena kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp76,80

### Current Assets

Current assets amounted to Rp715.86 billion, up 12.2% compared to Rp637.77 billion at end of 2017. The increase in current assets was mainly due to a growth in cash and cash

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
Financial Performance Review

miliar. Selain itu, piutang lain-lain naik Rp10,14 miliar, rekening bank yang dibatasi penggunaannya naik Rp4,92 miliar, dan biaya dibayar di muka naik Rp3,38 miliar. Sebaliknya, piutang usaha turun signifikan sebesar Rp13,68 miliar.

equivalents of Rp76.80 billion. In addition, other receivables, restricted bank accounts and prepaid expenses rose by Rp10.14 billion, Rp4.92 billion and Rp 3.38 billion, respectively. Conversely, trade receivables dropped significantly by Rp13.68 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Other Revenue (Expense)
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Kas dan setara kas	266,115	306,750	383,545	76,795	25.0%	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	54,716	50,647	55,569	4,922	9.7%	Restricted cash in banks
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi	128,142	232,167	218,482	(13,685)	-5.9%	Related parties
Pihak ketiga	441	42	20	(22)	-52.4%	Third parties
Piutang lain-lain	1,470	4,206	14,344	10,138	241.0%	Other receivables
Pajak dibayar di muka	26,704	40,045	36,615	(3,430)	-8.6%	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	6,969	3,910	7,290	3,380	86.4%	Prepaid expenses and advances
<b>JUMLAH</b>	<b>484,557</b>	<b>637,767</b>	<b>715,865</b>	<b>78,098</b>	<b>12.2%</b>	<b>TOTAL</b>

- Posisi kas dan setara kas pada tahun 2018 naik 25,0% dari Rp306,75 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp383,55 miliar. Peningkatan saldo kas dan setara kas terutama disebabkan oleh naiknya kas dari Rp766 juta pada tahun 2017 menjadi Rp958 juta dan nilai saldo deposito berjangka pihak berelasi (Bank Mandiri, BNI, dan BRI) dari Rp17,50 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp142,50 miliar. Kenaikan saldo kas dan bank berkorelasi dengan membaiknya tingkat kolektabilitas piutang (*collection period/CoP*) pada tahun 2018 yaitu menjadi 27 hari (HP) dan 55 hari (HPI).

Dari penempatan deposito berjangka dengan jangka waktu 1-3 bulan, Perusahaan memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp7,47 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 pendapatan bunga sebesar Rp7,76 miliar.

- Rekening bank yang dibatasi penggunaannya naik 9,7% dari Rp50,65 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp55,57 miliar. Akun ini terdiri dari rekening bank yang dijadikan sebagai jaminan (*cash collateral*) atas bank garansi yang diterbitkan oleh pihak bank untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan pelanggan sebesar Rp2,81 miliar, dan rekening tabungan bisnis yang merupakan rekening penyimpanan atas dana untuk pembelian saham pada entitas asosiasi sebesar Rp52,76 miliar.

- Cash and cash equivalents in 2018 increased by 25.0% from Rp306.75 billion at end of 2017 to Rp383.55 billion. The increase in cash and cash equivalents was mainly due to a growth in cash from Rp766 million at end of 2017 to Rp958 million and in time deposits placed in related parties (Bank Mandiri, BNI, and BRI) from Rp17.50 billion at end of 2017 to Rp142.50 billion. The increase in cash and bank balances was correlated with the improved collectability (*collection period/CoP*) in 2018 to 27 days (HP) and 55 days (HPI).

From the placement of time deposits with a period of 1-3 months, the Company generated interest income of Rp7.47 billion. Whereas in 2017 interest income was Rp7.76 billion.

- Restricted cash in banks grew by 9.7% from Rp50.65 billion at end of 2017 to Rp55.57 billion. This account consists of cash collateral for bank guarantee issued by the bank to guarantee certain work for customers amounting to Rp2.81 billion and business saving account for purchase of shares in associated entities amounting to Rp52.76 billion.

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Financial Performance Review

- Piutang usaha turun 5,9% dari Rp218,50 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp232,21 miliar. Penurunan piutang usaha terutama disebabkan membaiknya tingkat kolektabilitas piutang sehingga jumlah piutang yang lewat jatuh tempo dapat berkurang hingga 39,2% dari Rp53,10 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp32,30 miliar.
- Piutang lain-lain naik signifikan sebesar 241,0% dari Rp4,32 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp14,34 miliar. Kenaikan akun ini terutama disebabkan oleh adanya piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp9,61 miliar yang merupakan piutang atas restitusi PPN yang telah dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2019.
- Pajak dibayar di muka turun 8,6% dari Rp40,04 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp36,61 miliar.
- Biaya dibayar di muka dan uang muka naik 86,4% dari Rp3,91 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp7,29 miliar terutama karena kenaikan biaya sewa kantor dari Rp2,15 miliar menjadi Rp5,62 miliar.
- Trade receivables decreased by 5.9% from Rp218.50 billion at end of 2017 to Rp232.21 billion. The decrease in trade receivables was mainly due to improved collectability of accounts receivable so that the overdue receivables could be reduced by 39.2% from Rp53.10 billion at end of 2017 to Rp32.30 billion.
- Other receivables rose significantly by 241.0% from Rp4.32 billion at end of 2017 to Rp14.34 billion. The increase in this account was mainly due to other receivables from third parties amounting to Rp9.61 billion, representing VAT refunds that had been received on January 14, 2019.
- Prepaid taxes fell by 8.6% from Rp40.04 billion at end of 2017 to Rp36.61 billion.
- Prepaid expenses and advances rose by 86.4% from Rp3.91 billion at end of 2017 to Rp7.29 billion, mainly due to rising office rental fees from Rp2.15 billion to Rp5.62 billion.

### Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar sebesar Rp109,04 miliar, naik 35,1% dibandingkan Rp80,73 miliar pada tahun 2017. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan kenaikan pada aset tetap sebesar Rp16,36 miliar, investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp4,78 miliar, dan aset pajak tangguhan sebesar Rp6,93 miliar.

### Non-Current Assets

Non-current assets amounted to Rp109.04 billion, up 35.1% compared to Rp80.73 billion at end of 2017. The growth in non-current assets was mainly due to increases in fixed assets, investments in associated entities and deferred tax assets amounting to Rp16.36 billion, Rp4.78 billion and Rp6.93 billion, respectively.

Dalam jutaan Rupiah

ASET TIDAK LANCAR	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Non-Current Assets
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Aset tetap	11,206	14,059	30,421	16,362	116.4%	Property and equipment
Aset tak berwujud	613	263	7	(256)	-97.3%	Intangible assets
Investasi pada entitas asosiasi	38,093	42,698	47,476	4,778	11.2%	Investment in associate
Piutang lain-lain	80	80	-	(80)	-100.0%	Other receivables
Beban tangguhan	-	-	581	581		Deferred charges
Aset pajak tangguhan	14,129	23,626	30,556	6,930	29.3%	Deferred tax assets
<b>JUMLAH</b>	<b>64,121</b>	<b>80,726</b>	<b>109,041</b>	<b>28,315</b>	<b>35.1%</b>	<b>TOTAL</b>

In million Rupiah

- Aset tetap naik signifikan 116,4% dari Rp14,06 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp30,42 miliar. Kenaikan aset tetap berasal dari pengadaan perlengkapan umum (*general equipment*) pada tahun 2018 untuk mendukung peningkatan kegiatan usaha yang dicatat berdasarkan biaya perolehan sebesar Rp17,96 miliar.
- Investasi pada entitas asosiasi yang merupakan investasi Perusahaan pada PT EPI naik 11,2% dari Rp42,70 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp47,48 miliar.
- Fixed assets rose significantly by 116.4% from Rp14.06 billion at end of 2017 to Rp30.42 billion. The increase in fixed assets came from the procurement of general equipment in 2018 to support the increasing business activities which were recorded at acquisition cost of Rp17.96 billion.
- Investments in associated entities which represent the Company's investments in PT EPI grew by 11.2% from Rp42.70 billion at end of 2017 to Rp47.48 billion.

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
 Financial Performance Review

- Aset pajak tangguhan naik 29,3% dari Rp23,63 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp30,56 miliar karena penambahan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp6,93 miliar.
- Deferred tax assets increased by 29.3% from Rp23.63 billion at end of 2017 to Rp30.56 billion due to additional employee benefits liabilities amounting to Rp6.93 billion.

**Liabilitas**

Pada akhir tahun 2018, jumlah liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp211,60 miliar, naik 17,6% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2017 sebesar Rp179,86 miliar. Kenaikan liabilitas terutama didorong oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp27,65 miliar.

**Liabilities**

At end of 2018, total liabilities of the Company amounted to Rp211.60 billion, up 17.6% compared to the position at end of 2017 which was Rp179.86 billion. The growth in liabilities was mainly driven by an increase in non-current liabilities of Rp27.65 billion.

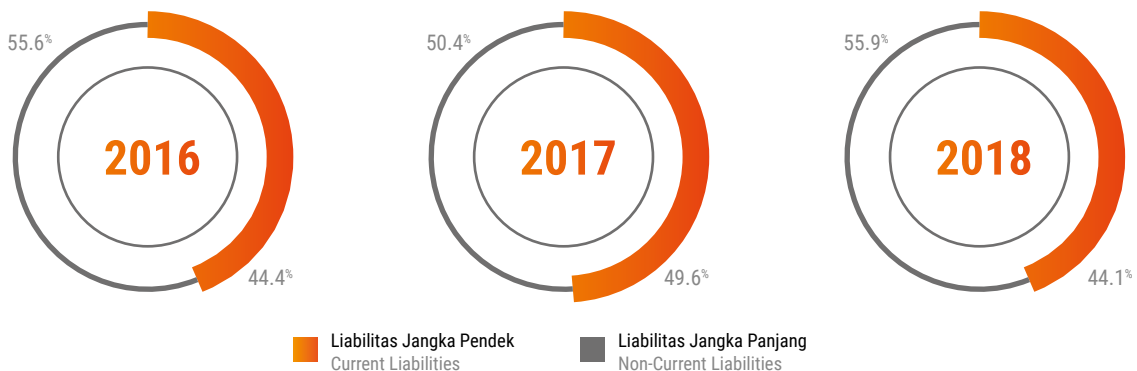
Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

LIABILITAS	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Liabilitas jangka pendek	62,655	89,129	93,214	4,085	4.6%	Short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang	78,479	90,735	118,382	27,647	30.5%	Long-term liabilities
<b>JUMLAH</b>	<b>141,134</b>	<b>179,864</b>	<b>211,596</b>	<b>31,732</b>	<b>17.6%</b>	<b>TOTAL</b>

Komposisi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam diagram berikut:

The composition of current and non-current liabilities in the past three years is shown in the following diagram:



**Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas jangka pendek sebesar Rp93,21 miliar, naik 4,6% dibandingkan Rp89,13 miliar pada tahun 2017 terutama didorong oleh kenaikan biaya masih harus dibayar sebesar Rp8,95 miliar dan kenaikan utang lain-lain sebesar Rp12,11 miliar.

**Current Liabilities**

Current liabilities amounted to Rp93.21 billion, grew by 4.6% compared to Rp89.13 billion at end of 2017, mainly driven by increases in accrued expenses by Rp8.95 billion and in other liabilities by Rp12.11 billion.

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

LIABILITAS JANGKA PENDEK	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Current Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	943	3,283	1,492	(1,791)	-54.6%	Related parties
Pihak ketiga	15,480	30,512	18,832	(11,680)	-38.3%	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak berelasi	2,290	8,575	13,343	4,768	55.6%	Related parties
Pihak ketiga	4,929	1,340	8,686	7,346	548.2%	Third parties
Utang pajak	2,753	9,674	6,167	(3,507)	-36.3%	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	36,260	35,745	44,694	8,949	25.0%	Accrued expenses
<b>JUMLAH</b>	<b>62,655</b>	<b>89,129</b>	<b>93,214</b>	<b>4,085</b>	<b>4.6%</b>	<b>TOTAL</b>

- Utang usaha yang merupakan utang sehubungan dengan pembelian/sewa barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan dan entitas anak terdiri dari utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga. Utang usaha pihak berelasi turun 54,6% dari Rp3,28 miliar di tahun 2017 menjadi Rp1,49 miliar terutama karena penurunan utang usaha kepada PLN dari Rp3,19 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp1,35 miliar. Sedangkan utang usaha pihak ketiga turun 38,3% dari 30,51 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp18,83 miliar.
- Utang lain-lain yang terdiri dari utang kepada pihak berelasi dan pihak ketiga naik 122,2% dari Rp9,91 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp22,03 miliar terutama karena kenaikan utang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank BNI dari Rp4,36 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp12,88 miliar dan utang lain-lain pihak ketiga dari Rp1,34 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp8,69 miliar.
- Biaya masih harus dibayar berupa bonus dan insentif kerja, gaji dan tunjangan, dan biaya lainnya naik 25,0% dari Rp35,75 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp44,69 miliar seiring dengan peningkatan aktivitas operasional Perusahaan.
- Trade payables are related to purchase/lease of goods and services to support operations of the Company and its subsidiaries, consisting of payables to related parties and third parties. Related party liabilities fell by 54.6% from Rp3.28 billion at end of 2017 to Rp 1.49 billion, mainly due to a decrease in trade payables to PLN from Rp3.19 billion at end of 2017 to Rp1.35 billion. While trade payables to third-parties decreased by 38.3% from Rp30.51 billion at end of 2017 to Rp18.83 billion.
- Other payables to related parties and third parties rose by 122.2% from Rp9.91 billion at end of 2017 to Rp22.03 billion, mainly due to an increase in Bank BNI Pension Fund (DPLK) liabilities from Rp4.36 billion at end of 2017 to Rp12.88 billion and other payables to third parties from Rp1.34 billion at end of 2017 to Rp8.69 billion.
- Accrued expenses representing bonuses and incentives, salaries and benefits and other expenses increased by 25.0% from Rp35.75 billion at end of 2017 to Rp44.69 billion, in line with the Company's increasing operations.

### Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang sebesar Rp118,38 miliar, naik 30,5% dibandingkan Rp90,74 miliar pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos liabilitas imbalan kerja. Perusahaan memberikan imbalan pascakerja tanpa pendanaan berupa uang pesangon kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Penyisihan imbalan pascakerja dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen dengan menggunakan

### Non-Current Liabilities

Non-current liabilities amounted to Rp118.38 billion, up 30.5% compared to Rp90.74 billion at end of 2017, mainly due to an increase in employee benefits liabilities. The Company provides post-employment benefits without funding in the form of severance payments to eligible employees in accordance with the Company's regulations based on Labor Law No. 13/2003. Allowance for post-employment benefits is recorded based on independent actuary calculation using Projected Unit Credit method. The post-employment benefits

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
Financial Performance Review

metode *Projected Unit Credit*. Kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan tahun 2018 adalah sebesar Rp118,38 miliar.

liabilities recognized in the 2018 financial statements were Rp118.38 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

LIABILITAS JANGKA PANJANG	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Non-Current Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Liabilitas imbalan kerja	78,411	90,667	118,382	27,715	30.6%	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain - pihak berelasi	68	68	0	(68)	-100.0%	Other payables - related parties
<b>JUMLAH</b>	<b>78,479</b>	<b>90,735</b>	<b>118,382</b>	<b>27,647</b>	<b>30.5%</b>	<b>TOTAL</b>

**Ekuitas**

Ekuitas Perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp613,31 miliar, meningkat 13,9% dibandingkan Rp538,63 miliar pada tahun 2017. Peningkatan ekuitas terutama dipengaruhi oleh peningkatan penghasilan komprehensif lain, saldo laba dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak PT HPI.

**Equity**

The Company's equity at end of 2018 amounted to Rp613.31 billion, an increase of 13.9% compared to Rp538.63 billion at end of 2017. The increase in equity was mainly driven by the growing other comprehensive income, retained earnings and non-controlling interests in the net assets of a subsidiary, PT HPI.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

EKUITAS	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Equity
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Modal saham	100,000	100,000	100,000	-	0.0%	Capital stock
Penghasilan komprehensif	53,225	62,263	56,836	(5,427)	-8.7%	Comprehensif income
Tambahan modal disetor	315	315	315	-	0.0%	Additional paid-in capital
Saldo laba	238,082	355,227	431,908	76,681	21.6%	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:						Equity attributable to:
Pemilik entitas induk	391,622	517,805	589,059	71,254	13.8%	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	15,922	20,824	24,251	3,427	16.5%	Non-controlling interests
<b>JUMLAH</b>	<b>407,544</b>	<b>538,629</b>	<b>613,310</b>	<b>74,681</b>	<b>13.9%</b>	<b>TOTAL</b>

**Laporan Arus Kas**

Perusahaan memperoleh kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp229,58 miliar, naik dari Rp83,95 miliar pada tahun 2017. Kas diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.089,97 miliar. Selain itu, terdapat penerimaan bunga sebesar Rp7,48 miliar. Kas dari hasil operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp1.520,04 miliar dan pembayara barang dan jasa kepada pemasok sebesar Rp340,35 miliar. Selain itu, terdapat pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp63,86 miliar dan pembayaran imbalan

**Statements Of Cash Flows**

The Company generated net cash from operating activities of Rp229.58 billion, up from Rp83.95 billion in 2017. Cash from operating activities consisted of cash receipts from customers of Rp2,089.97 billion and interest income of Rp7.48 billion. Cash from operating results was mainly used for cash payments to employees, suppliers of goods and services, income tax, and post-employment benefits amounting to

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Financial Performance Review

pascakerja sebesar Rp10,97 miliar. Dengan demikian, pada akhir tahun 2018, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp162,16 miliar.

Kas diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp2,29 miliar yang berasal dari penerimaan dividen dari entitas asosiasi. Sedangkan kas digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk membiayai perolehan aset tetap sebesar Rp24,16 miliar dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4,92 miliar. Dengan demikian, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar negatif Rp26,79 miliar.

Dari sisi pendanaan, berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari saldo laba tahun buku 2017 sebesar Rp58,57 miliar yang telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2018 dan 22 November 2018 kepada PT PLN (Persero) dan YPK PLN.

Dengan posisi kas dan setara kas di awal tahun sebesar Rp306,75 miliar dan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp76,79 miliar, maka posisi kas dan setara kas di akhir tahun adalah sebesar Rp383,55 miliar.

Rp1,520.04 billion, Rp340.35 billion, Rp63.86 billion and Rp10.97 billion, respectively. Hence, at end of 2018, net cash generated from operating activities was Rp162.16 billion.

Cash generated from investing activities amounting to Rp2.29 billion represented dividends received from associated entities. While cash used for investing activities was primarily to acquire fixed assets of Rp24.16 billion and placement of restricted cash in banks of Rp4.92 billion. Hence, net cash used for investing activities amounted to Rp26.79 billion.

In terms of financing, based on Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), shareholders approved distribution of dividends from retained earnings at end of 2017 amounting to Rp58.57 billion, which was paid on November 1, 2018 and November 22, 2018 to PT PLN (Persero) and YPK PLN.

With the balance of cash and cash equivalent at the beginning of the year amounting to Rp306.75 billion and an increase in cash and cash equivalents of Rp76.79 billion, the balance of cash and cash equivalent at end of the year amounted to Rp383.55 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

ARUS KAS	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change		Cash Flow
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Arus kas dari aktivitas operasi	79,974	42,445	162,156	119,711	282.0%	Cash flow from operating activities
Arus kas untuk aktivitas investasi	(9,299)	(1,598)	(26,788)	(25,190)	1,576.3%	Cash flows from investment activities
Arus kas untuk aktivitas pendanaan	-	(212)	(58,573)	(58,361)	-	Cash flows from financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	70,675	40,635	76,795	36,160	89.0%	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	195,440	266,115	306,750	40,635	15.3%	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	266,115	306,750	383,545	76,795	25.0%	Cash and cash equivalents at end of year



**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
 Financial Performance Review

**Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektabilitas Piutang, dan Rasio Keuangan Lainnya**

**Kemampuan Membayar Utang**

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya ditunjukkan melalui analisis rasio solvabilitas dan likuiditas.

**Rasio Solvabilitas**

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari rasio utang terhadap jumlah aset (*debt to total assets ratio/DAR*) dan rasio utang terhadap jumlah ekuitas (*debt to total equity ratio/DER*). Rasio solvabilitas Perusahaan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam jutaan Rupiah	In million Rupiah				
RASIO SOLVABILITAS	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change	Solvability Ratios
Rasio utang terhadap aset	0.2572	0.2503	0.2565	2.5%	Debt to assets ratio (DAR)
Rasio utang terhadap ekuitas	0.3463	0.3339	0.3450	3.3%	Debt to equity ratio (DER)

Nilai rasio utang terhadap aset tahun 2018 sebesar 25,65%, meningkat 2,5% dibandingkan 25,03% pada tahun 2017. Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 34,50%, meningkat 3,3% dibandingkan tahun 2017 sebesar 33,39%. Walaupun terjadi peningkatan pada kedua nilai rasio tersebut, Perusahaan masih memiliki kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Kenaikan solvabilitas Perusahaan pada tahun 2018 merupakan dampak langsung dari naiknya saldo liabilitas yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan di masa mendatang. Perusahaan menjaga rasio solvabilitas dengan menekan utang usaha yang turun 38,3% pada tahun 2018. Hingga saat ini, Perusahaan masih memiliki kemampuan memenuhi belanja modal dari sumber keuangan internal untuk mendukung pengembangan usaha di masa depan.

**Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Tingkat Likuiditas Perusahaan dapat dilihat dari rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio lancar (*current ratio*). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi

**Solvency, Collectability And Other Financial Ratios**

**Solvency**

The Company's ability to meet its obligations is reflected on solvency and liquidity ratios.

**Solvency Ratios**

Solvency Ratios are used to measure the Company's ability to pay its non-current and total debts. These ratios are debt to total assets ratio (DAR) and debt to total equity ratio (DER). The Company's solvency ratios in the last 3 years are as follows:

Debt to total assets ratio at end of 2018 was 25.65%, an increase of 2.5% compared to 25.03% at end of 2017. While debt to total equity ratio was 34.50%, an increase of 3.3% compared to 33.39% at end of 2017. Although both ratios increased, the Company still had the ability to pay all of its debts.

The increase in the Company's solvency in 2018 was a direct impact of the increasing liabilities undertaken to support business growth that would have a positive impact on the future revenue growth. The Company maintains its solvency ratios by reducing trade payables which decreased by 38.3% in 2018. To date, the Company still has the ability to meet capital expenditure from internal financial sources in order to support its future business development.

**Liquidity Ratios**

Liquidity ratios are used to measure the Company's ability to settle its current debts. The Company's Liquidity Level is reflected on cash ratio, quick ratio and current ratio. The higher the value of these ratios indicates that the Company is

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Financial Performance Review

kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Dalam hal ini, sebagai penyedia jasa operasional, Perusahaan tidak memiliki persediaan sehingga nilai rasio cepat sama dengan nilai rasio lancar.

able to meet its maturing debts. In this case, as an operational service provider, the Company does not have inventory so the value of quick ratio is equal to the value of current ratio.

Dalam jutaan Rupiah

RASIO LIKUIDITAS	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change	Liquidity Ratios
Rasio kas (kas dan setara kas/ liabilitas jangka pendek)	4.25	3.44	4.11	19.6%	Cash ratio (cash and cash equivalents/short-term liabilities)
Rasio cepat (aset lancar- persediaan/liabilitas jangka pendek)	7.73	7.16	7.68	7.3%	Quick ratio (current assets- inventory/short-term liabilities)
Rasio lancar (aset lancar/ liabilitas jangka pendek)	7.73	7.16	7.68	7.3%	Current ratio (current assets/short-term liabilities)

In million Rupiah

Nilai rasio kas tahun 2018 sebesar 4,11, meningkat 19,6% dibandingkan 3,44 pada tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kolektabilitas piutang (*collection period/CoP*) yang membaik sehingga kas dan setara kas Perusahaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 25,0% atau setara Rp76,80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

The value of cash ratio at end of 2018 was 4.11, an increase of 19.6% compared to 3.44 at end of 2017. This was mainly due to improved collection period (CoP) so that the Company's cash and cash equivalents increased significantly by 25.0% or equivalent to Rp76.80 billion compared to the previous year.

Nilai rasio cepat tahun 2018 sebesar 7,68, meningkat 7,3% dibandingkan 7,16 pada tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan aset lancar sebesar 12,2% sedangkan liabilitas jangka pendek hanya naik 4,6% dari tahun sebelumnya.

The value of quick ratio at end of 2018 was 7.68, an increase of 7.3% compared to 7.16 at end of 2017. This was mainly due to growth in current assets of 12.2% while current liabilities only up 4.6% from the previous year.

### Kolektabilitas Piutang

Nilai periode penagihan piutang (CoP) pada tahun menunjukkan perbaikan yaitu 27 hari. Tetapi secara konsolidasi mencapai 40 hari karena CoP entitas anak (HPI) mencapai 55 hari. Hal ini disebabkan karena skema penagihan HPI berbeda dengan HP yang memiliki skema penugasan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 734.K/DIR/2013 yang memberikan kemudahan bagi HP dalam hal penagihan.

### Receivables Collectability

The value of receivables collection period (CoP) in the year improved to 27 days. However, on a consolidation basis, it reached 40 days because CoP of a subsidiary, HPI, reached 55 days. This was due to the fact that HPI's billing scheme is different from HP's assignment scheme based on Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 734.K/DIR/2013 which facilitates HP's billing.

PERIODE PENAGIHAN	2016	2017	2018	Collection Period
Hari	32	38	40	Days

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
 Financial Performance Review

**Rasio Profitabilitas**

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas atau disebut juga sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari tingkat pengembalian modal (*return on equity/ROE*), tingkat pengembalian aset (*return on assets/ROA*), tingkat pengembalian investasi (*return on investment/ROI*) dan rasio marjin laba (*profit margin ratio*).

Rasio Likuiditas	2016	2017	2018	PERUBAHAN Change	Liquidity Ratios
Tingkat pengembalian aset	18.53%	17.05%	16.81%	-1.4%	Return on assets (ROA)
Tingkat pengembalian modal	24.94%	22.74%	22.61%	-0.6%	Return on equity (ROE)
Tingkat pengembalian investasi	23.30%	22.73%	22.61%	-0.6%	Return on investment (ROI)
Rasio marjin laba	7.57%	7.22%	6.69%	-7.4%	Profit margin ratio

**Tingkat Pengembalian Aset**

Nilai tingkat pengembalian aset (ROA) pada tahun 2018 sebesar 16,81%, turun 1,4% dibandingkan 17,05% pada tahun 2017. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan aset Perusahaan belum dapat mengoptimalkan pertumbuhan laba Perusahaan.

**Tingkat Pengembalian Modal**

Tingkat pengembalian modal (ROE) pada tahun 2018 sebesar 22,61%, turun 0,6% dibandingkan 22,74% pada tahun 2017 karena kenaikan nilai aset bersih (ekuitas) yang sedikit lebih besar dari kenaikan laba bersih yang disebabkan adanya kebijakan penurunan tingkat marjin Perusahaan.

**Tingkat Pengembalian Investasi**

Tingkat pengembalian investasi (ROI) pada tahun 2018 sebesar 22,61%, turun 0,6% dibandingkan 22,73% pada tahun 2017 karena aset yang dimiliki Perusahaan belum optimal dalam menghasilkan laba, antara lain disebabkan oleh kontrak pekerjaan baru yang telah memiliki alat kerja tetapi belum memberikan kontribusi pendapatan yang optimal, serta faktor penurunan tingkat marjin kontrak-kontrak pekerjaan.

**Rasio Marjin Laba**

Rasio marjin laba Perusahaan pada tahun 2018 sebesar 6,69%, turun 7,4% dibandingkan 7,22% pada tahun 2017. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tingkat marjin Perusahaan pada setiap kontrak pekerjaan dari 20% menjadi ±15%.

**Profitability Ratios**

The Company's ability to generate profit is measured using profitability ratios. Profitability ratios consist of return on equity (ROE), return on assets (ROA), return on investments (ROI) and profit margin ratio.

**Return on Assets**

Return on assets (ROA) in 2018 was 16.81%, fell by 1.4% compared to 17.05% in 2017. This decline indicated that the growth of the Company's assets has not been able to optimize the Company's profit growth.

**Return on Equity**

Return on equity (ROE) in 2018 was 22.61%, down 0.6% compared to 22.74% in 2017 due to an increase in net asset (equity) value which was slightly higher than the increase in net income driven by a policy to lower the Company's margin.

**Return on Investments**

Return on investments (ROI) in 2018 was 22.61%, decreased by 0.6% compared to 22.73% in 2017 because the assets owned by the Company were not optimal in generating profits, partly due to new work contracts that already had tools equipment but not yet contributing to an optimal income, as well as the reduced margin of work contracts.

**Profit Margin Ratio**

The Company's profit margin ratio in 2018 was 6.69%, fell by 7.4% compared to 7.22% in 2017. This decrease was mainly influenced by the Company's reduced margin for each work contract from 20% to ±15%.

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

### Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

#### Struktur Permodalan

Perusahaan mengelola modal untuk memastikan kemampuan melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur permodalan Perusahaan terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2018, struktur modal yang dibiayai oleh liabilitas sebesar 25,7% atau Rp211,60 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari tahun 2017 dimana proporsi liabilitas Perusahaan sebesar 25,0% dari struktur modal atau Rp179,86 miliar. Adapun yang dibiayai ekuitas sebesar 74,3% atau Rp613,31 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 75,0% atau Rp718,49 miliar.

### Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

#### Capital Structure

The Company manages its capital to ensure its business continuity and compliance with capital adequacy ratio. The Company's capital structure consists of liabilities and equity. At end of 2018, the capital financed by liabilities was 25.7% or Rp211.60 billion. This amount was higher than at end of 2017 where the Company's liabilities portion was 25.0% of the capital structure or amounting to Rp179.86 billion. While the capital financed by equity amounted to 74.3% or Rp613.31 billion, lower than at end of 2017 which amounted to 75.0% or Rp718.49 billion.

STRUKTUR MODAL	2016	2017		2018		Capital Structure
	Rp juta Rp million	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	
Liabilitas	141,134	179,864	25.0%	211,596	25.7%	Liability
Liabilitas jangka pendek	62,655	89,129	12.4%	93,214	11.3%	Short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang	78,479	90,735	12.6%	118,382	14.4%	Long-term liabilities
Ekuitas	407,544	538,629	75.0%	613,310	74.3%	Equity
<b>Total liabilitas dan ekuitas</b>	<b>548,678</b>	<b>718,493</b>	<b>100.0%</b>	<b>824,906</b>	<b>100.0%</b>	<b>Total liabilities and equity</b>

#### Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital/WACC*) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah akan meminimalkan WACC sebab biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak.

Tetapi peningkatan utang akan meningkatkan biaya beban bunga yang berisiko mengurangi nilai Perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi yang optimal. Selain itu, Perusahaan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap rasio likuiditas karena semakin tinggi rasio likuiditas

#### Management Policy on Capital Structure

The Company strives to minimize its cost of capital so as to maximize the Company's value. Therefore, the Company's policy in seeking funding always takes into account financial risks that may arise in the future.

An optimal capital structure is achieved with a minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). The increased use of debt will minimize WACC because the cost of debt is cheaper than the cost of equity. In addition, the use of debt will also reduce taxable income; hence, reducing tax expenses.

However, an increase in debts will also increase interest costs that may reduce the Company's overall value. Therefore, the Company manages the use of debt and equity to reach an optimal condition. In addition, the Company always monitors its liquidity ratios because the higher liquidity ratio

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
 Financial Performance Review

maka struktur modal akan optimal. Rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

**Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal**

**Tujuan Ikatan, Pihak yang Berikatan, Sumber Dana, dan Mata Uang**

Perusahaan melakukan sejumlah perikatan material yang bertujuan untuk investasi barang modal, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga. Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan investasi alat kerja untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan sebesar Rp24,16 miliar, meningkat 255,5% dari Rp6,79 miliar pada tahun sebelumnya. Ikatan material untuk investasi barang modal pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<b>TUJUAN PERIKATAN</b> The Objectives of Commitments	<b>PIHAK YANG BERIKATAN</b> Binding Parties	<b>BENTUK INVESTASI</b> Form of Investment	<b>SUMBER DANA</b> Source of Fund	<b>DENOMINASI MATA UANG</b> Currency
Mendukung Kegiatan Operasional Perusahaan Supporting Operational Activities of the company	PT Best Instrument Indonesia PT Surya Prima Eltrindo PT Krisbow Indonesia PT Maju Jaya Tehnik	Penambahan Alat Kerja Addition of Work Equipment	Internal	Rupiah

**Langkah Perlindungan Risiko**

Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan perlindungan risiko atas mata uang asing karena seluruh transaksi pengikatan dan belanja modal dilakukan dalam mata uang rupiah. Perusahaan dan entitas anak juga tidak mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian karena kebakaran dan lainnya. Hingga saat ini, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

**Realisasi Investasi Barang Modal**

Nilai Aset Tetap Perusahaan pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp30,42 miliar, meningkat 116,4% dibandingkan Rp14,06 miliar pada tahun 2017. Pertumbuhan aset tetap disebabkan oleh pertumbuhan proyek/kontrak baru yang cukup agresif sehingga membutuhkan investasi alat kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dengan baik. Rincian investasi barang modal tahun 2018 adalah sebagai berikut:

will optimize the capital structure. These ratios indicate the Company's ability to settle its current debts.

**Capital Expenditure Commitment**

**Purposes, Parties, Funding, and Currency**

The Company entered into a number of material commitments for capital expenditure, both with related parties and third parties. In 2018, the Company's capital expenditure was for work equipment to support its operations amounting to Rp24.16 billion, an increase of 255.5% from Rp6.79 billion in the previous year. Material commitments for capital expenditure in 2018 are as follows:

**Risk Hedging**

The Company and its subsidiaries did not enter into risk hedging for foreign currencies because all committed transactions and capital expenditure are denominated in rupiah. The Company and its subsidiaries also did not insure fixed assets against the risk of loss due to fire and other disasters. To date, management believes that there were no events or changes in circumstances that indicate impairment of property and equipment at the reporting date.

**Realized Capital Expenditure**

The Company's Fixed Assets at end of 2018 amounted to Rp30.42 billion, an increase of 116.4% compared to Rp14.06 billion at end of 2017. The growth of fixed assets was caused by aggressive addition of new projects/contracts that require investment in work equipment to support operations properly. Details of realized capital expenditure in 2018 are as follows:

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

URAIAN	SALDO AWAL (1 JAN 2018) Beginning Balance (Jan 1, 2018)	PENAMBAHAN Additions	PENGURANGAN Deductions	SALDO AKHIR (31 DES 2018) Ending Balance (Dec 31, 2018)	Description
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Tanah	-	1,331	-	1,331	Land
Bangunan	-	985	-	985	Building
Kendaraan Bermotor	131	1,283	-	1,414	Motor Vehicle
Perlengkapan Umum	11,277	17,957	-	29,234	General Equipment
Subjumlah	11,408	21,556	-	32,964	Subtotal
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Bangunan	-	38	-	38	Building
Kendaraan Bermotor	44	110	-	154	Motor Vehicle
Perlengkapan Umum	5,775	5,376	-	11,151	General Equipment
Subjumlah	5,819	5,524	-	11,343	Subtotal
<b>JUMLAH TERCATAT</b>	<b>5,589</b>		-	<b>21,621</b>	<b>TOTAL RECORDED</b>

### Informasi Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018 Dan Proyeksi Tahun 2019

Perusahaan menetapkan target yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai dasar untuk melaksanakan seluruh aktivitas operasional setiap tahun.

### Comparison of Target and Realization in 2018 and Projection for 2019

The company sets targets that are incorporated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as the basis for all operations on an annual basis.

### Target, Realisasi dan Proyeksi Laba Rugi

### Targets, Realization and Projection of Income

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

URAIAN	2018			2019		Description
	TARGET	REALISASI Realization	PENCAPAIAN Achievement (%)	TARGET	PERTUMBUHAN Growth (%)	
Pendapatan Usaha	1,765,666	2,073,318	117.4%	2,295,187	10.70%	Operating Revenues
Beban Usaha	(1,583,832)	(1,821,999)	115.0%	(2,052,408)	12.65%	Operating Expenses
Laba Usaha	181,834	251,319	138.2%	242,779	-3.40%	Net Income
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	6,399	(19,796)	-309.4%	10,027	-150.65%	Revenue (Expenses) Outside of Income
Laba (Rugi) sebelum Pajak	191,634	194,701	101.6%	252,806	29.84%	Income before tax
Beban Pajak	(47,908)	(56,020)	116.9%	(63,202)	12.82%	Tax Expenses
Laba setelah Pajak	143,725	138,681	96.5%	189,604	36.72%	After-tax Profit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	(5,427)	-	-	-	Other Comprehensive Income for the Year
<b>LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>143,725</b>	<b>133,254</b>	<b>92.7%</b>	<b>189,604</b>	<b>42.29%</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME</b>

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
 Financial Performance Review

Realisasi pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp2.073,31 miliar, tercapai 117,4% terhadap RKAP 2018 sebesar Rp1.765,67 miliar. Pencapaian di atas target disebabkan oleh penambahan Unit PLN yang dilayani secara *end-to-end service*. Pada tahun 2018, Perusahaan menargetkan penambahan 30 Unit PLN setingkat rayon dan terealisasi sebanyak 26,25 Rayon Unit PLN yang menjadi pelanggan baru.

Realisasi beban usaha tahun 2018 sebesar Rp1.822,00 miliar, tercapai 115,0% terhadap RKAP 2018 sebesar Rp1.583,83 miliar. Pencapaian melebihi target disebabkan bertambahnya aktivitas Perusahaan karena adanya penambahan proyek-proyek baru yang tidak tercakup di dalam RKAP.

Pada tahun 2019, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 10,79% dari realisasi 2018 atau menjadi Rp2.295,19 miliar berdasarkan asumsi pertumbuhan pelanggan baru/pengambilalihan pekerjaan di wilayah Sumatera dan Jawa secara bertahap. Sedangkan beban usaha diproyeksikan tumbuh 12,65% dari realisasi 2018 atau menjadi Rp2.052,41 miliar seiring dengan bertambahnya kontrak proyek secara *end-to-end services* dimulai dari kontrak pemeliharaan dan niaga di dalam area PT PLN (Persero). Laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 42,29% dari realisasi 2018 atau menjadi sebesar Rp189,60 miliar.

Realization of operating revenue in 2018 was Rp2,073.31 billion, reaching 117.4% of 2018 RKAP which amounted to Rp1,765.67 billion. The achievement exceeded the target due to additional PLN Units that were served with end-to-end service. In 2018, the Company targeted additional 30 PLN units at rayon level with realization of 26.25 PLN Unit Rayons that became new customers.

Actual operating expenses in 2018 amounted to Rp1,822.00 billion, reaching 115.0% of 2018 RKAP of Rp1,583.83 billion. The achievement exceeded the target due to increasing activities of the Company due to additional new projects that were not included in RKAP.

In 2019, the Company projects a growth of operating revenue of 10.79% of 2018 realization or to Rp2,295.19 billion based on the assumption of new customer growth/job takeovers in Sumatra and Java. While operating expenses are projected to grow by 12.65% from 2018 realization or to Rp2,052.41 billion, in line with the increase in project contracts with end-to-end services starting from maintenance and commercial contracts within the area of PT PLN (Persero). Comprehensive income for 2019 is projected to increase by 42.29% from 2018 realization or to become Rp189.60 billion.

**Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan**

**Target, Realization and Projection of Financial Position**

URAIAN	2018			2019		Description
	TARGET	REALISASI Realization	PENCAPAIAN Achievement (%)	TARGET	PERTUMBUHAN Growth (%)	
Aset Lancar	502,855	715,865	142.4%	767,671	7.24%	Current Assets
Aset Tidak Lancar	233,007	109,041	46.8%	216,448	98.50%	Non-Current Assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>735,862</b>	<b>824,906</b>	<b>112.1%</b>	<b>984,119</b>	<b>19.30%</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas Jangka Pendek	35,632	93,214	261.6%	55,394	-40.57%	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	75,638	118,382	156.5%	140,187	18.42%	Non-Current Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>111,270</b>	<b>211,596</b>	<b>190.2%</b>	<b>195,581</b>	<b>-7.57%</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>624,591</b>	<b>613,310</b>	<b>98.2%</b>	<b>788,539</b>	<b>28.57%</b>	<b>Equity</b>

**Aset Lancar**

Realisasi aset lancar pada tahun 2018 sebesar Rp715,87 miliar, tercapai 142,4% terhadap RKAP 2018 sebesar Rp502,86 miliar. Pencapaian aset lancar di atas target didorong realisasi pos-

**Current Assets**

Realized current assets at end of 2018 was Rp715.87 billion, reaching 142.4% of 2018 RKAP of Rp502.86 billion. The achievement of current assets exceeded the target driven by



## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Financial Performance Review

pos aset lancar yang melebihi RKAP 2018 seperti kas dan setara kas (128,98%), piutang usaha (144,77%) dan pajak dibayar di muka (76,54%).

Realisasi kas dan setara kas yang tinggi karena membaiknya periode penagihan piutang (*collection period/CoP*) pada tahun 2018 yaitu 27 hari (HP) dan 55 hari (HPI). Sedangkan realisasi piutang usaha yang melebihi target merefleksikan piutang usaha yang belum seluruhnya tertagih. Piutang HP yang belum terealisasi pembayarannya misalnya di PLN P3B Sumatera dan piutang HPI yang telah melebihi 100 hari terdapat di Unit Pekanbaru, Sumatera Barat, dan Lampung. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah strategis dan praktis untuk memperbaiki CoP seperti menunjuk PIC *monitoring* piutang usaha di kantor pusat yang dapat langsung berkomunikasi dengan PLN Unit Pelayanan Pelaksanaan Pelanggan (UP3), PLN Unit Induk Distribusi dan Unit Induk Wilayah untuk menginventarisasi kendala yang terjadi di dalam proses penagihan dan *progress* pembayarannya.

Perusahaan menargetkan pertumbuhan aset lancar pada RKAP 2018 sebesar 7,24% dari realisasi 2018 atau menjadi Rp767,67 miliar berdasarkan proyeksi investasi pada proyek-proyek baru seperti alat kerja, kendaraan proyek, kantor region dan pengalihan saham minoritas.

#### Aset Tidak Lancar

Realisasi aset tidak lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp109,04 miliar, tercapai 46,8% terhadap RKAP 2018 sebesar Rp233,01 miliar. Realisasi di bawah target terutama disebabkan rendahnya penyerapan investasi aset tetap seperti rencana penyelesaian kontrak dan PO senilai sekitar Rp20 miliar, rencana pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) senilai sekitar Rp500 juta, penyelesaian akuisisi saham minoritas sekitar Rp9 miliar dan pengadaan inventaris kantor dan alat kerja HPI senilai Rp2,1 miliar.

Pada tahun 2019, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan aset tidak lancar sebesar 98,50% dari realisasi 2018 atau menjadi Rp216,45 miliar.

#### Liabilitas

Realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2018 sebesar Rp93,21 miliar, tercapai 261,6% terhadap RKAP 2018 sebesar Rp35,63 miliar. Realisasi di atas target disebabkan oleh pertumbuhan nilai utang usaha yang akibat tingginya tagihan pihak ketiga yang diakui (akrual) pada akhir periode 2018 yang belum terealisasi pembayarannya berupa tagihan sewa kendaraan

realization of current assets accounts above 2018 RKAP, such as cash and cash equivalents (128.98%), trade receivables (144.77%) and prepaid taxes (76.54%).

Realized cash and cash equivalents was high because of the improved collection period (CoP) in 2018, which were 27 days (HP) and 55 days (HPI). While the realization of trade receivables that exceeded the target reflected trade receivables that had not been fully collected. HP's unrealized receivables, for example, were from PLN P3B Sumatera and HPI's receivables that were overdue for more than 100 days were from Pekanbaru, West Sumatra and Lampung Units. The Company took strategic and practical actions to improve CoP, such as appointing PIC to monitor accounts receivable at the head office that can directly communicate with PLN Customer Service Provider Unit (UP3), PLN Distribution Main Unit and Regional Main Unit to identify and register billing issues and payment progress.

The Company is targeted growth of current assets in 2018 RKAP of 7.24% of 2018 realization or to Rp767.67 billion based on investment projections in new projects, such as work tools, project vehicles, regional offices and transfer of minority shares.

#### Non-Current Assets

Realized non-current assets as of December 31, 2018 was Rp109.04 billion, reaching 46.8% of 2018 RKAP of Rp233.01 billion. The realization was below the target mainly due to the low absorption of fixed asset investments, such as completion plan of contracts and POs worth approximately Rp20 billion, development plan of Accounting Information Systems (SIA) worth around Rp500 million, completion of minority shares acquisition of approximately Rp9 billion and procurement of office inventory and HPI's work equipment worth Rp2.1 billion.

In 2019, the Company projects growth of non-current assets of 98.50% of 2018 realization or to Rp216.45 billion.

#### Liabilities

Realized current liabilities in 2018 amounted to Rp93.21 billion, reaching 261.6% of 2018 RKAP of Rp35.63 billion. The realization was above target because of the growth of trade payables due to the high amount of unpaid third-party invoices (accruals) at end of 2018 representing invoices of vehicle rental, work tools and materials. Meanwhile, realized

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

serta biaya pemakaian alat kerja dan material. Sedangkan realisasi liabilitas jangka panjang sebesar Rp118,38 miliar, tercapai 156,5% terhadap RKAP 2018 sebesar Rp75,64 miliar terutama karena realisasi saldo liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp118,38 miliar.

Pada tahun 2019, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan liabilitas sebesar 7,57% dari realisasi 2018 atau menjadi Rp195,58 miliar dengan asumsi pada tahun 2019 Perusahaan akan merealisasikan semua pembayaran kepada pihak ketiga ataupun ke Negara (utang pajak) untuk menjaga rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) ataupun DAR (*Debt to Asset Ratio*).

### Ekuitas

Realisasi ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp613,31 miliar, tercapai 98,2% terhadap RKAP 2018 sebesar Rp624,59 miliar. Pada tahun 2019, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan ekuitas sebesar 28,57% dari realisasi 2018 sejalan dengan proyeksi peningkatan laba bersih.

### Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2019 dan penerbitan kembali dengan informasi tambahan diterbitkan pada tanggal 30 April 2019.

Tambahan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut adalah informasi tambahan yang terdiri atas:

- Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Entitas Induk
- Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk
- Laporan Arus Kas Entitas Induk
- Catatan atas Laporan Keuangan Entitas Induk

### Dividen dan Kebijakan Dividen

#### Kebijakan Dividen

Perusahaan membagikan dividen atas laba bersih, sesuai dengan keputusan pemegang saham, dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditetapkan berdasarkan kinerja tahun berjalan dan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang.

non-current liabilities amounted to Rp118.38 billion, reaching 156.5% of 2018 RKAP of Rp75.64 billion, mainly due to realized post-employment benefits liabilities of Rp118.38 billion.

In 2019, the Company projects a liabilities growth of 7.57% of 2018 realization or to Rp195.58 billion assuming that in 2019 the Company will realize all payments to third parties or to the State (tax liabilities) to maintain DER (*Debt to Equity Ratio*) and DAR (*Debt to Assets Ratio*).

### Equity

Realized equity at end of 2018 amounted to Rp613.31 billion, reaching 98.2% of 2018 RKAP of Rp624.59 billion. In 2019, the Company projects equity growth of 28.57% of 2018 realization, in line with the projected increase in net income.

### Subsequent Events

The Company re-issued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018. The Company's consolidated financial statements were issued on March 29, 2019 and were reissued with additional information on April 30, 2019.

Additional presentations and disclosures in the consolidated financial statements were additional information consisting of:

- Statements of Financial Position of Parent Entity
- Statements of Income and Other Comprehensive Income of Parent Entity
- Statements of Changes in Equity of Parent Entity
- Statements of Cash Flows of Parent Entity
- Notes to Financial Statements of Parent Entity

### Dividend and Dividend Policy

#### Dividend Policy

The Company distributes dividends from net income, according to shareholders' decisions in General Meeting of Shareholders (GMS), which is determined based on the current year performance and the need for long-term business development.

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

### Dividen Dibagikan

Berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang tercantum dalam akta No. 34 tanggal 16 Mei 2018 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp58,57 miliar dan telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2018 dan 22 November 2018 kepada PT PLN (Persero) dan YPK PLN.

Pada tahun 2017, Perusahaan tidak membagikan dividen atas laba tahun 2016 kepada Pemegang Saham karena laba Perusahaan seluruhnya digunakan untuk pengembangan usaha.

### Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MESOP)

Perusahaan merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bukan merupakan perusahaan publik sehingga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) dan/atau manajemen (*Management Stock Option Program/MESOP*).

### Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan bukan merupakan perusahaan publik dan belum pernah melakukan aktivitas penawaran umum.

### Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Pada tahun 2018 Perusahaan tidak melakukan divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi maupun restrukturisasi utang/modal.

### Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Berelasi

#### Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode pelaporan.

### Distributed Dividends

According to resolution of Annual General Shareholders Meeting as stated in deed No. 34 dated May 16, 2018 of Muhammad Hanafi, SH, a notary in Jakarta, the Company's Shareholders approved dividends distribution from retained earnings as of December 31, 2017 amounting to Rp58.57 billion and was paid on November 1, 2018 and November 22, 2018 to PT PLN (Persero) and PLNYPK.

In 2017, the Company did not distribute dividends from 2016 income to Shareholders because the Company's income was entirely used for business development.

### Employee and/or Management Stock Option Program (ESOP/MESOP)

The Company is a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE) which is not a public company; so, it does not have Employee Stock Option Program (ESOP) and/or Management Stock Option Program (MESOP).

### Realization Of Fund Utilization From Initial Public Offering

As of December 31, 2018, the Company was not a public company and did not conduct a public offering activity.

### Divestment, Merger, Acquisition and/or Debt/Capital Restructuring

In 2018, the Company did not conduct divestment, merger, acquisition and/or debt/equity restructuring.

### Information on Material Transactions with Conflict of Interest or Related Parties Transactions

#### Transactions with Conflicts of Interest

There were no transactions with conflict of interest during the reporting period.

**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
 Financial Performance Review

**Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Afiliasi)**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi (hubungan afiliasi). Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

**Sifat Hubungan Berelasi**

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN merupakan pemegang saham Perusahaan.
- EPI merupakan entitas asosiasi Perusahaan.
- IP, PJB, PLN Batam, ICON, PLNE, PLN Batu Bara, dan PLN Tarakan merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personal manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

**Related Party Transactions**

In its business activities, the Company and subsidiaries carry out certain transactions with related parties. All significant related party transactions, whether arm's length or not, are disclosed in notes to consolidated financial statements.

**Nature of Relationships**

- The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and State-Owned Enterprises ("BUMN").
- PLN and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN are the stockholders of the Company.
- EPI is the Company's associated entity.
- IP, PJB, PLN Batam, ICON, PLNE, PLN Batu Bara, and PLN Tarakan are entities with common shareholders and or management.
- Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Company and its subsidiaries.

NAMA PIHAK BERELASI Related Party	SIFAT HUBUNGAN Nature Relationship	SIFAT TRANSAKSI Nature of Transaction
PT PLN (Persero) (PLN)	Pemegang saham Perusahaan Ultimate shareholders	Piutang usaha, utang usaha, piutang dan utang lain-lain dan pendapatan Trade receivable, trade payable, other receivable and payable and revenue
Bank BNI	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank
Bank Mandiri	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in bank and time deposit
Bank BRI	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank
BPJS	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Utang lain-lain Other payable

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Financial Performance Review

NAMA PIHAK BERELASI Related Party	SIFAT HUBUNGAN Nature Relationship	SIFAT TRANSAKSI Nature of Transaction
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha, utang lain-lain dan pendapatan Trade receivable, other payable and revenue
PLN Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan pendapatan Trade receivable and revenue
PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha, utang lain-lain dan pendapatan Trade receivable, other payable and revenue
PT Indonesia Power (IP)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan pendapatan Trade receivable and revenue
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan pendapatan Trade receivable and revenue
PT PLN Batubara	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan pendapatan Trade receivable and revenue
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan pendapatan Trade receivable and revenue
Dana Pensiun Lembaga Keuangan – Bank Negara Indonesia (DPLK – BNI)	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Utang lain-lain Other payable
Dana Pensiun PLN	Program imbalan pascakerja Post-employment benefit plan	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti dan utang lain-lain Payment of defined benefit program contributions and other payable
PT Cogindo Daya Bersama	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Pendapatan Revenue
PT Jambi Prima Coal	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Pendapatan Revenue

### Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan dengan berbagai pihak dalam dua tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut:

### Related Party Transactions

Related party transactions entered into by the Company with various parties in the last two years are shown in the following table:

Dalam jutaan Rupiah	In million Rupiah		
TRANSAKSI	2017	2018	Transactions
Kas dan Setara Kas	275,248	379,246	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1,308	55,201	Restricted cash in bank
Piutang usaha	232,167	218,482	Trade receivables
Piutang lain-lain	26	200	Other Receivables
Utang usaha	3,283	1,418	Trade Payable
Utang lain-lain	8,643	13,343	Other Payables
Pendapatan	1,695,988	2,073,318	Revenue

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Financial Performance Review

### Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perusahaan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

### Kebijakan Perusahaan tentang Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan Terkait

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan telah diaudit oleh auditor independen.

### Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan

Tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada kinerja Perusahaan pada tahun 2018.

### Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2018, terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang terjadi di Perusahaan yaitu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 2 (Amandemen): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, yang mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan diklasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.
- PSAK 13 (Amandemen): Properti Investasi tentang pengalihan properti investasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
- PSAK 16 (Amandemen): Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif, tentang klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap.

### Fairness of Transactions

All related party transactions are in accordance with policies and requirements agreed upon by both parties. Hence, the Company considers that all transactions are fairly stated in accordance with PSAK No.7 (2010 Revision) on Related Party Disclosures.

### Corporate Policy regarding Review Mechanisms on Transactions and Compliance with Related Regulations

Review mechanism on related party transactions through audit process is performed by internal and external auditors. To ensure the fairness of transactions and conformity to generally accepted accounting principles, related party transactions reports have been audited by independent auditor.

### Changes in Regulations and Their Impacts on the Company's Performance

There were no changes in laws and regulations that affected the Company's performance in 2018.

### Changes in Accounting Policy Applied to the Last Year Book

In 2018, there were changes in the Company's accounting policies, including adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standard (ISAK) that were effective for the financial years beginning on or after January 1, 2018.

The following amendments to the standards and interpretations are effective for periods beginning on or after January 1, 2018, and early application is permitted, including:

- PSAK 2 (Amendment): Statements of Cash Flows on Disclosure Initiatives, which requires an entity to disclose changes to its obligations for cash flows that have been, or will be classified as financing activities in statements of cash flows.
- PSAK 13 (Amendment): Investment Property on transfer of investment property.
- PSAK 15 (Adjustment): Investment in Associated Entities and Joint Ventures on long-term interests in associated entities and joint ventures.
- PSAK 16 (Amendment): Fixed Assets-Agriculture: Productive Plants on clarification of biological assets that meet the definition of productive plants to be recorded as fixed assets.

## URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Financial Performance Review

- PSAK 46 (Amandemen): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi, tentang klarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi.
- PSAK 53 (Amandemen): Pembayaran Berbasis Saham, tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK 67 (Amandemen): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, tentang kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan.
- PSAK 69: Agrikultur
- PSAK 111: Akuntansi Wa'd
- PSAK 46 (Amendment): Income Tax on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses on clarification of requirement to recognize deferred tax assets for unrealized losses.
- PSAK 53 (Amendment): Share-Based Payments on classification and measurement of share-based payment transactions.
- PSAK 67 (Amendment): Disclosure of Interests in Other Entities on interests in entities that are categorized as available-for-sale except for financial information summary.
- PSAK 69: Agriculture
- PSAK 111: Wa'd Accounting

Dampak atas perubahan dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar di atas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

- PSAK 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"  
Amandemen ini mensyaratkan agar Perusahaan dan entitas anak menyediakan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- PSAK 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"  
Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi tersedia sehingga perbedaan temporer atas kemungkinan laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

Impacts of the aforementioned amendments and adjustments to the standards and interpretations that are relevant and significant to the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries are as follows:

- PSAK 2 (2016 Amendment): "Statements of Cash Flows on Disclosure Initiatives"  
This amendment requires the Company and its subsidiaries to provide disclosures to users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flows or non-cash transactions.
- PSAK 46 (2016 Amendment): "Income Tax on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses"  
This amendment clarifies that to determine whether deductible taxable income can be utilized; estimations are available so that temporary differences over probability of future taxable income may include recovery of some of the entity's assets exceeding their carrying amounts.

At the time of issuance of the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still reviewing the impacts that may arise from adoption of the new standards, amendments to standards and interpretations of the standards and their impacts on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries.



**URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**  
 Financial Performance Review

**Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi**

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

**Kontribusi kepada Negara**

Sebagai wajib pajak dan pemotong pajak, Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu. Data setoran pajak dalam dua tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:

**Extraordinary and Non-Recurring Transactions**

During 2018, there were no extraordinary and non-recurring transactions.

**Contributions to the Country**

As a taxpayer and as withholding tax agent, the Company is committed to paying its tax liabilities in a timely manner. Tax payments made in the last four years are shown in the following table:

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

TRANSAKSI	PER 31 DESEMBER 2017 Per December 31, 2017	PER 31 DESEMBER 2018 Per December 31, 2018	Transactions
PPH Karyawan Pasal 21 yang masih harus disetor	1,226	241	Employee Income Tax Article 21 has to be paid
PPH Pihak Lain Pasal 23 yang masih harus disetor	93	193	Other Party Income Tax article 23 has to be paid
PPH Pasal 25 yang masih harus disetor	2,098	1,635	Income Tax Article 25 has to be paid
PPH Badan Terutang (PPH Pasal 29)	5,988	3,433	Corporate Income Tax Outstanding (Income Tax Article 29)
PPH Pasal 4 Ayat 2	59	31	Income Tax Article 4 Paragraph 2
PPN yang Masih Harus Disetor	9	-	VAT has to be Paid
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>9,473</b>	<b>5,533</b>	<b>Tax Payable</b>

# PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL*

Human Capital Management



Untuk melaksanakan tugas mengamankan kinerja sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik dan menjadi *trendsetter* bagi perusahaan lain yang memberikan jasa yang serupa bagi PLN, HP harus melakukan perubahan besar pada elemen-elemen dasar organisasi dan *human capital* melalui kebijakan yang berbasis kompetensi untuk menciptakan keunggulan operasi.

To carry out the duty securing performance of electricity transmission and distribution system and become a trendsetter for other companies providing similar services to PLN, HP should make major changes to the basic elements of the organization and human capital through competency-based policies to create operational excellence.

*Human capital* merupakan modal utama dalam mendukung keberhasilan pencapaian visi Perusahaan. Sebagai salah satu anak usaha PLN, HP mengemban tugas untuk menjaga keberlanjutan usaha PLN dengan mengamankan kinerja sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk pelanggan PLN dari berbagai potensi gangguan. Dalam melaksanakan perannya, HP diharapkan dapat menjadi barometer atau *trendsetter* bagi perusahaan alihdaya atau vendor-vendor lain yang memberikan jasa yang serupa bagi PLN. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Perusahaan harus melakukan perubahan besar pada elemen-elemen dasar organisasi dan *human capital* melalui kebijakan yang berbasis kompetensi untuk menciptakan keunggulan operasi.

Human capital is the key asset in supporting successful achievement of the Company's vision. As one of PLN's subsidiaries, HP has the duty to maintain the sustainability of PLN's business by securing performance of electricity transmission and distribution system for PLN customers from potential interruptions. In performing its role, HP is expected to be a barometer or trendsetter for outsourcing companies or other vendors providing similar services to PLN. To support the achievement of this goal, the Company should make major changes to the basic elements of the organization and human capital through competency-based policies to create operational excellence.

### **STRATEGI PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL**

Pengelolaan *human capital* di HP ditangani oleh Divisi Human Capital Management (Divisi HCM). Strategi pengelolaan *human capital* difokuskan pada pembenahan dan penguatan fondasi organisasi dan pegawai di grup HP. Hal ini bertujuan untuk mendukung implementasi strategi korporasi dalam mendukung tujuan perusahaan menjadi *asset operator* di bidang distribusi dan retail ketenagalistrikan.

### **HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRATEGY**

Human capital management at HP is performed by Human Capital Management Division (HCM Division). The human capital management strategy is focused on improvement and strengthening of organizational and employee foundations within HP group. It aims to support implementation of corporate strategy in achieving the Company's goal to become an asset operator in electricity distribution and retail.

## PENGLOLAAN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

Sebagai organisasi yang didukung oleh lebih dari 25 ribu tenaga kerja, tantangan utama dalam mengelola *human capital* adalah kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja yang dimiliki dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan tertentu. Untuk meminimalkan kesenjangan tersebut, Perusahaan melaksanakan program-program peningkatan kompetensi secara intensif berupa pelatihan, *workshop* atau *upscalling* kapabilitas pegawai sesuai bidang kerjanya masing-masing. Perusahaan memberikan pelatihan secara bertahap hingga para tenaga kerja mendapat sertifikasi kompetensi/profesi setelah menempuh uji kompetensi keahliannya.

Selain kompetensi *hard skill*, Perusahaan juga membangun budaya perusahaan sehingga pegawai dan tenaga kerja yang berasal dari latar belakang berbeda-beda dapat diarahkan untuk menuju suatu tujuan bersama. Karena sifat pekerjaannya berhubungan dengan pelayanan masyarakat, insan HP harus memiliki integritas tinggi dan kepedulian terhadap pelanggannya.

### PROGRAM KERJA DI BIDANG ORGANISASI DAN HUMAN CAPITAL

Program kerja di bidang organisasi dan pengelolaan *human capital* yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembenahan sistem pengelolaan *human capital* terutama pada aspek proses bisnis *human capital* untuk memastikan tenaga kerja mampu memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan Perusahaan.
2. Penyelarasan dan penyetaraan jenjang jabatan, nomenklatur jabatan, dan peraturan kepegawaian Perusahaan dengan perusahaan induk (PLN) yang telah disetujui oleh perusahaan induk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0110.K/DIR/2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Kesetaraan Jenjang Jabatan Struktural antara PT PLN (Persero) dengan PT HALEYORA POWER.
3. Penguatan formasi jabatan (FJ) organisasi Perusahaan dengan personel yang tepat, baik yang berasal dari tugas karya PLN, internal Perusahaan maupun tugas karya dari anak perusahaan PLN lainnya.
4. Penyusunan basis data pegawai yang terintegrasi dalam Sistem Informasi SDM (*Human Resources Information System/HRIS*) grup HP.

As an organization supported by more than 25 thousand workforce, the main challenge in managing human capital is the competency gap, between the existing and the required standard, to handle certain jobs. To minimize this gap, the Company implements intensive competency improvement programs in the form of training, workshop or upscalling employee capabilities according to their respective fields of work. The Company provides training in stages until the workforce gets competency/professional certification after taking competency test of their expertise.

In addition to hard skill competencies, the Company also builds a corporate culture so that employees and workforce who come from different backgrounds can be directed towards a common goal. Because the nature of their work is related to public service, HP people must have high integrity and care for their customers.

### WORK PROGRAM IN ORGANIZATION AND HUMAN CAPITAL

Work programs in organization and management of human capital implemented in 2018 were as follows:

1. Improving human capital management system, especially in the aspects of human capital business process to ensure that workforce is able to provide the best contribution to the achievement of the Company's goals.
2. Alignment and equalization of position rank, nomenclature, and staffing regulations of the Company with the parent company (PLN) which has been approved by the parent company based on Decision of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0110.K/DIR/2018 dated September 25, 2018 concerning Stipulation of Equal Structural Position between PT PLN (Persero) and PT HALEYORA POWER.
3. Strengthening position formation (FJ) of the Company's organization with the right personnel from work assignments of PLN, the Company's internal and other PLN subsidiaries.
4. Compiling employee databases integrated in HP group's Human Resources Information System (HRIS).

**PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL**  
 Human Capital Management

5. Pengembangan sistem pengelolaan kinerja hingga ke pengukuran kinerja (KPI) individu di level staf yang diselaraskan dengan kinerja Perusahaan, serta memastikan implementasi strategi remunerasi yang berbasis kompetensi dan kinerja.
6. Pengembangan *training center* dengan modul-modul yang sesuai kebutuhan untuk mengisi kesenjangan kompetensi.
7. Pengembangan *assessment center* untuk melakukan pengukuran kinerja secara berkala.
8. Konsolidasi HP dan HPI terkait strategi perusahaan dan sistem pengelolaan kepegawaian, melakukan harmonisasi aturan-aturan ketenagakerjaan antara HP dan HPI yang sesuai dengan arah, strategi dan kebijakan perusahaan dalam bentuk surat keputusan bersama dan pengelolaan hubungan industrial.
9. Pengembangan budaya korporasi Haleyora Power Believe.
10. Pembinaan elemen dasar organisasi dan *human capital* melalui kebijakan yang berbasis kompetensi.
11. Pengembangan budaya prestatif, disertai kepemimpinan transformasional dengan penguatan organisasi dan *human capital* pada tingkat manajer area.

5. Developing performance management system upto individual performance measurement (KPI) at staff level that is aligned with the Company's performance, as well as ensuring implementation of competency and performance-based remuneration strategy.
6. Developing training center with necessary modules fill competency gap.
7. Developing assessment center to conduct regular performance measurement.
8. Consolidation of HP and HPI related to corporate strategy and staffing management system, harmonizing labor regulations between HP and HPI in accordance with corporate direction, strategy and policy in the form of joint decree and management of industrial relations.
9. Developing Haleyora Power Believe corporate culture.
10. Improving basic elements of organization and human capital through competency-based policy.
11. Developing competitive culture, accompanied by transformational leadership by strengthening organization and human capital at area manager level.

**PROFIL PEGAWAI**

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pekerja grup HP mencapai 25.185 orang yang terdiri dari 23 pegawai tugas karya, 228 pegawai organik dan 24.936 tenaga kerja (*workforce*) proyek. Jumlah tersebut naik 5,6% dari 23.844 orang pada tahun 2017 seiring dengan peningkatan kontrak pekerjaan di tahun 2018.

**EMPLOYEE PROFILE**

As of December 31, 2018, HP group had 25,185 employees consisting of 23 work assignees, 228 organic employees and 24,936 project workforce. The number increased by 5.6% from 23,844 employees at end of 2017, in line with the increasing work contracts in 2018.

**BERDASARKAN STATUS TENAGA KERJA**  
 Composition based on Employment Status

ORGANISASI Organization	TUGAS KARYA Seconded			ORGANIK Organic			PROYEK Project			JUMLAH Total		
	2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%
HP	16	17	6.3	34	41	20.6	11,741	12,469	6.2	11,791	12,527	6.2
HPI	3	4	33.3	226	187	-17.3	11,822	12,467	5.5	12,051	12,658	5.0
EPI	2	2	0.0	-	-	-	-	-	-	2	2	0.0
<b>Jumlah Total</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>39.6</b>	<b>260</b>	<b>228</b>	<b>3.3</b>	<b>23,563</b>	<b>24,936</b>	<b>11.7</b>	<b>23,844</b>	<b>25,187</b>	<b>5.6</b>

Demografi pegawai (tugas karya dan organik) pada tahun 2018 dengan pembandingan tahun 2017 dan persentase pertumbuhannya adalah sebagai berikut:

Employee demographics (work assignment and organic) in 2018 with 2017 comparison and growth percentage are as follows:

## PENGLOLAAN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

### BERDASARKAN GENDER

Composition based on Gender

GENDER	2017	2018	Gender
Laki-laki	44	58	Male
Perempuan	6	8	Female
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

### BERDASARKAN TINGKAT JABATAN

Composition based on Position Level

JABATAN	2017	2018	Position
Manajemen Atas	-	-	Top Management
Manajemen Menengah	3	6	Middle Management
Manajemen Dasar	5	10	Basic Management
Supervisor Atas	10	16	Top Supervisor
Supervisor Dasar	11	11	Basic Supervisor
Fungsional 1	-	-	Functional 1
Fungsional 2	-	-	Functional 2
Fungsional 3	-	-	Functional 3
Fungsional 4	-	-	Functional 4
Fungsional 5	16	16	Functional 5
Fungsional 6	5	7	Functional 6
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

### BERDASARKAN USIA

Composition based on Age

USIA	2017	2018	Age
< 20 Tahun	-	-	< 20 Years Old
21-30 Tahun	18	29	21-30 Years Old
31-40 Tahun	17	24	31-40 Years Old
41-50 Tahun	8	8	41-50 Years Old
51-55 Tahun	6	5	51-55 Years Old
≥ 56 Tahun	1	-	≥ 56 Years Old
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

**PENGLOLAAN HUMAN CAPITAL**  
 Human Capital Management

**BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**  
 Composition based on Education

JENJANG PENDIDIKAN	2017	2018	Educational
S3	-	-	PhD
S2	10	10	Masters
S1	35	47	Bachelors
Diploma	5	9	Diploma
SMA/SMK/SMP	-	-	Junior High/High School/Vocational School
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan persaingan usaha, setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan standar kompetensi diri secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perubahan di industri yang dinamis. Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya melalui program-program pengembangan yang tersedia.

Divisi HCM menyusun program-program pelatihan dan pengembangan berdasarkan *Learning Needs Analysis* (LNA) yang dilakukan oleh Pusdiklat PLN dan mengacu pada Roadmap Transformasi HP yang membutuhkan standarisasi kompetensi. LNA merupakan program dari PLN, untuk membantu keberhasilan anak-anak usaha dalam menjalankan proses bisnisnya dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diberikan secara berjenjang, mulai dari tingkatan tenaga kerja (*workforce*), supervisor, dan para manajer. Program pelatihan yang diberikan terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Pelatihan *hard skill* yang dilaksanakan oleh HP seperti pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Pengelolaan Gardu Induk, Gardu Distribusi dan Asesmen Kabel, dan sebagainya.
2. Pelatihan *soft skill/leadership* yang dilaksanakan oleh Pusdiklat PLN, seperti pelatihan *Supervisory Education* atau *Executive Education*.
3. Pelatihan di luar masalah ketenagalistrikan seperti Awareness ISO 9001:2015, pembelajaran manajemen bisnis area, *Safety and Quality* bagi para Manajer Area dan Supervisor (SPV).
4. Sertifikasi Kompetensi yang merupakan prasyarat *mandatory* bagi tenaga kerja teknik Perusahaan.

**COMPETENCY DEVELOPMENT**

Along with the development of technology and business competition, every employee is required to continuously improve their self-competence standard in order to be able to encounter changes in a dynamic industry. Every employee has equal rights and opportunities to develop their competence through available development programs.

HCM Division compiles training and development programs based on Learning Needs Analysis (LNA) conducted by PLN Education and Training Center and refers to HP Transformation Roadmap that requires competency standardization. LNA is PLN's program to support its subsidiaries in carrying out their business processes and to enable them to overcome challenges.

Training and competency development programs are provided in stages for workforce, supervisors, and managers. The training programs are divided into 4 categories, namely:

1. Hard skill training organized by HP, such as General Occupational Health and Safety Expert (AK3U), First Aid in Accidents (P3K), Substation Management, Distribution Substation and Cable Assessment and so forth.
2. Soft skill/leadership training organized by PLN Education and Training Center, such as Supervisory Education or Executive Education.
3. Non-electricity training, such as ISO 9001:2015 Awareness, business area management learning, Safety and Quality for Area Managers and Supervisors (SPV).
4. Competency Certification as a mandatory prerequisite for the Company's technical workforce.



## PENGLOLAAN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

Pada tahun 2018 Perusahaan telah melaksanakan program pelatihan/pengembangan pegawai yang diikuti oleh 88 peserta yaitu:

In 2018, the Company organized training/development programs for employees which attended by 88 participant, namely:

NO	TOPIK PELATIHAN/WORKSHOP Training/Workshop Subject	WAKTU Date	JUMLAH PESERTA Number of Participant
1	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	12-14 Maret/March	18
2	Manajemen Risiko/Risk Management	13-14 Maret/March	2
3	Leadership for Director	26-27 April/April	6
4	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15, 17, 57 Statement of Financial Accounting Standards No. 15, 17, 57	15-16 Mei/May	2
5	In-house Training ISO 9001:2015	24-25 Mei/May	20
6	In-house Training Learning Need Analyst	3-4 Agustus/August	1
7	Commissioner and Directorship	9-10 Agustus/August	6
8	Hubungan Industrial/Industrial Relation	15-16 Agustus/August	1
9	System Application and Product in Data Processing (SAP)	23-31 Agustus/August	25
10	Strengthening Your Leadership Talent	3-5 Oktober/October	1
11	Budaya Kepemimpinan/Leadership Culture	22-23 Oktober/October	3
12	Mengelola Arus Kas/Managing Cash Flow	28-29 November/November	2
13	Perencanaan Strategik dan Efektif Anggaran Korporat/Strategic Planning and Effective Corporate Budgeting	20-21 Desember/December	1

Pelatihan pegawai/tenaga kerja juga diselenggarakan secara *in-house* di masing-masing region terutama untuk memastikan bahwa setiap personel dapat memahami dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, aman, dan sesuai prosedur operasi standar (SOP).

Employee/workforce trainings were also held in-house in each region, especially to ensure that each personnel understand and be able to perform their duties properly, safely in accordance with standard operating procedures (SOP).

## SERTIFIKASI KOMPETENSI

Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja, Perusahaan berkewajiban untuk memfasilitasi proses untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi bersifat *mandatory* sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009). Berdasarkan UU 30/2009, pekerja di bidang ketenagalistrikan harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## COMPETENCY CERTIFICATION

In line with technical competence enhancement for workforce, the Company is obliged to facilitate competency certification in collaboration with competent agencies. Competency certification is mandatory in accordance with the mandate of Law No. 30 of 2009 concerning Electricity (Law 30/2009). Based on Law 30/2009, workforce in the electricity sector must have a competency certificate issued by a professional certification agency appointed by the state, in this case Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Perusahaan memberikan pembekalan berupa pelatihan/*workshop* bagi tenaga kerja yang akan menempuh uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan oleh lembaga eksternal yang ditunjuk, di antaranya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Himpunan Ahli Pekerjaan Dalam Keadaan

The Company provides training/workshop for workforce who will take competency tests. Competency tests are organized by designated external agencies, including National Professional Certification Board (BNSP) and Association of Experts in High Voltage Electrical Work (Gema of PDKB). The company targets

## **PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL** Human Capital Management

Bertegangan (Gema PDKB). Perusahaan menargetkan seluruh tenaga kerja teknik telah 100% tersertifikasi pada akhir tahun 2018. Dari total 8.125 tenaga kerja teknik yang tersebar di seluruh region, sampai akhir tahun 2018 sertifikasi telah terealisasi untuk 6.704 orang atau tercapai 82,5% dari target.

### **BIAYA PELATIHAN**

Biaya pelatihan dan pengembangan pada tahun 2018 sebesar Rp752,71 juta, meningkat 43% dibandingkan Rp323,54 juta pada tahun 2017.

### **SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI (SIMKP)**

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP) sebagai pedoman untuk mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan terukur. SIMKP merupakan sistem manajemen strategis dan terpadu untuk menyelaraskan pencapaian kinerja pegawai terhadap sasaran kinerja korporat yang diterapkan di grup PLN berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 045.P/DIR/2017.

HP meratifikasi SIMKP sesuai dengan kebutuhan di Perusahaan. Sejak 2013, pengisian laporan kinerja pegawai tugas karya PLN dan organik telah menggunakan server yang ada di PLN, yaitu pada situs [simkpnas.pln.co.id](http://simkpnas.pln.co.id). Namun, karena ada perubahan, maka sejak pertengahan 2016 pelaporan kinerja pegawai HP dilakukan secara manual dan hasilnya dikirimkan ke Divisi HCP PLN. Selanjutnya, pada 2018 HP kembali menggunakan SIMKP yang disesuaikan dengan parameter *Key Performance Indicators* (KPI) di Perusahaan. Penggunaan SIMKP mencakup penilaian kinerja individu, kenaikan tingkat atau grading, promosi jabatan, kriteria talenta, dan pengembangan karir pegawai.

Pengisian SIMKP dilakukan pada awal tahun berjalan dan penilaian semester pertama dilaksanakan setiap bulan Agustus. Dengan demikian, siklus penilaian dilakukan dua kali dalam setahun dimulai dari perencanaan pekerjaan setiap pegawai selama setahun ke depan, masa revisi terhadap rencana dan target kerja tersebut, pencapaian sasaran, hingga penilaian akhir tahun. Dengan menggunakan SIMKP, kinerja setiap pegawai dapat termonitor lebih cepat dan mudah dan Perusahaan dapat melakukan kalibrasi/penyelarasan target organisasi dengan target individu berdasarkan realisasi pencapaian kinerja.

all technical workforce to be 100% certified by end of 2018. Of the total 8,125 technical workforce spread across regions, at end of 2018, 6,704 technical workforce were already certified or reached 82.5% of the target.

### **TRAINING COSTS**

Training and development costs in 2018 amounted to Rp752.71 million, increased by 43% compared to Rp323.54 million in 2017.

### **EMPLOYEE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (SIMKP)**

The Company applies Employee Performance Management System (SIMKP) as a guideline to evaluate employee performance achievement in an objective, transparent and measurable manner. SIMKP is a strategic and integrated management system to align employee performance achievement with corporate performance target which is implemented in PLN group based on Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 045.P/DIR/2017.

HP ratifies SIMKP based on the Company's requirements. Since 2013, performance reporting of PLN's work assignees and organic employees used PLN's existing server on [simkpnas.pln.co.id](http://simkpnas.pln.co.id) website. However, due to alteration, since mid-2016, HP's employee performance reporting was done manually and the results were sent to PLN's HCP Division. Subsequently, in 2018 HP was able to use SIMKP again, which had been adjusted to the Company's Key Performance Indicators (KPI) parameters. The use of SIMKP includes individual performance assessment, grading, promotion, talent criteria and career development.

SIMKP is completed at the beginning of the current year and the first semester assessment is conducted every August. Hence, assessment cycle is carried out twice a year starting from work plan of each employee for the next year, revision period for work plan and target, target achievement and year-end assessment. By using SIMKP, performance of each employee can be monitored faster and easier and the Company can calibrate/align organizational targets with individual targets based on realization of performance achievements.

## PENGLOLAAN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

### RENCANA KERJA TAHUN 2019 DI BIDANG HUMAN CAPITAL

Sesuai dengan penetapan Kontrak Manajemen tahun 2019, Key Performance Indicators (KPI) Divisi HCM adalah sebagai berikut:

### 2019 WORK PLAN FOR HUMAN CAPITAL

In accordance with the 2019 Management Contract, Key Performance Indicators (KPI) of the HCM Division are as follows:

NO	KPI	FORMULA	SATUAN UNIT	BOBOT Weight
<b>I</b>	<b>PERSPEKTIF EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES</b> Perspective of Product and Process Effectiveness			<b>58</b>
1	Sertifikasi/Certification			
	a. Tenaga Kerja Workforce	▲ (Jumlah tenaga kerja pada bidang tersertifikasi/Jumlah rencana tenaga kerja pada bidang teknis yang akan disertifikasi) x 100 (Number of workforce in the certified field/Number of planned workforce in the technical field to be certified) x 100	%	4
	b. Proses Bisnis Business Process	▲ (Jumlah area proses bisnis yang tersertifikasi/Jumlah rencana area proses bisnis tersertifikasi) x 100 (Number of certified business process areas/Number of planned business process area plans) x 100	%	4
<b>II</b>	<b>PERSPEKTIF SDM</b> Perspective of HR			<b>6</b>
1	Human Capital Readiness (HCR)	▲ Levelisasi 1-5 oleh Tim Asesmen Leveling 1-5 by the Assessment Team	Level	3
2	Organizational Capital Readiness (OCR)	▲ Levelisasi 1-5 oleh Tim Asesmen Leveling 1-5 by the Assessment Team	Level	3
<b>III</b>	<b>KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL</b> Leadership, Corporate Governance and Social Responsibility			<b>6</b>
1	Good Corporate Governance (GCG)	▲ Hasil asesmen GCG Result of GCG assessment	Skor Score	3
2	Penyelesaian Temuan Auditor Settlement of Auditor Finding	▲ (Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti/jumlah temuan total) x 100 (Number of findings have been settled/total number of findings) x 100	%	3

Berdasarkan KPI tersebut, Divisi HCM menyusun program kerja sebagai berikut:

- Sertifikasi Tenaga kerja
  - Melakukan pemetaan kebutuhan sertifikasi untuk tahun 2019.
  - Mengidentifikasi kebutuhan anggaran untuk sertifikasi tahun 2019.
  - Bekerja sama dengan pihak penyelenggara sertifikasi.
  - Menyusun jadwal pelaksanaan sertifikasi.

Based on the KPI, the HCM Division compiled the work program as follows:

- Labor Certification
  - Mapping the certification requirement for 2019.
  - Identify budget requirement for certification in 2019.
  - Collaborate with certification boadies.
  - Develop a certification implementation schedule.

**PENGLOLAAN HUMAN CAPITAL**  
Human Capital Management

2. *Human Capital Readiness (HCR)*
    - a. Menetapkan profil kompetensi yang wajib dimiliki setiap *strategic job families*.
    - b. Membuat draf usulan penyusunan kebutuhan sertifikasi pegawai untuk bisnis penunjang.
    - c. Melaksanakan asesmen kompetensi dan pengukuran gap kompetensi.
  3. *Organization Capital Readiness (OCR)*
    - a. Menyusun strategi dan inisiatif strategis yang melibatkan *leader* dalam mengkaji *strategic map unit* berdasarkan strategi korporat (visi misi korporat, tema strategis korporat, dan *strategic map* korporat).
    - b. Melakukan umpan balik hasil asesmen untuk para talenta dan merencanakan program pengembangan talenta berdasarkan modul pengembangan.
    - c. Merencanakan program budaya unggul dengan fokus pada perilaku Maju (gigih dan gesit) dan Andal (peduli dan kompeten).
    - d. Merencanakan kegiatan CoC yang dilaksanakan secara rutin.
    - e. Melaksanakan LKS Bipartit sebagai forum komunikasi antara pekerja dan manajemen untuk membahas segala potensi permasalahan dan mencari solusi penyelesaian, sehingga tercapai Hubungan Industrial yang harmonis.
    - f. Melakukan *Forum Group Discussion (FGD)* perencanaan *Knowledge Management (KM)* yang dipimpin oleh *leader*, yang terdiri dari topik *Community of Practice (CoP)*, rencana *Knowledge Sharing (KS)*, *Critical Knowledge*, dan *Knowledge Capturing (KC)*.
    - g. Melakukan sosialisasi KM ke seluruh unit HP.
2. Human Capital Readiness (HCR)
    - a. Establish competency profiles that must be held in every strategic job family.
    - b. Prepare a proposal draft for employee certification needs in supporting business.
    - c. Carry out competency assessment and measure competency gap.
  3. Organization Capital Readiness (OCR)
    - a. Develop strategic strategies and initiatives that involve leaders in reviewing unit strategic map based on corporate strategy (corporate vision and mission, corporate strategic theme, and corporate strategic maps).
    - b. Conduct feedback on assessment result for talents and plan a talent development program based on the development module.
    - c. Plan superior cultural program focused on Forward behavior (persistent and nimble) and Reliable behavior (caring and competent).
    - d. Plan routine CoC activities.
    - e. Implement Bipartite Cooperation Agency as a communication forum between workforces and management to discuss all potential problems and find solutions to solve them, so as to achieve harmonious Industrial Relations.
    - f. Conduct a Focus Group Discussion (FDG) on Knowledge Management (KM) planning led by a leader, which consists of Community of Practice (CoP) topics, Knowledge Sharing (KS) plans, Critical Knowledge, and Knowledge Capturing (KC).
    - g. Conduct KM socialization to all HP units.

# TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology





**Sistem informasi yang andal membantu Perusahaan mengelola data tenaga kerja, alat kerja, alat pelindung diri dan sumber daya lainnya sehingga menghasilkan efektivitas biaya yang optimal dan kecepatan respons dalam memberikan pelayanan operasi dan pemeliharaan.**

**Reliable information systems help the Company manage such data of workforce, work equipment, personal protective equipment and other resources so as to produce optimal cost effectiveness and speed response in providing operation and maintenance services.**

Perusahaan mengembangkan teknologi informasi (*information technology*/IT) untuk mendukung kegiatan operasional. Perusahaan membutuhkan dukungan sistem IT yang dapat membantu pengelolaan sumber daya manusia, informasi, infrastruktur, alat kerja, alat pelindung diri dan sumber daya lainnya dengan baik sehingga menghasilkan efektivitas biaya yang optimal. Selain itu, bisnis inti HP yang berkaitan erat dengan pelanggan membutuhkan kecepatan dalam merespons keluhan pelanggan. Dengan dukungan sistem informasi yang andal, petugas di lapangan dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yang mengalami gangguan instalasi.

Perusahaan telah memiliki pedoman tata kelola TI atau IT *governance* yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 0032.K/STH.03.01/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT Haleyora Power. IT *governance* memberikan suatu struktur yang mampu menghubungkan proses-proses dan sumber daya IT dengan strategi dan tujuan Perusahaan.

### **IT MASTER PLAN**

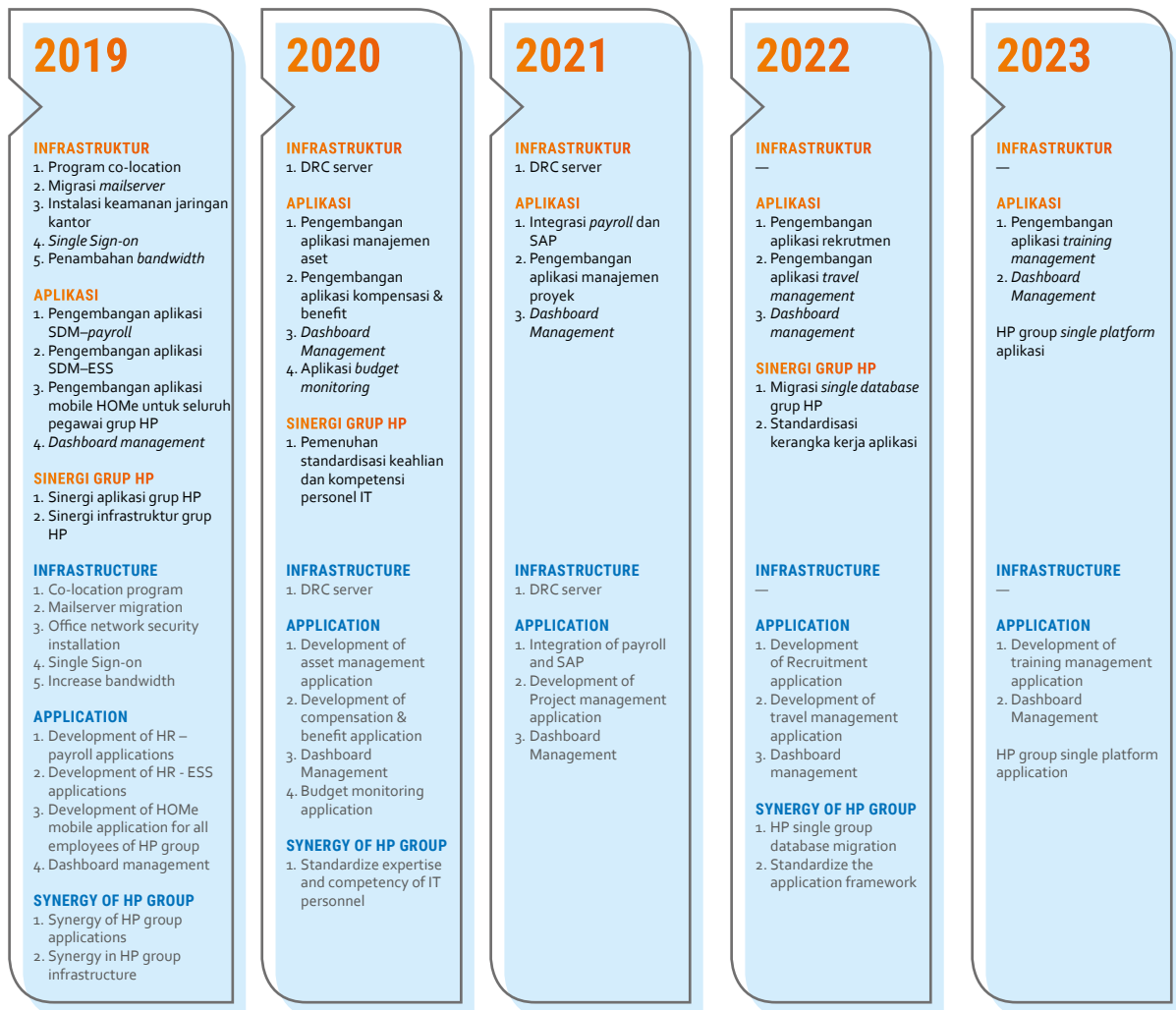
Perusahaan menyusun *Master Plan* 5 tahunan sebagai arahan kebijakan dan strategi dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan sistem dan infrastruktur IT sehingga lebih sistematis, terukur, terarah dan berkesinambungan. Dalam *Master Plan* 2019-2023, fokus pengembangan IT dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 1) Infrastruktur, 2) Aplikasi, 3) Sinergi grup HP, dan 4) HP Group *Single Platform* Aplikasi. Rencana pengembangan masing-masing kelompok dalam 5 tahun ke depan digambarkan dalam diagram berikut:

The Company develops information technology (IT) to support its operations. The Company needs the support of IT systems that can help manage human resources, information, infrastructure, work equipment, personal protective equipment and other resources properly so as to optimize cost effectiveness. In addition, HP's core business that is closely related to customers requires speed in responding to customer complaints. With the support of a reliable information system, officers in the field can move swiftly in providing services to customers who experience installation problems.

The Company already has IT governance guidelines stipulated in Decision of Board of Directors No. 0032.K/STH.03.01/2016 dated September 19, 2016 concerning General Policy and Guidelines for Information Technology Governance in PT Haleyora Power. IT Governance provides a structure to enable connection of IT processes and resources with the Company's strategy and objectives.

### **IT MASTER PLAN**

The Company prepared a 5-year IT Master Plan as a policy and strategy direction for planning and implementation of IT systems and infrastructure so that they become more systematic, measurable, directed and sustainable. In IT Master Plan 2019-2023, the focus of IT development is divided into 4 groups, namely: 1) Infrastructure, 2) Applications, 3) HP group synergy and 4) HP Group Single Platform Application. Each group's development plan for the next 5 years is illustrated in the following diagram:








### PENCAPAIAN TAHUN 2018

Pengembangan IT pada tahun 2018 difokuskan untuk membangun landasan bagi pelaksanaan IT *Master Plan* 2019-2023 dengan pencapaian sebagai berikut:

### 2018 ACHIEVEMENTS

IT development in 2018 was focused on building a foundation for implementation of 2019-2023 IT Master Plan with the following achievements:

 <p><b>INFRASTRUKTUR</b> Infrastructure</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan <i>data center</i> HP Construction of HP data center</li> <li>• <i>Bandwidth internet</i> Internet bandwidth</li> <li>• Migrasi <i>mail server</i> Mail server migration</li> <li>• <i>Setup VM dan sistem backup</i> VM setup and backup system</li> </ul>
 <p><b>KEAMANAN JARINGAN</b> Network Security</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Setup jaringan</i> Network setup</li> <li>• Sophos Firewall</li> <li>• Active directory</li> <li>• Wireless router</li> </ul>
 <p><b>APLIKASI</b> Application</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HOME – Inspeksi jaringan <i>tier 1 dan 2</i> HOME – Network inspection tier 1 and 2</li> <li>• HOME – Inspeksi trafor <i>tier 1 dan 2</i> HOME – Trafor inspection tier 1 and 2</li> <li>• HOME – Pemeliharaan jaringan dan trafo dan SWP HOME – Network, transformer and SWP maintenance</li> <li>• HOME – Laporan aktivitas harian, <i>invoice, cash card, BBM</i> HOME – Daily activity report, invoice, cash card, fuel</li> </ul>

#### Haleyora on My Finger (HOME)

Perusahaan mengembangkan *platform* aplikasi baru yang mawadahi berbagai aplikasi operasional dan *supporting* dalam satu *interface*, mulai dari fungsi transaksi, sistem pelaporan *online, dashboard*, hingga fungsi analisis dan evaluasi. *Platform* ini memungkinkan tim IT bekerja lebih efisien dalam melakukan pemeliharaan aplikasi dan mengintegrasikan aplikasi lainnya ke depan.

*Platform* aplikasi berbasis *mobile* tersebut dinamakan HOME (Haleyora on my finger) yang diluncurkan pada bulan November 2017. HOME merupakan perbaikan dan pengembangan versi 3.0 dari aplikasi SIMKU yang telah

#### Haleyora on My Finger (HOME)

The Company developed a new application platform that accommodates a variety of operational and supporting applications in one interface, ranging from transaction function, online reporting system, dashboard, to analysis and evaluation functions. This platform allows the IT team to work more efficiently in maintaining applications and integrating other applications going forward.

The mobile-based application platform called HOME (Haleyora on my finger) was launched in November 2017. HOME is an improvement and development of version 3.0 of the previous SIMKU application. In HOME platform, there

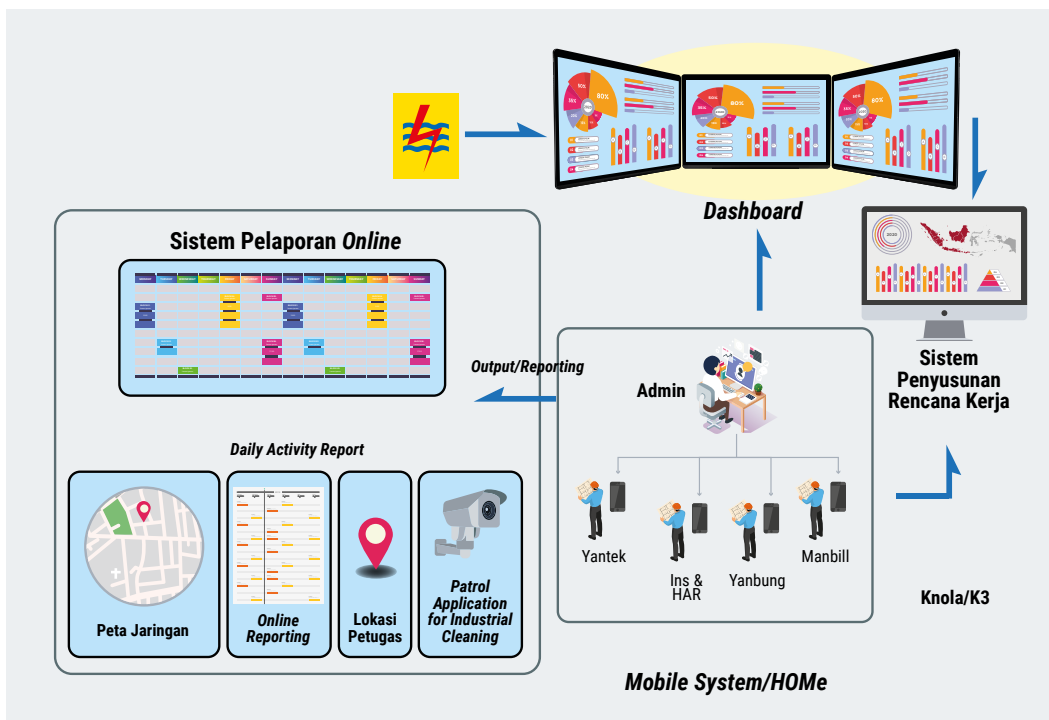
digunakan sebelumnya. Di dalam *platform* HOME antara lain terdapat aplikasi seperti inspeksi dan pemeliharaan untuk pekerjaan O&M, aplikasi BBM *Online* untuk menghitung penggunaan bahan bakar minyak (BBM) setiap area, aplikasi Invoice untuk memantau jumlah dan kontrak serta status pembayaran dari pelanggan, aplikasi Human Resources Information System (HRIS) untuk memfasilitasi manager area dalam mengusulkan kebutuhan tenaga kerja, aplikasi Mobile Shifting memantau *shift* antar regu di lapangan, serta aplikasi untuk memantau SPPD dan aset.

are applications, such as inspection and maintenance for O&M work, BBM Online application to calculate the use of fuel (BBM) in each area, Invoice application to monitor the amounts, contracts and payment status of customers, Human Resources Information System (HRIS) to facilitate the area manager in proposing workforce needs, Mobile Shifting application to monitor shifts among teams in the field and applications to monitor SPPD and assets.



Aplikasi HOME telah digunakan di sebagian besar wilayah kerja Perusahaan di Jawa dan Sumatera seperti Riau, Rantau Prapat, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta (Area Menteng dan Ciracas), Banten, Cilegon, beberapa area di Jawa Tengah, dan beberapa area di Jawa Timur. Ke depan, HOME akan dilengkapi dengan modul dan fitur-fitur pendukung lainnya untuk membantu kinerja harian seluruh tenaga kerja Perusahaan.

HOME application has been used in most of the Company's work areas in Java and Sumatera, such as Riau, Rantau Prapat, Lampung, Bangka Belitung, West Java, Jakarta (Menteng and Ciracas Areas), Banten, Cilegon, several areas in Central Java and East Java. Going forward, HOME will be equipped with modules and other supporting features to help the daily performance of the Company's workforce.



Di akhir tahun 2018, penyempurnaan HOME mencakup perbaikan modul Kinerja Unit untuk memudahkan tim di area memasukkan data ke dalam aplikasi HOME, sehingga kinerja per area dapat segera terpantau dan dianalisis. Selain itu, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan *upskilling* di dua region dan akan dilanjutkan ke empat region lainnya di awal tahun 2019. Berikut adalah *timeline* kegiatan *upskilling* HOME hingga kuartal I 2019.

At end of 2018, HOME refinement includes improvement of Unit Performance module to facilitate teams in the areas to enter data into the HOME application, so that each area performance can be monitored and analyzed immediately. In addition, the Company has conducted *upskilling* activities in two regions and will continue to four other regions in early 2019. Following is the timeline of HOME's *upskilling* activities until the first quarter of 2019.

NO	AGENDA UPSKILLING HOME	2018		2019				STATUS	KETERANGAN Description
		NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR		
1	Region 2–Jawa Tengah & DIY Region 2–Central Java & DIY							Selesai Done	Seluruh Area Whole area
2	Region 1–Jawa Barat Region 1–West Java							Selesai Done	Seluruh Area Whole area
3	Region 4–Sumatera Barat Region 4–West Sumatra							Selesai Done	Seluruh Area Whole area
4	Region 5–Area Lampung							Dijadwalkan Scheduled	Seluruh Area Whole area

NO	AGENDA UPSKILLING HOME	2018		2019				STATUS	KETERANGAN Description
		NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR		
5	Region 6–WRKR							Dijadwalkan Scheduled	Seluruh Area Whole area
6	Region 5–DKI Jakarta							Dijadwalkan Scheduled	Seluruh Area Whole area

Hingga saat ini, sebanyak 3 unit PLN telah mengajukan permintaan akses dan pelatihan penggunaan aplikasi HOME, yaitu PLN UID Lampung, PLN UID Jawa Barat, dan PLN Wilayah Sumatera Barat. Sosialisasi telah dilaksanakan pada PLN UID Lampung pada area kerja Perusahaan, dan PLN UID Jawa Barat untuk seluruh area di Jawa Barat, baik area kerja HP maupun non HP. PLN UID Jawa Barat telah meminta seluruh area Jawa Barat menggunakan aplikasi HOME untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan data aset.

### ListriQu

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa, Perusahaan menghadapi tingkat kompetisi yang tinggi terutama di dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, Perusahaan terus menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi, antara lain dengan menghadirkan layanan pelanggan berbasis digital.

Sebagaimana PLN yang telah memiliki aplikasi PLN MOBILE untuk melayani masyarakat, HP mengembangkan aplikasi serupa yaitu ListriQu, yang merupakan pengembangan dari produk layanan Q-Ins. ListriQu merupakan inovasi pengembangan layanan Perusahaan dalam rangka menyelaraskan diri atau mengharmonisasikan diri terhadap tuntutan perubahan.

ListriQu yang merupakan kependekan dari Layanan Instalasi Listrik Quick & Quality adalah aplikasi layanan jasa kepada pelanggan yang dapat diunduh di telepon pintar. Masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut dan menggunakannya jika terjadi gangguan instalasi di rumahnya.

Skema bisnis ListriQu melibatkan Perusahaan sebagai pemilik proses bisnis yang akan mengelola *human capital*, *material*, dan operasional layanan, dengan pihak ICON+ yang akan mengelola *mobile system*, *online payment*, dan *back end system*, serta PLN (DIVORJBB, Niaga dan STI). Pada akhir tahun 2018, pengembangan aplikasi ListriQu mulai dialihkan ke pihak ICON+ di mana ListriQu ditargetkan sudah terintegrasi langsung dengan sistem Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT), Aplikasi Pelayanan Pelanggan

To date, there are 3 PLN units that have submitted requests for access and training on HOME application, namely PLN UID Lampung, PLN UID West Java and PLN West Sumatra. The socialization has been carried out at PLN UID Lampung in the Company's work area and PLN UID West Java for all areas in West Java, both HP and non-HP work areas. PLN UID West Java required all areas of West Java to use HOME application to enhance accountability in asset data management.

### ListriQu

As a company engaged in the service sector, the Company faces a fierce competition, especially in the use of information technology. Therefore, the Company continues to adapt to technological advancements, including by providing digital-based customer service.

Since PLN has PLN MOBILE application to serve the public, HP is developing a similar application, ListriQu, which is a development of Q-Ins service product. ListriQu is an innovation in developing the Company's services in order to harmonize itself with the demands of change.

ListriQu which stands for Quick & Quality Electrical Installation Service is a customer service application that can be downloaded on smartphones. Public can access the application and use it if there is an installation disruption in their homes.

ListriQu business scheme involves the Company as the business process owner that will manage human capital, material and service operations, with ICON+ that will manage the mobile system, online payment and back end system, as well as PLN (DIVORJBB, Niaga and STI). At end of 2018, ListriQu application development was transferred to ICON+ where ListriQu is targeted to be integrated directly with Integrated Complaints Application (APKT) system, Centralized

Terpusat (AP2T), dan Mobile APKT PLN sehingga setiap pengaduan yang muncul di sistem PLN tersebut yang masuk ke dalam kategori gangguan pada instalasi milik pelanggan (IML) secara otomatis akan terhubung langsung ke sistem ListriQu.

Customer Service Application (AP2T) and PLN’s Mobile APKT so that every complaint that appears in PLN system that is categorized as disruption to the customer’s installation (IML) will automatically and directly be connected to ListriQu system.







# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



## Perusahaan menerapkan GCG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice* untuk membangun citra korporasi yang berintegritas dan terpercaya.

The Company implements GCG in accordance with the applicable laws and regulations as well as the best practices to build a corporate image with integrity and trust.

### KOMITMEN

PT Haleyora Power berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* ("GCG") untuk membangun citra korporasi yang berintegritas dan terpercaya. Integritas sudah menjadi bagian dari tata nilai Perusahaan "*Believe*" di mana setiap insan Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa mengedepankan integritas perilaku serta integritas penyampaian data dan proses bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan menerapkan GCG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice* untuk memberikan nilai dan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, pelanggan, pemangku kepentingan dan masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas GCG antara lain dilakukan dengan menerbitkan dan melakukan sosialisasi berbagai pedoman dan kebijakan terkait GCG, penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) yang konsisten, serta melakukan penilaian penerapan GCG oleh pihak independen secara berkala.

### PEDOMAN DAN KEBIJAKAN GCG

Perusahaan terus berupaya memperkuat komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, terukur dan berkelanjutan. Perusahaan telah memiliki perangkat pedoman GCG, kebijakan serta prosedur proses bisnis terkait GCG (*GCG softstructure*) sebagai panduan bagi seluruh insan Perusahaan dalam menerapkan praktik GCG terbaik di setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Pedoman GCG (*GCG Code*) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
2. Pedoman Perilaku/*Code of Conduct* (CoC) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;

### COMMITMENT

PT Haleyora Power is committed to implementing good corporate governance ("GCG") to build a corporate image with integrity and trust. Integrity has become part of the Company's "*Believe*" value system in which every employee, in carrying out their duties, must always prioritize the integrity of behavior, data delivery and business processes based on GCG principles.

The Company implements GCG in accordance with the applicable laws and regulations as well as the best practices to provide optimal value and benefits for shareholders, customers, stakeholders and the community. Efforts to improve GCG quality are carried out by, among others, publishing and disseminating various guidelines and policies related to GCG, consistent enforcement of Code of Conduct (CoC) and periodic evaluation of GCG implementation by independent party.

### GCG GUIDELINES AND POLICIES

The Company continues to strengthen its commitment to implementing GCG principles in a consistent, measurable and sustainable manner. The Company has a set of GCG guidelines, policies and business process procedures related to GCG (*GCG soft structure*) as a guide for the Company's personnel in implementing GCG best practices in each of business activities. These documents include:

1. GCG Code issued in September 2016;
2. Code of Conduct (CoC) issued in September 2016;

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

3. Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
  4. Keputusan Direksi No. 170.K/DIR-HP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT Haleyora Power;
  5. Keputusan Direksi No. 171.K/DIR-HP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pedoman Pengawasan Internal PT Haleyora Power;
  6. Peraturan Direksi No. 001.P/DIR-HP/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Haleyora Power;
  7. Peraturan Direksi No. 0003.P/DIR-HP/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Haleyora Power;
  8. Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR-HP/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Haleyora Power;
  9. Peraturan Direksi No. 0141.P/DIR-HP/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pedoman *Safety, Integrity* dan *Quality* di Lingkungan PT Haleyora Power;
  10. Keputusan Direksi No. 0016/DIR-HP/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Haleyora Power dan Edaran Direksi No. 0001.E/DIR-HP/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Haleyora Power;
  11. Keputusan Direksi No. 0031.K/DIR-HP/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Haleyora Power;
  12. Peraturan Perusahaan PT Haleyora Power No. KEP.646/PHIJSK-PK/PP/V/2018 tanggal 24 Maret 2018 edisi 2018-2020;
  13. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 001.E/DIR-HP/2018 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System*.
3. Board Manual issued in September 2016;
  4. Decision of Board of Directors No. 170.K/DIR-HP/2014 dated Desember 1, 2014 concerning Internal Control System Policy of PT Haleyora Power;
  5. Decision of Board of Directors No. 171.K/DIR-HP/2014 dated Desember 1, 2014 concerning Internal Monitoring Guidelines of PT Haleyora Power;
  6. Regulation of Board of Directors No. 001.P/DIR-HP/2017 concerning Guidelines for Report of State Officials Assets (LHKPN) in PT Haleyora Power;
  7. Regulation of Board of Directors No. 0003.P/DIR-HP/2017 concerning Guidelines for Gratification Control in PT Haleyora Power;
  8. Regulation of Board of Directors No. 0015.P/DIR-HP/2016 dated May 11, 2016 concerning Risk Management Implementation in PT Haleyora Power;
  9. Regulation of Board of Directors No. 0141.P/DIR-HP/2017 dated Agustus 29, 2017 concerning Guidelines for Safety, Integrity and Quality in PT Haleyora Power;
  10. Decision of Board of Directors No. 0016/DIR-HP/2016 dated May 25, 2016 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services of PT Haleyora Power and Circular of Board of Directors No. 0001.E/DIR-HP/2016 concerning Technical Guidelines for Procurement of Goods/Services of PT Haleyora Power;
  11. Decision of Board of Directors No. 0031.K/DIR-HP/2016 dated September 16, 2016 concerning Guidelines for Implementation of Services, Disclosures and Transparency of Public Information in PT Haleyora Power;
  12. PT Haleyora Power Corporate Regulation No. KEP.646/PHIJSK-PK/PP/V/2018 dated March 24, 2018 edition 2018-2020;
  13. Whistleblowing System, based on Circular Letter of Board of Directors No. 001.E/DIR-HP/2018 Regarding Whistleblowing System.

**DEWAN KOMISARIS**  
 Board of Commissioners

**DEWAN KOMISARIS**

**BOARD OF COMMISSIONERS**

**Komposisi Anggota dan Dasar Hukum Pengangkatan**

Sampai dengan tanggal 1 September 2018, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Composition and Legal Basis of Appointment**

Prior to September 1, 2018, composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

NAMA Name	JABATAN Position	DASAR PENGANGKATAN Appointment Basis
Fahmi El Amruzi	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan atau Pergantian Anggota Dewan Komisaris tanggal 18 September 2017
Okto Rinaldi	Komisaris Commissioner	Circular GMS on Dismissal and Appointment or Substitution of the Board of Commissioners' Member dated September 18, 2017

Selanjutnya, Keputusan RUPS Sirkuler PT Haleyora Power tanggal 1 September 2018 menetapkan pemberhentian Okto Rinaldi sebagai Komisaris PT Haleyora Power dan mengangkat serta menetapkan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris PT Haleyora Power. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per 1 September 2018 hingga 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Subsequently, Circular Decision of PT Haleyora Power's GMS dated September 1, 2018 stipulated dismissal of Okto Rinaldi as Commissioner of PT Haleyora Power and appointed Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioners of PT Haleyora Power. Accordingly, composition of the Company's Board of Commissioners as of September 1, 2018 to December 31, 2018 was as follows:

NAMA Name	JABATAN Position	DASAR PENGANGKATAN Appointment Basis
Fahmi El Amruzi	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Pemberhentian Okto Rinaldi dan Pengangkatan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris tanggal 1 September 2018 Circular GMS on Dismissal of Okto Rinaldi and Appointment of Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioner dated September 1, 2018
Karyawan Aji	Plt. Komisaris Act. Commissioner	
Purnama T. Sianturi	Plt. Komisaris Act. Commissioner	

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi mengelola Perusahaan dengan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta bertindak dengan itikad baik untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

**Duties and Responsibilities**

Board of Commissioners is a corporate organ that functions and is responsible for carrying out supervisory duties and providing advices to Board of Directors. Board of Commissioners must ensure that Board of Directors manages the Company in compliance with the provisions of the Company's Articles of Association, GMS resolutions, the laws and regulations; implements the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJPP); and acts in good faith to maximize the Company's value for shareholders and stakeholders.

## DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijabarkan di dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Secara umum, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris mencakup: (1) Fungsi pengawasan; (2) Pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS; (3) Sistem pengendalian internal; (4) Keterbukaan dan kerahasiaan informasi; serta (5) Etika berusaha dan anti korupsi.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat atas pengendalian internal Perusahaan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat di dalam Perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus bertindak secara kolektif berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri. Pembagian tugas Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

NAMA Name	JABATAN Position	TUGAS Duties
Fahmi El Amruzi	Komisaris Utama President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memimpin Rapat Dewan Komisaris</li> <li>Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris</li> <li>Ketua Komite Audit</li> <li>Chairing the BOC meetings</li> <li>Coordinating duties of the BOC members</li> <li>Chairman of Audit Committee</li> </ul>
Karyawan Aji	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Ketua Komite GCG & Manajemen Risiko Chairman of GCG & Risk Management Committee
Purnama T. Sianturi	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Anggota Komite Audit Audit Committee Member

### Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja Pengawasan Tahun 2018. Dewan Komisaris memantau dan memberikan arahan kepada Direksi di dalam forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, menelaah dan memberikan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen, Laporan Manajemen Risiko, Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) PLN,

Duties and responsibilities of Board of Commissioners are set out in Board Manual ratified by Board of Commissioners and Board of Directors. In general, duties and obligations of Board of Commissioners include: (1) Supervisory function; (2) Performing tasks related to GMS; (3) Internal control system; (4) Information disclosure and confidentiality; and (5) Business ethics and anti-corruption.

Board of Commissioners' supervisory duties are carried out by reviewing, discussing and providing advices on the Company's internal control, including all systems and processes within the Company that are designed to provide adequate confidence in achievement of the Company's goals, specifically in improving operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting and compliance with the applicable laws and regulations.

### Allocation of Duties of Board of Commissioners

Board of Commissioners must act collectively based on decision of Board of Commissioners. Allocation of duties among members of Board of Commissioners is self-governing. Allocation of duties of the Company's Board of Commissioners is as follows:

### Board of Commissioners Supervisory Report

Board of Commissioners performed supervisory duties in accordance with 2018 Supervisory Work Plan. Board of Commissioners monitored and provided guidance to Board of Directors in Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors, reviewed and provided Board of Commissioners' responses to Management Reports, Risk Management Reports, Audit Reports (LHA) from PLN Internal

**DEWAN KOMISARIS**  
Board of Commissioners

SPI Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan semua tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi dan atau persetujuan Dewan Komisaris, serta kegiatan pengawasan lainnya. Rincian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**A. Kegiatan Pengawasan**

1. Pengawasan atas efektivitas dan efisiensi operasi dan investasi, meliputi pengawasan atas efektivitas pengelolaan organisasi dan SDM, usulan RKAP dan RJPP, dan pengelolaan risiko.
2. Pengawasan atas keandalan pelaporan keuangan, meliputi pengawasan atas prosedur penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian, sistem informasi serta temuan audit oleh auditor eksternal.
3. Pengawasan atas laporan pelaksanaan RKAP berupa Laporan Manajemen dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen triwulanan dan tahunan, serta pengawasan atas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
4. Pengawasan atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pengawasan atas efektivitas audit internal, pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal, serta pengawasan atas penerapan GCG.
5. Pemberian nasihat dan teguran kepada Direksi.
6. Pengawasan atas kinerja Direksi secara individu maupun kolektif.

**B. Produk Pengawasan**

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat, nasihat, tanggapan maupun meminta perhatian Direksi baik di dalam forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, maupun dalam bentuk surat Dewan Komisaris, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan struktur organisasi
2. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017
3. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018
4. Pembagian laba bersih tahun 2017
5. Penunjukan KAP untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2018
6. RKAP tahun 2018
7. RJPP tahun 2018-2022
8. RKAP tahun 2019

Audit Unit (SPI), the Company's SPI and Public Accounting Firm (KAP) and all measures of Board of Directors that required recommendations and or approvals of Board of Commissioners, as well as other supervisory activities. Details of implementation of supervisory duties of Board of Commissioners during 2018 were as follows:

**A. Supervisory Activities**

1. Supervision of effectiveness and efficiency of operations and investments, including monitoring of effectiveness of organizational and HR management, RKAP and RJPP proposals and risk management.
2. Supervision of reliability of financial reporting, including monitoring of procedures for preparation of Consolidated Financial Statements, information system and audit findings of external auditor.
3. Supervision of RKAP implementation report in form of Management Report and Realization of quarterly and annual Key Performance Indicators (KPI) of Management, as well as audit work conducted by external auditor.
4. Supervision of the Company's compliance with applicable laws and regulations, including oversight of the effectiveness of internal audits, supervision of follow-up to the findings of external audit findings, and supervision of the implementation of GCG.
5. Providing advice and reprimands to the Directors.
6. Supervision of the performance of the Directors individually or collectively.

**B. Supervisory Products**

Board of Commissioners provided insights, advices and responses and requests Board of Directors' explanation, either in joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors or in Board of Commissioners letters, pertaining to the following matters:

1. Organizational structure refinement
2. Tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors for 2017
3. Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors for 2018
4. Allocation of net income in 2017
5. Appointment of KAP for audit of Financial Statements for financial year 2018
6. 2018 RKAP
7. 2018-2022 RJPP
8. 2019 RKAP



## DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

9. RJPP tahun 2019-2023
10. Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan tahun 2018
11. Laporan pencapaian KPI triwulanan dan tahunan tahun 2018
12. Laporan manajemen risiko triwulanan dan tahunan tahun 2018
13. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal
14. Usulan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan
15. Usulan pengangkatan pejabat satu level di bawah Direksi
16. Persetujuan pengambilalihan saham minoritas perorangan PT Haleyora Powerindo (HPI)
17. Isu-isu lainnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari fakta/kenyataan di lapangan maupun berdasarkan laporan Direksi pada saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

### C. Pemberian Tanggapan atau Laporan Kepada RUPS

Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan, usulan, rekomendasi dan laporan kepada RUPS mengenai hal-hal berikut:

1. Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris tahun 2018
2. Laporan perkembangan realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan I, II dan III tahun 2018
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2018
4. Rekomendasi tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2017 dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018
5. Rekomendasi penggunaan laba bersih 2017
6. Usulan KAP untuk audit tahun 2018
7. Pendapat Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT Haleyora Power tahun 2017
8. Pendapat Dewan Komisaris atas RKAP 2018
9. Pendapat Dewan Komisaris atas RJPP 2018-2022

### Program Induksi bagi Komisaris Baru

Perusahaan menyelenggarakan program induksi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pada tahun 2018. Program berlangsung pada tanggal 12 September 2018 antara lain berupa paparan mengenai Perusahaan; visi, misi dan tujuan Perusahaan; strategi; rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang; lingkup kegiatan; kinerja keuangan dan

9. 2019-2023 RJPP
10. 2018 quarterly and annual Management Reports
11. 2018 quarterly and annual KPI achievement reports
12. 2018 quarterly and annual risk management reports
13. Follow-up on external and internal audit findings
14. Proposed Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries
15. Proposed appointment of officials at one level below Board of Directors
16. Approval for acquisition of individual minority shares of PT Haleyora Powerindo (HPI)
17. Other issues based on information obtained from facts or reports of Board of Directors during joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors

### C. Responses or Reports to GMS

Board of Commissioners submits responses, proposals, recommendations and reports to GMS pertaining to the following matters:

1. Board of Commissioners' 2018 Work Plan and KPI
2. Report on progress of realized KPI of Board of Commissioners for quarter I, II and III 2018
3. Report on Implementation of Supervisory Duties of Board of Commissioners and realized KPI of Board of Commissioners in 2018
4. Recommendation on tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2017 and remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2018
5. Recommendation on the use of net income in 2017
6. Proposed KAP for 2018 audit
7. Opinion of Board of Commissioners on 2017 Annual Report of PT Haleyora Power
8. Opinion of Board of Commissioners on 2018 RKAP
9. Opinion Board of Commissioners on 2018-2022 RJPP

### Induction Program for New Commissioners

The Company held an induction program for newly appointed members of Board of Commissioners in 2018. The program took place on September 12, 2018, in the form of, among others: introduction to the Company; vision, mission and objectives of the Company; strategies; short term and long term work plans; scope of activities; financial and operational



**DEWAN KOMISARIS**  
 Board of Commissioners

operasi; peluang dan risiko yang dihadapi; serta aspek-aspek strategis lainnya. Program induksi difasilitasi oleh Corporate Secretary dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**Program Pengembangan Kompetensi**

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

NAMA Name	TANGGAL Date	PROGRAM PENGEMBANGAN Development Program	TEMPAT Venue
Fahmi El Amruzi Okto Rinaldi	26 Januari/January	Kunjungan Kerja/Work Visit	Bandung
	26 Februari/February	Kunjungan Kerja/Work Visit	Bogor
	25 April/April	Leadership Course	London, UK
	11 Juni/June	Kunjungan Kerja/Work Visit	Pangkalpinang
	9 Agustus/August	Expand Leadership	Bali
	21 Desember/December	Kunjungan Kerja/Work Visit	Surabaya
Karyawan Aji	12 September/September	Induksi Komisaris Baru/ Induction of New Commissioner	Jakarta
Purnama T. Sianturi	21 Desember/December	Kunjungan Kerja/Work Visit	Surabaya

**Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya**

Dewan Komisaris memiliki Komite Audit dan Komite GCG & Manajemen Risiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas aspek-aspek operasional dan strategis Perusahaan.

**Kinerja Komite Audit**

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah menelaah dokumen RKAP 2019, RJPP 2018-2022, serta Laporan Manajemen dan pencapaian KPI Manajemen triwulanan dan tahunan 2018. Komite Audit telah menyampaikan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam penyusunan arahan, rekomendasi, nasihat dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi baik secara tertulis maupun yang disampaikan di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Atas dasar kajian Komite Audit, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan/tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS. Komite Audit juga telah melaksanakan tugas khusus yaitu melakukan kajian atas rencana aksi korporasi pengambilalihan saham minoritas perorangan di PT Haleyora Powerindo (HPI).

performances; existing opportunities and risks; and other strategic aspects. Induction program is facilitated by Corporate Secretary and attended by all members of Board of Directors and Board of Commissioners.

**Competency Development Program**

In 2018, Board of Commissioners participated in the following competency development program:

**Performance Assessment of Committees of Board of Commissioners and Basis of Assessment**

Board of Commissioners has Audit Committee and GCG & Risk Management Committee to assist in carrying out supervisory duties and functions of Board of Commissioners on the Company's operational and strategic aspects.

**Audit Committee Performance**

Throughout 2018, Audit Committee reviewed 2019 RKAP, 2018-2022 RJPP, as well as 2018 Management Reports and quarterly and annual KPI achievements of Management. Audit Committee submitted the review results to Board of Commissioners as input for Board of Commissioners in preparing guidelines, recommendations, advices and responses of Board of Commissioners to Board of Directors both in writing and in joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors. Based on Audit Committee's review, Board of Commissioners also submitted reports/responses of Board of Commissioners to GMS. Audit Committee also carried out a special task which was reviewing corporate action plan for acquisition of individual minority shares in PT Haleyora Powerindo (HPI).

## DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Berkean dengan pengendalian internal, Komite Audit telah menyelesaikan tugasnya untuk mengawasi tindak lanjut temuan hasil audit internal dan eksternal yang hasilnya telah didiskusikan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris. Terkait dengan Piagam SPI yang disusun pada tahun 2014, Komite Audit telah memberikan pendapatnya agar Piagam SPI dievaluasi dan dimutakhirkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan proses bisnis Perusahaan saat ini.

### Dasar Penilaian Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit pada tahun 2018 sangat memuaskan berdasarkan capaian KPI Komite Audit sebagai berikut:

Regarding internal control, Audit Committee conducted monitoring of follow-up on internal and external audit findings that had been discussed with Internal Audit Unit (SPI) and presented in Board of Commissioners meetings. Related to SPI Charter which was compiled in 2014, Audit Committee recommended SPI Charter evaluation and update according to changes and developments in the Company's current business processes.

### Basis for Performance Assessment of Audit Committee

Board of Commissioners considers Audit Committee's performance in 2018 to be very good based on KPI achievements of Audit Committee as follows:

PROGRAM KERJA	SASARAN Target		REALISASI Realization		Work Program
	PARAMETER	BOBOT Weight	TARGET	NILAI Score	
1. Rapat Komite termasuk rapat dengan Dewan Komisaris	14 kali/times	20	21 kali/times	20	Committee meetings include meetings with the Board of Commissioners
2. Risalah Rapat Komite	100%	15	100%	15	Minutes of Committee's Meeting
3. Kajian atas usulan yang disampaikan Direksi	100%	10	100%	10	Review of proposals submitted by the Board of Directors
4. Peningkatan kompetensi anggota Komite	1 kali/times	10	1 kali/times	10	Competence development of Committee members
5. Kunjungan kerja Komite	1 kali/times	5	1 kali/times	5	Committee work visit
6. Laporan hasil kunjungan kerja Komite	100%	5	100%	5	Report on the Committee's work visits
7. Rencana kerja dan KPI Komite	1 paper	20	1 paper	20	Committee's work plan and KPI
8. Laporan realisasi kegiatan dan KPI Komite	1 paper	15	2 paper	15	Report on Committee activities and KPI results
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>TOTAL</b>

### Kinerja Komite GCG & Manajemen Risiko

Komite GCG & Manajemen Risiko (GCG & MR) telah membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi, menguji, dan mengevaluasi strategi, sistem dan kebijakan Perusahaan di bidang manajemen risiko, GCG, nominasi dan remunerasi, pengembangan *human capital*, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### GCG & Risk Management Committee Performance

GCG & Risk Management (GCG & MR) Committee assists Board of Commissioners in supervising, testing and evaluating the Company's strategies, systems and policies in the areas of risk management, GCG, nomination and remuneration, human capital development and other tasks assigned by Board of Commissioners.

**DEWAN KOMISARIS**  
 Board of Commissioners

Komite GCG & MR telah menelaah dokumen RKAP 2019, RJPP 2018-2022, serta Laporan Manajemen dan pencapaian KPI Manajemen triwulanan dan tahunan 2018 sesuai dengan lingkup tugas Komite GCG & MR. Komite telah menyampaikan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam penyusunan arahan, rekomendasi, nasihat dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi baik secara tertulis maupun yang disampaikan di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Atas dasar kajian Komite GCG & MR, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan/tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS.

Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Komite GCG & MR telah melakukan kajian atas besaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2017 dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018. Usulan dan rekomendasi terkait tantiem dan remunerasi tersebut telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

**Dasar Penilaian Kinerja Komite GCG & Manajemen Risiko**

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite GCG & MR pada tahun 2018 sangat memuaskan berdasarkan capaian KPI Komite GCG & MR sebagai berikut:

GCG & MR Committee reviewed 2019 RKAP, 2018-2022 RJPP, as well as 2018 Management Reports and quarterly and annual KPI achievements of Management. Audit Committee submitted the review results to Board of Commissioners as input for Board of Commissioners in preparing guidelines, recommendations, advices and responses of Board of Commissioners to Board of Directors both in writing and in joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors. Based on GCG & MR Committee's review, Board of Commissioners also submitted reports/responses of Board of Commissioners to GMS.

In carrying out nomination and remuneration functions, CG & MR Committee conducted review on the amount of tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2017 and remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2018. Proposals and recommendations related to tantiem and remuneration were submitted by Board of Commissioners for GMS approval.

**Basis for Performance Assessment of GCG & Risk Management Committee**

Board of Commissioners considers GCG & MR Committee's performance in 2018 to be very good based on KPI achievements of GCG & MR Committee as follows:

PROGRAM KERJA	SASARAN Target		REALISASI Realization		Work Program
	PARAMETER	BOBOT Weight	TARGET	NILAI Score	
1. Penyusunan rencana kerja Komite	1 berkas/bundle	20	1 berkas/bundle	20	Preparing Committee working plan
2. Rapat Komite termasuk rapat dengan Dewan Komisaris	14 kali/times	20	23 kali/times	20	Committee meetings include with the Board of Commissioners
3. Kajian atas Laporan Manajemen Risiko	3 kali/times	10	3 kali/times	10	Review of Risk Management Report
4. Kajian atas usulan yang disampaikan Direksi	100%	10	100%	10	Review of proposals submitted by the Board of Commissioners
5. Peningkatan kompetensi anggota Komite	1 kali/times	10	1 kali/times	10	Competence development of Committee member
6. Kunjungan kerja Komite	1 kali/times	10	1 kali/times	10	Committee working visit
7. Laporan kegiatan Komite triwulanan dan tahunan	2 kali/times	10	2 kali/times	10	Committee activity report quarterly and annually
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>TOTAL</b>

## KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioner

### KOMISARIS INDEPENDEN

Sampai akhir tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Berdasarkan Permen tersebut, penyebutan jabatan Komisaris Independen harus disebutkan dalam keputusan pengangkatannya.

Namun demikian, sebagai pernyataan independensi, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## DIREKSI

### Komposisi Anggota dan Dasar Hukum Pengangkatan

Sampai dengan 31 Desember 2018, komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

NAMA Name	JABATAN Position	DASAR PENGANGKATAN Appointment Basis
Achmad Taufik Haji	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017
Sutrisno Samad	Direktur Keuangan Director of Finance	Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Director dated May 26, 2017
Sinung Triwulandari	Direktur Operasi Director of Operations	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017 Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated November 7, 2017

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur di dalam Board Manual. Direksi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus bertindak dengan itikad baik guna memaksimalkan nilai Perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Setiap anggota Direksi, termasuk Direktur Utama memiliki kedudukan dan posisi setara. Tugas

### INDEPENDENT COMMISSIONER

At end of 2018, the Company did not have any Independent Commissioner with the criteria set out in Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOE. Based on the Regulation, Independent Commissioner position must be stated in the decision of his/her appointment.

Nevertheless, as a statement of independence, all members of the Company's Board of Commissioners signed an Integrity Pact containing statement that they do not have financial, management, share ownership and/or family relations with other members of Board of Commissioners, members of Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with the Company that may influence their ability to act independently.

## BOARD OF DIRECTORS

### Composition and Legal Basis of Appointment

As of December 31, 2018, composition of the Company's Board of Directors was as follows:

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Board of Directors are regulated in Board Manual. Board of Directors carries out its duties, responsibilities and authorities in the best interests of the Company based on the Company's Articles of Association, GMS resolutions and the applicable laws and regulations. Board of Directors must act in good faith to maximize the value of the Company for the interests of shareholders and other stakeholders. Each member of Board of Directors, including President Director, has equal position. President

Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi berdasarkan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

### **Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi**

Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal. Pembagian tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

#### **1. Direktur Utama**

Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh anggota Direksi, dalam hal:

- a. Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan;
- b. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh;
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan;
- d. Menyiapkan RJPP;
- e. Menyampaikan RJPP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
- f. Menyiapkan RKAP yang merupakan pejabaran tahunan dari RJPP;
- g. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup untuk memperoleh pengesahan;
- h. Menyiapkan kebijakan umum sistem pengendalian internal;
- i. Melaksanakan kebijakan sistem pengendalian internal;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS.

#### **2. Direktur Keuangan**

Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan antara lain adalah:

- a. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi perencanaan sumber dana keuangan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan di masa depan;
- b. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi penyusunan RKAP serta dokumen keuangan lainnya;

Director's duty is to coordinate activities of Board of Directors according to scope of duties and responsibilities of each member of Board of Directors.

### **Allocation of Duties and Authorities of Members of Board of Directors**

Board of Directors allocates duties and authorities among members of Board of Directors to ensure implementation of duties and responsibilities as well as optimal use of its authorities. Allocation of duties and authorities of Board of Directors is as follows:

#### **1. President Director**

President Director's duty is to coordinate activities and implementation of duties of all members of Board of Directors, in terms of:

- a. Planning, developing and establishing general policies of the Company;
- b. Directing, developing and establishing comprehensive corporate management strategies;
- c. Controlling and evaluating all activities of the Company;
- d. Preparing RJPP;
- e. Submitting RJPP signed by Board of Commissioners and Board of Directors to GMS for approval;
- f. Preparing RKAP which is the annual translation of RJPP;
- g. Submitting Annual Report to GMS within 5 (five) months after financial year-end to obtain ratification;
- h. Preparing general policies of internal control system;
- i. Implementing general policies of internal control system;
- j. Performing other duties as stipulated by GMS.

#### **2. Director of Finance**

Duties and responsibilities of Director of Finance include:

- a. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for planning of financial resources according to the Company's future needs;
- b. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for preparation of RKAP, as well as other financial documents;

## DIREKSI

Board of Directors

- c. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan biaya, serta pengelolaan dan pengamanan pendapatan dari arus kas;
- d. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi akuntansi dan audit internal di bidang keuangan;
- e. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
- f. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengawasan kinerja usaha untuk tahun fiskal yang lalu dan berjalan, serta mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa depan;
- g. Menetapkan dan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan sudah didukung oleh pengambilan keputusan yang sesuai;
- h. Memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pejabat di bawahnya.

### 3. Direktur Operasi

Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi antara lain adalah:

- a. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai visi melalui perencanaan dan pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP, termasuk di dalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perusahaan dan merancang sistematika pendanaannya;
- b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pengadaan;
- c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik, perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis, termasuk di dalamnya hasil studi kelayakan, disain engineering, serta Rencana Kerja dan Spesifikasi (RKS) untuk pelaksanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan

- c. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for budget management of revenues and expenses, as well as management and safeguarding of revenues from cash flows;
- d. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for accounting and internal audit in finance;
- e. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for financial management and reporting in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK);
- f. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for business performance monitoring for the past and current financial years and making efforts to improve performance in the future;
- g. Establishing and ensuring all financial-related activities supported by appropriate decision making;
- h. Providing guidelines, advising and supervising subordinate officers.

### 3. Director of Operations

Duties and responsibilities of Director of Operations include:

- a. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in achieving the vision through planning and development of operations and maintenance services for power transmission and distribution and the Company's business development as outlined in RKAP and RJPP, including planning the Company's financial projections and designing its funding systematics;
- b. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in planning, development and implementation of procurement;
- c. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in development of power technology, research and development of operations and maintenance services for power transmission and distribution, strategic procurement of goods and services, including results of feasibility studies, engineering designs and Work Plans and Specifications (RKS) for procurement;
- d. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in managing power transactions, business partnerships, developing

**DIREKSI**  
 Board of Directors

- model bisnis layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta pengembangan anak perusahaan dan usaha patungan;
- e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam manajemen risiko, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan ketenagalistrikan (K2), serta kepatuhan;
  - f. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko, melakukan pembinaan dan pengembangan anak perusahaan dan usaha patungan, serta pembinaan dan pengembangan region dan unit di bawah Direktorat Operasi;
  - g. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta mengelola pendapatan dan biaya operasi;
  - h. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam hal pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pemusatan serta integrasi sistem dan aplikasi teknologi informasi korporat.

- business models of operations and maintenance services for power transmission and distribution, as well as developing subsidiaries and joint ventures;
- e. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in risk management, occupational health and safety (K3), power safety (K2) and compliance;
  - f. Establishing and ensuring implementation of business development and risk management, providing guidance and development of subsidiaries and joint ventures, as well as fostering and developing regions and units under Directorate of Operations;
  - g. Establishing and ensuring implementation of operation and maintenance services management for power transmission and distribution, as well as managing operating revenues and expenses;
  - h. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in management of information systems and technology, centralization and integration of corporate information technology systems and applications.

**Program Induksi bagi Direktur Baru**

Pada tahun 2018 tidak diadakan program induksi bagi Direktur baru.

**Induction Program for New Directors**

In 2018 there was no induction program for new Directors.

**Program Pengembangan Kompetensi**

Pada tahun 2018, Direksi telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

**Competency Development Program**

In 2018, Board of Directors participated in the following competency development program:

NAMA Name	TANGGAL Date	PROGRAM PENGEMBANGAN Development Program	TEMPAT Venue
Achmad Taufik Haji	23-27 April/April	Leadership for Director	London, UK
	23-27 Juli/July	Corporation, Merger & Acquisition, and Subsidiaries	Jakarta
	8-9 Oktober/October	Directorship Program	Jakarta
Sutrisno Samad	23-27 April/April	Corporation, Merger & Acquisition, and Subsidiaries	Jakarta
	9-10 Oktober/October	Commissioner & Directorship	Bali
Purnama T. Sianturi	23-27 April/April	Corporation, Merger & Acquisition, and Subsidiaries	Jakarta
	9-10 Oktober/October	Commissioner & Directorship	Bali



## DIREKSI

Board of Directors

### Penilaian atas Kinerja Komite Direksi dan Dasar Penilaiannya

Sampai akhir tahun 2018 Direksi tidak memiliki dan membentuk komite di bawah Direksi.

### PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*)

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. *Board Manual* adalah perangkat yang menjadi acuan dasar pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. *Board Manual* disusun dengan mengacu kepada hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik terbaik GCG. *Board Manual* menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan efisien.

Hal-hal yang diatur dalam *Board Manual* yang terkait Dewan Komisaris di antaranya adalah: (1) Persyaratan, Komposisi, keanggotaan, dan masa Jabatan Dewan Komisaris; (2) Program pengenalan dan peningkatan kapabilitas; serta (3) Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Dewan Komisaris.

Sedangkan pengaturan terkait Direksi antara lain adalah: (1) Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan Direksi; (2) Tanggung jawab Direksi; (3) Tugas dan kewajiban Direksi; (4) Wewenang Direksi; (5) Hak-hak Direksi; (6) Etika jabatan; (7) Penerapan kebijakan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi; (8) Pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi; (9) Pembagian tugas Direksi; dan (10) Rapat Direksi.

### Performance Assessment of Committees of Board of Directors and Basis of Assessment

At end of 2018, Board of Directors did not have and establish any committees of Board of Directors.

### BOARD MANUAL

The Company has a Board Manual that was signed jointly by Board of Commissioners and Board of Directors. Board Manual is a device that serves as a basic reference for implementation of duties, responsibilities and authorities, as well as management of work relations between Board of Commissioners and Board of Directors. Board Manual was prepared by referring to company law, provisions of the Articles of Association, the applicable laws and regulations, directives of shareholders and GCG best practices. Board Manual describes the stages of activities in a structured, systematic, easily understood and implemented manner so that they can become guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties in a professional, transparent and efficient manner.

Matters stipulated in Board Manual pertaining to Board of Commissioners include: (1) Requirements, composition, membership, and office term of Board of Commissioners; (2) Induction and capability enhancement programs; and (3) Duties, responsibilities and obligations of Board of Commissioners.

While regulations related to Board of Directors include: (1) Requirements, membership and office term of Board of Directors; (2) Responsibilities of Board of Directors; (3) Duties and obligations of Board of Directors; (4) Authorities of Board of Directors; (5) Rights of Board of Directors; (6) Position ethics; (7) Implementation of the Company's management policies by Board of Directors; (8) Delegation of authorities among members of Board of Directors; (9) Allocation of duties of Board of Directors; and (10) Meetings of Board of Directors.

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif dievaluasi oleh Pemegang Saham di dalam RUPS. Di awal tahun, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi telah menandatangani Kontrak Manajemen dengan PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham untuk memenuhi *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disetujui oleh pemegang saham. Kontrak Kinerja Manajemen tahun 2018 disepakati dan disahkan pada RUPS Pengesahan RKAP pada tanggal 11 Januari 2018.

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

KPI Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN. Hasil pencapaian KPI Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS. Pencapaian KPI Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Performance of Board of Commissioners and Board of Directors is collectively assessed by Shareholders in GMS. At the beginning of the year, Board of Commissioners and Board of Directors signed a Management Contract with PT PLN (Persero) as the Shareholder to meet Key Performance Indicators (KPI) that were approved by the shareholders. 2018 Management Performance Contract was agreed and ratified in GMS for RKAP Approval on January 11, 2018.

### Board of Commissioners Performance Assessment

Board of Commissioners' KPI is prepared by taking into account duties and responsibilities of Board of Commissioners based on the Articles of Association and regulations of the Ministry of SOE. KPI achievement results of Board of Commissioners are submitted to GMS. Board of Commissioners' 2018 KPI achievement results were as follows:

No	PROGRAM KERJA Work Program	URAIAN Description	KPI 2018			
			SASARAN Target	BOBOT Portion	REALISASI Realization	BOBOT Portion
<b>Dewan Komisaris dengan Direksi</b> Board of Commissioners and Board of Directors				<b>45</b>		<b>45</b>
1	Rencana Perusahaan termasuk rencana dan kebijakan Perusahaan The Company's work plan includes the Company's plan and policy	Membahas dan memberikan pendapat sebelum menandatangani persetujuan atas RKAP dan rancangan/revisi RJPP Discuss and provide opinions before signing the approval of the Company's work plan and budget (RKAP) and draft/revision of the Company's long-term plan (RJPP)	2 kali/times	8	2 kali pembahasan pada RDD: – RKAP 2019 – RJPP 2019-2023 2 times discussion at BOC-BOD joint meeting on: – RKAP 2019 – RJPP 2019-2023	8
		Pemberian pendapat 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diserahkan Direksi Provision of opinions within 14 working days after complete documents are submitted by the BOD	14 hari kerja/ workdays	2	Surat tanggapan RKAP 2019 Response letter regarding RKAP 2019	2

**DIREKSI**

Board of Directors

No	PROGRAM KERJA Work Program	URAIAN Description	KPI 2018			
			SASARAN Target	BOBOT Portion	REALISASI Realization	BOBOT Portion
2	Kinerja Perusahaan termasuk implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan The Company's performance includes the implementation of the Company's plans and policies	Membahas, memberikan tanggapan serta menandatangani: – Laporan Tahunan 2017 – Laporan Berkala (triwulanan) Discuss, respond and approve: – 2017 Annual Report – Periodic report (quarterly)	4 kali/times	8	5 kali pembahasan pada RDD – Laporan Manajemen (LM) 2017 unaudited – LM 2017 audited – LMTW I – LMTW II – LMTW III  3 Surat Tanggapan Dewan Komisaris: – LM 2017 audited – LMTW I 2018 – LMTW II 2018  5 times discussion on BOC-BOD joint meetings regarding: – Management Report (MR) 2017 unaudited – MR 2017 audited – MR Q I – MR Q II – MR Q III  3 BOC's Response Letter on: – MR 2017 audited – MR Q I 2018 – MR Q II 2018	10
		Pemberian pendapat 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diserahkan Direksi Provision of opinions within 14 working days after complete documents are submitted by the BOD	14 hari kerja/ workdays	2	Rata-rata 14 hari kerja 14 working days on average	2
3	Tindak lanjut hasil /temuan audit internal/eksternal Follow-up of results/findings of internal/external audit	Membahas dan memberikan tanggapan atas: – Efektivitas pemeriksaan internal – Tindak lanjut temuan auditor Discuss and provide responses to: – The effectiveness of internal audit – Follow-up of the auditor's findings	4 kali/times	5	5 kali pembahasan pada RDD 5 times discussion at BOC-BOD joint meetings	4
4	Tanggapan tertulis/persetujuan/nasihat /saran/teguran kepada Direksi Written response/ approval/ counsel/ advice/warning to the BOD	Membahas dan memberi tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan yang diajukan Direksi Discuss and provide written response/approval on the request of proposals submitted by the BOD	100% usulan Direksi 100% of the BOD proposals	8	Telah menanggapi 10 dari 11 surat usulan dari Direksi Responded to 10 of 11 proposal letters from the BOD	6
		Pemberian pendapat 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diserahkan oleh Direksi Provision of opinions within 14 working days after complete documents are submitted by the BOD	14 hari kerja/ workdays	2	Rata-rata 14 hari kerja 14 working days on average	2

**DIREKSI**  
Board of Directors

No	PROGRAM KERJA Work Program	URAIAN Description	KPI 2018			
			SASARAN Target	BOBOT Portion	REALISASI Realization	BOBOT Portion
		Pemberian nasihat/saran/teguran Providing advice/ recommendation/ warning	3 kali/times	5	11 kali, disampaikan pada RDD 11 times, discussed in BOC- BOD joint meetings	5
5	Kunjungan Kerja Working Visit	Kunjungan kerja ke unit/anak perusahaan Working visit to units/subsidiary	4 kali/times	5	4 kali kunjungan kerja 4 times of working visit	5
<b>Dewan Komisaris dengan RUPS</b> Board of Commissioners and GMS				<b>25</b>		<b>25</b>
6	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Delivering the BOC work program and KPI	Rencana kerja dan KPI Dewan Komisaris BOC work plan and KPI	1 kali/times	5	Rencana kerja dan KPI Dewan Komisaris BOC work plan and KPI	5
7	Pendapat Dewan Komisaris BOC opinion	Pendapat atas : – RJP – RKAP – LM & KPI Tahunan – Usulan kantor akuntan publik (KAP) – Usulan remunerasi – Usulan penggunaan laba bersih Opinion on: – Long-term plan (RJP) – Company's work plan and budget (RKAP) – Annual MR and KPI – Proposed appointment of public accounting firm (KAP) – Proposed remuneration – Proposed use of the net profit	4 kali/times	10	5 surat pendapat Dewan Komisaris atas: – Tanggapan RKAP 2018 – Usulan penggunaan laba bersih 2017 – Usulan KAP 2018 – Usulan remunerasi 2018 dan tantiem 2017 – Tanggapan LM 2017 audited 5 BOC written opinions regarding: – Response on Company's work plan and budget (RKAP) 2018 – Proposed use of 2017 net profit – Proposed public accounting firm (KAP) 2018 – Proposed 2018 remuneration and 2017 tantiem – Response on 2017 audited MR	10

**DIREKSI**

Board of Directors

No	PROGRAM KERJA Work Program	URAIAN Description	KPI 2018			
			SASARAN Target	BOBOT Portion	REALISASI Realization	BOBOT Portion
8	Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Report of the BOC supervisory duty	Laporan terdiri atas: – Laporan pengawasan dan KPI tahunan – Realisasi KPI berkala The report consists of: – Annual supervisory report and KPI – Realization of quarterly KPI achievement	4 kali/times	5	4 laporan terdiri dari: – Laporan pengawasan Dewan Komisaris 2017 – Realisasi KPI Dewan Komisaris TW I 2018 – Realisasi KPI Dewan Komisaris TW II 2018 – Realisasi KPI Dewan Komisaris TW III 2018 4 reports consist of: – BOC supervisory report 2017 – Realization of the BOC KPI achievement on Q I 2018 – Realization of the BOC KPI achievement on Q 2 2018 – Realization of the BOC KPI achievement on Q 3 2018	5
9	RUPS GMS	Dewan Komisaris hadir kuorum pada RUPS BOC quorum attendance at the GMS	2 kali/times	5	2 kali RUPS Tahunan terdiri dari: – RUPST RKAP 2018 – RUPST Laporan Tahunan 2017 2 times AGMS consists of: – AGMS of RKAP 2018 – AGMS of Annual Report 2017	5
<b>Internal Dewan Komisaris</b> Internal of the Board of Commissioners				<b>30</b>		<b>30</b>
10	Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi BOC meetings may invite the BOD	Rapat Dewan Komisaris BOC meeting	12 kali/times	10	Rapat Dewan Komisaris diadakan 15 kali, terdiri dari 12 kali RDD dan 3 kali RID The BOC meeting was held 15 times, consisting of 12 BOC-BOD joint meetings and 3 BOC internal meetings	10
		Komisaris hadir dalam rapat Commissioner attendance	100%	5	Hadir kuorum Quorum presence	5
		Penyelesaian risalah rapat Completion of the minutes of meeting	100%	5	Risalah rapat sejumlah 15 risalah 15 minutes of the meetings	5
11	Pengenalan/Induksi/ peningkatan kompetensi Orientation/Induction/ competence development	Pengenalan/induksi dan peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar/workshop Orientation/induction and competence development by attending seminar/ workshop	2 kali/times	5	3 kali/times	5

**DIREKSI**  
 Board of Directors

No	PROGRAM KERJA Work Program	URAIAN Description	KPI 2018			
			SASARAN Target	BOBOT Portion	REALISASI Realization	BOBOT Portion
12	Pengelolaan GCG GCG management	Mengikuti asesmen GCG 2017 aspek Dewan Komisaris Following the 2017 GCG assessment on the BOC aspects	Skor minimal 32 Minimum score of 32	5	Skor asesmen GCG aspek Dewan Komisaris 32,5 GCG assessment score on the BOC aspect was 32.5	5
<b>JUMLAH NILAI/TOTAL SCORE</b>				<b>100</b>		<b>100</b>

**Penilaian Kinerja Direksi**

Dasar penilaian kinerja Direksi adalah KPI Direksi/KPI Manajemen yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. KPI tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.

KPI Manajemen menjadi indikator tingkat kesehatan perusahaan yang pengukurannya mengacu pada:

1. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0065.P/DIR/2015 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi;
3. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan;
4. Surat Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) No. 0015/SKK.00.01/SPKK/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Penyampaian Kontrak Manajemen Tahun 2018.

Laporan pencapaian KPI Manajemen bulanan disampaikan kepada Divisi Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) dan laporan pencapaian KPI tahunan disampaikan kepada RUPS di mana Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja KPI Manajemen pada tahun operasional. Dalam pertanggungjawaban tersebut, Direksi menjabarkan kaitan pencapaian KPI dengan kondisi lapangan dan kebijakan strategis yang dijalankan Direksi. Sedangkan Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan selama tahun operasional. Tabel berikut menyajikan hasil pencapaian KPI Manajemen tahun 2018:

**Board of Directors Performance Assessment**

Basis for performance assessment of Board of Directors is KPI of Management/Board of Directors that are jointly established with Board of Commissioners at the beginning of the management period. KPI is basically a qualitative and quantitative measurement of RKAP which is the objective of preparation and implementation of activity budget.

KPI of Management are indicators of the Company's soundness level whose measurements refer to:

1. Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment of State-Owned Enterprises;
2. Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0065.P/DIR/2015 concerning Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment;
3. Circular of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2018 concerning Implementation Guidelines for Calculation of Organizational Performance Score of Units and Subsidiaries;
4. Letter of Head of Corporate Performance Monitoring Unit of PT PLN (Persero) No. 0015/SKK.00.01/SPKK/2018 dated January 26, 2018 concerning Submission of 2018 Management Contracts.

Monthly Management's KPI achievement report is submitted to Corporate Performance Management Division of PT PLN (Persero) and annual KPI achievement report are submitted to GMS as part of accountability of Board of Directors and the Board of Commissioners on Management's KPI achievement in the operational year. In this accountability, Board of Directors outlines the relationship among KPI achievements, factual conditions and strategic policies implemented by Board of Directors. Whereas Board of Commissioners provides explanation and is accountable on supervisory and advisory aspects that are carried out during the operational year. The following table presents results of 2018 Management's KPI:

**DIREKSI**

Board of Directors

NO	PERSPEKTIF Perspective	SATUAN Unit	BOBOT Weight	SASARAN Target	REALISASI Realization	PENCAPAIAN Achievement	NILAI Score
				a	b	c	
<b>1</b>	<b>FOKUS PELANGGAN</b> Customer Focus						
	1.1 Kecepatan respons terhadap kontrak Speed of response to contracts	Hari Day	12.00	28.00	28.83	100.00%	12.00
	1.2 Indeks kepuasan pelanggan Customer satisfaction index	Skor Score	10.00	87.50	76.19	87.07%	8.70
<b>2</b>	<b>EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES</b> Products and Process Effectiveness						
	2.1 Pencapaian <i>Service Level Agreement (SLA)</i> pekerjaan layanan <i>Operation and Maintenance (O&amp;M)</i> Distribusi SLA achievement in O&M Distribution services	%	12.00	100.00	97.37	97.37%	11.68
	2.2 Penambahan unit PLN yang dilayani secara <i>end-to-end service</i> Additional PLN units served by end-to end service	Unit	20.00	30.00	28.25	87.50%	8.75
	2.3 Sertifikasi Certification						
	a. Tenaga Kerja Workforce	%	8.00	100.00	82.51	82.51%	6.60
	a. Proses Bisnis Business Process	%	7.00	100.00	100.00	100.00%	7.00
<b>3</b>	<b>FOKUS TENAGA KERJA</b> Employment Focus						
	3.1 Human Capital Readiness (HCR)	Level	3.00	3.72	3.45	92.74%	2.78
	3.1 Organization Capital Readiness (OCR)	Level	3.00	3.72	3.53	94.89%	2.84
<b>4</b>	<b>KEUANGAN DAN PASAR</b> Finance and Market						
	4.1 Rasio Operasi Operation Ratios	%	10.00	89.66	90.36	99.22%	9.92
	4.2 Pencapaian investasi Investment achievement	Rp miliar Rp billion	8.00	66.52	58.72	88.27%	7.06
	4.3 Sinergi dengan anak perusahaan PLN Lain Synergy with other PLN subsidiaries	Rp miliar Rp billion	10.00	163.98	202.17	100.00%	10.00

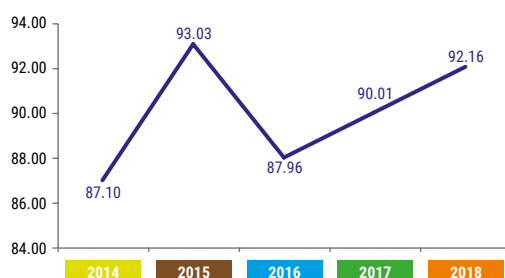


NO	PERSPEKTIF Perspective	SATUAN Unit	BOBOT Weight	SASARAN Target	REALISASI Realization	PENCAPAIAN Achievement	NILAI Score
				a	b	c	
5	<b>KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKAT</b> Leadership, Governance and Social Responsibility						
	5.1 Good Corporate Governance (GCG)	Skor Score	3.00	85.00	80.36	94.35%	2.83
	5.2 Penyelesaian temuan auditor Completion of auditor's findings	%	4.00	100.00	100.00	100.00%	4.00
	5.3 Kepatuhan pada Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup Compliance on Safety, Occupational Health and Environment	Max -10					-2.00

Hasil penilaian KPI Manajemen tahun 2018 mencapai skor 92,16 di mana berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk pada kategori "AA" atau kondisi "SEHAT". Dengan pencapaian ini, KPI Manajemen mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

The results of 2018 Management's KPI assessment reached a score of 92.16. Based on Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment of State-Owned Enterprises, such score is under "AA" or "SOUND" category. With this achievement, Management's KPI has improved in the last three years as shown in the following graph:

**PENCAPAIAN KPI MANAJEMEN (2014-2018)**  
 Management KPI Achievement (2014-2018)



Sehat/Healthy : >95  
 AAA : <80-≤95  
 Sehat/Healthy AA : <65-≤80  
 Sehat/Healthy A : 80

## PENILAIAN PENERAPAN GCG

GCG Assessments

## PENILAIAN PENERAPAN GCG

Perusahaan melaksanakan penilaian penerapan GCG secara berkala untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kepatuhan penerapan GCG. Penilaian mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

### Kriteria yang Digunakan dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Kriteria penilaian GCG berdasarkan parameter yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Kriteria yang digunakan meliputi 1) Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan; 2) Pemegang Saham dan RUPS; 3) Dewan Komisaris; 4) Direksi; 5) Pengungkapan informasi dan transparansi; dan 6) Aspek Lainnya. Penilaian penerapan GCG dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Pada tahun 2018, penilaian GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

### Hasil Penilaian

Hasil Penilaian GCG Perusahaan pada tahun 2018 berdasarkan Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG oleh BPKP No. LGCG-24/D402/2/2019 tanggal 29 Maret 2019 mencapai skor 80,359%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 76,009% dengan skor penilaian masing-masing kriteria dan perbandingannya dengan asesmen tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR Indicators	BOBOT Weight	CAPAIAN 2017 2017 Achievement			CAPAIAN 2018 2018 Achievement		
			SKOR Score	%	PREDIKAT Predicate	SKOR Score	%	PREDIKAT Predicate
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara berkelanjutan Commitment into sustainable implementation of Good Corporate Governance (GCG)	7.00	6.778	96.827	Sangat Baik Excellent	6.436	91.942	Sangat Baik Excellent
2	Pemegang saham dan RUPS Shareholders and GMS	9.00	7.262	80.687	Baik Good	7.703	85.558	Sangat Baik Excellent
3	Dewan Komisaris The Board of Commissioners	35.00	30.306	86.590	Sangat Baik Excellent	30.322	86.634	Sangat Baik Excellent

## GCG ASSESSMENT

The Company conducts regular GCG assessments to obtain an overview of GCG compliance level. The assessment refers to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

### Criteria Used and Parties Conducting Assessment

Criteria for GCG assessment are based on parameters stipulated in Decision of Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Assessment Indicators/Parameters and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation in SOE. The criteria used include: 1) Commitment to sustainable governance; 2) Shareholders and GMS; 3) Board of Commissioners; 4) Board of Directors; 5) Information disclosure and transparency; and 6) Other aspects. GCG assessment is carried out by an independent third party. In 2018, GCG assessment was conducted by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).

### Assessment Results

The Company's GCG assessment result in 2018 based on GCG Implementation Assessment Report by BPKP No.: LGCG-24/D402/2/2019 dated March 29, 2019 reached a score of 80.359%, an increase compared to the previous year of 76.009% with an assessment score of each criterion and comparison with the previous year's assessment were as follows:

**PENILAIAN PENERAPAN GCG**  
GCG Assessments

NO	INDIKATOR Indicators	BOBOT Weight	CAPAIAN 2017 2017 Achievement			CAPAIAN 2018 2018 Achievement		
			SKOR Score	%	PREDIKAT Predicate	SKOR Score	%	PREDIKAT Predicate
4	Direksi The Board of Directors	35.00	28.048	80.136	Baik Good	30.117	86.048	Sangat Baik Excellent
5	Pengungkapan informasi dan transparansi Information disclosure and transparency	9.00	3.615	40.172		5.771	64.122	
6	Aspek lainnya Other aspect	5.00	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH SKOR</b> Total Score		<b>100.00</b>	<b>76.009</b>		<b>CUKUP BAIK</b> Satisfactory	<b>80.359</b>		<b>BAIK</b> Good

**Rekomendasi Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut**

Hasil penilaian GCG tahun 2018 oleh BPKP menghasilkan 43 rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement/AoI*) dengan status tindak lanjut sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Recommendations and Follow-ups on Assessment Results**

2018 GCG Assessment performed by BPKP resulted in 43 Area of Improvement (AoI) with follow-up status at end of 2018 as follows:

NO	REKOMENDASI Recommendation	TINDAK LANJUT Follow Up
<b>A.</b>	<b>Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola yang Baik Secara Berkelanjutan</b> Commitment into Sustainable Implementation of GCG	
A.01	Menyusun hasil evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi <i>assessment</i> pelaksanaan GCG tahun 2016 dan 2017. To compile the evaluation results of the follow-up on GCG assessment recommendations in 2016 and 2017.	Telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Followed up by Board of Directors.
A.02	Menyempurnakan pedoman gratifikasi, melakukan pembahasan dan menyusun laporan atas hasil pembahasan terkait penyempurnaan perangkat pendukung pengendalian gratifikasi. To improve the gratification guidelines, conduct discussion and prepare report of discussion result related to improvement of gratification control tools.	
A.03	Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan WBS untuk disampaikan ke Direksi. To evaluate and prepare report on WBS implementation to be submitted to Board of Directors.	
<b>B.</b>	<b>Aspek Pemegang Saham</b> Aspects of Shareholder	
B.01	Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk segera menetapkan status definitif bagi Direksi yang masih sebagai pelaksana teknis (plt). To coordinate with Ministry of SOEs to immediately determine the definitive status for Acting Director.	Rekomendasi telah disampaikan kepada PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan Pengendali. Recommendations have been submitted to PT PLN (Persero) as Majority and Controlling Shareholders.
B.02	Membuat pengaturan mengenai mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan. To arrange resignation mechanism of concurrent position of Board of Directors, no later than 30 days after the concurrent occupation.	

## PENILAIAN PENERAPAN GCG

### GCG Assessments

NO	REKOMENDASI Recommendation	TINDAK LANJUT Follow Up
B.03	Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk segera menetapkan status definitif bagi Dewan Komisaris yang masih sebagai pelaksana teknis (plt). To coordinate with the Ministry of SOEs to immediately determine the definitive status for Acting Commissioner.	
B.04	Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. To determine maximum number of Commissioner positions may be hold by a member of Board of Commissioners.	
B.05	Memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). To ratify the Company's Long Term Plan (RJPP).	
B.06	Lebih tepat waktu dalam memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi perusahaan yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS salah satunya rancangan RKAP. To be more timely in providing approval/decision of corporate action proposals that need to get GMS approval/decision, such as draft of Company's Work Plan and Budget (RKAP).	
B.07	Menyusun pedoman penilaian kinerja individu Direksi dan yang sekurang-kurangnya memuat indikator kinerja utama (KPI) dan kriteria keberhasilan, menetapkan target kinerja, melakukan penilaian kinerja individu Direksi, serta membuat KPI Dewan Komisaris dan melakukan penilaian atas capaian KPI Dewan Komisaris. To prepare guidelines for performance assessment of individual Director at least contains KPI and success criterias, set performance targets, assess individual performance of Director and make KPI of Board of Commissioners and assess KPI of Board of Commissioners.	
B.08	Menetapkan pedoman penunjukan auditor eksternal. To establish guidelines for appointing external auditors.	
B.09	Lebih meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti <i>areas of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> tahun sebelumnya. To improve effort in following up the areas of improvement from the previous year's assessment.	
<b>C.</b>	<b>Aspek Dewan Komisaris</b> <b>Aspects of the Board of Commissioners</b>	
C.01	Menyusun dan menyampaikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran atas rancangan RJPP kepada RUPS. To prepare and submit written opinions and suggestions on RJPP draft to GMS.	Telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris dengan penanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris.
C.02	Mendorong Direksi untuk melaksanakan reviu sistem pengendalian intern tingkat entitas dan menerbitkan <i>internal control report</i> , untuk selanjutnya melakukan telaah terhadap sistem pengendalian intern secara menyeluruh serta menyampaikan arahan dan hasil telaahnya kepada Direksi. To request Board of Directors to review entity-level internal control system and submit report to Board of Commissioners as a basis to review overall internal control system and give the result and direction to Board of Directors.	Followed up by Board of Commissioners designated to Secretary of Board of Commissioners.
	Dalam rangka pengajuan calon Auditor Eksternal, melakukan evaluasi kinerja Auditor Eksternal dan menyampaikan hasilnya kepada Pemegang Saham. To evaluate the performance of External Auditor and submit the results to Shareholders in order to propose an External Auditor candidate.	
C.03	Menelaah efektivitas sistem pengendalian intern pada tingkat entitas. To review the effectiveness of entity-level internal control system.	

**PENILAIAN PENERAPAN GCG**  
GCG Assessments

NO	REKOMENDASI Recommendation	TINDAK LANJUT Follow Up
C.04	Menyusun kebijakan dan melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit audit eksternal. To prepare policy and assess the effectiveness of external audit.	
C.05	Menyusun kebijakan dan melaksanakan penilaian Direksi secara individu ( <i>soft skill</i> ) serta menyampaikan hasilnya kepada RUPS/Pemegang Saham dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. To prepare policy and carry out assessment for Director (soft skills) and submit the result to GMS/Shareholders attached in Board of Commissioners' supervisory report.	
C.06	Meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti <i>areas of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG. To improve efforts in following up the areas of improvement of GCG assessment.	
C.07	Menetapkan indikator kinerja utama ( <i>key performance indicators</i> ) setiap tahun yang disusun secara spesifik atas tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. To determine KPI every year which prepared specifically on Board of Commissioners' duties and functions and assess the achievement of Commissioner's and Audit Committee member performance as outlined in minutes of Board of Commissioners' meeting.	
C.08	Menyempurnakan pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris dengan memuat pengaturan mengenai etika rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, dan pembahasan atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. To improve the guidelines/code of conduct of Board of Commissioners meeting by setting the meeting ethics, evaluating the follow-up of previous meeting results, and discussion on Board of Directors proposal and GMS direction/resolution related to Board of Directors proposal.	
C.09	Menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendokumentasikan pembahasan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya di dalam risalah rapat. To instruct Board of Commissioners' Secretary to prepare documentation of discussion on evaluation of implementation the previous meeting decisions in minutes of meeting.	
C.10	Menyempurnakan Piagam Komite Audit, di antaranya dengan pengaturan mengenai masa kerja Komite Audit dan pelaporan, menyempurnakan program kerja tahunan, di antaranya dengan mencantumkan <i>self assessment</i> kinerja Komite Audit. To improve Audit Committee Charter, including by regulating Audit Committee term of service and reporting, refining the annual work program, including self-assessment of Audit Committee performance.	
<b>D.</b>	<b>Aspek Direksi</b> <b>Aspects of the Board of Directors</b>	
D.01	Menyempurnakan mekanisme pengambilan keputusan dengan mengatur kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Direksi ke tingkat organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut. To improve the decision making mechanism by regulating urgency to communicate Board of Directors decisions to the staff related to such decisions.	Telah ditindaklanjuti dengan penanggung jawab Corporate Secretary. Followed up by Corporate Secretary.

## PENILAIAN PENERAPAN GCG

### GCG Assessments

NO	REKOMENDASI Recommendation	TINDAK LANJUT Follow Up
D.02	Menyelesaikan revisi rancangan RJPP dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham/RUPS tepat waktu dan selanjutnya menyosialisasikan RJPP kepada seluruh karyawan Perusahaan. To complete revised RJPP draft and submit to Shareholders/GMS in a timely manner and socialize RJPP to all Company employees.	
D.03	Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham/RUPS tepat waktu dan menuangkan pembahasan masukan Dewan Komisaris atas RKAP secara terstruktur di dalam risalah rapat Direksi. To submit draft of RKAP to Board of Commissioners and or Shareholders/GMS in a timely manner and attach the discussion of Board of Commissioners' recommendation on RKAP in Board of Directors' minutes of meeting.	
D.04	Membuat dan menyampaikan capaian kinerja individu masing-masing Direksi. To prepare and submit individual performance achievement of each Director.	
D.05	Melaksanakan pengembangan TI sesuai dengan <i>master plan</i> TI. To carry out IT development in accordance with IT master plan.	Telah ditindaklanjuti dengan penanggung jawab Direktur Operasi. Followed up by Operation Director.
D.06	Menyusun DRP pada awal tahun yang didasarkan pada perhitungan kebutuhan pengadaan Perusahaan. To prepare DRP at the beginning of the year based on the calculation of Company's procurement needs.	
D.07	Menyusun kebijakan untuk anak perusahaan ( <i>subsidiary governance</i> ) dan perusahaan patungan antara lain mencakup pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi. To prepare policy for subsidiaries ( <i>subsidiary governance</i> ) and joint ventures companies including the appointment of Board of Commissioners and Directors.	
D.08	Mengesahkan laporan manajemen risiko dan melengkapi rancangan RKAP dengan analisis risiko dan penanganan risiko. To ratify risk management report and to complete the RKAP draft with risk management and analysis.	
D.09	Direksi melalui SPI melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dan operasional/aktivitas, dan menerbitkan <i>internal control report</i> . The Board of Directors through SPI to evaluate the effectiveness of entity-level internal control and operational/activities, and to issue internal control report.	Telah ditindaklanjuti dengan penanggung jawab Kepala SPI. Followed up by Head of SPI.
D.10	Menindaklanjuti saran hasil survei kepuasan karyawan dengan lebih intensif lagi. To follow up the recommendations of employee satisfaction surveys more intensively.	Telah ditindaklanjuti oleh Direktur Keuangan. Followed up by Director of Finance.
D.11	Menyempurnakan pedoman tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menambahkan indikator keberhasilan pelaksanaan CSR, dan melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilannya. To refine the corporate social responsibility (CSR) guidelines by adding CSR implementation success indicators, and evaluating the achievement of success indicators.	Telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Perusahaan. Followed up by Corporate Secretary.
D.12	Menyampaikan laporan manajemen triwulanan, laporan semester dan laporan tahunan kepada pemegang saham minoritas. To submit quarterly, half year, and full year management reports to minority shareholders.	

**PENILAIAN PENERAPAN GCG**  
 GCG Assessments

NO	REKOMENDASI Recommendation	TINDAK LANJUT Follow Up
D.13	Melakukan penyempurnaan tata tertib rapat Direksi dengan menambahkan substansi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi. To improve Board of Directors' meeting code of conduct by adding substance to evaluation of the follow-up actions of previous meeting results, and discussion/ review of directives/proposals and/or follow-up to the implementation of Board of Commissioners' decisions on Board of Directors' proposals.	
D.14	Melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal dan melakukan penilaian atas program tersebut di atas. To implement quality assurance program and improving internal audit function and conduct assessment of the above program.	Telah ditindaklanjuti dengan penanggung jawab Kepala SPI. Followed up by Head of SPI.
D.15	Menginstruksikan Kepala SPI lebih meningkatkan fungsinya dengan merealisasikan dengan lebih maksimal lagi rencana penugasan yang tercantum dalam PKPT dan melaksanakan evaluasi atas audit kegiatan operasional Perusahaan. To instruct Head of SPI to improve its function by maximizing audit plan stated in PKPT and conduct an evaluation of the Company's operational audit.	
D.16	Menyampaikan laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu, dan melakukan <i>update website</i> Perusahaan. To submit Quarterly and Annual reports to Board of Commissioners in a timely manner, and update the Company's website.	Telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Perusahaan. Followed up by Corporate Secretary.
D.17	Berupaya lebih optimal lagi untuk mendorong pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan RKAP dan penyelenggaraan RUPS Pengesahaan RKAP. To be more optimal to encourage parties involved in the preparation of RKAP and GMS for RKAP Approval.	
D.18	Berupaya lebih optimal lagi untuk mendorong pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan RJPP dan penyelenggaraan RUPS Pengesahaan RJPP. To be more optimal to encourage parties involved in the preparation of RJPP and GMS for RJPP Approval.	
<b>E.</b>	<b>Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi</b> <b>Aspects of Information Disclosure and Transparency</b>	
E.01	Meningkatkan kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam <i>website</i> Perusahaan. To improve the ease of access to the Company policies and information on the Company's website.	Telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Perusahaan. Followed up by Corporate Secretary.
E.01	Menyempurnakan muatan Laporan Tahunan dengan berpedoman pada <i>best practices</i> yang disyaratkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN. To improve Annual Report content based on best practices required in Decision of the Secretary of the Ministry of SOE Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Evaluation Indicators/Parameter for GCG Implementation in SOEs.	
E.03	Berupaya mendapatkan penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi. To attempt to get awards in the field of publication and information disclosure.	



## PENILAIAN PENERAPAN GCG

GCG Assessments

## KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Kebijakan

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS. Secara umum, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan dan standar gaji profesional di industri sejenis. Selain itu, sebagai anak perusahaan BUMN, besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya yang terakhir No. 01/MBU/06/2017. Besaran remunerasi terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem.

### Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi dan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menugaskan Komite GCG & MR yang salah satu tugas pokoknya adalah bidang nominasi dan remunerasi untuk mengkaji usulan Direksi dan menyusun rekomendasi yang diperlukan. Hasil kajian dan rekomendasi menjadi bagian dari usulan penetapan remunerasi dan tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS.

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 PT Haleyora Power tanggal 16 Mei 2018 menyetujui dan menetapkan paket remunerasi tahun buku 2018 dan tantiem tahun buku 2017 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018 dan 2017

Secara total besaran kompensasi berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem yang diterima Dewan Komisaris

## REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

### Policy

Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through GMS resolution. In general, remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on duties, responsibilities and authorities of members of Board of Commissioners and the Board of Directors taking into account the Company's financial capabilities and professional salary standards in similar industries. In addition, as an SOE subsidiary, remuneration amount of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors also refers to Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Income Determination for Board of Directors, Board of Commissioners and SOE Supervisory Board including the latest amendment No. 01/MBU/06/2017. Remuneration amount consists of salary, allowances and bonuses.

### Procedure of Proposal and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remuneration and bonuses for members of Board of Commissioners and Board of Directors are proposed by Board of Directors to Board of Commissioners. Board of Commissioners assigns GCG & MR Committee, whose main tasks include nomination and remuneration, to review Board of Directors' proposal and to prepare recommendation as needed. The review results and recommendations become part of the proposed remuneration and tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to GMS.

Annual GMS on Approval for Annual Report and Ratification of Financial Statements for Financial Year 2017 of PT Haleyora Power on May 16, 2018 approved and determined remuneration package for financial year 2018 and tantiem for financial year 2017 for members of Board of Commissioners and Board of Directors.

### Remuneration Amount for Board of Commissioners and Board of Directors for Financial Years 2018 and 2017

In total, compensation amount in the form of salaries, facilities, allowances and bonuses received by Board of Commissioners

**KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

dan Direksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp9,65 miliar sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp11,13 miliar.

and Board of Directors in 2018 amounted to Rp9.65 billion while in 2017 it was Rp11.13 billion.

**FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**FREQUENCY AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS**

**Rapat Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menyelenggarakan 4 kali rapat internal dengan kehadiran dan agenda sebagai berikut:

**The Board of Commissioners Meetings**

During 2018, the Board of Commissioners held 4 internal meetings with attendance and agenda as follows:

NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS BOC Attendance		AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		TINGKAT KEHADIRAN Attendance Rate	NAMA Name	
1	20 Januari/January	Kuorum 100% Quorum	Fahmi El Amruzi Okto Rinaldi	1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2017 2. Laporan realisasi rencana kerja dan KPI Komite tahun 2017 3. Status kemajuan GCG tahun 2017 1. BOC Supervisory Report 2017 2. Report of the Committee work plan and KPI 2017 realization 3. Progress of GCG implementation in 2017
2	4 Mei/May	Kuorum 100% Quorum	Fahmi El Amruzi Okto Rinaldi	1. Usulan kantor akuntan publik 2018 2. Usulan remunerasi 2018 3. Usulan penggunaan laba 2017 4. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen 2017 audited 5. Laporan realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan I 2018 1. Proposed public accounting firm in 2018 2. Proposed remuneration for 2018 3. Proposed use of 2017 net profit 4. BOC response on the audited Management Report 2017 5. BOC KPI realization report Q1 2018
3	12 Juli/July	Kuorum 100% Quorum	Fahmi El Amruzi Okto Rinaldi	1. Usulan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris 2019 2. Laporan realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan II 2018 1. Proposed BOC work plan and budget 2019 2. Report on the realization of BOC KPI in Q2 2018

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS BOC Attendance		AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		TINGKAT KEHADIRAN Attendance Rate	NAMA Name	
4	23 Oktober/October	Kuorum <sup>1)</sup> 100% Quorum	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji <sup>2)</sup> Purnama T. Sianturi <sup>2)</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Susunan Komite Dewan Komisaris</li> <li>Laporan realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan III 2018</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Composition of the BOC Committees</li> <li>Report on the realization of BOC KPI in Q3 2018</li> </ol>

<sup>1)</sup> Per 1 September 2018 Okto Rinaldi tidak menjabat sebagai Komisaris  
As of September 1, 2018 Okto Rinaldi did not serve as a Commissioner

<sup>2)</sup> Per 1 September 2018 Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi menjabat sebagai Plt. Komisaris  
As of September 1, 2018 Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi served as Acting Commissioner

### Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan adalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi atau rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris. Rapat dapat berlangsung atas inisiatif Dewan Komisaris atau Direksi. Di dalam rapat gabungan, Direksi berkonsultasi dengan Dewan Komisaris untuk memperoleh kesamaan visi dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai pengelola Perusahaan. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan 12 kali rapat gabungan dengan kehadiran dan agenda sebagai berikut:

### The Board of Commissioners and the Board of Directors Joint Meetings

Joint Meeting is Board of Commissioners meeting attended by Board of Directors or Board of Directors meeting attended by Board of Commissioners. Such meeting may take place at the initiative of Board of Commissioners or Board of Directors. In the joint meeting, Board of Directors consults with Board of Commissioners to obtain a common vision and aligned measures between Board of Commissioners as the supervisors and Board of Directors as the managers of the Company. During 2018, Board of Commissioners and Board of Directors held 12 joint meetings with the following attendance and agenda:

NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS BOC Attendance		KEHADIRAN DIREKSI BOD Attendance	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		TINGKAT KEHADIRAN Attendance Rate	NAMA Name		
1	26 Januari/ January	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahmi El Amruzi</li> <li>Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achmad Taufik Haji</li> <li>Sutrisno Samad</li> <li>Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut agenda Rapat gabungan bulan Desember 2017</li> <li>Rencana implementasi arahan Pemegang Saham pada RUPS RKAP 2018</li> <li>KPI Direktorat 2018</li> <li>Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up of Joint Meeting Agenda on December 2017</li> <li>Plant to execute Shareholders directives at 2018 EGMS on the Company's Workplan and Budget</li> </ol>

**FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**  
Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS BOC Attendance		KEHADIRAN DIREKSI BOD Attendance	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		TINGKAT KEHADIRAN Attendance Rate	NAMA Name		
2	26 Februari/ February	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahmi El Amruzi</li> <li>Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achmad Taufik Haji</li> <li>Sutrisno Samad</li> <li>Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring tindak lanjut rapat gabungan tahun 2017</li> <li>Laporan Manajemen 2017 <i>audited</i></li> <li>Hasil asesmen GCG tahun 2017</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring the follow-up of joint meetings in 2017</li> <li>Audited Management Report 2017</li> <li>GCG assessment result 2017</li> </ol>
3	21 Maret/ March	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahmi El Amruzi</li> <li>Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achmad Taufik Haji</li> <li>Sutrisno Samad</li> <li>Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program kerja dan KPI anak perusahaan HPI (presentasi Direksi HPI)</li> <li>Laporan kecelakaan kerja di Riau</li> <li>Laporan tindak lanjut hasil temuan SPI tahun 2017</li> <li>Program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) SPI tahun 2018</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Work program and KPI of HPI (presentation of HPI Directors)</li> <li>Reports of work accidents in Riau</li> <li>Follow-up report on the 2017 SPI findings</li> <li>SPI Audit Plan in 2018 (PKPT)</li> </ol>
4	20 April/April	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahmi El Amruzi</li> <li>Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achmad Taufik Haji</li> <li>Sutrisno Samad</li> <li>Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan tindak lanjut keputusan rapat gabungan triwulan I 2018 (Januari, Februari, Maret 2018)</li> <li>Laporan Manajemen dan KPI Direktorat triwulan I 2018</li> <li>Tindak lanjut hasil temuan auditor/SPI triwulan I 2018</li> <li>Tindak lanjut arahan RUPS dan Dewan Komisaris (RKAP 2018) triwulan I 2018</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up report of the joint meeting decisions in Q1 2018 (January, February, March 2018)</li> <li>Management and KPI Directorate Reports for Q1 2018</li> <li>Follow-up on the auditor/SPI findings in Q1 2018</li> <li>Follow up on the direction of GMS and the Board of Commissioners (RKAP 2018) in Q1 2018</li> </ol>

### FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS BOC Attendance		KEHADIRAN DIREKSI BOD Attendance	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		TINGKAT KEHADIRAN Attendance Rate	NAMA Name		
5	4 Mei/May	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahmi El Amruzi</li> <li>• Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achmad Taufik Haji</li> <li>• Sutrisno Samad</li> <li>• Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Laporan hasil audit KAP tahun 2017</li> <li>3. Laporan Manajemen dan KPI tahunan 2017 audited</li> <li>4. Persiapan RUPS LPT 2017               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Updated information</li> <li>2. 2017 audit report from Public Accounting Firm</li> <li>3. 2017 audited annual Management and KPI Reports</li> <li>4. Preparation for the 2017 LPT GMS</li> </ol> </li> </ol>
6	29 Juni/June	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahmi El Amruzi</li> <li>• Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achmad Taufik Haji</li> <li>• Sutrisno Samad</li> <li>• Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan persetujuan pengambilalihan saham minoritas perorangan PT HPI</li> <li>2. Kebijakan Direksi</li> <li>3. Laporan kunjungan kerja Komite GCG               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Request for approval of the acquisition of PT HPI's minority share</li> <li>2. Directors' Policy</li> <li>3. GCG Committee work visit report</li> </ol> </li> </ol>
7	5 Juli/July	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahmi El Amruzi</li> <li>• Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achmad Taufik Haji</li> <li>• Sutrisno Samad</li> <li>• Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan persetujuan pengambilalihan saham minoritas perorangan PT HPI</li> <li>2. Kebijakan Direksi</li> <li>3. Laporan kunjungan kerja Komite GCG               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Request for approval of the acquisition of PT HPI's minority share</li> <li>2. Directors' Policy</li> <li>3. GCG Committee work visit report</li> </ol> </li> </ol>

**FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**  
Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS BOC Attendance		KEHADIRAN DIREKSI BOD Attendance	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		TINGKAT KEHADIRAN Attendance Rate	NAMA Name		
8	15 Agustus/ August	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahmi El Amruzi</li> <li>• Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achmad Taufik Haji</li> <li>• Sutrisno Samad</li> <li>• Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Manajemen dan KPI triwulan II 2018, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi KPI Direktorat triwulan II 2018</li> <li>b. Tindak lanjut hasil temuan SPI/KAP triwulan II 2018</li> <li>c. Tindak lanjut arahan RUPS dan tanggapan Dewan Komisaris pada RKAP tahun 2018 dan LPT tahun 2017 sampai dengan triwulan II 2018</li> </ol> </li> <li>2. Tindak lanjut tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen triwulan II 2018</li> <li>3. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris sampai dengan triwulan II 2018</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management and KPI Reports for Q2 2018, including: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realization of KPI Directorate in Q2 2018</li> <li>b. Follow-up on the SPI/Public Accounting Firm's findings of in Q2 2018</li> <li>c. Follow-up the GMS direction and the Board of Commissioners response on the Workplan and Budget 2018 and Annual Report 2017 LPT until Q2 2018</li> </ol> </li> <li>2. Follow up on the Board of Commissioners' response to the Management Report in Q2 2018</li> <li>3. Follow up on decisions of the Board of Commissioners' meetings until Q2 2018</li> </ol>
9	12 September/ September	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahmi El Amruzi</li> <li>• Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achmad Taufik Haji</li> <li>• Sutrisno Samad</li> <li>• Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan proses pengambilalihan saham minoritas perorangan PT HPI</li> <li>2. <i>Company exposure</i></li> <li>3. <i>Pencapaian Service Level Agreement (SLA) region</i></li> <li>4. Program Simphoni <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progress of the acquisition process of PT HPI's individual minority shares</li> <li>2. Company exposure</li> <li>3. Achievement of Service Level Agreement (SLA) region</li> <li>4. Simphoni Program</li> </ol> </li> </ol>

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

NO.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS BOC Attendance		KEHADIRAN DIREKSI BOD Attendance	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
		TINGKAT KEHADIRAN Attendance Rate	NAMA Name		
10	23 Oktober/ October	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahmi El Amruzi</li> <li>Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achmad Taufik Haji</li> <li>Sutrisno Samad</li> <li>Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan proses pengambilalihan saham minoritas perorangan PT HPI</li> <li>Laporan Manajemen triwulan III 2018</li> <li>RKAP 2019</li> <li>Project AMC</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Progress of the acquisition process of PT HPI's individual minority shares</li> <li>Management report for Q3 2018</li> <li>Workplan and Budget 2019</li> <li>AMC Project</li> </ol>
11	22 November/ November	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahmi El Amruzi</li> <li>Okto Rinaldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achmad Taufik Haji</li> <li>Sutrisno Samad</li> <li>Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan proses pengambilalihan saham minoritas perorangan PT HPI</li> <li>RKAP 2019</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Progress of the acquisition process of PT HPI's individual minority shares</li> <li>Workplan and Budget 2019</li> </ol>
12	21 Desember/ December	Kuorum 100% Quorum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahmi El Amruzi</li> <li>Karyawan Aji</li> <li>Purnama T. Sianturi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achmad Taufik Haji</li> <li>Sutrisno Samad</li> <li>Sinung Triwulandari</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>RJPP 2019-2023</li> <li>Realisasi kegiatan strategis Perusahaan tahun 2018 dan rencana strategis yang akan dilaksanakan tahun 2019</li> <li>Persiapan RUPS RKAP 2019</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2019-2023 Long-term Plan</li> <li>Realization of the Company's strategic activities in 2018 and strategic plans to be implemented in 2019</li> <li>Preparation of EGMS on Workplan and Budget 2019</li> </ol>

<sup>1)</sup> Per 1 September 2018 Okto Rinaldi tidak menjabat sebagai Komisaris  
<sup>2)</sup> Per 1 September 2018 Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi menjabat sebagai Plt. Komisaris

<sup>1)</sup> As of September 1, 2018 Okto Rinaldi did not serve as a Commissioner  
<sup>2)</sup> As of September 1, 2018 Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi served as Acting Commissioner

### Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Selain rapat bulanan, rapat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila ada kebutuhan yang mendesak dan memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi berikut pejabat yang terkait, dan untuk menghasilkan keputusan, kehadiran Direksi dalam rapat harus memenuhi kuorum. Sepanjang tahun 2018, Direksi mengadakan 12 kali rapat yang seluruhnya dilaksanakan bersama Dewan Komisaris. Tanggal, agenda dan kehadiran anggota Direksi seperti diuraikan di atas.

### Board of Directors Meetings

Board of Directors holds regular Board of Directors Meeting at least once a month. In addition to monthly meeting, meetings can be held at any time if there are urgent needs that require immediate decision. During 2018, Board of Directors held 12 meetings which were all held together with Board of Commissioners. Date, agenda and attendance of member of Board of Directors as described above.



**FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**  
 Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

**INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI**

Pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan adalah PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%. Pemegang saham utama dan pengendali diwakili oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) dan secara teknis berada di bawah Sekretaris Perusahaan cq. Fungsi Hubungan Investor. Skema kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:



**INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER**

The major and controlling shareholder of the Company is PT PLN (Persero) with a shareholding of 99.999%. The main and controlling shareholder is represented by President Director of PT PLN (Persero) and is technically under Corporate Secretary cq. Investor Relations Function. The Company's share ownership scheme is as follows:

**HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI**

Untuk menjaga independensi, menghindari potensi benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, Perusahaan memiliki aturan yang melarang adanya hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan atau Pengendali.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan atau Pengendali baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Hubungan yang terjalin semata-mata karena hubungan kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab Direksi seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**AFFILIATED RELATIONSHIP AMONG THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDER**

To maintain independence, to avoid potential conflict of interest and to maintain accountability in decision making, the Company has a rule that prohibits affiliation among members of Board of Directors, Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholder.

All members of Board of Directors currently in office do not have financial or family relations up to the third degree with fellow members of Board of Directors, members of Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholder either straight line or sideways, including relationship arising from marriage. Relationships are formed solely because of work relations based on duties and responsibilities of Board of Directors as stipulated in the Articles of Association, Board Manual and the applicable laws and regulations.

## INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Information on Major and Controlling Shareholder

## KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memberikan pendapat profesional dan independen terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengevaluasi efektivitas pengendalian internal Perusahaan.

Anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Perusahaan sebagai ketua dan atau anggota, dan anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

### Komposisi Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. 001. SK/DK/HP/2017 tanggal 8 Februari 2017, komposisi Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA Name	Position
Ketua merangkap Komisaris Utama	Fahmi El Amruzi	Chairman and President Commissioner
Anggota	Zulhendri	Member

Sejalan dengan perubahan komposisi Dewan Komisaris, maka komposisi Komite Audit mengalami perubahan per 1 Desember 2018. Berdasarkan SK Dewan Komsisaris No. 02. SK/DK/HP/2018, susunan anggota Komite Audit menjadi sebagai berikut:

JABATAN	NAMA Name	Position
Ketua merangkap Komisaris Utama	Fahmi El Amruzi	Chairman and President Commissioner
Anggota merangkap Plt. Komisaris	Purnama T. Sianturi	Member and Act. Commissioner
Anggota	Zulhendri	Member

## AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is established by Board of Commissioners to provide professional and independent opinion related to financial statements and information submitted by Board of Directors to Board of Commissioners and to evaluate effectiveness of the Company's internal control.

Audit Committee members consist of the Company's Commissioners as chairman and/or members and independent members with expertise and experience according to the required qualifications. Audit Committee members are appointed and terminated by Board of Commissioners.

### Composition of Audit Committee

Based on Decision of Board of Commissioners No. 001.SK/DK/HP/2017 dated February 8, 2017, composition of the Company's Audit Committee was as follows:

In line with changes in composition of Board of Commissioners, composition of Audit Committee changed as of December 1, 2018. Based on Decision of Board of Commissioners No. 02.SK/DK/HP/2018, composition of Audit Committee is as follows:

**KOMITE AUDIT**  
 Audit Committee

**Profil Anggota Komite Audit bukan Komisaris**

**Profile of Non-Commissioner Audit Committee Member**



<b>Nama Name</b>	Zulhendri
<b>Kewarganegaraan Citizenship</b>	Indonesia Indonesian
<b>Usia Age</b>	41 tahun 41 years old
<b>Domisili Domicile</b>	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan Educational Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Andalas, Padang (2001)</li> <li>• Master of Finance Management dari Curtin University of Technology, Perth, Australia (2010)</li> <li>• Bachelor of Accounting from Andalas University, Padang (2001)</li> <li>• Master of Finance Management from Curtin University of Technology, Perth, Australia (2010)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan Appointment Legal References</b>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 003.SK/DK/HP/2017 tanggal 8 Februari 2017 Decree of the Board of Commissioners No. 003.SK/DK/HP/2017 dated February 8, 2017
<b>Pengalaman Kerja Professional Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deputi Manajer Anggaran dan Keuangan pada Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016)</li> <li>• Deputi Manajer Kemitraan Bisnis pada Bidang Kemitraan Bisnis, Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-2018)</li> <li>• Manager Portfolio Management 1 pada Bidang Portfolio Management, Divisi Portfolio Management, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018)</li> <li>• Deputy Manager of Budget and Finance in the Field of Finance, HR and Administration of PT PLN (Persero) Center of Electricity Maintenance (2016)</li> <li>• Deputy Manager of Business Partnerships in the Field of Business Partnerships, Division of Electricity Transaction and Business Partnership, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2016-2018)</li> <li>• Manager of Portfolio Management 1 in the Field of Portfolio Management, Portfolio Management Division, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2018)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap Concurrent Position</b>	Tidak memiliki jabatan rangkap Does not have concurrent positions
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Trainings and Competence Development</b>	Pada tahun 2018 tidak mengikuti program peningkatan kompetensi. Did not attend any competency improvement program in 2018.

**Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit**

Kriteria independensi anggota Komite Audit Perusahaan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 agar anggota Komite dapat bertindak

**Statement of Independence of Audit Committee Members**

Independence criteria for members of the Company's Audit Committee refer to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 so that Committee members can act

## KOMITE AUDIT

Audit Committee

independen, objektif, bebas dari benturan kepentingan dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

independently, objectively, free from conflict of interest and professionally in carrying out their duties and in giving opinions to Board of Commissioners. All members of the Company's Audit Committee have fulfilled the following independence criteria:

KRITERIA INDEPENDENSI Independence Criteria	Fahmi El Amruzi	Purnama T. Sianturi	Zulhendri
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be an employee in the Public Accountants Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Service Office, or any other party providing Insurance Services, Non-Insurance Services, Appraisers, and/or other Consulting Services to the Company within the last 6 months.	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Shall have no direct or indirect shares in the Company.	√	√	√
Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last 6 months.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. Shall have no family relationship cause of marriage and descent to the second level, horizontally or vertically with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Principal Shareholders of the Company.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Shall have no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Shall not in the position in institutional that the business activity in providing services to the Company.	√	√	√

### Piagam Komite Audit

Komite Audit telah menyusun Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja yang telah disahkan dengan SK Dewan Komisaris No. 007.SK/DK/HP/2017 tanggal 12 Desember 2017. Piagam Komite Audit menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Secara garis besar, tugas pokok Komite Audit adalah sebagai berikut:

### Audit Committee Charter

Audit Committee established Audit Committee Charter as a work guideline that was approved by Decision of Board of Commissioners No. 007.SK/DK/HP/2017 dated December 12, 2017. Audit Committee Charter outlines duties, responsibilities and obligations of Audit Committee.

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Audit Committee are regulated in Audit Committee Charter. In general, main duties of Audit Committee are as follows:

**KOMITE AUDIT**  
Audit Committee

**A. Bidang Audit**

- 1) Memonitor efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor internal maupun eksternal;
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan hasil audit baik yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun auditor eksternal.
- 3) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pengendalian internal dan mengawasi pelaksanaannya;
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap setiap informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan;
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

**B. Bidang Perencanaan dan Implementasi**

- 1) Menelaah dan memberikan hasil kajian/tanggapan atas informasi mengenai Perusahaan, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, dan informasi lainnya;
- 2) Menelaah pengaduan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;

**C. Bidang Kinerja**

- 1) Memberikan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja;
- 2) Memberikan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dan/atau instrumen lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan evaluasi lebih lanjut;

**D. Bidang Pengembangan Usaha**

- 1) Memantau dan mengevaluasi realisasi rencana bisnis Perusahaan;
- 2) Mengkaji rencana pengembangan/ekspansi bisnis Perusahaan;

**E. Rencana Kerja dan Pelaporan Komite Audit**

- 1) Membuat rencana kerja dan KPI Komite tahunan;
- 2) Menyampaikan laporan kegiatan Komite dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**A. Audit**

- 1) Monitoring effectiveness of internal control system and audits conducted by internal and external auditors;
- 2) Evaluating audit works and results, both those carried out by Internal Audit Unit (SPI) and external auditor;
- 3) Evaluating and providing recommendations for internal control system improvement and monitoring the implementation;
- 4) Ensuring that there are satisfactory evaluation procedures for any financial information issued by the Company;
- 5) Providing recommendations regarding appointment of public accountants and public accounting firms to Board of Commissioners to be submitted to GMS;

**B. Planning and Implementation**

- 1) Reviewing and providing review results/responses to information pertaining to the Company, long-term plans, work plans and budget of the Company, Management Reports and other information;
- 2) Reviewing complaints from stakeholders related to the Company's operations;

**C. Performance**

- 1) Providing recommendations regarding Board of Directors' KPI at the beginning of each financial year;
- 2) Providing recommendations regarding performance assessment of Board of Directors based on KPI and/ or other instruments to be submitted to Board of Commissioners for further evaluation;

**D. Business Development**

- 1) Monitoring and evaluating realization of the Company's business plans;
- 2) Reviewing the Company's business development/ expansion plans;

**E. Audit Committee Work Plan and Reporting**

- 1) Preparing annual work plan and KPI of the Committee;
- 2) Submitting reports on the Committee's activities and quarterly and annual realizations of the Committee's KPI;
- 3) Performing other tasks assigned by Board of Commissioners based on the laws and regulations.

## KOMITE AUDIT

Audit Committee

### Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugasnya termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mengkaji dan menyusun tanggapan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019;
2. Mengkaji dan menyusun tanggapan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan tahun 2018-2022;
3. Mengevaluasi Laporan Manajemen dan pencapaian KPI Manajemen triwulanan tahun 2018;
4. Mengevaluasi Laporan Manajemen dan Pencapaian KPI Manajemen tahunan tahun 2018;
5. Memonitor tindak lanjut temuan hasil audit internal dan eksternal;
6. Menyusun kajian rencana pengambilalihan saham minoritas perorangan HPI;
7. Mengevaluasi dan memberikan pendapat untuk revisi Piagam SPI tahun 2014;
8. Menyampaikan hasil evaluasi, kajian, dan pendapat kepada Dewan Komisaris di dalam forum rapat internal Dewan Komisaris;
9. Menyusun rencana kerja dan KPI Komite Audit tahun 2018;
10. Menyusun laporan perkembangan realisasi KPI Komite Audit triwulan II tahun 2018;
11. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan realisasi KPI Komite Audit tahun 2018;
12. Merumuskan Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja Komite Audit.

Realisasi kinerja Komite Audit secara kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk pencapaian KPI Komite Audit. Pada tahun 2018, KPI Komite Audit yang terdiri dari 8 program kerja terpenuhi seluruhnya dengan skor 100.

### Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2018 menyelenggarakan 21 kali rapat termasuk rapat dengan Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit 100%.

### Audit Committee's Duties Performed in 2018

During 2018, Audit Committee performed its duties including but not limited to:

1. Reviewed and prepared responses to 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
2. Reviewed and prepared responses to 2018-2022 Corporate Long Term Plan (RJPP);
3. Evaluated Management Reports and quarterly achievements Management's KPI in 2018;
4. Evaluated Management Reports and annual achievements Management's KPI in 2018;
5. Monitored follow-up on internal and external audit findings;
6. Prepared review on plan to take over HPI's individual minority shares;
7. Evaluated and provided opinions for revision of 2014 SPI Charter;
8. Submitted results of evaluations, reviews and opinions to Board of Commissioners in Board of Commissioners' internal meetings;
9. Prepared Audit Committee's work plan and KPI for 2018;
10. Prepared report on progress of Audit Committee's KPI realization in the second quarter of 2018;
11. Prepared report on Audit Committee's implementation of duties and KPI realization in 2018;
12. Prepared Audit Committee Charter as a work guide for Audit Committee.

Realization of Audit Committee's performance is indicated quantitatively in Audit Committee's KPI achievements. In 2018, Audit Committee's KPI consisted of 8 work programs that were fully implemented with a score of 100.

### Audit Committee Meetings

During 2018, there were 21 meetings, including meetings with Board of Commissioners, with 100% attendance of Audit Committee members.

## KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG & Manajemen Risiko (GCG & MR) dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan Perusahaan di bidang manajemen risiko, GCG, nominasi dan remunerasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Anggota Komite GCG & MR terdiri dari Komisaris Perusahaan sebagai ketua dan atau anggota, dan anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keanggotaan Komite GCG & MR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

### Komposisi Komite GCG & MR

Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002.SK/DK/HP/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan SK No. 004.SK/DK/HP/2017 tanggal 29 September 2017, komposisi Komite GCG & MR Perusahaan adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA Name	Position
Ketua merangkap Komisaris	Okto Rinaldi S.	Chairman and Commissioner
Anggota	Riza Indriawan	Member

Sejalan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris, maka komposisi Komite GCG & MR mengalami perubahan per 1 Desember 2018. Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 01.SK/DK/HP/2018 dan SK No. 02.SK/DK/HP/2018, susunan anggota Komite GCG & MR menjadi sebagai berikut:

JABATAN	NAMA Name	Position
Ketua merangkap Plt. Komisaris	Karyawan Aji	Chairman and Act. Commissioner
Anggota	Kurniawan Andriyanto	Member

## GCG & RISK MANAGEMENT COMMITTEE

GCG & Risk Management (GCG & MR) Committee was established by Board of Commissioners to assist in carrying out supervisory duties on the Company's activities in the areas of risk management, GCG, nomination and remuneration and human resources development.

GCG & MR Committee members consist of the Company's Commissioners as chairman and/or members and independent members with expertise and experience according to the required qualifications. GCG & MR Committee members are appointed and terminated by Board of Commissioners.

### Composition of GCG & MR Committee

Based on Decisions of Board of Commissioners No. 002.SK/DK/HP/2017 dated February 24, 2017 and No. 004.SK/DK/HP/2017 dated September 29, 2017, composition of the Company's GCG & MR was as follows:

In line with changes in composition of Board of Commissioners, composition of GCG & MR Committee changed as of December 1, 2018. Based on Decisions of Board of Commissioners No. 01.SK/DK/HP/2018 and No. 02.SK/DK/HP/2018, composition of GCG & MR Committee is as follows:



**KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO**  
GCG & Risk Management Committee

**Profil Anggota Komite Komite GCG & MR Bukan Komisaris**

**Profile of Non-Commissioner GCG & MR Committee Member**

	<b>Nama Name</b>	Kurniawan Andriyanto
	<b>Kewarganegaraan Citizenship</b>	Indonesia Indonesian
	<b>Usia Age</b>	37 tahun 37 years old
	<b>Domisili Domicile</b>	Jakarta
	<b>Riwayat Pendidikan Educational Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004)</li> <li>• Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (2012)</li> <li>• Bachelor of Mechanical Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2004)</li> <li>• Master of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (2012)</li> </ul>
	<b>Dasar Hukum Penunjukan Appointment Legal References</b>	Keputusan Dewan Komisaris No. 02.SK/DK/HP/2018 tanggal 1 Desember 2018 Decree of the Board of Commissioners No. 02.SK/DK/HP/2018 dated December 1, 2018
	<b>Pengalaman Kerja Professional Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Proyek pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018)</li> <li>• Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Investasi dan Operasi pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018)</li> <li>• Deputy Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Investasi dan Operasi, pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-2018)</li> <li>• Manager of Project Risk Assessment, Monitoring, and Reporting in the field of Project and Operation Risk Management, Risk Management Division, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2018)</li> <li>• Manager of Investment and Operation Risk Assessment, Monitoring, and Reporting in the field of Project and Operation Risk Management, Risk Management and Compliance Division, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2018)</li> <li>• Deputy Manager of Investment and Operation Risk Assessment, Monitoring, and Reporting in the field of Project and Operation Risk Management, Risk Management and Compliance Division, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2016-2018)</li> </ul>
	<b>Jabatan Rangkap Concurrent Position</b>	Tidak memiliki jabatan rangkap Does not have concurrent positions
	<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Trainings and Competence Development</b>	Pada tahun 2018 tidak mengikuti program peningkatan kompetensi. Did not attend any competency improvement program in 2018.

**KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO**  
 GCG & Risk Management Committee

**Pernyataan Independensi Anggota Komite GCG & MR**

Kriteria independensi anggota Komite GCG & MR Perusahaan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 agar anggota Komite dapat bertindak independen, objektif, bebas dari benturan kepentingan dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite GCG & MR Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi, yaitu:

**Statement of Independence of GCG & MR Committee Members**

Independence criteria for members of the Company's GCG & MR Committee refer to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 so that Committee members can act independently, objectively, free from conflict of interest and professionally in carrying out their duties and in giving opinions to Board of Commissioners. All members of the Company's GCG & MR Committee have fulfilled the following independence criteria:

<b>KRITERIA INDEPENDENSI</b> Independence Criteria	<b>Karyawan Aji</b>	<b>Kurniawan Andriyanto</b>
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be an employee in the Public Accountants Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Service Office, or any other party providing Insurance Services, Non-Insurance Services, Appraisers, and/or other Consulting Services to the Company within the last 6 months.	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Shall have no direct or indirect shares in the Company.	√	√
Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last 6 months.	√	√
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. Shall have no family relationship cause of marriage and descent to the second level, horizontally or vertically with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Principal Shareholders of the Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Shall have no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Shall not in the position in institutional that the business activity in providing services to the Company.	√	√

**Piagam Komite GCG & MR**

Komite GCG & MR telah menyusun Piagam Komite GCG & MR sebagai pedoman kerja Komite GCG & MR yang telah disahkan dengan SK Dewan Komisaris No. 006.SK/DK/HP/2017 tanggal 12 Desember 2017. Piagam Komite GCG & MR menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite GCG & MR.

**GCG & MR Committee Charter**

GCG & MR Committee established GCG & MR Committee Charter as a work guideline that was approved by Decision of Board of Commissioners No. 006.SK/DK/HP/2017 dated December 12, 2017. GCG & MR Committee Charter outlines duties, responsibilities and obligations of GCG & MR Committee.

## KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO

GCG & Risk Management Committee

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite GCG & MR diatur dalam Piagam Komite GCG & MR. Secara garis besar, tugas pokok Komite GCG & MR adalah sebagai berikut:

#### A. Bidang Manajemen Risiko

- 1) Mengevaluasi dan memberikan tanggapan atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;
- 2) Mengevaluasi model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan tanggapan untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- 3) Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;

#### B. Bidang GCG

- 1) Melakukan kajian atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bisnis Perusahaan;
- 2) Mengevaluasi dan memantau penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
- 3) Memastikan jalannya pengurusan Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan mengenai GCG;
- 4) Memastikan GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

#### C. Bidang Nominasi dan Remunerasi

- 1) Memberikan tanggapan atas kebijakan nominasi dan remunerasi;
- 2) Memberikan rekomendasi dan memantau prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan untuk memastikan agar sesuai dengan kebijakan nominasi;
- 3) Memberikan rekomendasi calon Direksi Perusahaan yang akan diusulkan kepada RUPS, apabila diperlukan;
- 4) Memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan;

#### D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Memberikan tanggapan atas kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Memberikan tanggapan atas kebijakan Manajemen dan prosedur operasi standar (SOP) di bidang pengembangan sumber daya manusia;

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of GCG & MR Committee are regulated in GCG & MR Committee Charter. In general, main duties of GCG & MR Committee are as follows:

#### A. Risk Management

- 1) Evaluating and responding to policies and implementation of the Company's risk management;
- 2) Evaluating risk measurement model used by the Company and providing recommendations for further improvement;
- 3) Monitoring various potential risks faced by the Company;

#### B. GCG

- 1) Reviewing the Company's compliance with the laws and regulations relevant to the Company's business;
- 2) Evaluating and monitoring GCG implementation in the Company;
- 3) Ensuring that management of the Company is in accordance with GCG principles and regulations;
- 4) Ensuring that GCG is implemented effectively and sustainably;

#### C. Nomination and Remuneration

- 1) Providing responses to nomination and remuneration policy;
- 2) Providing recommendations and monitoring procedures for appointment of prospective members of Board of Commissioners and Board of Directors of subsidiaries/joint ventures to ensure compliance with the nomination policy;
- 3) Providing recommendations for candidates for prospective Directors of the Company to be proposed to GMS, if needed;
- 4) Providing recommendations for remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors, if needed;

#### D. Human Resources Development

- 1) Providing responses to policies for human resources management and development;
- 2) Providing responses to Management's policies and standard operating procedures (SOP) in human resources development;

**KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO**  
GCG & Risk Management Committee

- 3) Melakukan kajian implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia;

**E. Rencana Kerja dan Pelaporan Komite GCG & MR**

- 1) Membuat rencana kerja dan KPI Komite tahunan;
- 2) Menyampaikan laporan kegiatan Komite dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pelaksanaan Tugas Komite GCG & MR Tahun 2018**

Sepanjang tahun 2018, Komite GCG & MR telah melaksanakan tugas-tugasnya termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mengkaji dan menyusun tanggapan atas RKAP tahun 2019;
2. Mengkaji dan menyusun tanggapan atas RJPP tahun 2018-2022;
3. Mengevaluasi Laporan Manajemen dan pencapaian KPI Perusahaan triwulanan tahun 2018;
4. Mengevaluasi Laporan Manajemen dan pencapaian KPI Perusahaan tahunan tahun 2018;
5. Mengkaji dan memberikan pendapat atas Piagam SPI tahun 2014.
6. Menyampaikan hasil evaluasi, kajian, dan pendapat kepada Dewan Komisaris di dalam forum rapat internal Dewan Komisaris;
7. Menyusun rencana kerja dan KPI Komite GCG & MR tahun 2018;
8. Menyusun laporan perkembangan realisasi KPI Komite GCG & MR triwulan II tahun 2018;
9. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan realisasi KPI Komite GCG & MR tahun 2018;
10. Merumuskan Piagam Komite GCG & MR.

Realisasi kinerja Komite GCG & MR secara kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk pencapaian KPI Komite GCG & MR. Pada tahun 2018, KPI Komite GCG & MR yang terdiri dari 7 program kerja terpenuhi seluruhnya dengan skor 100.

**Rapat Komite GCG & MR**

Sepanjang tahun 2018 Komite menyelenggarakan 23 kali rapat termasuk rapat dengan Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Komite GCG & MR 100%.

- 3) Conducting implementation studies of human resources planning system;

**E. GCG & MR Committee Work Plan and Reporting**

- 1) Preparing annual work plan and KPI of the Committee;
- 2) Submitting reports on the Committee's activities and quarterly and annual realizations of the Committee's KPI;
- 3) Performing other tasks assigned by Board of Commissioners based on the laws and regulations.

**GCG & MR Committee's Duties Performed in 2018**

During 2018, GCG & MR Committee performed its duties including but not limited to:

1. Reviewed and prepared responses to 2019 RKAP;
2. Reviewed and prepared responses to 2018-2022 RJPP;
3. Evaluated Management Reports and quarterly achievements the Company's KPI in 2018;
4. Evaluated Management Reports and annual achievements the Company's KPI in 2018;
5. Reviewed and provided opinions for 2014 SPI Charter;
6. Submitted results of evaluations, reviews and opinions to Board of Commissioners in Board of Commissioners' internal meetings;
7. Prepared GCG & MR Committee's work plan and KPI for 2018;
8. Prepared report on progress of GCG & MR Committee's KPI realization in the second quarter of 2018;
9. Prepared report on GCG & MR Committee's implementation of duties and KPI realization in 2018;
10. Prepared GCG & MR Committee Charter.

Realization of GCG & MR Committee's performance is indicated quantitatively in GCG & MR Committee's KPI achievements. In 2018, GCG & MR Committee's KPI consisted of 7 work programs that were fully implemented with a score of 100.

**GCG & MR Committee Meetings**

During 2018, there were 23 meetings, including meetings with Board of Commissioners, with 100% attendance of GCG & MR Committee members.

## KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO

GCG & Risk Management Committee

### Kebijakan Suksesi Direksi

Untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan Perusahaan di masa depan, Perusahaan menyelenggarakan program pengembangan kompetensi di bidang teknis, manajemen, strategi pengembangan usaha, dan sebagainya. Pada saatnya pergantian kepemimpinan, Perusahaan akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh Direksi dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite GCG & MR yang salah satu bidang tugasnya adalah menjalankan fungsi pengawasan di bidang nominasi dan remunerasi. Kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Pemegang Saham Utama yaitu PT PLN (Persero) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Kebijakan suksesi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kandidat Direktur yang diangkat oleh RUPS dapat berasal dari internal Perusahaan, anak perusahaan PLN dan atau kalangan profesional eksternal.
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Direktur oleh PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham, atau pihak independen yang ditunjuk.
3. Jumlah dan komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, tepat dan cepat.
4. Calon Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta atau jabatan lainnya di perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

## CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary merupakan sebutan jabatan untuk Sekretaris Perusahaan di lingkungan grup PT PLN (Persero) yang menjalankan fungsi *liaison officer*, untuk menjembatani kepentingan Perusahaan dengan pihak eksternal, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

### Succession Policy for Board of Directors

To prepare candidates for its future leaders, the Company runs competency development programs in technical, management, business development strategies and so forth. At the time of leadership change, the Company will propose internal candidates through an election conducted by Board of Directors and facilitated by Board of Commissioners through GCG & MR Committee, whose main tasks include supervision on nomination and remuneration. The internal candidates are then proposed to Major Shareholder, namely PT PLN (Persero), to undergo a fit and proper test.

Succession policy for Board of Directors is as follows:

1. Candidates for Board of Directors appointed by GMS may come from the Company's internal, PLN's subsidiaries and/or external professionals.
2. Appointment of Directors is carried out through fit and proper test mechanism on candidates for Directors by PT PLN (Persero) as Shareholder, or appointed independent party.
3. Number and composition of Board of Directors are adjusted to the needs and developments of the Company so as decision making process can run effectively, precisely and quickly.
4. Candidates for Directors are prohibited from holding multiple positions as Director or Commissioner in SOE/ROE/private company or other positions in other company that may lead to conflict of interest, except upon GMS approval.

## CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is a designation within PT PLN (Persero) group that carries out the liaison officer function, to communicate the Company's interests to external parties and to ensure the Company's compliance with GCG and the applicable laws and regulations in carrying out its operations.

**KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO**  
 GCG & Risk Management Committee

Corporate Secretary bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham.

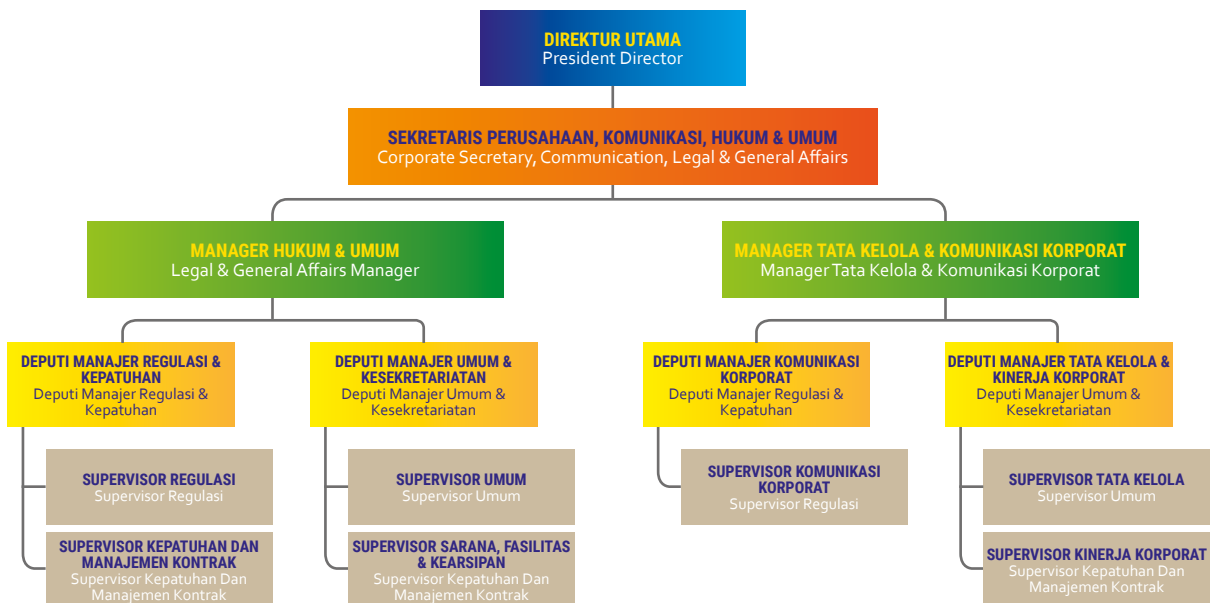
Corporate Secretary reports directly to President Director. Appointment and termination of Corporate Secretary are based on Decision of Board of Directors upon approval of Board of Commissioners and reported to Shareholders.

**Struktur Organisasi Corporate Secretary**

Struktur organisasi Corporate Secretary ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 0012.P/DIR-HP/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT Haleyora Power Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Corporate Secretary dibantu oleh Manajer Hukum & Umum dan Manajer Tata Kelola dan Komunikasi Korporat.

**Corporate Secretary Organizational Structure**

Corporate Secretary organizational structure is stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0012.P/DIR-HP/2018 dated August 1, 2018 concerning Organizational Structure and Position Formation of PT Haleyora Power Head Office. In carrying out its duties and responsibilities, Corporate Secretary is assisted by Legal & General Manager and Corporate Governance and Communication Manager.




## CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary

### Profil CORPORATE SECRETARY

### Corporate Secretary Profile

	<b>Nama Name</b> <b>Kewarganegaraan</b> <b>Citizenship</b>	Indarmi Indonesia Indonesian
	<b>Usia</b> <b>Age</b>	53 tahun 53 years old
	<b>Domisili</b> <b>Domicile</b>	Bandar Lampung
	<b>Riwayat Pendidikan</b> <b>Educational</b> <b>Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi Umum/Administrasi Negara, Universitas Bandar Lampung (1991)</li> <li>• Magister Manajemen, Universitas Bandar Lampung (2005)</li> <li>• Bachelor of Economics/State Administration from University of Bandar Lampung (1991)</li> <li>• Master in Management from University of Bandar Lampung, Lampung (2005)</li> </ul>
	<b>Dasar Hukum</b> <b>Penunjukan</b> <b>Appointment Legal</b> <b>References</b>	Keputusan Direksi No. 008.K/SDM.00.03/DIR-HP/2018 tentang Penempatan Pegawai Tugas Karya tanggal 9 Februari 2018 Decree of the Board of Directors No. 008.K/SDM.00.03/DIR-HP/2018 concerning the Placement of Seconded Employee dated February 9, 2018
	<b>Pengalaman Kerja</b> <b>Professional</b> <b>Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Specialist II Rekrutmen pada Sub Bidang Rekrutmen dan Seleksi – Bidang Rekrutmen dan Seleksi – Divisi Pengembangan Talenta Direktorat Human Capital Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2018)</li> <li>• Deputy Manajer Mekanisme Niaga pada Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Distribusi Lampung (2013-2015)</li> <li>• Deputy Manajer Pengembangan Organisasi dan SDM pada Bidang SDM dan Komunikasi, Hukum, Administrasi PLN Wilayah Lampung (2011-2012)</li> <li>• Deputy Manajer pada Sub Bidang Akuntansi – Bidang Keuangan PLN Wilayah Lampung (2011)</li> <li>• Deputy Manajer pada Sub Bidang Komersial Bidang Niaga &amp; Pelayanan Pelanggan PLN Wilayah Lampung (2009-2011)</li> <li>• Senior Specialist II Recruitment in Sub-Field of Recruitment and Selection – Field of Recruitment and Selection – Division of Talent Development, Directorate of Human Capital Management of PT PLN (Persero) Head Office (2015-2018)</li> <li>• Deputy Manager of Commerce Mechanism, Field of Commerce and Customer Service PLN Distribution of Lampung (2013-2015)</li> <li>• Deputy Manager of Organizational Development and HR, Field of HR and Communication, Legal, Administration, PLN Region of Lampung (2011-2012)</li> <li>• Deputy Manager in Sub-Field of Accounting – Field of Finance, PLN Region of Lampung (2011)</li> <li>• Deputy Manager in Sub-Field of Commercial, Field of Commerce and Customer Service, PLN Region of Lampung (2009-2011)</li> </ul>
	<b>Jabatan Rangkap</b> <b>Concurrent Position</b>	Tidak memiliki jabatan rangkap Does not have concurrent positions
	<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> <b>Trainings and Competence</b> <b>Development</b>	Pada tahun 2018 tidak mengikuti program peningkatan kompetensi. Did not attend any competency improvement program in 2018.



### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi hubungan dengan pihak eksternal dan pemangku kepentingan;
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan GCG, memastikan Perusahaan memiliki perangkat dan pedoman GCG serta melakukan pemantauan dan implementasi GCG;
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesekretariatan Perusahaan, termasuk di dalamnya integrasi kegiatan Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, melalui, tetapi tidak terbatas pada, media cetak dan media digital.
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi dan laporan manajemen, laporan tahunan, statistik Perusahaan, dan laporan Perusahaan lainnya.

### **Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary**

Selama tahun 2018, Corporate Secretary telah melaksanakan tugas, antara lain:

1. Pelaksanaan implementasi GCG termasuk memfasilitasi kegiatan asesmen GCG oleh BPKP;
2. Pelaksanaan RUPS Tahunan RKAP tahun 2018 dan Pengesahan Kontrak Manajemen/KPI tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018;
3. Pelaksanaan RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 tanggal 16 Mei 2018;
4. Pelaksanaan kegiatan CSR;
5. Penerbitan produk hukum.

## **FUNGSI AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERNAL)**

Fungsi Audit Internal di Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan audit; serta mengevaluasi dan melakukan pembinaan fungsi

### **Duties and Responsibilities**

Duties and responsibilities of Corporate Secretary are as follows:

1. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies on relations with external parties and stakeholders;
2. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies on GCG management, ensuring that the Company has GCG tools and guidelines as well as monitoring and implementing GCG;
3. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies on secretariat management, including integration of activities of Board of Directors, Board of Commissioners, General Meeting of Shareholders (GMS) and other stakeholders;
4. Ensuring planning, implementation and evaluation of the Company's information availability that can be accessed by stakeholders, through, but not limited to, print and digital media.
5. Ensuring planning, implementation and evaluation of availability of management information and reports, annual reports, corporate statistics and other corporate reports.

### **Implementation of Corporate Secretary's Duties**

During 2018, Corporate Secretary performed the following duties:

1. GCG implementation including facilitated GCG assessment by BPKP;
2. Implementation of Annual GMS on 2018 RKAP and Ratification of 2018 Management Contract/KPI on January 11, 2018;
3. Implementation of Annual GMS on Approval for Annual Report and Ratification of Financial Statements for Financial Year 2017 on May 16, 2018;
4. Implementation of CSR activities;
5. Issuance of legal products.

## **INTERNAL AUDIT UNIT**

Internal Audit Function in the Company is carried out by Internal Audit Unit (SPI). SPI is responsible for leading, developing plans and conducting audit activities; as well as evaluating and developing SPI functions that are not limited

**FUNGSI AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERNAL)**

## Internal Audit Unit

SPI yang tidak terbatas pada fungsi audit internal, audit khusus dan kegiatan konsultasi, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan GCG.

SPI memegang peranan penting dalam membantu Perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis, teratur dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola. SPI pun berperan dalam memastikan seluruh proses bisnis yang dijalankan Perusahaan dilakukan sesuai dengan kaidah, peraturan dan ketentuan yang berlaku guna mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha Perusahaan.

SPI bersifat independen dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI). KSPI diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan KSPI didasarkan kemampuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Fungsi Audit Internal baik dari segi kualifikasi, kompetensi, keahlian dan pengalaman kerja.

to the functions of internal audit, special audit and consulting, but also in the context of GCG implementation.

SPI plays a key role in helping the Company achieves its goals through a systematic, orderly and structured approach to evaluate and increase effectiveness of risk management, internal control and governance processes. SPI also plays a role in ensuring that all business processes carried out by the Company are in accordance with the applicable rules and regulations and to support the Company's business growth and sustainability.

SPI is independent and is led by Head of Internal Audit Unit (KSPI). KSPI was appointed and terminated directly by President Director upon approval of Board of Commissioners. Appointment of KSPI is based on capability, competence and expertise according to the needs for performing duties of Internal Audit Function, in terms of qualification, competence, expertise and work experience.

**FUNGSI AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERNAL)**

Internal Audit Unit

**Profil KEPALA SPI**

**SPI CHAIRMAN Profile**



<b>Nama Name</b>	Gathut Rudi Warianto
<b>Kewarganegaraan Citizenship</b>	Indonesia Indonesian
<b>Usia Age</b>	53 tahun 53 years old
<b>Domisili Domicile</b>	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan Educational Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya (1992)</li> <li>• Pemegang Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) (2014)</li> <li>• Bachelor of Mechanical Engineering from 10 Nopember Institute of Technology, Surabaya (1992)</li> <li>• Holder of Qualified Internal Auditor (QIA) Certification (2014)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan Appointment Legal References</b>	Keputusan Direksi No. 089.K/DIR-HP/2016 tentang Penempatan Pegawai Tugas Karya tanggal 19 Juli 2016 Decree of the Board of Directors No. 089.K/DIR-HP/2016 concerning the Placement of Seconded Employee dated July 19, 2016
<b>Pengalaman Kerja Professional Background</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Specialist II Audit Distribusi pada Bidang Audit Regional VI SPI PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)</li> <li>• Senior Specialist II Audit Transmisi dan Distribusi pada Deputy Group Audit Regional 7A, Group Head Audit Regional 7, Inspektorat Audit Regional Jawa Bagian Barat, SPI PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)</li> <li>• Deputy Group Audit Regional 20A pada Group Head Audit Regional 20, Inspektorat Audit Regional Kantor Pusat, SPI PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016)</li> <li>• Senior Specialist II of Distribution Audit in the Field of Regional Audit VI, Internal Audit Unit, PT PLN (Persero) Head Office(2015)</li> <li>• Senior Specialist II Transmission and Distribution Audit at Deputy Group Audit Regional 7A, Group Head Audit Regional 7, inspectorate of Audit of Western Java Regional, Internal Audit Unit, PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)</li> <li>• Deputy Group Audit of Regional 20A at Group Head Regional Audit 20, Inspectorate of Regional Audit Head Office, Internal Audit Unit, PT PLN (Persero) Head Office (2016)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap Concurrent Position</b>	Tidak memiliki jabatan rangkap Does not have concurrent positions
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Trainings and Competence Development</b>	Pada tahun 2018 tidak mengikuti program peningkatan kompetensi. Did not attend any competency improvement program in 2018.

**Struktur Organisasi SPI**

Struktur organisasi SPI ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0013.K/DIR-HP/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi 023.K/DIR-HP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT HALEYORA POWER. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala SPI dibantu oleh 1 orang Auditor.

**SPI Organizational Structure**

SPI organizational structure is stipulated in Decision of Board of Directors No. 0013.K/DIR-HP/2016 concerning Amendment to Decision of Board of Directors No. 023.K/DIR-HP/2014 concerning Organization and Work Procedures of PT HALEYORA POWER Head Office. In performing its duties and responsibilities, Head of SPI is assisted by 1 Auditor.

## FUNGSI AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERNAL)

Internal Audit Unit



### Piagam SPI

SPI memiliki Piagam Satuan Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya. Piagam SPI telah menjadi panduan tugas SPI sejak 2 Juni 2014. Saat ini Piagam SPI tersebut sedang dievaluasi bersama Komite Audit untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan proses bisnis Perusahaan saat ini.

Piagam SPI memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mencakup uraian visi, misi dan atribut; kedudukan SPI; fungsi, tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup tugas SPI, peran SPI atas manajemen risiko; standar auditor yang berisi persyaratan profesional auditor dan SPI, lingkup kerja audit, pelaksanaan dan pelaporan audit, pengelola SPI; serta Kode Etik.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SPI meliputi:

1. Menyusun rencana, strategi, kebijakan dan prosedur pengawasan;
2. Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan, serta melakukan kajian berkala;
3. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan efektif, termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan, dan melakukan asesmen terhadap sistem tersebut secara rutin;
4. Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha, antara lain meliputi bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan operasional;
5. Melakukan kegiatan audit untuk mendorong terciptanya kepatuhan seluruh insan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan,

### SPI Charter

SPI has Internal Audit Charter as a guide in performing its duties. SPI Charter has been SPI task guide since June 2, 2014. Currently, SPI Charter is being evaluated by Audit Committee to adjust to the development of the Company's organization and business processes.

SPI Charter stipulates aspects relating to tasks implementation which include description of vision, missions and attributes; SPI position; functions, responsibilities, authorities, scope of SPI's duties, SPI's role in risk management; auditor standards that include professional requirements for auditors and SPI, scope of audit work, audit conduct and reporting, SPI manager; and Code of Conducts.

### Duties and Responsibilities

SPI's duties and responsibilities include:

1. Preparing audit plans, strategies, policies and procedures;
2. Monitoring achievement of audit objectives and strategies, and conducting periodic reviews;
3. Ensuring that the Company's internal control system runs effectively, including performing activities that can prevent irregularities and conducting routine assessment of the system;
4. Performing supervisory functions in all business activities, including, among others, in accounting, finance, human resources (HR) and operations;
5. Conducting audit activities to encourage compliance of the Company's personnel with the applicable laws and regulations;
6. Conducting special audits (investigations) to uncover cases that have indications of abuse of authority, embezzlement and fraud;

## FUNGSI AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERNAL)

Internal Audit Unit

- penyelewengan, dan kecurangan (*fraud*);
7. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi objektif kepada *auditee* mengenai objek yang diaudit;
  8. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;
  9. Mendukung penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
  10. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya kepada Direktur Utama.
7. Providing improvement recommendations and objective information to auditee regarding the audited object;
  8. Providing consultation to all levels of management regarding efforts to improve effectiveness of internal control and other activities related to performance improvement;
  9. Supporting GCG implementation in the Company;
  10. Reporting all audit results to President Director.

## AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2018, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan RSM, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018. Nilai biaya jasa yang diberikan oleh KAP seluruhnya menjadi beban induk Perusahaan (PLN).

Jasa audit yang diberikan KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan pada tahun 2018 mencakup:

- a. Audit Laporan Keuangan Konsolidasian;
- b. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal;
- c. *Review* atas laporan evaluasi kinerja Perusahaan.

Informasi mengenai KAP dan akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 tahun terakhir serta opini audit, disajikan dalam tabel berikut:

TAHUN BUKU Fiscal Year	KANTOR AKUNTAN PUBLIK Public Accountant Firm	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant	OPINI AUDIT Audit Opinion
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Haryanto Sahari	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2014	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Haryanto Sahari	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect

## PUBLIC ACCOUNTANT

Based on Resolution of Annual GMS on May 16, 2018, the Company appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, members of RSM network, to audit Consolidated Financial Statements for Financial Year 2018. Services provided by KAP are entirely at the expense of the holding company (PLN).

Audit services provided by KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan in 2018 included:

- a. Audit of Consolidated Financial Statements;
- b. Audit of compliance with the laws and regulations and internal control;
- c. Review of the Company's performance evaluation report.

Information on KAP and public accountants who have audited the Company's Financial Statements for the past 5 years and audit opinions are presented in the following table:

**AKUNTAN PUBLIK)**  
Public Accountant

## MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh internal dan eksternal yang membuat ketidakpastian yang menimbulkan risiko bagi keberlanjutan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan sistem pengelolaan risiko yang mengacu pada standar penerapan manajemen risiko yang baik sejalan dengan praktik GCG. Fungsi manajemen risiko di Perusahaan dilakukan oleh Manajer Pengembangan Bisnis dan menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam penyiapan kerangka kerja pengelolaan risiko, penerapan proses manajemen risiko, memantau dan mengkaji kerangka kerja manajemen risiko. Setiap pimpinan unit kerja sebagai pemilik risiko (*risk owner*) bertanggung jawab atas pelaksanaan komitmen manajemen di unit kerjanya masing-masing untuk mewujudkan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terintegritasi sehingga visi dan misi Perusahaan dapat tercapai.

### Kerangka Penerapan Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada standar ISO 31000:2009 (*International Standard of Risk Management*). Tetapi pada beberapa hal, misalnya aspek kepatuhan, lingkup penerapan dan beberapa istilahnya mengacu pada COSO-*Enterprise Risk Management (ERM) 2014*.

ERM merupakan proses penyusunan strategi yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasarannya serta mekanisme pengelolaan risiko-risiko tersebut agar berada dalam tingkat yang dapat diterima dan dapat memberikan kepastian bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan akan tercapai.

## RISK MANAGEMENT

The Company's business is affected by internal and external influences that create uncertainty which may risk the Company's business sustainability. Therefore, the Company implements risk management system that refers to the standards for good risk management in line with GCG practices. Risk management function in the Company is carried out by Business Development Manager who submits periodic reports to Board of Commissioners and Board of Directors.

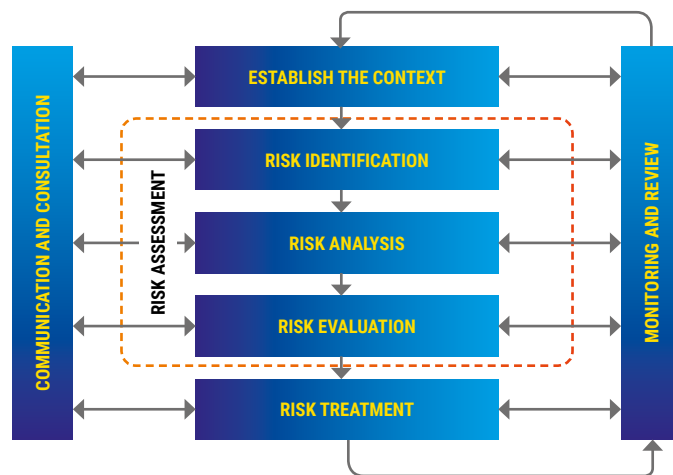
Risk Management function is responsible for preparing risk management framework, implementing risk management process, monitoring and reviewing risk management framework. Each head of work unit as a risk owner is responsible for implementing management commitment in their work units to realize a comprehensive and integrated risk management system so that the Company's vision and mission can be achieved.

### Risk Management Framework

Risk management in the Company refers to ISO 31000:2009 (International Standard of Risk Management). However, in some cases, for example compliance aspect, scope of application and some of the terms refer to COSO-*Enterprise Risk Management (ERM) 2014*.

ERM is a process of developing a strategy designed to identify risks that can affect the Company's ability to achieve its goals and objectives as well as mechanisms for managing those tolerable risks and to providing assurance that the Company's goals and objectives will be achieved.

**MANAJEMEN RISIKO**  
 Risk Management



**Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Mitigasinya**

Perusahaan telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan merumuskan mitigasinya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**The Company's Risks and Mitigations**

The Company has identified the main types of risks faced by the Company and formulated mitigation as described in the following table:

NO	JENIS RISIKO YANG DIHADAPI Type of Risks	MITIGASI RISIKO Risk Mitigations
1	Migrasi kontrak ke <i>end-to-end</i> terkendala karena PLN memilih mempertahankan kontrak eksisting yang belum berbasis aset. Contract migration to end-to-end is hindered because PLN chooses to stand with the existing non-asset-based contract.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi komprehensif kepada PLN Unit/Regional/Pusat untuk mendapatkan dukungan menerapkan layanan end-to-end berbasis manajemen aset (penerapan SE DIR 017 dan 018 tahun 2014) di unit PLN dan menyampaikan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari layanan <i>end-to-end</i>.</li> <li>Memantau pelaksanaan proyek percontohan <i>end-to-end</i> agar memberikan hasil yang maksimal.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Conducting comprehensive socialization to PLN Unit/Regional/Head Office to obtain support to implement end-to-end services based on asset management (implementation of SE DIR 017 and 018 of 2014) in PLN units and disseminating long-term benefits of end-to-end services.</li> <li>Monitoring end-to-end Pilot Project in order to provide maximum results.</li> </ol>



**MANAJEMEN RISIKO**  
Risk Management

NO	JENIS RISIKO YANG DIHADAPI Type of Risks	MITIGASI RISIKO Risk Mitigations
2	<p>Kewajiban kontrak tidak dipenuhi Perusahaan. Contract obligations are not fulfilled by the Company.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman <i>region</i> mengenai kewajiban kontrak.</li> <li>2. Mengoptimalkan aplikasi <i>monitoring</i> data aset di seluruh area.</li> <li>3. Memantau kekurangan personel untuk setiap kontrak dan menyampaikan ke Kantor Pusat.</li> <li>4. Mengamandemen kontrak sebagai kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.</li> <li>5. Membuat perencanaan yang akurat.</li> <li>6. Melaksanakan proses pengadaan yang akurat untuk meminimalkan risiko keterlambatan dan kualitas yang tidak sesuai.</li> <li>7. Menyusun SOP proses validasi persetujuan/ketersediaan anggaran.</li> <li>8. Menyusun SOP <i>impassing</i>/rekrutmen tenaga kerja.</li> <li>9. Membangun <i>database</i> sertifikasi pada <i>Human Resources Information System</i> (HRIS) untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja.</li> <li>10. Mengadakan pembekalan sertifikasi di <i>region</i>.</li> <li>11. Mengkaji dan merevisi kerja sama operasi (KSO) untuk kejelasan status tenaga kerja HPI.</li> <li>12. Mengidentifikasi pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 13 antara lain BPJS dari entitas KSO (HPI).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Increasing understanding of region on contractual obligations.</li> <li>2. Optimizing asset data monitoring application in all areas.</li> <li>3. Monitoring and reporting personnel shortages for each contract to Head Office.</li> <li>4. Amending contract to comply with the employment laws and regulations.</li> <li>5. Preparing accurate planning.</li> <li>6. An accurate procurement process to minimize the risk of delays and improper quality.</li> <li>7. Establishing SOP for validation process of budget approval/availability.</li> <li>8. Establishing SOP for employment <i>impassing</i>/recruitment.</li> <li>9. Developing Human Resources Information System (HRIS) to support planning and implementation of workforce certification.</li> <li>10. Certification training in regions.</li> <li>11. Reviewing and revising operational cooperation (KSO) for clarity of HPI workforce status.</li> <li>12. Identifying fulfillment of employment obligations in accordance with Law No. 13 of 2013, including BPJS of KSO entity (HPI).</li> </ol>
3	<p>Kinerja keandalan jaringan dengan <i>end-to-end</i> tidak meningkat. Performance of network reliability with <i>end-to-end</i> does not increase.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau secara intensif proses pelaksanaan proyek <i>end-to-end</i>.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi kinerja staf terkait melalui pelatihan.</li> <li>3. Membuat sistem aplikasi <i>monitoring</i> kinerja.</li> <li>4. Membuat standar laporan pencapaian SLA.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensive monitoring of <i>end-to-end</i> project implementation.</li> <li>2. Improving relevant staff performance analysis and evaluation through training.</li> <li>3. Creating performance monitoring application system.</li> <li>4. Creating standardization of SLA achievement report.</li> </ol>

**MANAJEMEN RISIKO**  
 Risk Management

NO	JENIS RISIKO YANG DIHADAPI Type of Risks	MITIGASI RISIKO Risk Mitigations
4	Terjadi kecelakaan kerja kritis/fatal. Critical/fatal occupational accident	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan addendum kontrak dengan PLN yang mengakomodasi klausul kepatuhan terhadap K<sub>3</sub> sesuai UU No. 1/1970 dan UU No. 30/2009 serta kebijakan, peraturan atau surat-surat dari PLN.</li> <li>2. Penerapan SMK<sub>3</sub> sebagai kepatuhan pada pasal 87 UU 13/2003 dan diatur dalam PP 50/2012.</li> <li>3. Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di area yang diatur dalam pasal 10 UU No. 1/1970 dan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 04/1987.</li> <li>4. Sertifikasi kompetensi tenaga pelaksana/pengawas K<sub>2</sub>/K<sub>3</sub>.</li> <li>5. Pembinaan rutin dan <i>review</i> untuk pengawas/koordinator di lapangan terkait K<sub>3</sub>.</li> <li>6. Melaksanakan pemutakhiran SOP.</li> <li>7. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> K<sub>2</sub>/K<sub>3</sub>.</li> <li>8. Penetapan standar alat pelindung diri (APD) yang mengacu pada Standar PLN (SPLN)/Peraturan Menteri.</li> <li>9. <i>Set-up</i> SMK<sub>3</sub> di seluruh region dan pelaksanaan pemantauan.</li> <li>10. Audit K<sub>3</sub> oleh tim Kantor Pusat secara periodik.</li> <li>11. Melakukan sosialisasi SOP minimal setiap 6 bulan.</li> <li>12. Implementasi aplikasi data aset/alat kerja untuk pengendalian kebutuhan APD (risiko no. 1) dan pengajuan pengadaan berdasarkan pengendalian kebutuhan APD.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addendum to contract with PLN that accommodates clause of K<sub>3</sub> compliance in accordance with Law No. 1 of 1970, Law No. 30 of 2009 and policies, regulations and PLN letters.</li> <li>2. SMK<sub>3</sub> implementation to comply with Article 87 of Law No. 13 of 2003 and PP No. 50 of 2012.</li> <li>3. Establishing Advisory Committee for Occupational Health and Safety (P2K3) in areas regulated by Article 10 of Law No. 1 of 1970 and Ministerial Regulation No. 04 of 1987.</li> <li>4. Competency certification of K<sub>2</sub>/K<sub>3</sub> executive/supervisor.</li> <li>5. K<sub>3</sub> periodic guidance and review for executive/supervisor.</li> <li>6. Updating SOP.</li> <li>7. Awarding K<sub>2</sub>/K<sub>3</sub> reward and punishment.</li> <li>8. Establishing APD standard that refers to SPLN/Permen.</li> <li>9. SMK<sub>3</sub> set up in regions and implementation monitoring.</li> <li>10. K<sub>3</sub> audit by Head Office team periodically</li> <li>11. SOP socialization at least every 6 months.</li> <li>12. Implementation of assets/work equipment data application for APD requirement control (risk no. 1) and procurement proposal based on APD requirement control.</li> </ol>

**MANAJEMEN RISIKO**  
Risk Management

NO	JENIS RISIKO YANG DIHADAPI Type of Risks	MITIGASI RISIKO Risk Mitigations
5	Terjadi mogok kerja oleh tenaga kerja. Workforce strike	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem penggajian tenaga kerja berbasis kompetensi yang terintegrasi pada HRIS.</li> <li>2. Melakukan identifikasi dan koreksi menyeluruh terhadap aspek kepatuhan sesuai regulasi ketenagakerjaan seperti BPJS, DPLK dan sebagainya.</li> <li>3. Pengajuan <i>addendum</i> kontrak ke PLN terkait penggajian dan tunjangan ketenagakerjaan lainnya.</li> <li>4. Memetakan tenaga kerja untuk tiap proyek.</li> <li>5. Melaksanakan <i>coaching, mentoring, dan counselling</i>.</li> <li>6. Penerapkan sistem <i>reward and punishment</i>.</li> <li>7. Melakukan pembinaan melalui <i>employee gathering</i> dan pembinaan kerohanian (pengajian, tausiah) secara rutin.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Developing integrated competency-based payroll system in HRIS.</li> <li>2. Comprehensive identification and correction in compliance aspect in accordance with employment regulations, such as BPJS, DPLK and so forth.</li> <li>3. Proposing contract Addendum to PLN regarding payroll and other employment benefits.</li> <li>4. Workforce mapping for each project.</li> <li>5. Coaching, mentoring dan counselling.</li> <li>6. Reward and punishment system implementation.</li> <li>7. Regular employee gatherings and spiritual education (recitation, tausiah).</li> </ol>
6	PLN tidak memperpanjang kontrak sesuai target waktu kelayakan keekonomian proyek pekerjaan sehingga kewajiban DPLK tidak dapat terpenuhi sesuai undang-undang ketenagakerjaan. PLN does not renew contract according to project economic feasibility time target so that DPLK obligation cannot be fulfilled according to the employment laws and regulations.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta dukungan induk perusahaan (PLN) agar setiap kontrak berlangsung minimal 12 tahun sesuai target keekonomian proyek pekerjaan (12 tahun).</li> <li>2. Meminta addendum kontrak dengan PLN untuk mengatur risiko finansial terkait ketenagakerjaan apabila durasi kontrak lebih pendek dari 12 tahun.</li> <li>3. Amandemen kontrak yang mengatur penyesuaian beban pesangon tenaga kerja sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku kepada PLN apabila proyek tidak dilanjutkan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Request for support from the holding company (PLN) to apply at least 12-year contract period according to project economic target (12 years).</li> <li>2. Request for PLN contract addendum to manage financial risk related to employment if the contract period is less than 12 years.</li> <li>3. Contract amendment to regulate adjustment of unfunded severance cost in accordance with employment regulation that applis to PLN if the project is not continued.</li> </ol>

**MANAJEMEN RISIKO**  
 Risk Management

NO	JENIS RISIKO YANG DIHADAPI Type of Risks	MITIGASI RISIKO Risk Mitigations
7	SLA tidak tercapai. SLA is not reached.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau secara harian realisasi pencapaian SLA dan mengidentifikasi solusi masalah agar dapat melakukan penanganan lebih awal (seperti pengajuan anggaran pengadaan, proses pengadaan, dan sebagainya).</li> <li>2. Penetapan KPI individu.</li> <li>3. Evaluasi kendala pencapaian target SLA dengan PLN melalui rapat koordinasi.</li> <li>4. Pengajuan amandemen kontrak apabila target SLA dinilai tidak realistis sehubungan dengan fakta kondisi di lapangan.</li> <li>5. Pelaksanaan <i>set-up</i> dan implementasi aplikasi AMIH di seluruh unit HP.</li> <li>6. Memantau secara intensif pencapaian SLA di setiap <i>region</i>.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daily monitoring of SLA realization and identification of problem solutions for early handling (such as procurement budget proposal, procurement process etc.)</li> <li>2. Individual KPI determination.</li> <li>3. Evaluation of problems in SLA target achievement with PLN through coordination meeting.</li> <li>4. Proposing contract amendment if SLA target is unrealistically linked to the factual conditions.</li> <li>5. Set up and implementation of AMIH application in all HP units.</li> <li>6. Intensive SLA monitoring in each region.</li> </ol>
8	Biaya Pokok Penyediaan (BPP) melampaui target anggaran. Cost of Supply (BPP) exceeds the budget target.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperketat pengawasan mutu material melalui evaluasi kontrak (Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang).</li> <li>2. Sosialisasi SOP penggunaan dan pemeliharaan alat kerja yang benar.</li> <li>3. Menerapkan hukuman/sanksi kepada tenaga kerja yang lalai dalam melakukan pekerjaan O&amp;M tanpa alat kerja yang benar.</li> <li>4. Menindaklanjuti hasil pelaporan pemeriksaan alat kerja/peralatan kerja.</li> <li>5. Memastikan proses pengadaan menghasilkan barang/jasa yang berkualitas melalui seleksi Daftar Penyedia Tetap (DPT) yang ketat dan QC yang akurat.</li> <li>6. Membentuk tim pemeriksaan material teknik.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifying material quality control through contract evaluation (Goods Inspection and Receipt Report).</li> <li>2. Socialization of SOP for proper maintenance and utilization of work equipment.</li> <li>3. Punishment to neglectful workforce who conduct O&amp;M work without proper work equipment.</li> <li>4. Following up on work equipment inspection report.</li> <li>5. Ensuring that procurement process produces quality goods/services through strict List of Vendor (DPT) selection and accurate QC.</li> <li>6. Establishing technical material inspection team.</li> </ol>
9	Pengambilalihan saham minoritas di HP terkendala karena permintaan yang lebih tinggi daripada perolehan. Takeover of minority shares in HP is constrained due to higher demand than acquisition cost.	<p>Menyiapkan pembagian peran bisnis antara HP dan HPI, di mana HP akan berkonsentrasi pada bisnis inti dan HPI pada bisnis non-inti. Proyek-proyek HPI terkait bisnis inti dimigrasikan ke HP dan HPI akan melakukan pengembangan bisnis non-inti.</p> <p>Preparing allocation of business roles between HP and HPI, where HP will concentrate on the core business and HPI on non-core business. HPI core projects will be transferred to HP and HPI will develop a non-core business.</p>

## MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

NO	JENIS RISIKO YANG DIHADAPI Type of Risks	MITIGASI RISIKO Risk Mitigations
10	Kualifikasi SDM yang tidak terpenuhi karena HP harus mengakomodasi tenaga kerja eksisting ( <i>impassing</i> ). HR qualifications that are not fulfilled due to HP must accommodate the existing workforce ( <i>Impassing</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan standar kualifikasi SDM dalam proses <i>impassing</i> sesuai dengan lingkup pekerjaan kepada PLN.</li> <li>2. Sosialisasi intensif dan persuasif oleh PLN dan HP kepada tenaga kerja eksisting mengenai kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan Perusahaan.</li> <li>3. Menyusun SOP proses <i>impassing</i> di mana uji kelayakan untuk segala risiko pengelolaan SDM dilakukan dan diperhitungkan dalam penyusunan kontrak kerja dengan mitra.</li> <li>4. Membangun pembinaan dan pengembangan SDM secara rutin untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Submitting HR standards qualification in <i>impassing</i> process according to scope of work to PLN.</li> <li>2. Intensive and persuasive socialization by PLN and HP to the existing workforce on the Company's qualification requirement.</li> <li>3. Preparing SOP for <i>impassing</i> process that regulates due diligence for all HR management risks is performed and considered in arranging work contract with business partners.</li> <li>4. Improving HR coaching and development regularly to enhance workforce competence/expertise.</li> </ol>

### Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko

Pada tahun 2018, Fungsi Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Penyempurnaan aplikasi manajemen risiko.
2. Sosialisasi profil risiko di Kantor Pusat
3. Memfasilitasi kegiatan evaluasi manajemen risiko oleh SPI.
4. Memberikan supervisi penyusunan kajian risiko.
5. Mengkaji dan memantau profil risiko Perusahaan triwulan I, II, III dan IV tahun 2018.
6. Menyampaikan laporan manajemen risiko triwulan I, II, III dan IV tahun 2018 kepada PT PLN (Persero).
7. Melakukan asesmen mandiri kematangan risiko semester 1 dan 2 tahun 2018.

### Hasil Kajian Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Kajian efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh Manajer Pengembangan Bisnis. Penilaian efektivitas penanganan risiko Perusahaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam pengelolaan risiko yang meliputi aspek-aspek kepemimpinan, kebijakan dan strategi, sumber daya manusia, pemangku kepentingan, dan proses, termasuk langkah-langkah mitigasi dan hasil dari mitigasi tersebut. Pada tahun 2018, penilaian risiko dari sasaran strategis difokuskan pada sasaran:

1. Peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya operasi;
2. Pemenuhan aspek K3LH untuk mencapai *zero accident*;
3. Pemenuhan undang-undang ketenagakerjaan;

### Duties Implementation of Risk Management

Risk management activities held in 2018 were as follows:

1. Refined risk management application.
2. Socialized risk profile in Head Office.
3. Facilitated risk management evaluation by SPI.
4. Supervised risk review preparation.
5. Reviewed and monitored the Company's quarterly risk profile in 2018.
6. Submitted quarterly risk management reports in 2018 to PT PLN (Persero).
7. Risk maturity self-assessment for the first and second semesters in 2018.

### Risk Management System Effectiveness Review Results

Risk management effectiveness review is carried out by Business Development Manager. Effectiveness assessment of the Company's risk management is carried out to improve the Company's capability in risk management which consists of the aspects of leadership, policies and strategies, human resources, stakeholders and processes, including mitigation measures and the results of such mitigations. In 2018, risk assessment of strategic objectives was focused on:

1. Increase in operating revenues and costs efficiency;
2. Fulfillment of K3LH aspects to achieve *zero accident*;
3. Compliance with the labor laws;

**MANAJEMEN RISIKO**  
 Risk Management

4. Peningkatan kualitas layanan eksisting dengan layanan *end-to-end* berbasis teknologi informasi;
5. Penguatan *work services* manajemen (SDM, teknologi, dan alat kerja).

4. Improvement in the existing service quality with information technology-based end-to-end services;
5. Enhancement of management (HR, technology and work equipment) work services.

Penilaian risiko diukur melalui tingkat kematangan manajemen risiko (*risk management maturity level*) atau *risk maturity*. Penilaian *risk maturity* dilakukan setahun sekali melalui asesmen kontrak kinerja – *Enterprise Risk Management* (ERM). Pada tahun 2018, target KPI *risk maturity* implementasi manajemen risiko yang ditetapkan untuk anak perusahaan PLN sebesar 3,50 (skala 5) di mana Perusahaan mencapai nilai 3,58.

Risk assessment is measured with risk maturity level. Risk maturity assessment is conducted once a year through performance contract assessment - Enterprise Risk Management (ERM). In 2018, risk maturity KPI target for risk management implementation applied to PLN subsidiaries was 3.50 (scale of 5). The Company reached 3.58 score.

NO	KRITERIA Criteria	TINGKAT KEMATANGAN RISIKO 2017 Risk Maturity Level 2017	PENILAIAN MANDIRI 2018 Self Assessment 2018	AKTIVITAS 2018 Activities 2018
1	Kebijakan bisnis: strategi bisnis dan kebijakan risiko Business policy: Business strategy and risk policy	4.60	4.64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Me-review kebijakan risiko</li> <li>• Sosialisasi manajemen risiko</li> <li>• Reviewing risk policy</li> <li>• Risk management socialization</li> </ul>
2	Proses bisnis Business process	3.30	3.33	Benchmark ERM PT Indonesia Power ERM enchmarking to PT Indonesia Power
3	People & organisasi People & organization	2.90	2.92	Pelatihan manajemen risiko Risk management training
4	Laporan Manajemen Management Report	3.75	3.75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan rutin profil risiko dan pemantauan indikator risiko</li> <li>• Melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan risiko</li> <li>• Laporan insiden risiko dan solusi perbaikan</li> <li>• Routine monitoring of risk profile and risk indicator</li> <li>• Self assessment of risk maturity</li> <li>• Risk incident report and corrective action</li> </ul>
5	Metodologi Methodologies	3.50	3.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem peringatan dini – sistem risiko proyek di <i>region</i></li> <li>• Database insiden risiko pada aplikasi manajemen risiko</li> <li>• Development of early warning system – project risk system at regions</li> <li>• Risk incident database at risk management application</li> </ul>
6	Sistem & data System & data	3.33	3.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan aplikasi manajemen risiko</li> <li>• Sosialisasi Q-Radar dari Manajemen Risiko PLN Pusat</li> <li>• Development of risk management application</li> <li>• Socialization of Q-Radar from Risk Management Unit, PLN Head Office</li> </ul>
<b>Tingkat Kematangan Risiko Risk Maturity Level</b>		<b>3.46</b>	<b>3.58</b>	

## MANAJEMEN RISIKO

### Risk Management

Hasil kajian manajemen risiko pada tahun 2018 dan tindak lanjut manajemen adalah sebagai berikut:

Risk management review results in 2018 and management's follow up were as follows:

NO	KRITERIA Criteria	AKTIVITAS 2018 Activities 2018
1	Melanjutkan proses menuju RKAP berbasis risiko Continuing the process towards risk-based Workplan and Budget (RKAP)	Melaksanakan program <i>sistering</i> ERM dengan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan supervisi dari Komite Dewan Komisaris untuk menerapkan RKAP berbasis risiko Implementing ERM <i>sistering</i> program with PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) and supervision from the Board of Commissioners' Committee to implement a risk-based RKAP
2	<i>Set-up</i> Q-Radar di tahun 2019 dengan <i>input</i> profil risiko di Q-Radar Q-Radar set-up in 2019 with risk profile input in Q-Radar	a. Sosialisasi dari Divisi MRO PT PLN (Persero) pada Desember 2018 b. <i>Set-up</i> direncanakan untuk dilakukan pada semester I 2019 a. Dissemination from PT PLN (Persero) MRO Division in December 2018 b. Set-up is planned to be carried out in the first semester of 2019
3	Sertifikasi ERM untuk manajemen puncak ERM certification for top management	<i>Certified Risk Management Professional</i> (RCMP): a. Level Direksi (semester I 2019) b. Level EVP (semester II 2019) c. Pelatihan manajemen risiko dasar <i>Certified Risk Management Professional</i> (RCMP): a. Board of Directors level (H1 2019) b. EVP Level (H2 2019) c. Basic risk management training

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal di Perusahaan meliputi seluruh kebijakan dan prosedur di semua fungsi operasional dengan memperhatikan faktor-faktor jumlah aset, jenis produk dan jasa, kompleksitas operasional termasuk jaringan kantor, profil risiko dari setiap kegiatan usaha, metode yang digunakan untuk pengelolaan data dan teknologi informasi, serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan dan pembatasan risiko, serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan merancang sistem pengendalian internal dengan mengadopsi *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari implementasi sistem pengendalian internal Perusahaan yang di antaranya terkait efektivitas dan efisiensi operasi, pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh regulator maupun Perusahaan serta terkait kepatuhan

## INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's internal control system covers all policies and procedures for operational functions taking into account the factors of total assets, types of products and services, operational complexity including office networks, risk profile of each business activity, the method used in data and information technology management and the methodology which applied to measure, monitor and limit risks, as well as the applicable laws and regulations.

### Internal Control System Framework

The Company designed an internal control system by adopting *Internal Control Integrated Framework* developed by *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). The objectives of internal control, according to COSO, include operational, reporting and compliance objectives. This is in accordance with the Company's objectives of internal control system implementation that include effectiveness and efficiency of operations; reliable, timely and transparent financial



## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur pengendalian internal meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Kegiatan monitoring.

### Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Secara berkala, Perusahaan mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pengendalian internal untuk mencapai kemajuan berkelanjutan pada semua proses bisnis. Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi risiko Perusahaan yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun peta risiko. Selain itu, evaluasi juga dilakukan oleh SPI melalui kegiatan audit untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal dalam menekan tingkat pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap prosedur.

Setiap permasalahan yang menyangkut pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi untuk dibahas sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menelaah laporan Direksi bersama Komite Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam menjaga kelangsungan usaha.

## PERKARA PENTING

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan, entitas anak, Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perkara penting seperti permasalahan hukum di lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pajak, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sepanjang tahun 2018, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

reporting; other requirements set by the regulators and the Company; as well as compliance with the laws and regulations.

Internal control elements consist of the following components:

1. Control environment;
2. Risk assessment;
3. Control activities;
4. Information and communication; and
5. Monitoring activities.

### Internal Control System Evaluation

The Company periodically evaluates and refines its internal control system to achieve continuous progress in all business processes. The evaluation includes the Company's risk evaluation which will then become a reference in risk map preparation. In addition, the evaluation is also conducted by SPI through audits to determine internal control system effectiveness in reducing violations/non-conformities with procedures.

Internal control issues are reported to Board of Directors to be discussed prior to submission to Board of Commissioners. Board of Commissioners shall review the report with Committee of Board of Commissioners to provide improvement recommendations in maintaining business sustainability.

## LEGAL ISSUES

At end of 2018, the Company, its subsidiaries, Board of Directors and Board of Commissioners were not involved in significant cases, such as legal issues in the judiciary, either District Court, High Court, Tax Court or Corruption Court.

During 2018, no administrative sanctions were imposed on the Company, members of Board of Directors and Board of Commissioners.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perusahaan menyediakan sarana dan fasilitas komunikasi untuk memudahkan para pemangku kepentingan memperoleh berbagai informasi terkait dengan Perusahaan yang tidak diklasifikasikan sebagai rahasia Perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai implementasi prinsip keterbukaan informasi. Di lingkungan internal, Perusahaan menyediakan intranet, buletin internal, *e-mail*, dan media lainnya sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Media cetak yang digunakan antara lain surat edaran, brosur, spanduk, dan majalah 4 bulanan "Media Haleyora".

Perusahaan menyediakan akses informasi untuk masyarakat melalui situs *web*: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id) yang berisi berbagai informasi seperti: profil perusahaan, produk dan layanan, dan komunikasi berkelanjutan (berita, dokumentasi, kegiatan CSR, *procurement*, majalah Media Haleyora) serta laman "Kontak" untuk permintaan informasi, penyampaian pendapat, kritik, keluhan maupun pertanyaan. Selain itu, Perusahaan juga memiliki akun media sosial seperti facebook dengan nama akun PT Haleyora Power, twitter dengan nama @pthaleyorapower serta instagram dengan nama akun @haleyorapower.

## PEDOMAN PERILAKU

Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pedoman bagi insan Perusahaan untuk berperilaku etis, profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan pelanggan, rekanan, maupun dengan sesama pegawai sesuai tata nilai Perusahaan. Selain Pedoman Perilaku yang ditetapkan pada bulan September 2016, Perusahaan juga memiliki tata nilai dan budaya Perusahaan yang disebut "Believe".

### Pokok-Pokok Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku terdiri dari tiga kelompok isi sebagai berikut:

#### A. Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; manfaat; serta tata nilai Perusahaan.

## ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

The Company provides communication means and facilities to enable stakeholders in obtaining various unclassified information related to the Company. This is done as to implemente the principle of information disclosure. In its internal environment, the Company provides intranet, internal bulletin, e-mail and other media as a means of communication and information dissemination. Print media used include circular, brochure, banner and "Media Haleyora" magazine which is issued every 4 months.

The Company provides access to information for the public through its website: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id) which contains various information, such as: company profile, products and services, as well as ongoing communications (news, documentation, CSR activities, procurement, Media Haleyora magazine) and "Contact" to request for information, to express opinions, criticisms, complaints and questions. In addition, the Company also has social media accounts, such as Facebook: PT Haleyora Power, Twitter: @pthaleyorapower and Instagram: @haleyorapower.

## CODE OF CONDUCT

The Company has Code of Conduct as a guideline for the Company's personeel to behave ethically, professionally, responsibly, fairly and reliably in conducting business relationships with customers, partners and fellow employees according to the Company's values. In addition to the Code of Conduct which was ratified in September 2016, the Company also has corporate values and culture called "Believe".

### Contents of Code of Conduct

Code of Conduct consists of three groups of contents as follows:

#### A. Introduction

Description of background; purposes and objectives; benefits; and the Company's values.

## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Corporate Information and Data

### B. Pedoman Perilaku

Berisi uraian mengenai benturan kepentingan; pemberian hadiah, makanan, hiburan dan pemberian donasi; kepedulian terhadap keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH); kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi; integrasi laporan keuangan; perlindungan informasi Perusahaan dan *intangible asset*; perlindungan harta perusahaan; kegiatan sosial dan politik; serta etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan.

### C. Penegakan Pedoman Perilaku

Berisi uraian mengenai sosialisasi; pelanggaran; mekanisme pelaporan pelanggaran; sanksi atas pelanggaran; serta penghargaan atas kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.

### Sosialisasi Pedoman Perilaku

Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan sosialisasi Pedoman Perilaku untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan insan Perusahaan mengenai arti penting Pedoman Perilaku bagi kelangsungan usaha Perusahaan serta membangun kesadaran bahwa Pedoman Perilaku merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja pegawai. Dengan demikian diharapkan tumbuh rasa memiliki dan komitmen untuk melaksanakan Pedoman Perilaku secara konsisten. Sosialisasi Pedoman Perilaku secara terus-menerus disampaikan kepada seluruh pegawai melalui portal internal maupun di situs web: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id).

### Pemberlakuan, Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku ditetapkan untuk berlaku bagi seluruh level organisasi. Seluruh pegawai Perusahaan wajib membaca, memahami dan menandatangani Pakta Integritas setelah membaca dan memahami isi dari Pedoman Perilaku Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang terbukti, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

### B. Code of Conduct

Description of conflict of interest; giving and receiving gifts, entertainment and donation; occupational health and safety and environment; equal opportunity to get job and promotion; financial statements integrity; corporate information and intangible assets protection; assets safeguarding; politic and social activities; and ethics in relationship with stakeholders.

### C. Code of Conduct Enforcement

Description of socialization; violation; whistleblowing mechanism; sanction on violation; and reward on compliance with Code of Conduct.

### Code of Conduct Socialization

Periodically, the Company holds Code of Conduct socialization to encourage understanding and insight of the Company's personnel regarding the importance of Code of Conduct for the Company's business sustainability and to build awareness of Code of Conduct as an integrated part of business practices and employee performance assessment. Hence, the sense of belonging and commitment to consistently implement Code of Conduct are expected to grow. The Code of Conduct is continually socialized to all employees through internal portal and on website: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id).

### Code of Conduct Enactment, Enforcement and Sanction on Violation

Code of Conduct is set to apply to all levels of the organization. All of the Company's personnel must read, understand and sign Integrity Pact after reading and understanding contents of the Company's Code of Conduct. Any proven violation of Code of Conduct will be subject to sanction in accordance with the applicable laws and regulations in the Company.

Sanctions for employees who commit violations are determined by Board of Directors after receiving report from direct supervisor of the respective employee. Board of Commissioners and Board of Directors decide on education, disciplinary sanction and/or other actions as well as prevention that must be carried out by direct supervisors in the respective units.

## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Corporate Information and Data

Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham. Sedangkan jika pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau pemangku kepentingan lain, maka Perusahaan akan melaksanakan ketentuan sebagaimana telah tertuang dalam kontrak hingga pemutusan hubungan kerja. Jika terdapat unsur tindak pidana maka kasus dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. Sepanjang tahun 2018 tidak ada pelanggaran Pedoman Perilaku.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) untuk mendukung implementasi GCG dan praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. WBS merupakan kebijakan untuk mengelola pelaporan/pengungkapan mengenai kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan kecurangan, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran Pedoman Perilaku.

Pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti antara lain:

- Penyimpangan dari peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan;
- Pemerasan;
- Korupsi;
- Benturan kepentingan; dan
- Gratifikasi.

### Pihak yang Mengelola Pengaduan

WBS dikelola oleh Komite Pelaporan Pelanggaran, yang bertugas mengadministrasikan pengaduan atau penyingkapan. Komite Pelaporan Pelanggaran diketuai oleh Kepala SPI sebagai ketua, Corporate Secretary sebagai sekretaris dan anggota, serta VP Hukum dan EVP HCM sebagai anggota.

### Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian Pengaduan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memberikan informasi

Sanction for members of Board of Directors and Board of Commissioners who commit violations are decided by Shareholders. Whereas if the violation is committed by business partner or other stakeholders, the Company will implement the provisions as stated in the contract, including possible work contract termination. If there is an element of crime, the case shall be forwarded to the authorities. During 2018, there was no violation of Code of Conduct.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

Since 2014, the Company has established whistleblowing system (WBS) to support GCG implementation as well as clean and responsible business practices. WBS is a policy to manage reporting/disclosure regarding certain events suspected to be related to fraud, criminal acts, violations of the Company's policies and Code of Conduct.

Violations to be followed up include:

- Deviations from the Company's applicable laws and regulations;
- Misuse of position for other interests than the Company's;
- Extortion;
- Corruption
- Conflict of interest; and
- Gratification.

### Whistleblowing Manager

WBS is managed by WBS Committee, which is tasked with administering complaints or disclosures. WBS Committee consists of Head of SPI as the chairman, Corporate Secretary as secretary and member and Legal VP and HCM EVP as members.

### WBS Reporting Submission

Whistleblowing must consider the following matters:

- a. Whistleblower is required to provide initial indications that can be accounted for, at least information on the amount

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Whistleblowing System

mengenai jumlah kerugian apabila dapat diidentifikasi, pihak yang terlibat, saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan, lokasi pelanggaran (divisi, region, unit dan sebagainya), waktu kejadian, dan bukti bukti pendukung.

- b. Pelapor harus mempunyai alasan/bukti awal yang kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran.
- c. Pelapor memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat, nomor telepon, dan email.

Pengaduan/Penyungkapan pelanggaran disampaikan kepada Unit Administrasi Pelaporan Pelanggaran (Komite Pelaporan) melalui sarana/media sebagai berikut:

- Telepon, pesan singkat (SMS) atau *whatsapp*: 081270000219
- *Website*: [haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower](http://haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower)
- *E-mail*: [wbs@haleyorapower.co.id](mailto:wbs@haleyorapower.co.id)
- Surat : Direktur Utama

### Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Perusahaan melindungi kerahasiaan identitas pelapor, dan melindungi pelapor dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi, pemecatan atau tindakan tidak menyenangkan lainnya, dari pihak manapun, selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan juga berlaku bagi para pihak yang melakukan investigasi, dan pihak yang memberikan informasi/saksi terkait pengaduan tersebut.

### Penanganan Pengaduan

Pengaduan pelanggaran ditangani dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Unit Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan pengaduan pelanggaran dan melakukan penelitian apakah terdapat indikasi awal atau sesuai kriteria laporan WBS yang dapat ditindaklanjuti. Bila "YA", laporan diteruskan ke Komite Pelaporan Pelanggaran. Jika "TIDAK", maka proses WBS selesai.
2. Komite Pelaporan Pelanggaran melakukan investigasi awal terhadap pengaduan. Jika pada investigasi awal ditemukan indikasi pelanggaran pada hasil investigasi awal tersebut, maka akan dilaporkan kepada Direksi. Sebaliknya, jika tidak ada indikasi pelanggaran, maka laporan dinyatakan selesai.
3. Direksi menerima laporan dari Komite Pelaporan Pelanggaran dan merekomendasikan apakah harus

of loss if identified, parties involved, witnesses and parties who benefit or are disadvantaged, location of violation (division, region, unit and so forth), time of incident and supporting evidence.

- b. Whistleblower must have strong rationale/preliminary evidence to report whistleblowing or potential violation.
- c. Whistleblower must provide personal information, at least address, phone number, facsimile and email.

Complaint/disclosure of violation is submitted to Whistleblowing Administration Unit (Whistleblowing Committee) using the following means/media:

- Telephone, Short Message (SMS) or *whatsapp*: 081270000219
- Website : [haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower](http://haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower)
- E-mail : [wbs@haleyorapower.co.id](mailto:wbs@haleyorapower.co.id)
- Letter : President Director

### Whistleblower Protection

The Company protects whistleblower's confidentiality from various threat, intimidation, dismissal or other unpleasant actions, from any party, as long as the whistleblower maintains confidentiality of the reported violation from any party. Protection also applies to investigators and witnesses providing information related to the complaint.

### Complaint Handling

Complaints are handled with the following mechanism:

1. Whistleblowing Administration Unit receives whistleblowing and investigates early indication according to WBS report criteria. If "YES," the report is forwarded to Whistleblowing Committee. If "NO," the report is closed.
2. Whistleblowing Committee performs early investigation towards the report. If there is indication of violation, then it will be reported to Board of Directors. On the other hand, if there is no indication of violation, then the report is closed.
3. Board of Directors receives report from Whistleblowing Committee and recommends further investigation, if

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

### Whistleblowing System

dilakukan investigasi lanjutan oleh Unit fungsi Investigasi (Kepala SPI atau penyidik eksternal), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.

4. Unit fungsi Investigasi kemudian melakukan investigasi lanjutan terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
5. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Unit Fungsi Investigasi, Direksi akan merekomendasikan tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan itu akan ditutup. Apabila hal tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut.
6. Seluruh proses investigasi atas laporan pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara sesuai format yang ditetapkan dalam pedoman WBS.
7. Prosedur pengelolaan pengaduan melalui WBS dilaksanakan sesuai bagan alur sebagaimana diatur dalam Pedoman WBS.
8. Seluruh proses WBS harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Jumlah Pengaduan Masuk pada Tahun 2018

Sampai akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran baik melalui telepon, sms, *e-mail*, ataupun kotak surat.

required, by Investigation Unit (Head of SPI or external investigator) and reports the recommendation to Board of Commissioners.

4. Investigation Unit performs further investigation towards the complaint/disclosure and reports the results to Board of Directors.
5. Based on further investigation reported by Investigation Unit, Board of Directors will recommend further action. If it is not proven, the complaint/disclosure report will be closed. If it is proven or requires further action, then it will be sanctioned according to the applicable regulations or forwarded to investigators for further process.
6. The whole process of whistleblowing investigation shall be reported in minutes using a format stipulated in WBS guidelines.
7. WBS management procedure is carried out according to the flow chart described in WBS guidelines.
8. All WBS process shall be well documented and accountable.

### Number of Complaint Received in 2018

At end of 2018, the Company did not receive any whistleblowing report through phone, sms, e-mail, or mail box.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Whistleblowing System

### **KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus untuk mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan hak dari Pemegang Saham. Dalam menentukan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham telah memperhatikan unsur-unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman, kompetensi, usia dan gender. Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi diperlukan sebagai upaya untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif karena memperhatikan berbagai sudut pandang.

Sebagaimana ditunjukkan di profil Dewan Komisaris dan Direksi pada bagian Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki komposisi yang beragam baik dari segi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan keahlian. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menunjukkan pemenuhan bidang keahlian yang dibutuhkan serta aspek persamaan kesempatan. Keberadaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan pegawai karir dengan pengalaman penugasan yang lengkap di lingkungan PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa sistem *talent management* dan pembinaan karir di Perusahaan telah berjalan dengan baik.

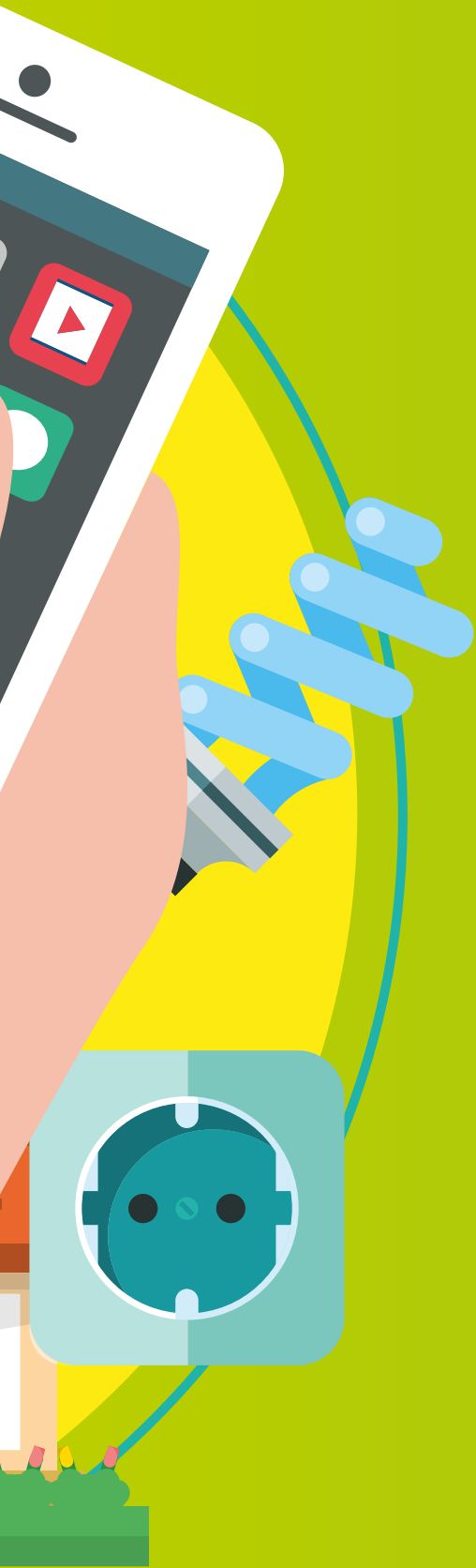
### **DIVERSITY POLICY IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS**

The Company does not have specific policy to regulate diversity in composition of Board of Commissioners and Board of Directors. Determination of composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is authorized rights of Shareholders. In determining composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors, Shareholders take into account diversity elements, which are a combination of education, experience, competence, age and gender. Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors is required to encourage more objective and comprehensive decision making because they consider various points of view.

As shown in profiles of Board of Commissioners and Board of Directors in the Company's Profile section of this Annual Report, Board of Commissioners and Board of Directors of the Company have a diverse composition in terms of education, work experience, age and expertise. Diversity in composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors reflects fulfillment of the required expertise and the aspect of equal opportunity. Several members of Board of Commissioners and Board of Directors who are career employees with thorough experience within PT PLN (Persero) show that talent management and career path system in the Company runs effectively.







# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social  
Responsibility

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



HP menyadari bahwa kegiatan CSR yang dilakukan saat ini sebagian besar masih bersifat donasi dan insidental. Ke depan, program-program CSR akan lebih ditingkatkan kualitas dan cakupan penerima manfaatnya, sehingga mampu menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan, serta meningkatkan *corporate branding*.

HP is well aware that the existing CSR activities are still mostly donations and incidentals in nature. Going forward, CSR programs will be further improved in the quality and scope of beneficiaries, to produce measurable and sustainable impacts, as well as to enhance corporate branding.

### KOMITMEN

Bagi Perusahaan, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mengaplikasikan kompetensi inti di bidang ketenagalistrikan ke dalam program-program CSR berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama generasi muda, agar siap kerja dan mandiri secara ekonomi. Perusahaan ikut mendorong peningkatan kualitas pendidikan terutama pendidikan vokasi, dengan cara meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anak-anak muda calon tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha.

#### Metoda dan Lingkup Uji Tuntas terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan dan Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Terkait Dampak Tersebut

Dengan area operasional yang meliputi wilayah Sumatera dan Jawa, pegawai dan tenaga kerja Perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang luas mencakup pelanggan (PLN), mitra kerja dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasi Perusahaan cukup besar, mencapai lebih dari 25.000 tenaga kerja yang penyebarannya tergantung pada kompleksitas pekerjaan di masing-masing region. Keberadaan tenaga kerja tersebut menciptakan interaksi sosial dan ekonomi dengan masyarakat setempat. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja membuka kesempatan

### COMMITMENT

To the Company, Corporate Social Responsibility (CSR) is to implement core competencies in the power sector in sustainable CSR programs that can improve the quality of life of people, especially young people, to be ready to work and to be economically independent. The Company also encourages enhancement of education quality, especially vocational education, by developing competency and professionalism of young people to align with the needs of the business world.

#### Methods and Scope of Due Diligence on Social, Economic and Environmental Impacts of the Company's Activities and Crucial Social, Economic, and Environmental Issues Related to the Impacts

With operational areas covering Sumatera and Java regions, the Company's employees and workforce interact with various stakeholders, including customers (PLN), business partners and the public. The number of workforce involved in the Company's operations is quite large, reaching more than 25,000 workforce; distributed according to work complexity in each region. The Company's workforce interacts socially and economically with the local community. In addition, the

## KOMITMEN

Commitment

kerja bagi lulusan sekolah kejuruan yang ada sekitar region Perusahaan.

Perusahaan belum pernah melakukan penelitian khusus dan mendalam atas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang mungkin terjadi sebagai dampak dari aktivitas Perusahaan. Namun Perusahaan meyakini bahwa kegiatan operasi Perusahaan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

### Pemangku Kepentingan Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Perusahaan memiliki wilayah kerja yang terbagi dalam 6 region. Setiap region berinteraksi dengan unit-unit PLN sebagai pemangku kepentingan utama Perusahaan yang terdiri dari 6 Unit Induk Distribusi (UID), 4 Unit Induk Wilayah (UIW), 1 Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban (UIP3B), dan 1 Unit Induk Transmisi (UIT) yang meliputi 43 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), 4 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), 13 Unit Pelaksana Transmisi (UPT), dan 283 Unit Layanan Pelanggan (ULP).

need for workforce opens job opportunities for graduates of vocational schools surrounding the Company's region.

The Company has not conducted special and in-depth research on the social, economic and environmental impacts that may occur as a result of the Company's activities. However, the Company believes that its operations do not have any negative impact on the local community and the environment.

### Key Stakeholders Affected or Impacted by the Company's Activities

The Company's operational areas are divided into 6 regions. Each region interacts with PLN units as the main stakeholder of the Company which consists of 6 Distribution Main Units (UID), 4 Regional Main Units (UIW), 1 Channeling Unit and Load Management (UIP3B) and 1 Transmission Main Unit (UIT) which includes 43 Customer Service Provider Units (UP3), 4 Distribution Management Executive Units (UP2D), 13 Transmission Executive Units (UPT) and 283 Customer Service Units (ULP).

REGION Region	PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholder
Region 1 Jawa Barat Region 1 West Java	PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat PLN Parent Unit of Distribution of West Java
Region 2 Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta Region 2 Central Java & Special Region of Yogyakarta	PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta PLN Parent Unit of Distribution of Central Java and Special Region of Yogyakarta
Region 3 Jawa Timur Region 3 East Java	PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur PLN Parent Unit of Distribution of East Java PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali PLN Parent Unit of Transmission of Eastern Java and Bali
Region 4 Sumatera Barat Region 4 West Sumatera	PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat PLN Parent Unit of Region of West Sumatera
Region 5 DKI Jakarta & Banten Region 5 DKI Jakarta & Banten	PLN Unit Induk Distribusi Banten PLN Parent Unit of Distribution of Banten PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya PLN Parent Unit of Distribution of Jakarta Raya PLN Unit Induk Distribusi Lampung PLN Parent Unit of Distribution of Lampung PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung PLN Parent Unit of Region of Bangka Belitung
Region 6 Riau dan Kepulauan Riau Region 6 Riau and Riau Islands	PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Parent Unit of Region of Riau and Riau Islands PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara PLN Parent Unit of Region of North Sumatera PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera PLN Parent Unit of Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera (UIP3B)

**KOMITMEN**  
Commitment

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak penugasan dari PLN. Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan dialog dan menjalin komunikasi sesuai harapan yang melekat pada kedua belah pihak untuk mencapai target-target kinerja yang telah disepakati bersama. Dampak kegiatan operasi Perusahaan terhadap PLN sebagai pemberi tugas diukur dari pencapaian target *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati. Tercapai atau tidak tercapainya target SLA akan berdampak pada kualitas layanan PLN yang diterima oleh pelanggannya/masyarakat.

**Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 0013.K/DIR-HP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Haleyora Power, pengelolaan CSR di Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan, Hukum dan Umum. Sedangkan ketentuan mengenai CSR diatur dalam Peraturan Direksi No. 0004.P/DPR-HP/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perdir 0004.P/2017). Lingkup kegiatan CSR Perusahaan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan CSR yang dilakukan saat ini sebagian besar masih bersifat donasi dan insidental, atau sekadar berpartisipasi mendukung kegiatan CSR PLN (Program PLN Peduli). Ke depan, dengan berpedoman pada Perdir 0004.P/2017, program-program CSR Perusahaan diharapkan akan lebih meningkat kualitas dan cakupan penerima manfaatnya, menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan *corporate branding*.

**Program-Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan yang Relevan dengan Bisnis yang Dijalankan**

Perusahaan ikut mendukung program vokasi Pemerintah melalui kegiatan "Haleyora Mengajar" yang difokuskan untuk mempersiapkan para siswa SMK agar siap kerja. Saat ini program dilaksanakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terpilih yang ada di sekitar region Perusahaan. Perusahaan memasukkan kurikulum aplikatif terkait operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi berdasarkan kompetensi dan pengalaman Perusahaan. Siswa peserta program akan mendapatkan sertifikat yang mengkonfirmasi kompetensinya sehingga mereka memiliki keunggulan kompetitif sebagai calon tenaga kerja. Uraian lebih lengkap

The Company carries out its business activities based on an assignment contract from PLN. Periodically, the Company conducts dialogues and establishes communication as expected by both parties to achieve mutually agreed performance targets. The impact of the Company's operations on PLN as the assignor is measured by achievement of the agreed Service Level Agreement (SLA) targets. Achievement of SLA targets will have an impact on the quality of PLN services delivered to its customers/public.

**Scope of Corporate Social Responsibility**

Based on the Decision of Board of Directors No. 0013.K/DIR-HP/2016 dated October 27, 2016 concerning organization and Work Procedure of PT Haleyora Power, CSR management in the Company is carried out by Corporate Secretary, Legal and General Affairs Division. While the provisions regarding CSR are regulated in Regulation of Board of Directors No. 0004.P/DPR-HP/2017 dated October 2, 2017 concerning Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation (Perdir 0004.P/2017). Scope of the Company's CSR activities covers the fields of education, health, social community and environment.

The Company is well aware that the existing CSR activities are still mostly donations and incidentals in nature, or participation in supporting PLN's CSR activities (PLN Cares Program). Going forward, based on Perdir 0004.P/2017, the Company's CSR programs are expected to further improve the quality and scope of beneficiaries, to produce measurable and sustainable impacts, as well as to be able to enhance corporate branding.

**Programs that Exceed Minimum Corporate Responsibility that are Relevant to Business**

The Company supports the Government's vocational program through "Haleyora Teaching" program which is focused on preparing vocational students to be ready to work. Currently, the program is implemented in selected Vocational High Schools (SMK) around the Company's regions. The company includes applicable curriculum related to operation and maintenance of transmission and distribution based on the Company's competence and experience. Participating students will obtain certificate confirming their competence so that they have a competitive advantage as a prospective workforce. A more complete description of "Haleyora



## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT ASPEK HAK AZAZI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Program Related to Human Rights

mengenai program “Haleyora Mengajar” disampaikan pada bagian “Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait Dengan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan.”

### Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Anggaran CSR disusun berdasarkan usulan dari setiap Unit Kerja ke Divisi Sekretaris Perusahaan, Hukum dan Umum, yang kemudian diusulkan ke Bidang Keuangan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program CSR disusun berdasarkan:

1. Inisiatif perusahaan berdasarkan hasil pemetaan sosial masyarakat;
2. Permintaan masyarakat/komunitas;
3. Kesesuaian dengan program Pemerintah;
4. Kondisi tanggap darurat/bencana alam.

Anggaran CSR diperhitungkan sebagai biaya non-operasi Perusahaan. Pada tahun 2018, total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR (HP dan HPI) kurang lebih mencapai Rp600 juta.

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Hingga saat ini Perusahaan tidak/belum memiliki program CSR yang terkait dengan aspek hak asasi manusia.

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT ASPEK OPERASI YANG ADIL

Hingga saat ini Perusahaan tidak/belum memiliki program CSR yang terkait dengan aspek operasi yang adil.

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan belum memiliki program CSR yang secara khusus terkait dengan aspek lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan masih bersifat sporadis bersinergi dengan unit-unit PLN sebagai mitra kerja Perusahaan.

Pada tanggal 7 Desember 2018, Perusahaan ikut mendukung PLN UP<sub>3</sub> Cimahi dan Satgas Citaruh Harum Sektor 21

Teaching” program is presented in “Corporate Social Responsibility Program Related to Social and Community Development.”

### Corporate Social Responsibility Financing and Budget

CSR budget is prepared based on proposals from each Work Unit that are submitted to Corporate Secretary, Legal and General Affairs Division. The proposals will be forwarded to Finance Department to be included in Corporate Work Plan and Budget (RKAP) to be ratified by General Meeting of Shareholders (GMS).

CSR programs are structured based on:

1. The Company's initiatives based on results of the social community mapping;
2. The community's requests;
3. Compliance with the Government's programs;
4. Emergency/natural disaster response.

CSR budget is calculated as part of the Company's non-operating costs. In 2018, the total costs incurred for CSR activities (HP and HPI) reached approximately Rp600 million.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO HUMAN RIGHTS

To date, the Company does not have CSR program related to human rights.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO FAIR OPERATIONS

To date, the Company does not have CSR program related to fair operations.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO ENVIRONMENT

To date, the Company does not have CSR program related to environment. The activities carried out are sporadic in synergy with PLN units as the Company's business partner.

On December 7, 2018, the Company supported PLN UP<sub>3</sub> Cimahi and Citaruh Harum Sector 21 Task Force in ecosystem



## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Program Related to Employment, Occupational Health and Safety

dalam kegiatan pelestarian ekosistem di sepanjang badan Sungai Citarum. Sungai Citarum mengalami pencemaran berat tetapi saat ini kondisinya sedikit membaik setelah Pemerintah bersama masyarakat dan berbagai institusi yang peduli, gencar melakukan pembersihan mulai dari hulunya. Upaya pembersihan sungai Citarum perlu dibarengi dengan pelestarian lingkungan bantaran sungai agar ekosistem sungai dapat berkembang dengan baik.

Dalam kegiatan tersebut, Perusahaan dan PLN UP3 Cimahi menanam 50 batang pohon buah di bantaran sungai Citarum di daerah Nanjung, Kabupaten Bandung. Selain untuk penghijauan, penanaman pohon produktif diharapkan dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat. Kegiatan yang mendukung program Pemerintah "Citarum Harum" ini merupakan salah satu bentuk sinergi CSR untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berdaya guna untuk masyarakat.

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### Aspek Ketenagakerjaan

##### Komitmen dan Kebijakan Dalam Aspek Ketenagakerjaan

Perusahaan berupaya mengoptimalkan pengelolaan human capital dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai secara adil. Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan terhadap seluruh pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan gender dalam menjalankan proses bisnis di lingkungan Perusahaan. Praktik anti-diskriminasi diterapkan sejak dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, remunerasi, hingga pengembangan kompetensi dan jenjang karir.

Untuk mencapai pemahaman bersama terhadap tujuan Perusahaan dan ekspektasi pegawai, Perusahaan membentuk forum bipartit melalui Peraturan Direksi No. 0001.P/DIR-HP/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Forum Bipartit diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara manajemen dan pegawai dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.

conservation along Citarum River. Citarum River has experienced severe pollution but its current condition has improved slightly after the Government, together with the community and various concerned institutions, have been intensively cleaning it up starting from its upstream. Efforts to clean Citarum River should be accompanied by preservation of the riverbank so as to properly improve the river ecosystem.

In this activity, the Company and PLN UP3 Cimahi planted 50 fruit trees on Citarum riverbank in Nanjung, Bandung Regency. In addition to greening, planting productive trees is expected to provide a source of income for the local community. This activity that supports the Government's "Citarum Harum" program is a part of CSR synergy to create a healthy and productive environment for the community.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

#### Employment

##### Commitment and Policy in Employment

The Company seeks to optimize the management of human capital while taking into account the interests of employees fairly. The company is committed to building harmonious industrial relations in accordance with the applicable laws and regulations.

The Company applies the principles of transparency, fairness and equality to all employees regardless of ethnicity, religion, race, class and gender in carrying out business processes within the Company. Anti-discrimination practices are applied in recruitment, performance appraisal, remuneration, competence development and career path.

To achieve a common understanding of the Company's objectives and employee expectations, the Company established a bipartite forum based on Regulation of Board of Directors No. 0001.P/DIR-HP/2018 dated April 17, 2018 concerning Establishment of a Bipartite Cooperation Agency. The Bipartite Forum is expected to address the communication gap between management and employees in resolving labor issues.

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Program Related to Employment, Occupational Health and Safety

### Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu inisiatif Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan adalah mendukung aktivitas *employee relations* yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antar sesama pegawai dan dengan Perusahaan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas pegawai. Aktivitas *employee relations* yang telah berjalan di antaranya adalah:

- **Spiritual, Budaya, dan Olah Raga (SBO)**

Spiritual, Budaya, dan Olah Raga Haleyora Power (SBO HP) dibentuk pada tahun 2015. SBO adalah forum koordinasi yang mewadahi aktivitas pegawai di bidang spritual, budaya dan olah raga. Setiap pegawai boleh memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya di bidang olah raga dan budaya, ataupun kegiatan yang terkait keseimbangan rohani/keagamaan. Selain di kantor pusat, kegiatan SBO juga diterapkan di enam region HP dan anak perusahaan HPI. Perusahaan mendukung aktivitas SBO dengan mengalokasikan biaya di RKAP setiap tahun.

Kegiatan SBO diselenggarakan secara rutin seminggu sekali. Aktivitas olah raga yang sudah berjalan rutin di antaranya adalah bulu tangkis, senam dan futsal. Setiap cabang olah raga membentuk komunitas masing-masing untuk menentukan waktu dan lokasi kegiatannya. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan olah raga juga bertujuan untuk mempersiapkan tim yang akan mengikuti kompetisi tahunan antar anak perusahaan grup PLN pada rangkaian acara Hari Listrik Nasional (HLN) yang berlangsung setiap bulan Oktober. Sedangkan kegiatan seni budaya umumnya dipersiapkan untuk acara peringatan hari-hari besar, seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Ibu, serta acara hari besar keagamaan.

Setelah berjalan tiga tahun, keberadaan SBO telah memberikan dampak positif. Selain bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani pegawai, kegiatan SBO menumbuhkan sikap sportif serta meningkatkan semangat kerja, kekompakan dan kerja sama yang baik antar pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi lintas bagian. Komunikasi antar pegawai baik di kantor pusat, region, anak perusahaan maupun unit-unit PLN lainnya berkembang dengan baik melalui kegiatan latihan bersama atau pertandingan persahabatan.

### Scope and Formulation of Social Responsibility in Employment

One of the Company's initiatives in carrying out social responsibility in the field of employment is to support employee relations that aim to build harmonious relationships among fellow employees and with the Company which ultimately are expected to increase employee productivity and creativity. The existing employee relations activities include:

- **Spiritual, Culture, and Sports (SBO)**

Spiritual, Culture and Sports - Haleyora Power (SBO HP) was incorporated in 2015. SBO is a coordination forum that facilitates employee activities in spiritual, culture and sports. Each employee may choose activities that suit their interests and talents in sports and culture, or spiritual/religion. In addition to the head office, SBO activities are also implemented in six HP regions and HPI subsidiaries. The Company supports SBO activities by providing sufficient budget in RKAP.

SBO activities are held routinely once a week. Regular sports activities that have been running include badminton, gymnastics and futsal. Each sport established its own community and determined schedule and location of their activities. Other than hobbies, sports activities also aim to prepare a team that will participate in annual competition among subsidiaries of PLN group in a series of National Electricity Day (HLN) in October every year. While culture activities are generally prepared for celebration of holidays, such as Independence Day, Kartini Day, Mother's Day and religious holidays.

After three years, SBO has had a positive impact. In addition to being beneficial for the physical and spiritual health of employees, SBO activities also fosters sportsmanship and increases morale, cohesiveness and good cooperation among employees in completing tasks that require cross-section coordination. Communication among employees both at headquarters, regions, subsidiaries and other PLN units is well developed through joint trainings or friendly matches.

**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Corporate Social Responsibility Program Related to Employment, Occupational Health and Safety

Realisasi biaya kegiatan SBO pada tahun 2018 sebesar Rp91,39 juta yang meliputi kegiatan pengajian rutin, Porseni HLN dan Festival Budaya.

Realization of the costs of SBO activities incurred in 2018 amounted to Rp91.39 million which included routine recitation activities, Porseni HLN and Cultural Festival.

- Lomba Karya Inovasi Haleyora Power 2018**  
 Setiap entitas bisnis akan berupaya untuk terus tumbuh dan berkembang demi keberlanjutan usahanya. Di tengah tuntutan pengguna jasa yang semakin meningkat, serta tingkat persaingan usaha dan perkembangan teknologi yang pesat, maka HP harus terus berinovasi agar mampu memenuhi standar ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, mulai tahun 2018, Perusahaan mengadakan Lomba Karya Inovasi untuk menggali ide, gagasan, dan terobosan-terobosan dari pegawai di lapangan yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas dalam menyelesaikan pekerjaannya.

- Haleyora Power 2018 Innovation Competition**  
 Every business entity will strive to continue to grow and develop for the sake of business sustainability. Amid the increasing demands of service users, as well as the level of business competition and rapid technological development, HP must continue to innovate in order to be able to meet the increasingly high standards of customer expectations. Therefore, starting in 2018, the Company holds Innovation Competition to explore ideas, thoughts and breakthroughs from employees in the field that can be applied to improve effectiveness, efficiency and quality in accomplishing their works.

Inovasi yang diajukan tidak harus besar, rumit atau sesuatu yang baru. Kriteria penilaian adalah kemudahan untuk diimplementasikan, biaya yang dibutuhkan, dan signifikansi dampaknya terhadap proses bisnis Perusahaan. Lomba Karya Inovasi tahun ini diikuti oleh enam tim dari berbagai area (region) dengan hasil penilaian sebagai berikut:

The proposed innovation does not have to be big, complicated or new. The assessment criteria include ease of implementation, required costs and significance of the impact on the Company's business processes. This year's Innovation Competition was participated by six teams from various regions with the following assessment results:

NO	JUDUL INOVASI Innovation Title	PENEMU Innovator	UNIT Unit	HASIL Result
1	SIPUJO (Sistem Pengaman untuk Jaringan <i>Offline</i> ) SIPUJO (Protection System for Offline Networks)	Usep Soleh Safaat, Ahmad Solihin, Anwar Sodikin	Majalaya - Region 1	Juara ke-1 1 <sup>st</sup> Winner
2	Pembatas Alat untuk <i>Toolset</i> Toolset Partition	Agus Wahyu Nugroho	Area Bojonegoro - Region 3	Juara ke-2 2 <sup>nd</sup> Winner
3	Tempat <i>Ground Cluster</i> Ground Cluster Storage	Moch. Pamuji	Area Bojonegoro - Region 3	Juara ke-3 3 <sup>rd</sup> Winner
4	SOTGAN (Solusi Tuntas Tunggakan) Solution for Account Receivables Settlement	Hendro Wahyudi, Bagus Setio Prabowo	Area Bandung - Region 1	
5	Bagle dan Rambu untuk <i>Telescopic Hot Stick</i> 20 kV pada <i>Motor Trail</i> URC dan Inspeksi Bagle and Sign for 20 kV Telescopic Hot Stick on Motor Trail of Quick Response and Inspection Team	Agus Andi Wibowo, Krestiyon Ganang Marhendra	Region 2	
6	SILUTung (Sistem Informasi dan Laporan Tunggakan) SILUTung (Account Receivables Reporting and Information System)	Atang Hidayat, Adi Akhmad Fauzi, RM, Leonardi	Area Purwakarta - Region 1	

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Program Related to Employment, Occupational Health and Safety

Lomba Karya Inovasi dinilai sangat bermanfaat karena penerapannya dapat berdampak pada peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mendorong pegawai lainnya untuk menciptakan inovasi lebih banyak lagi. Lomba Karya Inovasi akan diselenggarakan rutin setiap tahun.

- Pada tanggal 15 Desember 2018, Perusahaan melaksanakan kegiatan *Employee Gathering* PT Haleyora Power Kantor Pusat sebagai bentuk *worklife balance* antara bekerja, bersuka cita dan membangun kerja sama tim. Kegiatan yang bertema "*Together We Are Achieve More*" ini diikuti oleh seluruh insan HP dan diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15-16 Desember 2018.

Pada kegiatan ini, seluruh insan HP mulai dari Direksi hingga seluruh pegawai melepaskan semua atribut jabatan di kantor dan melebur bersama-sama saat melakukan aktivitas *games* dan *outbound* yang bertujuan membangun kekompakan dan kerja sama tim.

Dalam kesempatan ini, pegawai HP juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan yaitu membersihkan pantai terutama dari sampah plastik dan menyumbang tempat sampah.

### Remunerasi

Perusahaan memberlakukan sistem remunerasi yang kompetitif dengan mempertimbangkan tingkat pengupahan pada industri sejenis, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan upah minimum provinsi (UMP) serta kemampuan keuangan Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa besaran upah minimum yang diberikan kepada semua pekerja berada di atas upah minimum provinsi. Tidak ada kebijakan remunerasi yang membedakan perlakuan terhadap pegawai laki-laki dan perempuan di seluruh level jabatan.

Remunerasi bagi pegawai organik Perusahaan terdiri dari kompensasi (P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> dan P<sub>3</sub>) dan manfaat pegawai (tunjangan-tunjangan, asuransi, dan lainnya). Tabel berikut menyajikan rincian dari total biaya pegawai yang dikeluarkan pada tahun 2018.

Innovation Competition is considered very useful because its application can have an impact on improving performance and service quality. In addition, this activity can also encourage other employees to create better innovations. Innovation Competition will be held on an annual basis.

- On December 15, 2018, the Company conducted Employee Gathering of PT Haleyora Power Head Office as a form of work-life balance among work, fun and teamwork. The activity with the theme "Together We Are Achieve More" was participated by all HP personnel and held in Yogyakarta on 15-16 December 2018.

In this activity, all HP personnel from Directors to all employees release all attributes of office positions and merge together while doing games and outbound activities aimed to build cohesiveness and teamwork.

On this occasion, HP employees also carried out environmental clean-up activities, namely cleaning the beach, especially from plastic waste and donating trash bins.

### Remuneration

The Company has a competitive remuneration system that takes into account wage rate in similar industries, labor laws, provincial minimum wage regulation (UMP) and the Company's financial capability. The company ensures that minimum wage rate given to all workforce is above the provincial minimum wage. There is no remuneration policy that differentiates male and female employees at all position levels.

Remuneration for the Company's organic employees consists of compensation (P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> and P<sub>3</sub>) and employee benefits (allowances, insurance and others). The following table provides a breakdown of the total employee costs incurred in 2018.

**RENCANA KEGIATAN PADA TAHUN 2019**  
 Activity Plan in 2019

NO	KOMPONEN REMUNERASI	TOTAL (Rp)	Component of Remuneration
1	Gaji pokok	4,842,233,640	Pay for person (P1)
2	Tunjangan jabatan	2,985,631,680	Pay for position (P2)
3	Tunjangan kinerja	2,577,902,790	Pay for performance (P3)
4	Bonus/insentif	3,437,203,720	Bonus/incentive
5	Tunjangan hari raya (THR)	475,234,333	Holiday allowance
6	Tunjangan cuti tahunan	366,746,000	Annual leave allowance
7	Tunjangan cuti besar	295,764,000	Sabbatical leave
8	Iuran pemberi kerja	295,792,474	Employer contribution premium
9	Penghargaan kesetiaan kerja (winduan)	174,294,000	Work loyalty award (8 years)
10	Pemeliharaan kesehatan	106,553,499	Health maintenance
11	Asuransi pegawai	596,945,690	Employee insurance
12	Pakaian dinas	158,400,000	Work uniform
13	Bantuan fasilitas perumahan	252,994,000	Housing allowance
14	Perjalanan dinas mutasi jabatan	45,240,000	Official travel allowance for job transfer
<b>JUMLAH</b>		<b>16,610,935,826</b>	<b>TOTAL</b>

**RENCANA KEGIATAN PADA TAHUN 2019**

Perusahaan telah merencanakan berbagai kegiatan terkait CSR dan kepegawaian untuk tahun 2019, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan CSR inspeksi instalasi pelanggan dan pembentukan komunitas peduli kelistrikan.
2. Berbagi kebahagiaan Hari Raya Idul Qurban di Kampung Babakan.
3. Lomba keterampilan pelayanan teknik.
4. Lomba Karya Inovasi PLN 2019.
5. Safari Ramadhan 2019.

**ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

**Komitmen dan Kebijakan dalam Aspek K3**

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pegawai dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus ditanamkan kepada seluruh pegawai, terutama pekerja teknis di lapangan, karena jenis pekerjaan mereka memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Para pekerja teknis harus memiliki perilaku disiplin, taat melaksanakan prosedur kerja, serta mampu melakukan *job safety analysis* sehingga bisa menyadari potensi-potensi bahaya yang dihadapinya.

**ACTIVITY PLAN IN 2019**

The Company has planned various activities related to CSR and staffing for 2019, including the following:

1. CSR activity on inspecting customer installations and forming electricity caring communities.
2. Sharing the happiness of Eid al-Qurban in Babakan Village.
3. Technical service skill competition.
4. 2019 PLN Innovation Work Competition.
5. Safari Ramadhan 2019.

**OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)**

**Commitment and Policy in K3**

The Company is committed to protecting employees from the risk of occupational accidents and diseases. Occupational health and safety (K3) culture must be instilled in all employees, especially technical workers in the field, because their type of work has a high risk of occupational accidents. Technical workers must demonstrate disciplined behavior, be obedient in carrying out work procedures and be able to do job safety analysis so they can realize the potential hazards they encounter.

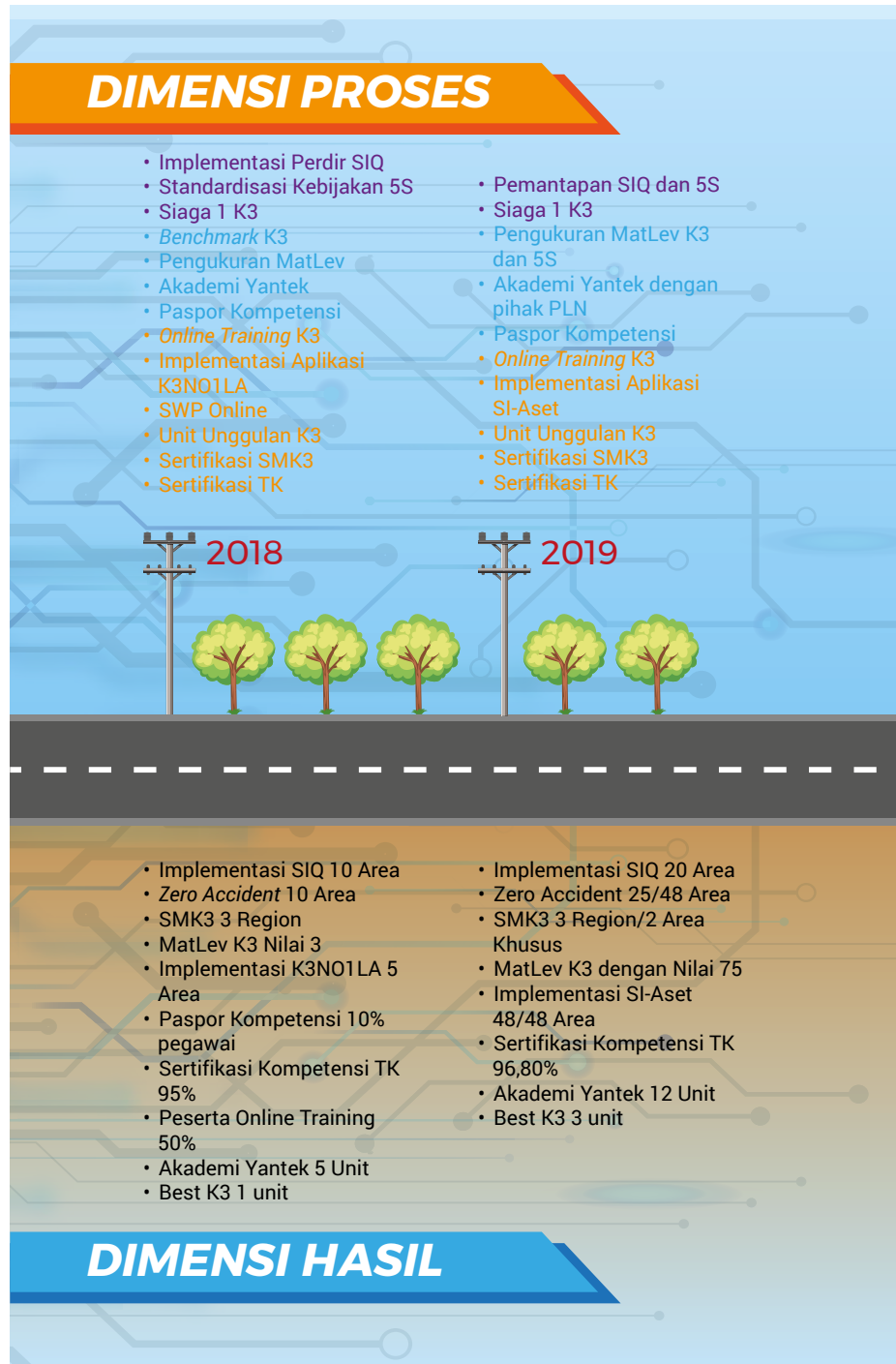
**ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**  
 Occupational Health and Safety (K3)

**Roadmap K3**

Untuk mencapai keunggulan operasi dan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja terbaik di industrinya, Perusahaan telah menyusun roadmap K3 2017-2021 sebagai berikut:

**K3 Roadmap**

To achieve operational excellence and the best level of occupational health and safety in the industry, the Company compiled 2017-2021 K3 roadmap as follows:



**ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**  
 Occupational Health and Safety (K3)

- Budaya SIQ dan S5
- Siaga 1 K3
- Pengukuran MatLev K3 dan 5S
- Akademi Yantek
- Paspur Kompetensi
- *Online Training K3*
- K3 Award
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK
- Safety Driving

- Budaya SIQ dan S5
- Siaga 1 K3
- Pengukuran MatLev K3 dan 5S
- Akademi Yantek
- *Online Training K3*
- K3 Award
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK

- Budaya SIQ dan S5
- Siaga 1 K3
- Pengukuran MatLev K3 dan 5S
- Akademi Yantek
- *Online Training K3*
- K3 Award
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK

2020

2021

2022

- Implementasi SIQ 30 Area
- Zero Accident 30 Area
- SMK3 8 Area
- MatLev K3 dengan Nilai 85
- Paspur Kompetensi 80% pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 98%
- Peserta *Online Training* 100%
- Akademi Yantek 26 Unit
- Best K3 8 unit

- Implementasi SIQ Seluruh Unit
- Zero Accident Seluruh Area
- SMK3 20 Area
- MatLev K3 dengan Nilai 95
- Paspur Kompetensi 100% pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 100%
- Peserta *Online Training* 100%
- Akademi Yantek 48 Unit

- Implementasi SIQ Seluruh Unit
- Zero Accident Seluruh Area
- SMK3 32 Area
- MatLev K3 dengan Nilai 100
- Paspur Kompetensi 100% pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 100%
- Peserta *Online Training* 100%
- Akademi Yantek Seluruh Unit



## ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Occupational Health and Safety (K3)

*Roadmap* K3 menjabarkan elemen-elemen terukur yang harus dipenuhi Perusahaan dalam aspek K3 sehingga pada tahun 2021 Perusahaan telah memenuhi kriteria *operational excellence* sebagai *asset operator* mitra strategis PLN dan menjadi *trendsetter* di industri O&M jaringan ketenagalistrikan.

### Kegiatan K3

Untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen Perusahaan akan pentingnya K3 dan mengakselerasi tumbuhnya budaya K3 yang kuat di seluruh wilayah kerja grup HP, Direksi mengeluarkan Peraturan Direksi No. 014.P/DIR-HP/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pedoman *Safety, Integrity, dan Quality* di Lingkungan PT Haleyora Power. Sosialisasi implementasi Peraturan Direksi mengenai *Safety, Integrity, Quality* tersebut dilakukan sepanjang tahun 2018 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

K3 roadmap outlines measurable K3 elements that must be fulfilled by the Company so that by 2021 the Company will achieve operational excellence criteria as an asset operator of PLN's strategic partners and become a trendsetter in the O&M industry for power network.

### K3 Activities

To increase awareness of the Company's elements of K3 importance and to encourage a strong K3 culture in all work areas of HP group, Board of Directors issued Regulation of Board of Directors No. 014.P/DIR-HP/2017 dated August 29, 2017 concerning Safety, Integrity and Quality Guidelines in PT Haleyora Power. Socialization of Regulation of Board of Directors concerning Safety, Integrity and Quality was carried out throughout 2018 with the following activities:

NO	KEGIATAN Activity	TANGGAL Date	LOKASI Location
1	Sosialisasi <i>Safety, Integrity, dan Quality</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman dan implementasi <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ dan 5R)</li> <li>• Pemahaman kualitas kinerja (kontrak, SLA, <i>respond, recovery</i>)</li> <li>• Pemahaman teknik sesuai SOP/SWP (simulasi dan penilaian)</li> <li>• Penandatanganan komitmen <i>Safety, Integrity, dan Quality</i></li> </ul> <i>Safety, Integrity, and Quality</i> socialization: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understanding and implementing <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ and 5S)</li> <li>• Understanding performance quality (contract, SLA, <i>respond, recovery</i>)</li> <li>• Technical understanding according to SOP/SWP (simulation and assessment)</li> <li>• Signing of commitments for <i>Safety, Integrity, and Quality</i></li> </ul>	16, 17, 19, 23-26 Juli July 16, 17, 19, 23-26	Region 1 & Region 5
2	Sosialisasi <i>Safety, Integrity, dan Quality</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman dan implementasi <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ dan 5R)</li> <li>• Pemahaman kualitas kinerja (kontrak, SLA, <i>respond, recovery</i>)</li> <li>• Pemahaman teknik sesuai SOP/SWP (simulasi dan penilaian)</li> </ul> <i>Safety, Integrity, and Quality</i> socialization: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understanding and implementing <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ and 5S)</li> <li>• Understanding performance quality (contract, SLA, <i>respond, recovery</i>)</li> <li>• Technical understanding according to SOP/SWP (simulation and assessment)</li> </ul>	8-10 Agustus August 8-10	Area Tanjung Karang
3	Pelatihan calon instruktur materi pengawas dan pelaksana pekerjaan Yantek Training for trainer of module of Technical Service supervisor and executor	14-15 Agustus August 14-15	Pusdiklat PN Training and Education Center
4	<i>Assesment safety sign</i> Kantor HP Pusat Assesment on <i>safety sign</i> at HP Head Office	28 Agustus August 28	Kantor Pusat HP HP Head Office

**ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**  
Occupational Health and Safety (K3)

NO	KEGIATAN Activity	TANGGAL Date	LOKASI Location
5	Sosialisasi <i>Safety, Integrity, dan Quality</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman dan implementasi <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ dan 5R)</li> <li>Pemahaman kualitas kinerja (kontrak, SLA, <i>respond, recovery</i>)</li> <li>Pemahaman teknik sesuai SOP/SWP (simulasi dan penilaian)</li> </ul> <i>Safety, Integrity, and Quality socialization</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Understanding and implementing <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ and 5S)</li> <li>Understanding performance quality (contract, SLA, <i>respond, recovery</i>)</li> <li>Technical understanding according to SOP/SWP (simulation and assessment)</li> </ul>	8-10, 29-31 Agustus August 8-10, 29-31	Area Tanjung Karang & Area Pangkalpinang
6	Audit internal SMK <sub>3</sub> untuk persiapan audit eksternal sertifikasi SMK <sub>3</sub> tahap awal 64 Kriteria OHSMS internal audit for the preparation to comply 64 criteria initial stage external audit for OHSMS certification	4-5, 6-7 September September 4-5, 6-7	Area Bandung & Area Majalaya
7	Verifikasi pemenuhan <i>setup</i> SMK <sub>3</sub> untuk persiapan audit eksternal sertifikasi SMK <sub>3</sub> tahap awal 64 kriteria di Region 4. Pencapaian: 62,50% Verification on OHSMS <i>setup</i> compliance in preparation for initial stage external audit 64 criteria for OHSMS certification in Region 4. Achievement: 62.50%	16 Oktober October 16	Region 4
8	Pendampingan Pelatihan Pengawas Pekerjaan Yantek <i>Batch</i> 1-2 Assistance in Training of Technical Service Supervisor Batch 1-2	24-26 Oktober October 24-26	Bogor
9	Lomba Yantek dalam rangka ulang tahun HP Technical Service competition in the event of HP anniversary	1-2 November November 1-2	Kantor Pusat HP HP Head Office
10	Pemasangan <i>safety sign</i> , APAR dan P3K Kantor Pusat HP Fixing of <i>safety sign</i> , light fire extinguisher and first aid kit at HP Head Office	12-13 November November 12-13	Jakarta
11	Instruktur Pelatihan Pengawas Pekerjaan Yantek <i>Batch</i> 11-12 Trainer for training of Technical Service Supervisor Batch 11-12	26-30 November November 26-30	Bogor
12	<i>Aanwijzing</i> pengadaan Alker dan APD PT Haleyora Power Direction on the procurement of work tools and personal protective equipment of PT Haleyora Power	6 Desember December 6	Kantor Pusat HP HP Head Office
13	Pendampingan pemulihan jaringan pasca angin puting beliung di Area Bogor Assistance in post-whirlwind network recovery in Bogor Area	7 Desember December 7	Bogor
14	Sosialisasi <i>Safety, Integrity, dan Quality</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman dan Implementasi <i>Safety</i> (5LMS, 5TPJ dan 5R)</li> <li>Pemahaman Kualitas Kinerja (Kontrak, SLA, <i>Respond, Recovery</i>)</li> <li>Pemahaman Teknik sesuai SOP/SWP (simulasi dan penilaian)</li> </ul> <i>Safety, Integrity, and Quality socialization</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Understanding and implementing <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ and 5S)</li> <li>Understanding performance quality (contract, SLA, <i>respond, recovery</i>)</li> <li>Technical understanding according to SOP/SWP (simulation and assessment)</li> </ul>	19-21 Desember December 19-21	Region 3
15	Pendampingan Audit Eksternal SMK <sub>3</sub> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Area Bandung pencapaian: 90,62%</li> <li>Area Majalaya pencapaian: 89,06%</li> </ul> SMK <sub>3</sub> External Audit Assistance: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandung Area achievement: 90.62%</li> <li>Majalaya Area achievement: 89.06%</li> </ul>	27-28 Desember December 27-28	Region 1

## ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Occupational Health and Safety (K3)

### Siaga I K3

Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja adalah ketidakdisiplinan dan ketidaktaatan terhadap ketentuan prosedur kerja. Dari laporan investigasi kecelakaan kerja dan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana maupun pengawas seperti tidak menjalankan prosedur operasi standar (*standard operating procedures/SOP*) dengan benar, tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan alat kerja (Alker) yang sesuai, tidak melakukan pengujian tegangan pada jaringan, tidak memasang *grounding set*, tidak menggunakan *lotto*, serta tidak melakukan koordinasi ketika mengubah rencana kerja. Tingginya tingkat pelanggaran tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab para leader, mulai dari Direksi hingga Pengawas K3.

Oleh karena itu, pada tahun 2017 Perusahaan mencanangkan komitmen "Siaga I K3" sebagai upaya agar para pekerja terhindar dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) ketika melakukan pekerjaannya. Siaga 1 K3 diterapkan di seluruh region untuk meningkatkan perhatian pegawai akan pentingnya K3 dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), serta untuk mengakselerasi tumbuhnya budaya K3 yang kuat di seluruh wilayah kerja grup HP.

Sasaran jangka pendek dari Siaga I K3 adalah membangun budaya K3 dalam setiap pekerjaan operasional di lapangan. Target ini harus dilaksanakan secara cepat, karena Perusahaan menggerakkan tenaga kerja dalam jumlah besar di lokasi kerja yang berbahaya. Fokus pembenahan adalah dari sisi sumber daya manusia, baik pelaksana maupun pengawas, dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai K3, prosedur kerja dan *job safety analysis*. Pendidikan dan sertifikasi juga menjadi prioritas untuk mendukung tercapainya nihil kecelakaan (*zero accident*).

### Morning Briefing

Sebagai bagian dari implementasi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) yang mengatur perilaku Perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya dan perilaku pegawai dalam berinteraksi dengan pegawai lainnya, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan *Morning Briefing* atau *Morning Spirit* HP yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis. Sedangkan Jumat pagi diisi dengan kegiatan olah raga atau senam bersama.

*Morning Briefing* dilakukan sebelum mulai bekerja baik di kantor pusat, region, area, maupun kelompok-kelompok

### K3 Alert I

The main causes of occupational accidents are indiscipline and disobedience in performing work procedures. According to reports of occupational accident investigations and surprise inspections in the field, there are many violations committed by executives and supervisors, such as not carrying out standard operating procedures (SOP) properly, not using appropriate personal protective equipment (PPE) and work equipment (Alker), not conducting stress testing on the network, not installing grounding set, not using lotto and no coordination after changing work plans. The high level of violations is part of the responsibilities of leaders, ranging from Board of Directors to K3 Supervisors.

Therefore, in 2017, the Company made a commitment to "K3 Alert I" as an effort to avoid the risk of occupational accidents and diseases (PAK) at work. K3 Alert I is implemented in all regions to encourage employee attention to the importance of K3 and Power Safety (K2), as well as to accelerate the growth of a strong K3 culture in all operational areas of HP group.

The short-term objectives of K3 Alert I is to encourage OHS culture in every operational work in the field. This target must be implemented quickly, because the Company mobilizes large numbers of workforce in hazardous work sites. The focus of improvement is on human resources, both executives and supervisors, by providing comprehensive understanding on K3, work procedures and job safety analysis. Education and certification are also priorities to achieve zero accident target.

### Morning Briefing

As part of implementation of Code of Conduct (CoC) which regulates the Company's behavior towards its stakeholders and employee behavior in interacting with other employees, the Company holds HP Morning Briefing or Morning Spirit that are routinely carried out every Monday to Thursday. While the regular schedule on Friday morning is for sports or exercise activities.

Morning Briefing is held before work hours at head office, regions, areas and work groups/shifts. The briefing topic

## ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Occupational Health and Safety (K3)

kerja/shift. Topik *briefing* mencakup aspek-aspek terkait pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi bila ada, inspeksi alat kerja (Alker) dan alat pelindung diri (APK), kesiapan fisik dan mental pekerja dalam melaksanakan tugas hari itu, dan ditutup dengan doa bersama sebelum memulai tugas. *Morning Briefing* merupakan bagian dari budaya K3 yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja aman, meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan mencapai *target zero accident*.

### Kampanye 5 Langkah Menuju Selamat (5LMS)

Perusahaan secara konsisten melakukan kampanye keselamatan kerja. Seluruh personel harus ikut terlibat membangun budaya K3. Setiap hari, Manajer Area dan Koordinator Gardu Induk (GI) wajib menyampaikan Rencana Kerja Harian, evaluasi pelaksanaan kerja hari N-1, kondisi Alker dan APD, Rencana Pembinaan Harian Tenaga Kerja, serta laporan kondisi kendaraan.

Perusahaan memanfaatkan aplikasi grup percakapan *whatsapp* untuk memantau kegiatan unit di seluruh region dan area. Para *leader* harus memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 25 ribu orang mematuhi SOP dan peduli keselamatan kerja.

Salah satu kampanye K3 yang dilakukan Perusahaan adalah kampanye pemahaman 5 Langkah Menuju Selamat (5LMS). 5LMS adalah prosedur standar yang harus dilaksanakan setiap individu terutama yang bekerja pada instalasi bertegangan (*online service*). Untuk menanamkan sikap disiplin terhadap prosedur, para Manager dan Supervisor harus melakukan pembinaan, praktik dan *upskilling* yang terus-menerus kepada tenaga kerja tim kerja Pelayanan Andal (Yandal) dan Inspeksi & Pemeliharaan.

5LMS merupakan kontrol mandiri (*self assessment*) bagi pelaksana agar selamat. Di dalam 5LMS terdapat 5 pertanyaan pokok yang harus dipastikan jawabannya "Ya". Bila dari 5 pertanyaan tersebut ada pertanyaan yang dijawab "Tidak" (walaupun hanya satu pertanyaan), maka pekerjaan tidak boleh dilakukan. Pelanggar prosedur 5LMS akan mendapat sanksi disiplin pegawai dan hak-haknya untuk mendapat perlindungan asuransi atas risiko kecelakaan menjadi gugur.

covers aspects related to work and existing issue, if any, inspection of work equipment (Alker) and personal protective equipment (APK), physical and mental readiness of workforce in performing their daily work. This routine is closed with pray before the workforce start their work. Morning Briefing is part of K3 culture which is expected to create a safe work environment, to minimize the risk of work accidents and to achieve the zero accident target.

### 5-Step to Safety (5LMS) Campaign

The Company consistently carries out work safety campaigns. All personnel must be involved in building K3 culture. Every day, Area Managers and Substation (GI) Coordinators are required to submit Daily Work Plan, evaluation of N-1 day work realization, Alker and PPE conditions, Workforce Daily Development Plan and vehicle condition report.

The Company utilizes whatsapp group chat application to monitor unit activities in all regions and areas. The leaders must ensure that the entire workforce of more than 25 thousand people adhere to SOP and are well aware of work safety.

One of K3 campaigns carried out by the Company is 5-Step to Safety (5LMS) campaign. 5LMS is a standard procedure that must be performed by each individual, especially those who work in voltage installation (*online service*). To instill a disciplined attitude, Managers and Supervisors must provide mentoring, practice and upskilling to workforce of Reliable Service (Yandal) and Inspection & Maintenance teams.

5LMS is a safety self-assessment for executives. In 5LMS, there are 5 main questions that need "Yes" answer. If from the 5 questions have one or more "No" answers, then the work should not be done. 5LMS procedure offenders will be imposed disciplinary sanctioned and their rights to receive insurance protection on risk of accident will become void.

## ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Occupational Health and Safety (K3)



Salah satu aspek yang menjadi fokus 5LMS adalah kesiapan Alker dan APD sebagai sarana kerja yang mendukung keselamatan kerja bagi pelaksana. Alker dan APD membutuhkan perawatan, penyimpanan dan penataan yang baik dan benar agar kondisinya tetap prima dan siap digunakan saat diperlukan. Kesadaran untuk memelihara dan mengelola Alker dan APD juga menjadi perhatian karena banyak Alker dan APD yang sudah rusak sebelum umur ekonomisnya tercapai.

### Sosialisasi 5 Tahapan Pekerjaan pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM)

Pekerjaan pada jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pemahaman personel terhadap *Job Safety Analysis* (JSA) sangat penting terutama dalam mengamankan titik kerja dari bahaya listrik. Mengamankan titik kerja dari bahaya listrik adalah hal utama yang harus diperhatikan ketika bekerja pada instalasi tenaga listrik. Oleh karena itu, SOP yang berisi urutan kerja yang benar sangat dibutuhkan agar pelaksana terhindar dari kecelakaan kerja. Tahapan-tahapan dalam mengamankan titik kerja dari tegangan oleh pelaksana dimulai dari:

5LMS focuses on, among others, readiness of Alker and APD as work facilities that support work safety for executives. Alker and APD need good care, storage and arrangement so that they are always in good condition and ready to use when needed. Awareness to maintain and manage Alker and APD is also a concern because many Alker and APD have been damaged prior to the end of their economic lives.

### Socialization of 5 Stages of Work on Medium Voltage Network (JTM)

Work on 20kV medium voltage network (JTM) has a high level of occupational accident risk. Personnel's understanding of Job Safety Analysis (JSA) is very important especially in securing work points from electrical hazards. Securing work points from electrical hazards is the priority that must be considered when working on power installations. Therefore, SOP containing proper work order is needed so that executives can avoid work accidents. The stages in securing work point from voltage to be done by executives start from:

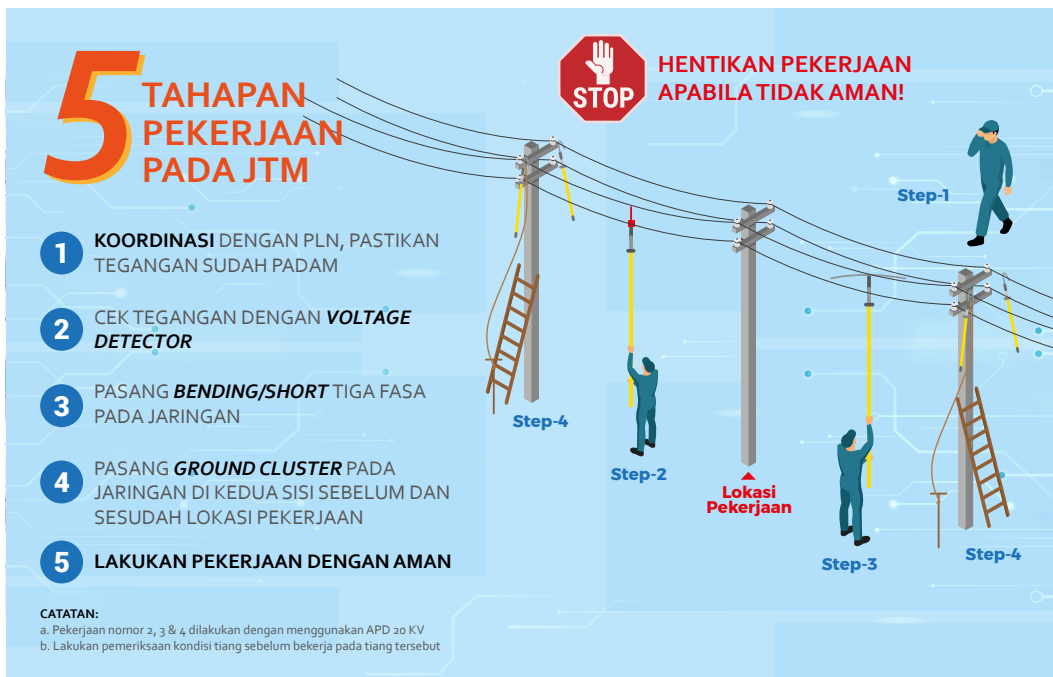
**ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**  
 Occupational Health and Safety (K3)

1. Konfirmasi pemadaman penyulang oleh *dispatcher*. Pernyataan operator bahwa saklar pemutus tenaga (PMT)/recloser sudah dikeluarkan, tidak boleh diyakini secara mutlak tanpa mengkonfirmasi ulang.
2. Melakukan uji tegangan dengan *volt detector* dan uji tegangan dilakukan setelah asesmen 5LMS (menggunakan APD 20 KV).
3. Melakukan pemasangan *grounding apparatus* dan pemasangan dilakukan setelah asesmen 5LMS (menggunakan APD 20 KV).
4. Setelah DIYAKINI AMAN, pelaksana baru boleh mengerjakan perbaikan.

1. Confirmation of feeder blackout by dispatcher. Operator’s issued statement that power disconnecting switch (PMT)/recloser must not be absolutely believed without reconfirming.
2. Voltage test with volt detector and voltage test carried out after 5LMS assessment (using 20 KV APD).
3. Installation of grounding apparatus and installation after 5LMS assessment (using 20 KV APD).
4. Once it is ABSOLUTELY SECURED, the operator may start working on repairs.

Tahapan-tahapan tersebut tidak boleh lepas dari pengawasan Pengawas K3 atau pengawas regu. Praktik dan uji coba adalah cara cepat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menaati SOP dan 5LMS untuk melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan kerja.

These stages are part of scope of supervision of K3 Supervisor or team supervisor. Practice and trials are an easy way to provide understanding on the importance of adhering to SOP and 5LMS to protect workforce from potential occupational accidents.



**Pelatihan dan Sertifikasi K3**

Upaya meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pegawai terhadap aspek-aspek keselamatan terus dilakukan melalui kegiatan rutin seperti *morning briefing*, kampanye 5LMS, *upskilling*, *refreshment* dan sebagainya. Perusahaan

**K3 Certification and Training**

Efforts to enhance awareness and responsibility of employees regarding safety aspects continue to be done through routine activities, such as morning briefing, 5LMS campaign, upskilling, refreshment and so forth. The Company also

### ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Occupational Health and Safety (K3)

juga meningkatkan kualifikasi pegawai di bidang K3 dengan memberikan pelatihan sertifikasi mandatori untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Ahli K3 Umum (AK3U) untuk memenuhi kebutuhan personel AK3U di seluruh region. Pada tahun 2018, jumlah pegawai pemegang sertifikasi AK3U sebanyak 60 orang yang ditempatkan di organisasi K3 kantor pusat, region dan area.

improves employee qualification in K3 by providing mandatory certification training to obtain competency certificates.

Periodically, the Company organizes education and training (Diklat) for General K3 Expert (AK3U) to meet the needs for AK3U personnel in all regions. At end of 2018, there were 60 employees who have obtained AK3U certification to be placed in K3 organizations at head office, regions and areas.

NO	LOKASI TUGAS Assignment	JUMLAH AK3U Total OHS Expert
1	Kantor Pusat Head Office	3
2	Region 1	13
3	Region 2	9
4	Region 3	12
5	Region 4	8
6	Region 5	5
7	Region 6	6
8	Area Bangka	1
9	Area Tanjung Karang	2
10	Area Rantau Prapat	1
<b>JUMLAH AK3U Total OHS Expert</b>		<b>60</b>

Selain Diklat AK3U, Perusahaan juga menyelenggarakan Diklat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Diklat Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Diklat Pengawas Pekerjaan untuk memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Sistem Manajemen K3 (SMK3). Jumlah pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

In addition to AK3U Training, the Company also organizes First Aid (P3K) Training, Fire Fighting (Damkar) Training and Work Supervisory Training to meet the criteria required in K3 Management System (SMK3). The number of certification trainings held throughout 2018 is as follows:



**ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**  
Occupational Health and Safety (K3)

NO	REGION Region	PELATIHAN SERTIFIKASI Certification Training			JUMLAH PELATIHAN Total Training
		PEMADAM KEBAKARAN Fire Fighting	P3K First Aid	PENGAWAS PEKERJAAN Operation Supervisor	
1	Kantor Pusat Head Office	1	2	-	3
2	Region 1	3	2	80	85
3	Region 2	2	3	-	5
4	Region 3	3	7	-	10
5	Region 4	2	1	-	3
6	Region 5	2	2	-	4
7	Region 6	2	1	-	3
8	Area Bangka	-	-	-	-
9	Area Tanjung Karang	-	-	-	-
10	Area Rantau Prapat	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>113</b>

Untuk meningkatkan kompetensi (*upskilling*) tenaga kerja teknik, Perusahaan, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PLN dan Divisi K3LH PLN, telah menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) K3 yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan dan dapat diaplikasikan untuk tenaga kerja Pelayanan Teknik (Yantek) lulusan SMK yang dimiliki Perusahaan. Materi pelatihan disusun berdasarkan pengalaman HP di lapangan, diarahkan oleh Divisi K3LH PLN serta disiapkan dan dilaksanakan oleh Pusdiklat. Pelatihan Yantek dengan menggunakan kurikulum tersebut telah dimulai pada tahun 2018.

**Kecelakaan Kerja**

Pada tahun 2018 terjadi 2 kejadian kecelakaan kerja, yaitu di Region 6 (Rayon Pekanbaru Timur) dan Area Khusus Bangka (Rayon Pangkalpinang). Perusahaan telah menindaklanjuti peristiwa kecelakaan kerja tersebut sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat peringatan kepada petugas pengawas dan manajemen yang bertanggung jawab kepada K3;
2. Melakukan pembinaan kepada tenaga kerja dan *refreshment* kepada jajaran manajemen terkait pentingnya budaya K3;
3. Memperbaiki sistem pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga (*vendor management*) untuk pekerjaan *Right of Way* (ROW);
4. Perbaikan/revisi SOP pekerjaan;
5. Pengadaan alat kerja ROW non-konduktif;
6. Rekrutmen tenaga kerja dan pelembagaan pekerjaan ROW.

To improve competency (*upskilling*) of technical workforce, the Company, in collaboration with Center for Education and Training (Pusdiklat) of PLN and K3LH Division of PLN, has compiled K3 education and training (Diklat) curriculum that is suitable for the Company's business and can be applied to workforce of Technical Services (Yantek) who are SMK graduates work for the Company. The training material was compiled based on HP's field experience, directed by PLN's K3LH Division and prepared and held by Yantek Training Center using such curriculum since 2018.

**Occupational Accident**

In 2018, there were 2 occupational accidents in Region 6 (East Pekanbaru Rayon) and Bangka Special Area (Pangkal Pinang Rayon). The Company followed up on these occupational accidents by:

1. Issuing warning letter to the supervisor and management responsible for K3;
2. Providing coaching to workforce and refreshment to management pertaining to the importance of K3 culture;
3. Improving implementation and supervision system of work carried out by third parties (*vendor management*) for *Right of Way* (ROW) work;
4. Revising SOP;
5. Procurement of non-conductive ROW work equipment;
6. Recruitment of workforce and institutionalization of ROW work.

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Program Related to Consumer Protection

### Sistem Manajemen K3

Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 (SMK3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sesuai PP 50/2012 tersebut, HP yang bidang pekerjaannya memiliki potensi bahaya tinggi diwajibkan memenuhi 64 kriteria SMK3. Pemenuhan 64 kriteria tersebut diaudit oleh pihak eksternal, dalam hal ini PLN Jasa Sertifikasi (Pusertif). Hasil audit dan rekomendasinya menjadi dasar pertimbangan dalam proses sertifikasi SMK3.

Saat ini Perusahaan telah membentuk tim setup untuk finalisasi proses sertifikasi SMK3 di 6 region. Tugas tim setup adalah melakukan peninjauan awal sampai sejauh mana region bersangkutan telah menerapkan 64 kriteria sebagai tahap awal. Bila implementasi K3 di region tersebut sudah mencapai lebih dari 85%, maka audit internal dapat dilakukan. Sertifikasi SMK3 (untuk yang 64 kategori) akan mencantumkan kategori Memuaskan, Baik, dan Kurang. Nilai "Memuaskan" diberikan bila implementasinya telah mencapai lebih dari 85%. Nilai "Baik" untuk implementasi 65%-85%, dan nilai "Kurang" untuk implementasi di bawah 65%.

Hasil sertifikasi SMK3 dan kemajuan proses sertifikasi SMK3 hingga akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	REGION Region	NILAI AUDIT Audit Result	SERTIFIKASI Certification	TANGGAL AUDIT Audit Date
1	Region 1	Eksternal: 90,62 %	Gold	17-18 Januari January 17-18
2	Region 2	Eksternal: 90,62 %	Gold	
3	Region 3	Eksternal: 92,19 %	Gold	
4	Area Bandung	Internal: 87,50 %	Proses Eksternal	4-5 September September 4-5
5	Area Majalaya	Internal: 92,19 %	Proses Eksternal	6-7 September September 6-7

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

### Komitmen

Kepuasan pelanggan adalah kunci keberlanjutan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan berusaha untuk menjaga standar kualitas layanan dihasilkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sesuai dengan *service level agreement* (SLA) yang telah disepakati.

### K3 Management System

The Company implements K3 management system (SMK3) referring to Government Regulation No. 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Health and Safety Management System (K3). In accordance with PP 50/2012, mobile phones that work in areas with high potential hazards are required to meet 64 SMK3 criteria. Fulfillment of these 64 criteria is audited by external party, in this case, PLN Certification Service (Pusertif). The results and recommendations of the audit form the basis for consideration in SMK3 certification process.

Currently, the Company has established setup team to finalize SMK3 certification process in 6 regions. The task of the setup team is to conduct initial review of the extent to which the region has implemented 64 criteria as an initial stage. If K3 implementation in the respective region reaches more than 85%, then internal audit will be conducted. SMK3 certification (for 64 categories) will mention the category of Satisfactory, Good, or Poor. "Satisfactory" rating is given if the implementation reaches more than 85%. "Good" rating for implementations is 65% -85% and "Poor" rating for implementations is below 65%.

The results of SMK3 certification and the progress of SMK3 certification process at end of 2018 are as follows:

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO CONSUMER PROTECTION

### Commitment

Consumer protection is the key to the Company's business sustainability. Therefore, the Company strives to maintain the service quality standards and to provide the best services to customers in accordance with the agreed service level agreements (SLA).

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Program Related to Consumer Protection

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu mengedepankan misinya yaitu mendukung PLN untuk merealisasikan pelayanan sistem distribusi yang andal dan berkualitas sesuai dengan standar layanan tertinggi, serta mendukung PLN dalam menerapkan *sistem revenue assurance* (REVASS) dan efisiensi jaringan distribusi tenaga listrik.

### Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak atas Kegiatan Tersebut

- **Forum Bisnis dan *Voice of Customer***

Pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2018, Perusahaan menyelenggarakan acara Forum Bisnis Semester II 2018 di Bogor bersamaan dengan kegiatan *Voice of Customer*.

*Voice of Customer* merupakan sebuah segmen untuk mendengar kritik dan saran dari para pemangku kepentingan, agar Perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih baik lagi ke depan. Saat ini pelanggan utama Perusahaan adalah PLN dan acara *Voice of Customer* ini antara lain dihadiri oleh PLN Distribusi Lampung, PLN Area Bangka, dan PLN Area Bogor.

Selain mendapat saran dan masukan yang berharga untuk perbaikan ke depan, pelanggan juga memberikan apresiasi dan kepuasannya atas layanan yang diberikan. PLN Distribusi Lampung yang bekerja sama di pekerjaan Yantek dan billing mencatat adanya peningkatan kinerja. Angka *energy not sold* turun dari 9,2 juta kWh menjadi 5,3 kWh terutama sebagai hasil dari koordinasi yang baik antara PLN dengan tim Yantek pada saat pemeliharaan jaringan sehingga frekuensi dan waktu pemadaman listrik yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan di satu penyulang dapat ditekan lebih rendah. Dalam hal billing, kinerja pencatatan meter pada bulan Juni 2018 dapat mencapai 99,55% dari sebelumnya yang rata-rata hanya mencapai 80%.

PLN Area Bangka yang bekerja sama di pekerjaan Yantek dan inspeksi & pemeliharaan juga mengakui adanya perbaikan dan kemajuan kualitas layanan dalam periode 1,5 tahun bekerja sama. Layanan Yantek dinilai cukup membantu operasional PLN Area Bangka. Dari sisi waktu respons (*response time*) terhadap keluhan pelanggan, HP menargetkan SLA kecepatan respons 45 menit tetapi tim dapat merespons lebih singkat, bahkan di bulan Juni 2018 mampu mencapai di bawah 30 menit. Waktu perbaikan (*recovery time*), yaitu jangka waktu sejak lampu di

In carrying out its business, the Company always prioritizes its mission of supporting PLN to realize reliable and quality distribution system services in accordance with the highest service standards, as well as supporting PLN in implementing revenue assurance (REVASS) system and efficiency of power distribution networks.

### Activities and Impacts

- **Business Forum and *Voice of Customer***

On August 2 and 3, 2018, the Company organized Semester II 2018 Business Forum and *Voice of Customer* in Bogor.

*Voice of Customer* is a segment to identify criticism and suggestions from stakeholders, so that the Company can improve the quality of services going forward. Currently, the Company's main customer is PLN and *Voice of Customer* was attended by PLN Lampung Distribution, PLN Bangka Area and PLN Bogor Area.

In addition to getting valuable suggestions and input for future improvement, customers also gave their appreciation and satisfaction for the services provided. PLN Lampung Distribution who worked together on Yantek's work and billing recorded improved performance. The number of energy not sold decreased from 9.2 million kWh to 5.3 kWh mainly as a result of effective coordination between PLN and Yantek team during network maintenance so that the frequency and time of power outages needed to make repairs on one feeder can be reduced. In terms of billing, the performance of meter recording in June 2018 reached 99.55% from the previous average of only 80%.

PLN Bangka Area that cooperates in Yantek's work and inspection & maintenance also recognized improvements and advances in service quality in the 1.5 year period of cooperation. Yantek's services are considered to be sufficient to help PLN Bangka Area operations. In terms of response time to customer complaints, HP was targeting SLA response rate of 45 minutes but the team could respond faster, even in June 2018, was able to reach under 30 minutes. Recovery time, which is the period from the time the lights go out until the lights goes back

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Program Related to Consumer Protection

tempat pelanggan padam sampai menyala kembali, juga mengalami perbaikan yang signifikan. Bagi PLN, waktu respons dan waktu perbaikan merupakan faktor penting untuk menjaga kepuasan pelanggannya.

- **Haleyora Power Fair**

Pada tanggal 2 November 2018, Perusahaan menyelenggarakan Haleyora Fair dengan tema "Synergy in Disruption". Acara yang diadakan di Bandung ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun PT Haleyora Power yang jatuh pada tanggal 18 Oktober 2018. Dalam kesempatan tersebut, Perusahaan menandatangani nota kesepakatan dengan PLN Unit Induk Distribusi/Wilayah mengenai pemanfaatan fasilitas jaringan distribusi.

### Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan, Perusahaan secara berkala mengadakan Survei Kepuasan Pelanggan untuk mengukur dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan serta memperoleh umpan balik dari pelanggan. Tujuan akhir dari pelaksanaan survei adalah perbaikan kualitas layanan dan kinerja.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan 2 kali survei, yaitu pada semester I dan II. Survei dilaksanakan kepada 41 responden (pelanggan). Aspek yang diukur meliputi aspek layanan secara umum, tingkat harga (*billing rate*), administrasi keuangan, ketepatan waktu layanan, dan mutu pelayanan yang diberikan. Survei semester I menghasilkan peningkatan indeks kepuasan pelanggan dari 75,36 pada semester 1 menjadi 76,19. Namun demikian, hasil indeks kepuasan pelanggan masih di bawah target kontrak manajemen tahun 2018 yaitu sebesar 87,5. Hal ini menjadi bahan evaluasi manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

on at customer premise, also experienced a significant improvement. For PLN, response time and repair time are crucial factors to maintain customer satisfaction.

- **Haleyora Power Fair**

On November 2, 2018, the Company organized Haleyora Fair with the theme "Synergy in Disruption." The event which was held in Bandung was part of a series of PT Haleyora Power's anniversary on October 18, 2018. On this occasion, the Company signed a memorandum of understanding with PLN Regional/Distribution Main Unit regarding utilization of distribution network facilities.

### Customer Satisfaction Survey

To improve service quality for customers, the Company regularly holds Customer Satisfaction Survey to measure and evaluate services provided to customers and to obtain feedback from customers. The final objective of the survey is to improve service quality and performance.

In 2018, the Company conducted 2 surveys, in semester I and II. The surveys were conducted on 41 respondents (customers). The aspects measured included service in general, billing rate, financial administration, timeliness and quality of services. The second semester survey showed an increase in customer satisfaction index from 75.36 in semester I to 76.19. However, the result of customer satisfaction index was still below 2018 management contract target of 87.5. This would be considered in management evaluation to improve service quality going forward.

NO	ASPEK PENGUKURAN	SEMESTER I	SEMESTER II	Measurement Aspect
1	Layanan Umum	76.07	76.19	General Services
2	Biaya	69.27	71.67	Cost
3	Mutu	75.83	77.31	Quality
4	Waktu	74.29	74.60	Time
5	Keuangan	76.43	76.19	Finance
	<b>Indeks Kepuasan Pelanggan</b>	<b>75.36</b>	<b>76.19</b>	<b>Customer Satisfaction Index</b>

**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN  
PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**  
Corporate Social Responsibility Program Related to Social and Community Development

**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN  
PENGEMBANGAN SOSIAL DAN  
KEMASYARAKATAN**

**Kebijakan dan Komitmen**

Perusahaan ingin turut berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja melalui program tanggung jawab sosial di bidang sosial dan kemasyarakatan.

**Kegiatan/Program yang Dilakukan dan Dampaknya**

• **Haleyora Mengajar**

Perusahaan mengadakan program "Haleyora Mengajar" yang ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan teknik tenaga listrik di sekitar lingkungan 6 region/wilayah operasi Perusahaan. Program ini semula bernama "Kelas Haleyora", yang diadakan di Region 1, yaitu di SMKN 6 dan SMKN 4 Bandung pada 2016. Setelah sempat vakum pada tahun 2017, Program dilanjutkan pada tahun 2018 di 6 region, yaitu di Cibubur untuk region Jakarta, Bandung untuk region Jawa Barat, Surabaya untuk region Jawa Timur, dan Semarang untuk region Jawa Tengah. Program dilaksanakan serentak mulai tanggal 22 Juni 2018, di antaranya di SMKN 4 Bandung, SMKN 5 Padang, dan SMKN 2 Pekanbaru.

Program ini merupakan payung dari kegiatan belajar-mengajar tentang distribusi tenaga listrik yang bertujuan menyalurkan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Pada 2018, kegiatan Haleyora Mengajar dilaksanakan di 9 SMK dari 6 region. Quota untuk setiap region adalah 30 orang di satu kelas, dimana peserta boleh berasal dari sekolah yang sama ataupun dari SMK lainnya.

Haleyora Mengajar diadakan selama seminggu penuh di SMK yang telah ditentukan dan telah setuju untuk mengikuti program. Materi yang diajarkan terutama adalah bidang transmisi dan distribusi listrik sesuai bidang kerja Perusahaan dengan Manajer Region dan Manajer Area setempat yang menjadi pengajar. Dalam waktu 1 minggu, pada 3 hari pertama diberikan teori, hari keempat praktik, dan hari kelima diadakan *post test* atau evaluasi atas kegiatan 4 hari sebelumnya. Penanggung jawab, penyusun kerangka kerja dan materi untuk post

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
PROGRAM RELATED TO SOCIAL AND  
COMMUNITY DEVELOPMENT**

**Policy and Commitment**

The Company is eager to take part in improving the standard of living of the community and in increasing employment rate through social responsibility programs in the social and community sector.

**Activities/Programs and Impacts**

• **Haleyora Teaching**

The Company conducts "Haleyora Teaching" program aimed at Vocational High School (SMK) students majoring in electrical engineering in the vicinity of the Company's 6 regions/operational areas. This program was originally called "Haleyora Class," held in Region 1, namely at SMKN 6 and SMKN 4 Bandung in 2016. After being halted in 2017, the program was resumed in 2018 in 6 regions, namely in Cibubur for Jakarta, Bandung region for West Java region, Surabaya for East Java region and Semarang for Central Java region. The program was held simultaneously on June 22, 2018, at SMKN 4 Bandung, SMKN 5 Padang and SMKN 2 Pekanbaru.

This program is a forum of teaching and learning activities on power distribution which aims to align competencies of vocational graduates with the needs for workforce. In 2018, Haleyora Teaching activities was held in 9 SMK in 6 regions. Quota for each region was 30 students in one class. The students came from the same school or from other vocational schools.

Haleyora Teaching was held for a full week at designated SMK that agreed to participate in the program. Delivered material was mainly related to power transmission and distribution, in line with the Company's field of work. Regional Managers and Area Managers acted as teachers in this program. During the week, the first 3 days were for theory, the fourth day was for practice and the fifth day was for post test or evaluation of the activities during the previous 4 days. The person in charge, the compiler of framework and materials for the post test was Human

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Program Related to Social and Community Development

test adalah Divisi Human Capital Management (HCM) PT Haleyora Power sedangkan pemilihan SMK target diserahkan kepada *region*. Biaya program berasal dari anggaran pendidikan dan pelatihan.

Dalam program ini, siswa diberikan berbagai pengetahuan mengenai distribusi listrik termasuk praktik menggunakan APD sebagai perlengkapan wajib saat melakukan pekerjaan sesuai SOP. Selanjutnya, satu bulan setelah program, siswa akan mengikuti psikotes sesuai standar rekrutmen HP. Hasil psikotes menjadi bank data Perusahaan. Setelah lulus sekolah, para siswa tersebut sudah memenuhi spesifikasi siap kerja dan dapat menjadi kandidat tenaga kerja Perusahaan.

- **Haleyora Peduli: Back to School**  
Program CSR "Haleyora Peduli" bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) melaksanakan kegiatan dengan tema "Back to School" pada tanggal 23 Agustus 2018 di Kampung Cibakul, Desa Cibadak, Bogor. Dalam kegiatan ini, Perusahaan membagikan paket peralatan sekolah lengkap terdiri dari tas, buku dan alat tulis, kepada 100 siswa Sekolah Dasar di Kampung Cibakul.
- Pada tanggal 12 November 2018, Perusahaan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan kegiatan Aksi Donor Darah dengan tema "Menyumbang Darah, Menyumbang Kehidupan". Kegiatan yang dilaksanakan di kantor pusat ini disambut antusias oleh jajaran Direksi dan pegawai HP, bahkan para karyawan kantor sekitarnya. Perusahaan mengadakan kegiatan donor darah rutin setiap tahun sejalan dengan tata nilai *WE BELIEVE* yang keenam, yaitu *Emphaty*. Menjadi donor darah, selain sebagai manifestasi sikap peduli dan keinginan mulia untuk menolong sesama, juga menyehatkan bagi pendor.

Capital Management (HCM) Division of PT Haleyora Power. Selection of the targeted Vocational Schools was up to the respective region. Funding for the program came from education and training budget.

In this program, students were given various knowledge regarding power distribution, including the practice of using APD as mandatory equipment when doing work according to SOP. Subsequently, one month after the program, students took psychological test according to HP's recruitment standards. The results of the psychology test became the Company's data bank. After graduating from school, the students who meet the job-ready specifications would become candidates for the Company's workforce.

- **Haleyora Care: Back to School**  
"Haleyora Care" CSR program in collaboration with Al Falah Social Fund Foundation (YDSF) carried out activity with the theme "Back to School" on August 23, 2018 in Cibakul Village, Cibadak Village, Bogor. In this activity, the Company distributed a complete school equipment package consisting of bags, books and stationery, to 100 Elementary School students in Cibakul Village.
- On November 12, 2018, the Company collaborating with Indonesian Red Cross (PMI) held a Blood Donation with the theme "Donating Blood, Donating Life." The activity taking place at the head office was enthusiastically welcomed by Directors and employees of HP, even other employees of the surrounding offices. The Company conducts routine blood donation every year in line with the sixth *WE BELIEVE* values system, *Emphaty*. Being a blood donor, in addition to being a manifestation of caring attitudes and a noble desire to help others, is also healthy for the donors.

**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN  
PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**  
Corporate Social Responsibility Program Related to Social and Community Development

- **Safari Ramadhan**

Perusahaan memiliki kegiatan tahunan dalam menyambut bulan Ramadhan. Salah satunya adalah kegiatan Safari Ramadhan, yaitu silaturahmi Direksi dan manajemen ke region-region untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan mendengarkan aspirasi pegawai HP. Kegiatan Safari Ramadhan juga diisi dengan acara berbuka puasa, mendengarkan tausiyah dari pemuka agama setempat, dan berbagi untuk anak-anak yatim.

- **Buka Bersama PT PLN (Persero)**

Sebagai bagian dari grup PLN, HP mendukung acara buka puasa bersama 17.000 anak yatim dan dhuafa yang digelar PT PLN (Persero). Acara bertajuk "PLN Berbagi Kebahagiaan Ramadhan 1439 H – Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Dhuafa" ini dipusatkan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018. Sebanyak 3.300 anak yatim dan dhuafa dari 59 yayasan di Jabodetabek dan Banten hadir di JCC. Acara serupa juga diadakan di unit-unit PLN di seluruh Indonesia sepanjang bulan Ramadhan.

- **Ramadhan Safari**

The company has several annual activities in welcoming Ramadhan month. One of them is Safari Ramadhan, which is the activity of Directors and management visiting to regions for sharing information, knowledge, and hearing HP employees aspirations. Safari Ramadhan are also filled with iftar, Islamic speech delivered by local religious leader, and donation to orphans.

- **Iftar with PT PLN (Persero)**

As part of PLN group, HP supported the iftar with 17,000 orphans and underprivileged conducted by PT PLN (Persero). The event titled "PLN Shares the Happiness of Ramadhan 1439 H – Iftar with Orphans and Dhuafa" was centered at Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta on June 6, 2018. A total of 3,300 orphans and underprivileged from 59 foundations in Jabodetabek and Banten were present at JCC. Similar events were also held at PLN units throughout Indonesia on Ramadhan.





# LAPORAN KEUANGAN AUDIT

Audited Financial Statements

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

This page is intentionally left blank

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian dan  
Informasi Tambahan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017**

***PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY***

***Consolidated Financial Statements and  
Supplementary Information  
For the Years Ended  
December 31, 2018 and 2017***

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman/ <u>Pages</u></b>	<b>Table of Contents</b>
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>		<b><i>Directors' Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditors' Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017</b>		<b><i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2018 and 2017</i></b>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>		<b><i>SUPPLEMENTARY INFORMATION</i></b>
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	61	<i>Parent Entity Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	62	<i>Parent Entity Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	63	<i>Parent Entity Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Entitas Induk	64	<i>Parent Entity Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Entitas Induk	65	<i>Notes to the Parent Entity Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY  
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama/ <i>Name</i>  | : Achmad Taufik Haji  |
| Alamat kantor/ <i>Office address</i>  | : Kindo Square Blok A 15-16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101<br>Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan 12760 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/<br><i>Domicile as stated in ID Card</i> | : Jl. Magetan No. 1 Antapani Kota Bandung Jawa Barat  |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i>  | : (021) 79192517  |
| Jabatan/ <i>Position</i>  | : Direktur Utama/ <i>President Director</i>   |
| 2. Nama/ <i>Name</i>  | : Sutrisno Samad  |
| Alamat kantor/ <i>Office address</i>  | : Kindo Square Blok A 15-16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101<br>Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan 12760 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/<br><i>Domicile as stated in ID Card</i> | : Pungkuran No. 369 Kauman Semarang Jawa Tengah   |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i>  | : (021) 79192517  |
| Jabatan/ <i>Position</i>  | : Direktur Keuangan dan SDM/ <i>Director of Finance and HCM</i>                                       |

menyatakan bahwa/*state that:*

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;  | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;</i>   |
| 2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;                                     | 2. <i>The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>          |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;  | 3. a. <i>All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct;</i>  |
| b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak.   | 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiary.</i>   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*The statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 30 April 2019/*April 30, 2019*

 Achmad Taufik Haji Direktur Utama/ <i>President Director</i>	 Sutrisno Samad Direktur Keuangan dan SDM/ <i>Director of Finance and HCM</i>
---	--



# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340  
F +62 21 5140 1350

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

**Nomor/Number : 00485/2.1030/AU.1/03/0499-3/1/IV/2019**

## **Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report**

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/  
*The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors*

### **PT Haleyora Power**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Haleyora Power ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Haleyora Power ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### **Management's responsibility for the consolidated financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### **Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.*



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Haleyora Power dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Haleyora Power dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Haleyora Power (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### Opinion

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Haleyora Power and its subsidiaries as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### Other matters

*Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Haleyora Power and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Haleyora Power (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes on investment in subsidiaries (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates*



## Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00446/2.1030/AU.1/03/0499-3/1/III/2019 bertanggal 29 Maret 2019 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan informasi tambahan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Laporan ini diterbitkan kembali dengan tujuan hanya untuk tujuan analisis tambahan atas laporan keuangan konsolidasian, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

*directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.*

*Prior to this report, we have issued our independent auditors' report No. 00446/2.1030/AU.1/03/0499-3/1/III/2019 dated March 29, 2019 on the consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2018 and 2017 and for the years then ended with an unmodified opinion. With respect to the supplementary information, the Company has reissued its consolidated financial statements as described in Note 29 to the accompanying consolidated financial statements.*

*This report has been reissued solely for additional analysis of the basic consolidated financial statements and is not intended nor permitted to be used for any other purposes.*

**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**



**Saptoto Agustomo**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0499/  
Public Accountant License Number: AP. 0499

Jakarta, 30 April / April 30, 2019

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5	383,545	306,750	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	6	55,569	50,647	Restricted cash in banks
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	7.25	218,482	232,167	Related parties
Pihak ketiga	7	20	42	Third parties
Piutang lain-lain	12	14,344	4,206	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	8	36,615	40,045	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	9	7,290	3,910	Prepaid expenses and advances
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>715,865</b>	<b>637,767</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap	11	30,421	14,059	Property and equipment
Aset tak berwujud		7	263	Intangible assets
Investasi pada entitas asosiasi	10	47,476	42,698	Investment in associate
Piutang lain-lain	12	--	80	Other receivables
Beban tangguhan		581	--	Deferred charges
Aset pajak tangguhan	18	30,556	23,626	Deferred tax assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>109,041</b>	<b>80,726</b>	<b>Total Non-Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>824,906</b>	<b>718,493</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(Continued)**

December 31, 2018 and 2017

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	13.25	1,492	3,283	Related parties
Pihak ketiga	13	18,832	30,512	Third parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak berelasi	15.25	13,343	8,575	Related parties
Pihak ketiga	15	8,686	1,340	Third parties
Utang pajak	16	6,167	9,674	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	14	44,694	35,745	Accrued expenses
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>93,214</b>	<b>89,129</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan kerja	17	118,382	90,667	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain - pihak berelasi	15	--	68	Other payables - related parties
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>118,382</b>	<b>90,735</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>211,596</b>	<b>179,864</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - par value of
Rp1 per saham				Rp1 per share
Modal dasar - 100.000 saham				Authorized - 100,000 shares
Modal ditempatkan dan				Subscribed and fully paid-up
disetor penuh - masing-masing				100,000 shares as of
100.000 saham pada				December 31, 2018
31 Desember 2018 dan 2017	19	100,000	100,000	and 2017, respectively
Penghasilan komprehensif lain		56,836	62,263	Other comprehensive income
Tambahan modal disetor		315	315	Additional paid-in capital
Saldo laba		431,908	355,227	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan				Equity attributable to
kepada pemilik entitas induk		589,059	517,805	owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	20	24,251	20,824	Non-controlling interests
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>613,310</b>	<b>538,629</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>824,906</b>	<b>718,493</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
For the Years Then Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
<b>PENDAPATAN</b>	21	2,073,318	1,696,226	<b>REVENUES</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	22	1,821,999	1,487,314	<b>COST OF REVENUES</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>251,319</b>	<b>208,912</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Penghasilan keuangan		7,475	7,765	Financial income
Bagian laba bersih entitas asosiasi	10	7,071	5,733	Share of profit in associate
Beban umum dan administrasi	23	(51,305)	(49,097)	General and administration expenses
Beban keuangan		(63)	(214)	Financial costs
Beban lain-lain - bersih	24	(19,796)	(13,753)	Other expense - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>194,701</b>	<b>159,346</b>	<b>INCOME BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	18	(56,020)	(36,875)	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>138,681</b>	<b>122,471</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan</b>				<b>Other comprehensive income for the year</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	17	(7,236)	12,051	Remeasurement on defined benefit plans
Beban pajak terkait	18	1,809	(3,013)	Related income tax expenses
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>		<b>(5,427)</b>	<b>9,038</b>	<b>Other comprehensive income for the year after tax</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>133,254</b>	<b>131,509</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		135,254	117,145	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		3,427	5,326	Non-controlling interests
<b>Jumlah</b>		<b>138,681</b>	<b>122,471</b>	<b>Total</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		129,827	126,183	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	20	3,427	5,326	Non-controlling interests
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>133,254</b>	<b>131,509</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years then Ended December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-up capital stock Rp	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid- In Capital Rp	Saldo laba/ Retained earnings Rp	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti manfaat pensi/ Remeasurement on defined benefit plans Rp	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk/ Equity attributable to owner of the parent Rp	Kepentingan non-pengendali/ non-controlling interests Rp	Jumlah ekuitas/ Total equity Rp	
<b>Saldo per 1 Januari 2017</b>	<u>100,000</u>	<u>315</u>	<u>238,082</u>	<u>53,225</u>	<u>391,622</u>	<u>15,922</u>	<u>407,544</u>	<b>Balance as of January 1, 2017</b>
Dividen kepada kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	(424)	(424)	Dividend to non-controlling interest
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	117,145	9,038	126,183	5,326	131,509	Total comprehensive income for the year
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<u>100,000</u>	<u>315</u>	<u>355,227</u>	<u>62,263</u>	<u>517,805</u>	<u>20,824</u>	<u>538,629</u>	<b>Balance as of December 31, 2017</b>
Pembayaran Dividen	--	--	(58,573)	--	(58,573)	--	(58,573)	Dividend Payment
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	135,254	(5,427)	129,827	3,427	133,254	Total comprehensive income for the year
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<u>100,000</u>	<u>315</u>	<u>431,908</u>	<u>56,836</u>	<u>589,059</u>	<u>24,251</u>	<u>613,310</u>	<b>Balance as of December 31, 2018</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these  
consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years then Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In million of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	2,089,974	1,589,864	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok	(340,352)	(293,963)	<i>Cash paid to suppliers</i>
Pembayaran kas kepada karyawan	(1,520,044)	(1,211,949)	<i>Cash paid to employees</i>
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	229,578	83,952	<i>Cash provided by operations</i>
Penerimaan bunga	7,475	7,765	<i>Interest received</i>
Pembayaran bunga	(64)	(214)	<i>Interest expense paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(63,857)	(43,638)	<i>Income tax paid</i>
Pembayaran imbalan pascakerja	(10,976)	(5,420)	<i>Payment of post-employment benefit</i>
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>162,156</b>	<b>42,445</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	2,293	1,128	<i>Dividend receipt from associate</i>
Perolehan aset tetap	(24,159)	(6,795)	<i>Acquisition of property, plant and equipment</i>
Penarikan (penempatan) rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(4,922)	4,069	<i>Withdrawal (placement) of restricted cash in banks</i>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(26,788)</b>	<b>(1,598)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	--	(212)	<i>Dividend paid to non-controlling interest</i>
Pembayaran dividen	(58,573)	--	<i>Dividend payment</i>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(58,573)</b>	<b>(212)</b>	<b>Net cash used in financing activities</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>76,795</b>	<b>40,635</b>	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>306,750</b>	<b>266,115</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>383,545</b>	<b>306,750</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**

December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Haleyora Power ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51226.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan No.72182.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 104 tanggal 27 November 2017 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan kepengurusan Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0196200 tanggal 30 November 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha pembangkitan tenaga listrik dan usaha usaha lain yang terkait dengan ketenagalistrikan, ekspor dan impor peralatan listrik, menyelenggarakan usaha dalam bidang pembangunan dan pemasangan, pemeliharaan peralatan dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beralamat di Kindo Square Blok A 15 - 16, Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.

**b. Susunan pengurus dan informasi lain**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

**1. General**

**a. Establishment and General Information**

*PT Haleyora Power ("the Company") was established based on Deed No. 36 dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-51226.AH.01.01.Year 2011 dated October 21, 2011 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93 dated November 20, 2012, Supplement No.72182.*

*The Company's articles of association have been amended several times, recently by notarial deed No. 104 dated November 27, 2017 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, related to changes of the Company's management composition. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0196200 dated November 30, 2017.*

*According to article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to run electricity generation and other business related to electricity, export and import of electricity tools, business of development and installation, maintenance of equipment and expansion of electricity technology, and business of inspection services and electricity installation testing services.*

*The Company is domiciled in Jakarta and located at Kindo Square Blok A 15 – 16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.*

**b. Management and other information**

*As of December 31, 2018 and 2017, the Company's management consists of the following:*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
Komisaris Utama	Fahmi El Amruzi D	Fahmi El Amruzi D	President Commissioner
Komisaris	Karyawan Aji Purnama Tioria Sianturi	Okto Rinaldi S	Commissioner
Direktur Utama	Achmad Taufik Haji	Achmad Taufik Haji	President Director
Direktur Keuangan	Sutrisno Samad	Sutrisno Samad	Director of Finance
PLT Direktur Operasi	Sinung Triwulandari	Sinung Triwulandari	Task Executor Director of Operation

Berdasarkan akta no.47 tanggal 25 September 2018 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Karyawan Aji dan Purnama Tioria Sianturi diangkat sebagai Komisaris. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0246532 tanggal 26 September 2018.

Based on deed No. 47 dated September 25, 2018 from Muhammad Hanafi, S.H, notary in Jakarta about Statement of Shareholders' Decision, Karyawan Aji and Purnama Tioria Sianturi was appointed as President Director and Sutrisno Samad was appointed as Commissioner. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0246532 dated September 26, 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2018 and 2017, the composition of Audit Committee are as follows:

	2018	2017	
<b>Komite Audit</b>			<b>Audit Committee</b>
Ketua	Fahmi El Amruzi D	Fahmi El Amruzi D	Chairman
Anggota	Purnama Tioria Sianturi	Zulhendri	Member
Anggota	Zulhendri		Member

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak termasuk karyawan yang diperbantukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The total number of employees of the Company and its subsidiary including the employees who are assigned by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") are as follows (unaudited):

	2018	2017	
	<u>Karyawan/Employees</u>	<u>Karyawan/Employees</u>	
Karyawan non-proyek	246	260	Non-project employees
Karyawan proyek	11.637	11.741	Project employees
Karyawan tugas karya dari entitas anak	13.872	11.822	Employees seconded from subsidiaries
Karyawan tugas karya PLN	19	21	Employees seconded from PLN
	<u>25.774</u>	<u>23.844</u>	

**c. Entitas Anak**

**c. Subsidiary**

Entitas anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2018	2017		2018	2017
PT Haleyora Powerindo ("HP")	Bandung	Layanan teknik dan pemeliharaan/ Technical and maintenance service	90%	90%	2002	408.639	339.952

**2. Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018**

**2. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“SFAS”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISFAS”) effective for the year beginning on or after January 1, 2018**

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 2 (Amandemen): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, yang mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.
- PSAK 13 (Amandemen): Properti Investasi tentang pengalihan properti investasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
- PSAK 16 (Amandemen): Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif, tentang klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap.
- PSAK 46 (Amandemen): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tanggahan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, tentang klarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tanggahan atas rugi yang belum terealisasi.
- PSAK 53 (Amandemen): Pembayaran Berbasis Saham, tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK 67 (Amandemen): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, tentang kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan.
- PSAK 69: Agrikultur
- PSAK 111: Akuntansi Wa'd

Berikut ini adalah dampak atas perubahan dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak:

*The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2018, for which early adoption is permitted, namely:*

- *SFAS 2 (Amendment): Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative, which requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.*
- *SFAS 13 (Amendment): Investment Property, regarding transfer of investment property.*
- *SFAS 15 (Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, regarding long term interest in associates and joint ventures.*
- *SFAS 16 (Amendment): Property, Plant and Equipment-Agriculture: Bearer Plants, regarding clarification on biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets.*
- *SFAS 46 (Amendment): Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, regarding clarification on the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses.*
- *SFAS 53 (Amendment): Share-based Payment, regarding classification and measurement of share-based payment transactions.*
- *SFAS 67 (Amendment): Disclosures of Interest in Other Entities, regarding interests in entities classified as held-for-sale except for summarised financial information.*
- *SFAS 69: Agriculture*
- *SFAS 111: Wa'd Accounting*

*The following is the impact of the amendments and improvements of standards and interpretation of standards that are relevant and significant to the consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries:*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"  
Amandemen ini mensyaratkan agar Perusahaan dan Entitas Anak menyediakan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- PSAK 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi tersedia sehingga perbedaan temporer atas kemungkinan laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 dan setelahnya

Standard dan amandemen standar serta interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

- SFAS 2 (Amendment 2016): "Statements of Cash Flows regarding Disclosure Initiative"  
*This Amendment requires the Company and its Subsidiaries to provide disclosures to users of the financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flows or non-cash changes.*

- SFAS 46 (Amendment 2016): "Income Tax regarding Deferred Tax Assets Recognition for Unrealised Loss"

*This amendment clarifies that to determine whether taxable income will be available so that deductible temporary differences can be utilized; the estimate of the possibility of future taxable profit may include the recovery of some of the entity's assets beyond its carrying amount.*

*New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2019 and onwards*

*Standards and amendments to standards and interpretation to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application is permitted:*

- SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination
- SFAS 24 (Amendment 2018): Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement,
- SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost
- SFAS 46 (Improvement 2018): Income Taxes
- SFAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement
- SFAS 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
- SFAS 34: Uncertainty over Income Tax Treatments

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

*Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application is permitted are:*

- *SFAS 15 (Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures*
- *SFAS 62 (Amendment): Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts*
- *SFAS 71: Financial Instruments*
- *SFAS 71 (Amendment): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*
- *SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers*
- *SFAS 73: Leases*

*Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application is permitted are:*

- *SFAS 112: Wakaf Accounting*

*As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and subsidiaries' consolidated financial statements.*

### **3. Kebijakan Akuntansi Penting**

#### **a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK – IAI.

#### **b. Dasar Penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa

### **3. Significant Accounting Policies**

#### **a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")**

*The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS issued by DSAK – IAI.*

#### **b. Basis of Preparation**

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its subsidiary. The measurement basis is the historical cost, except for certain*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**c. Dasar Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

*accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.*

*The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.*

**c. Basis of Consolidation**

*The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiary (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiary. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.*

*The results of subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.*

*When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiary to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.*

*All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.*

*Changes in the Company and its subsidiary interests in subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiary's interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**d. Kombinasi Bisnis**

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

*If the Company loses control over the subsidiary, the Company:*

- a. Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;*
- b. Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c. Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;*
- d. Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value on the date of loss control;*
- e. Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;*
- f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.*

**d. Business Combinations**

*Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiary, liabilities incurred by the Company and its subsidiary to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiary in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.*



Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

*At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.*

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

*Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.*

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

*When the consideration transferred by the Company and its subsidiary in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.*

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi

*The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

**e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
  - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

*accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.*

*When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiary' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.*

*If the initial accounting for a business combination is incompleted by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiary report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleted. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.*

**e. Transactions with Related Parties**

*A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiary (the reporting entity):*

- a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
  - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
  - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
  - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau;
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
  - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
- Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.
- i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
  - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
  - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
  - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
  - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
  - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a), or;*
  - vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and*
  - viii. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

*A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years

then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**f. Aset Keuangan**

**Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan**

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

**i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")**

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai

*Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State Owned Enterprise as shareholder's representative.*

*All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.*

**f. Financial Assets**

**Initial Recognition and Measurement**

*All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.*

**Subsequent Measurement of Financial Assets**

*The Company and its subsidiary' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.*

**i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")**

*Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang  
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
  - pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
  - pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")  
Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu,

*derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.*

*After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.*

- ii. Loans and Receivables  
*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:*
- those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
  - those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
  - those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration*

*After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.*

- iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")  
*On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrument ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

**Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrument keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrument keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan

*shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.*

*The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.*

*Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiary' rights to receive the dividends are established.*

**Effective Interest Method**

*The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.*

*Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.*

**Impairment of Financial Assets**

*Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau hukum yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

*financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.*

*For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.*

*For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:*

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.*
- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

*For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's and its subsidiary's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.*

*For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.*



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

**Penghentian Pengakuan Aset  
Keuangan**

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki

*The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.*

*When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.*

*With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.*

*In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.*

**Derecognition of Financial Assets**

*The Company and its subsidiary derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiary neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar kedua bagian tersebut.

*control the transferred asset, the Company and its subsidiary recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiary retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiary continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.*

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.*

*On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiary retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiary allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.*

#### **Reklasifikasi**

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrument derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

#### **Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

#### **Reclassification**

*The Company and its subsidiary shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiary as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiary may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its subsidiary shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.*

*If, as a result of a change in the Company and its subsidiary' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for-sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.*

#### **Fair Value Measurement**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.*

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

*The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.*

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

*Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:*

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

- i. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- iii. *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

*When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiary use observable market data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiary use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.*

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

*Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiary at the end of the reporting period during of which the change occurred.*

#### **Lindung Nilai**

Dalam bisnis normal Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan treasury tertulis dari manajemen, Perusahaan dan entitas anak menggunakan instrument derivative dan lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

#### **Hedging**

*In the normal course of the Company and its subsidiary' business exposes them to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Company and its subsidiary use derivatives and other hedging instruments. SFAS 55 allows three types of hedging relationships:*

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge;*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektivitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

**Lindung nilai atas arus kas**

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrument lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrument lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar

*The Company and its subsidiary use hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:*

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*
- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

*The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.*

**Cash flow hedge**

*The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognized (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.*

*No adjustment is made to the hedged item.*

*If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.*

*If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Company reclassifies the associated*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

diterapkan, maka Perusahaan mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**h. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan

*gains and losses that were previously recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.*

**g. Financial Liabilities and Equity Instruments**

Classification as liabilities or equity

*Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiary are classified accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.*

Equity instruments

*An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiary after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.*

Financial liabilities

*Financial liabilities are initially recognized at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective interest rate.*

Derecognition of financial liabilities

*The Company and its subsidiary derecognize financial liabilities if, and only if, the Company and its subsidiary obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.*

**h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities**

*The Company and its subsidiary only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the consolidated statement of financial position where they:*

- *currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*

- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**i. Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3f.

**j. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**k. Investasi pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan

- *intend either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

**i. Cash and Cash Equivalents**

*For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.*

*Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivable. Refer to Note 3f for the accounting policy on loans and receivables.*

**j. Prepaid Expenses**

*Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.*

**k. Investment in Associate**

*Associates are all entities over which the Company and its subsidiary have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and its subsidiary investment in associates includes goodwill identified on acquisition.*

*The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiary's share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in*



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014) sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

*other comprehensive income. These postacquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiary' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiary net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiary have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.*

*Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiary and associate are eliminated to the extent of the Company and its subsidiary interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associate have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiary.*

*The Company and its subsidiary determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiary' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 (Revised 2014) to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. jika investasi menjadi entitas anak.
- b. jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- c. ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

**I. Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap berikut:

	<b>Tahun/ Years</b>	
Bangunan	20	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	8	<i>Motor vehicles</i>
Perlengkapan umum	4	<i>General equipment</i>

*The Company and its subsidiary discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:*

- a. if the investment becomes a subsidiary.*
- b. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiary measure the retained interest at fair value.*
- c. When the Company and its subsidiary discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiary account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

*When the Company and its subsidiary transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.*

**I. Property and Equipment**

*Property and equipment held for use in the supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.*

*Depreciation is recognized as a write off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

*The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.*

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

*Land is stated at cost and is not depreciated.*

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

*The costs of maintenance and repairs are charged to consolidated profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or to service an item of property, plant and equipment are recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.*

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

*When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.*

**m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

**m. Impairment of Non-Financial Assets**

*Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.*

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan

*Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or*

tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

*loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.*

**n. Sewa Operasi**

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**n. Operating Leases**

*Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.*

Sebagai lessor

Sewa di mana Perusahaan dan entitas anak tidak mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

As lessor

*Lessee where the Company and its subsidiary does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset ownership are classified as operating leases.*

Sebagai lessee

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

As lessee

*Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.*

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari lessor) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

*Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.*

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

*In the event that lease incentives are received when entering into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.*

**o. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari penyediaan jasa diakui pada saat jasa diberikan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

**p. Imbalan Kerja**

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan and entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian

**o. Revenue and Expense Recognition**

Revenue from services are recognized when the services are delivered.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.

**p. Employee Benefits**

Post-employment Benefits

The Company and its subsidiary established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiary also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiary's policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Long-term Benefits

Long-term benefits are determined using the *Projected Unit Credit* method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiary recognize gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

**q. Provisi**

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Bila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**r. Pajak Penghasilan**

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

*curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.*

*Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the period in which they occur.*

*The long-term employee benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.*

**q. Provisions**

*Provisions are recognized when the Company and its subsidiary have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiary will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.*

*When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.*

**r. Income Tax**

*Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

*Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.*

*For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.*

*Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.*

*Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.*

*A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:*



- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

- a. *the initial recognition of goodwill; or*
- b. *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.*

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

*The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiary expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.*

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan

*Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiary intend to settle*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**s. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan dan entitas anak telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- a. Tanggal SKPP;
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

*their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

**s. Tax Amnesty Assets and Liabilities**

*Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid-in Capital.*

*Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in TAAL.*

*Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.*

*The compensation paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives TAAL.*

*After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant FAS according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.*

*With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company and its subsidiary have disclosed the following in its financial statements:*

- a. The date of TAAL;
- b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with TAAL; and
- c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

**4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan  
Estimasi Akuntansi yang Signifikan**

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

**Imbalan Pascakerja**

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 17.

**4. Critical Accounting Judgments and  
Significant Accounting Estimates**

*In the application of the Company and its subsidiaries accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.*

*The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.*

**Key Sources of Estimation Uncertainty**

*The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:*

**Post-employment Benefits**

*The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiary' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiary' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiary' post-employment benefit liabilities.*

*Assumptions used in the calculation of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 17.*

### Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan dan entitas anak, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari akumulasi rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

### Income tax

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company and its subsidiary, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income to provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

## 5. Kas dan Setara Kas

## 5. Cash and Cash Equivalents

	2018 Rp	2017 Rp	
Kas	958	766	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
Bank Negara Indonesia	233,348	256,316	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	2,273	850	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	1,125	582	Bank Rakyat Indonesia
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin	3,325	30,720	Bank Bukopin
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	16	16	Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat
Subjumlah kas dan bank	<u>241,045</u>	<u>289,250</u>	Subtotal cash on hand and in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
Bank Mandiri	85,000	10,000	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	50,000	7,500	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	7,500	--	Bank Rakyat Indonesia
Subjumlah deposito berjangka	<u>142,500</u>	<u>17,500</u>	Subtotal time deposits
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b><u>383,545</u></b>	<b><u>306,750</u></b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	4,75% - 7,25%	4,75% - 7,25%	Interest rate per annum on time deposits
Jangka waktu	1 - 3 bulan/ months	1 - 3 bulan/ months	Maturity

**6. Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya**      **6. Restricted Cash in Banks**

	2018 Rp	2017 Rp	
<b>Jaminan garansi</b>			<b>Collateral of guarantess</b>
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related party (Note 25)
Bank Negara Indonesia	2,813	1,308	Bank Negara Indonesia
<b>Rekening tabungan bisnis</b>			<b>Business account</b>
Pihak ketiga			Third party
Bank Mandiri	52,388	--	Bank Mandiri
Bank Bukopin	368	49,339	Bank Bukopin
<b>Jumlah</b>	<b>55,569</b>	<b>50,647</b>	<b>Total</b>

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo rekening bank yang dijadikan sebagai jaminan (*cash collateral*) atas bank garansi yang diterbitkan oleh pihak Bank untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan pelanggan. Rekening tabungan bisnis merupakan rekening penyimpanan atas dana untuk pembelian saham pada entitas asosiasi.

*Restricted cash in banks represents bank account balances pledged as collateral (cash collateral) for bank guarantees issued by the Bank to guarantee the implementation of specific work with customers. Business account represents the savings account for share purchase in associate.*

**7. Piutang Usaha**

**7. Trade Receivables**

**a. Berdasarkan langganan**

**a. By debtor**

	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
PLN	177,567	181,377	PLN
PT Indonesia Comnets Plus ("ICON")	15,247	25,856	PT Indonesia Comnets Plus ("ICON")
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")	13,091	9,553	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")
PT Indonesia Power ("IP")	6,788	5,678	PT Indonesia Power ("IP")
PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB")	4,188	3,964	PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB")
PT PLN Batubara ("PLN Batubara")	829	2,105	PT PLN Batubara ("PLN Batubara")
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")	517	2,231	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	134	864	PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLN Tarakan")	--	539	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLN Tarakan")
PT Jambi Prima Coal	121	--	PT Jambi Prima Coal
Pihak ketiga	20	42	Third parties
<b>Jumlah</b>	<b>218,502</b>	<b>232,209</b>	<b>Total</b>

**b. Berdasarkan umur piutang usaha**

**b. By age category of receivables**

	2018 Rp	2017 Rp	
Belum jatuh tempo	186,200	179,104	Not yet due
<b>Lewat jatuh tempo</b>			<b>Past due</b>
1 - 90 hari	25,680	48,135	1 - 90 days
91 - 360 hari	5,248	2,800	91 - 360 days
Lebih dari 360 hari	1,374	2,170	More than 360 days
<b>Jumlah</b>	<b>218,502</b>	<b>232,209</b>	<b>Total</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

*The Company and its subsidiary do not provide allowance for impairment losses due to management believes that all receivables are collectible.*

**8. Pajak Dibayar Dimuka**

**8. Prepaid Taxes**

	2018 Rp	2017 Rp	
Pajak pertambahan nilai	34,275	34,048	Value added tax
Lebih bayar pajak penghasilan badan			Overpayment of corporate income tax
Entitas anak			Subsidiary
2017	2,340	2,340	2017
2016	--	3,657	2016
<b>Jumlah</b>	<b>36,615</b>	<b>40,045</b>	<b>Total</b>

**9. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

**9. Prepaid Expenses and Advance**

	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya dibayar dimuka			Prepaid expenses
Sewa kantor	5,623	2,158	Rent office
Asuransi	885	895	Insurance
Subjumlah	6,508	3,053	Subtotal
Uang muka	782	857	Advances
<b>Jumlah</b>	<b>7,290</b>	<b>3,910</b>	<b>Total</b>

**10. Investasi pada Entitas Asosiasi**

**10. Investment in Associate**

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

*Details of investment in associate is as follows:*

Asosiasi/ Associate	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ commercial operations year	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership	
				2018	2017
EPI	Jakarta	Penyediaan dan Pendistribusian Tenaga Listrik Wilayah Pelabuhan/ Supply and Distribution of Electric Power Port Region	2013	45.00%	45.00%

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

*Changes in investment in associate is as follows:*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Saldo awal tahun	42,698	38,093	<i>Beginning balance</i>
Pembagian dividen	(2,293)	(1,128)	<i>Payment of dividend</i>
Bagian laba bersih	7,071	5,733	<i>Equity in net income</i>
<b>Jumlah</b>	<b>47,476</b>	<b>42,698</b>	<b>Total</b>

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi sebagai berikut:

*Summarized financial information in associate is as follows:*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Jumlah aset	164,453	131,811	<i>Total assets</i>
Jumlah liabilitas	(58,950)	(36,926)	<i>Total liabilities</i>
<b>Aset bersih</b>	<b>105,503</b>	<b>94,885</b>	<b>Net assets</b>
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>159,249</b>	<b>138,674</b>	<b>Total revenues</b>

EPI didirikan untuk penyediaan pasokan listrik dengan layanan yang prima bagi konsumen di wilayah pelabuhan dan/atau kawasan lainnya di Indonesia.

*EPI was established to supply electricity with the best services for consumers in the area of the port and/or other areas in Indonesia.*

**11. Aset Tetap**

**11. Property and Equipment**

	<b>2018</b>				
	<b>1 Januari/ January 1</b>	<b>Penambahan/ Additions</b>	<b>Pengurangan/ Deductions</b>	<b>31 Desember/ December 31</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Tanah	1,785	1,331	--	3,116	<i>Land</i>
Bangunan	1,190	985	--	2,175	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	131	1,471	--	1,602	<i>Motor vehicles</i>
Perlengkapan umum	18,864	20,372	--	39,236	<i>General equipment</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>21,970</b>	<b>24,159</b>	<b>--</b>	<b>46,129</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	357	98	--	455	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	43	114	--	157	<i>Motor vehicles</i>
Perlengkapan umum	7,511	7,585	--	15,096	<i>General equipment</i>
<b>Subjumlah</b>	<b>7,911</b>	<b>7,797</b>	<b>--</b>	<b>15,708</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>14,059</b>			<b>30,421</b>	<b>Net Carrying Value</b>



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017				
	1 Januari/ January 1 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	31 Desember/ December 31 Rp	
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Tanah	1,785	--	--	1,785	Land
Bangunan	1,190	--	--	1,190	Buildings
Kendaraan bermotor	131	--	--	131	Motor vehicles
Perlengkapan umum	12,069	6,795	--	18,864	General equipment
<b>Subjumlah</b>	<b>15,175</b>	<b>6,795</b>	<b>--</b>	<b>21,970</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	298	59	--	357	Buildings
Kendaraan bermotor	27	16	--	43	Motor vehicles
Perlengkapan umum	3,644	3,867	--	7,511	General equipment
<b>Subjumlah</b>	<b>3,969</b>	<b>3,942</b>	<b>--</b>	<b>7,911</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>11,206</b>			<b>14,059</b>	<b>Net Carrying Value</b>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi sebesar Rp7.797 pada 2018 dan Rp3.942 pada 2017.

*Depreciation expense was allocated as general and administration expense amounted to Rp7,797 in 2018 and Rp3,942 in 2017.*

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian karena kebakaran dan lainnya.

*The Company and its subsidiary do not insure their assets against losses due to fire and other risks.*

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

*Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment of property and equipment at the reporting date.*

**12. Piutang Lain-lain**

**12. Other Receivables**

	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
EPI	34	12	EPI
Lain-lain	166	14	Others
Pihak ketiga			Third parties
PT Asuransi Jiwa Bumiputera Koperasi Jasa Keuangan	3,973	3,973	PT Asuransi Jiwa Bumiputera Koperasi Jasa Keuangan
Haleyora Powerindo	81	161	Haleyora Powerindo
Karyawan	--	126	Employees
Lain-lain	10,090	--	Others
<b>Jumlah</b>	<b>14,344</b>	<b>4,286</b>	<b>Total</b>
Dikurangi bagian tidak lancar	--	80	Less non-current portion
<b>Bagian lancar</b>	<b>14,344</b>	<b>4,206</b>	<b>Current portion</b>

Piutang Lain – lain pihak ketiga sebesar Rp9.615 juta merupakan piutang atas restitusi PPN yang telah dibayarkan di tanggal 14 Januari 2019.

*Other Receivables at Third Parties amounting to Rp9,615 million is Receivables for VAT restitution that already paid at January 14, 2019.*

**13. Utang Usaha**

Akun ini merupakan utang usaha sehubungan dengan pembelian barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Pihak berelasi (Catatan 25)		
PLN	1,355	3,195
ICON	63	88
Karyawan	74	--
Pihak ketiga	18,832	30,512
<b>Jumlah</b>	<b>20,324</b>	<b>33,795</b>

**13. Trade Payables**

*This accounts represents payables in relation to purchase of goods and services to support the operations of the Company and its subsidiary as follows:*

*Related parties (Note 25)*  
*PLN*  
*ICON*  
*Employees*  
*Third Parties*  
**Total**

**14. Biaya Masih Harus Dibayar**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Bonus dan insentif kerja	39,009	31,380
Gaji dan tunjangan	4,601	2,820
Lainnya	1,084	1,545
<b>Jumlah</b>	<b>44,694</b>	<b>35,745</b>

**14. Accrued Expenses**

*Bonus and incentive*  
*Salaries and allowances*  
*Others*  
**Total**

**15. Utang Lain-lain**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Pihak berelasi (Catatan 25)		
DPLK - Bank Negara Indonesia	12,884	4,356
Dana Pensiun PLN	22	45
PLN Batam	15	15
PLN	7	565
BPJS Ketenagakerjaan	--	3,316
Lain-lain	415	346
Pihak ketiga	8,686	1,340
<b>Jumlah</b>	<b>22,029</b>	<b>9,983</b>
Dikurangi bagian jangka panjang		
Pihak berelasi	--	68
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>22,029</b>	<b>9,915</b>

**15. Other Payables**

*Related parties (Note 25)*  
*DPLK - Bank Negara Indonesia*  
*Dana Pensiun PLN*  
*PLN Batam*  
*PLN*  
*BPJS Ketenagakerjaan*  
*Others*  
*Third parties*  
**Total**

*Less non-current portion*  
*Related parties*  
**Current portion**

**16. Utang Pajak**

**16. Taxes Payable**

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp	
Pajak Penghasilan:			<i>Income Taxes:</i>
Pasal 4 (2)	59	59	<i>Article 4 (2)</i>
Pasal 21	474	1,426	<i>Article 21</i>
Pasal 23	299	94	<i>Article 23</i>
Pasal 25	1,635	2,099	<i>Article 25</i>
Pasal 29 (Catatan 18)	3,700	5,987	<i>Article 29 (Note 18)</i>
Pajak pertambahan nilai	--	9	<i>Value added tax</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>6,167</u></b>	<b><u>9,674</u></b>	<b><i>Total</i></b>

**17. Liabilitas Imbalan Kerja**

**17. Employee Benefits Liabilities**

Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan pascakerja tanpa pendanaan berupa uang pesangon kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

*The Company and its subsidiary provide unfunded post-employment benefit to their employees in accordance with the Company's regulation which is based on Labour Law No. 13/2003.*

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan dan entitas anak mencatat penyisihan imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan masing-masing oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah dan PT Quattro Asia Consulting dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

*On December 31, 2018 and 2017, the Company and its subsidiary recorded a provision for post-employment benefits based on an independent actuarial calculation performed by PT Binaputera Jaga Hikmah and PT Quattro Asia Consulting, respectively, using the Projected Unit Credit method with the following assumptions:*

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Tabel mortalita	CSO 58	CSO 58	<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	<i>Normal retirement age</i>
Tingkat diskonto per tahun	8,76%	7,22%	<i>Discount rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun			<i>Salary increase rate per annum</i>
Pegawai non-proyek	7,20%	7,20%	<i>Non-project employee</i>
Pegawai proyek	9,76%	9,76%	<i>Project employee</i>

Kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Post-employment benefit obligations recognized in the statement of financial position are as follows:*

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp	
Nilai kini dari kewajiban yang tidak didanai	<b><u>118,382</u></b>	<b><u>90,667</u></b>	<i>Present value of unfunded obligation</i>

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

*Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Pada awal tahun	90,667	78,411	<i>At beginning of year</i>
Biaya jasa kini	25,107	31,034	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	6,348	6,312	<i>Interest expense</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurement:</i>
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi aktuari	7,236	(12,050)	<i>Gain from changes in actuarial assumptions</i>
Pembayaran imbalan	(8,195)	(5,420)	<i>Benefit and contributions paid</i>
Pembayaran iuran	(2,781)	(7,620)	<i>Paid contribution</i>
<b>Pada akhir tahun</b>	<b>118,382</b>	<b>90,667</b>	<b><i>At the end of year</i></b>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

*The principal actuarial assumptions used were as follows:*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>%</b>	<b>%</b>	
Tingkat diskonto	8.76%	7.22%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.20%	<i>Salary increase rate per annum</i>

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

*The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal assumption is as follows:*

	<b>Perubahan asumsi/ Change in assumption</b>	<b>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</b>	<b>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</b>	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ <i>Decrease by</i> 14.83%	Kenaikan sebesar/ <i>Increase by</i> 21.40%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ <i>Increase by</i> 20.64%	Penurunan sebesar/ <i>Decrease by</i> 14.67%	<i>Salary increase rate</i>

Analisis sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Pada praktiknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi dan perubahan-perubahan dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan. Ketika melakukan perhitungan sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti ke asumsi aktuarial yang signifikan, metode yang sama (nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang dihitung menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti saat menghitung kewajiban pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan.

*The above sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and the changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculation with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.*

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

*Expected maturity analysis of undiscounted pension and post-employment medical benefits is as follow:*

	<b>Kurang dari 1 tahun/ Less than a year Rp</b>	<b>1 sampai 2 tahun/ Between 1- 2 years Rp</b>	<b>2 sampai 5 tahun/ Between 2- 5 years Rp</b>	<b>Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years Rp</b>	<b>Jumlah/ Total Rp</b>	
Imbalan pensiun	7,864	4,044	13,545	158,970	184,423	<i>Pension benefits</i>

### 18. Pajak Penghasilan

### 18. Income Tax

Manfaat (beban) pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

*Tax benefit (expense) of the Company and its subsidiary consists of the following:*

	<b>2018 Rp</b>	<b>2017 Rp</b>	
Beban pajak kini	61,141	49,385	<i>Current tax expenses</i>
Manfaat pajak tangguhan	(5,121)	(12,510)	<i>Deferred tax income</i>
<b>Jumlah manfaat pajak</b>	<b>56,020</b>	<b>36,875</b>	<b><i>Total tax benefit</i></b>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:*

	<b>2018 Rp</b>	<b>2017 Rp</b>	
Laba sebelum pajak laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	194,701	159,346	<i>Income before tax per consolidated statements of profit or loss and comprehensive income</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	52,685	41,074	<i>Income before tax attributable to subsidiary</i>
Laba sebelum pajak Perusahaan	142,016	118,272	<i>Profit before tax - The Company</i>
Koreksi fiskal:			<i>Fiscal correction:</i>
Imbalan kerja	50	76	<i>Employee benefits</i>
Beban/(penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			<i>Non-deductible expense/ (non-taxable income):</i>
Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan	40,577	28,167	<i>Employees' welfare and tax allowance</i>
Bantuan dan sumbangan	20	68	<i>Assistance and donation</i>
Beban penyusutan	15	--	<i>Depreciation expense</i>
Pembayaran manfaat pesangon	(1,772)	--	<i>Payment of severance benefits</i>
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(7,071)	(5,733)	<i>Equity in net income of associate</i>
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(5,565)	(5,156)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Pendapatan dividen dari entitas anak	--	3,816	<i>Dividend income from subsidiaries</i>
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	4,114	2,347	<i>Other non deductible expense</i>
<b>Jumlah</b>	<b>172,384</b>	<b>141,857</b>	<b><i>Total</i></b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perhitungan beban dan pajak penghasilan lebih bayar adalah sebagai berikut:

Current tax expense and income tax overpayment are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Beban pajak kini			Current tax expenses
Perusahaan	43,096	35,464	The Company
Entitas anak	18,045	13,921	Subsidiary
Subjumlah	<u>61,141</u>	<u>49,385</u>	Subtotal
Pembayaran pajak di muka			Prepayment of taxes
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan pasal 23	22,578	15,840	Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 25	17,086	13,637	Income tax article 25
Entitas anak	17,777	16,261	Subsidiary
Subjumlah	<u>57,441</u>	<u>45,738</u>	Subtotal
Pajak penghasilan kurang bayar	3,700	3,647	Income tax under payment
Terdiri dari:			Consist of:
Utang Pajak Kini			Current tax payable
Perusahaan	3,433	5,987	The Company
Entitas anak	267	--	Subsidiary
Jumlah utang pajak kini (Catatan 16)	<u>3,700</u>	<u>5,987</u>	Total current tax payables (Note 16)
Pajak penghasilan lebih bayar			Income tax overpayment
Perusahaan	--	--	The Company
Entitas anak	--	(2,340)	Subsidiary
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	<u>--</u>	<u>(2,340)</u>	Total income tax overpayment

**Pajak tangguhan**

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

**Deferred tax**

The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 January/ January 1, 2018 Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to income for the period Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax asset</b>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	22,666	5,121	1,809	29,596	Employment benefits obligations
Penyusutan Aset Tetap	960	--	--	960	Depreciation of fixed assets
<b>Jumlah</b>	<u>23,626</u>	<u>5,121</u>	<u>1,809</u>	<u>30,556</u>	<b>Total</b>
	1 January/ January 1, 2017 Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to income for the period Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax asset</b>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14,609	11,070	(3,013)	22,666	Employment benefits obligations
Penyusutan Aset Tetap	(480)	1,440	--	960	Depreciation of fixed assets
<b>Jumlah</b>	<u>14,129</u>	<u>12,510</u>	<u>(3,013)</u>	<u>23,626</u>	<b>Total</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	194,701	159,346	Income before tax per consolidated statements of comprehensive income
Beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku	48,675	39,837	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas Beban/(penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect on Non-deductible expense/ (non-taxable income):
Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan	11,046	8,062	Employees' welfare and tax allowance
Beban pajak	--	450	Tax Expense
Pendapatan dividen dari entitas anak	--	954	Dividend income from subsidiaries
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(1,869)	(1,941)	Interest income subject to final tax
Manfaat aset pajak yang tidak diakui	--	(5,108)	Unrecognized deferred tax income
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	(1,832)	(5,379)	Other non deductible expense
<b>Jumlah</b>	<b>56,020</b>	<b>36,875</b>	<b>Total</b>

**Surat Ketetapan Pajak**

Selama tahun 2018, Perusahaan menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN dan Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN untuk tahun fiskal 2013, 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp136, Rp2.300, Rp1.645 dan Rp451.

Selama tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN dan Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN untuk tahun fiskal 2016 masing-masing sebesar Rp13 dan Rp2.

Perusahaan juga menerima berbagai STP PPH 21 untuk tahun fiskal 2017-2018 dengan nilai total sebesar Rp15 dan STP PPh Badan tahun fiskal 2017 dengan nilai total sebesar Rp18.

**Tax Assessments**

In 2018, the Company has received Tax Assessment Letter Less Payment ("SKPKB") in relation to VAT and Tax Collection Letter ("STP") VAT for 2013, 2014, 2015 and 2016 fiscal year amounted to Rp136, Rp2,300, Rp1,645 and Rp451, respectively.

In 2017, the Company has received Tax Assessment Letter Less Payment ("SKPKB") in relation to VAT and Tax Collection Letter ("STP") VAT for 2016 fiscal year amounted to Rp13 and Rp2, respectively.

Moreover, the Company also received several STP income tax article 21 for 2017-2018 fiscal year amounting to Rp15 and STP for the 2017 fiscal year in relation to corporate income tax amounting to Rp18.

**19. Modal Saham**

**19. Capital Stock**

	2018 dan/ and 2017			
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital Rp	
Nama pemegang saham PLN	99,999	99.99%	99,999	Name of stockholders PLN
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	1	0.01%	1	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN
<b>Jumlah</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,000</b>	<b>Total</b>



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak untuk membawa satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.

*The shares issued and fully paid are ordinary shares which entitle the holder to carry one vote per share and to participate in dividends.*

Berdasarkan keputusan rapat pemegang saham secara sirkular sebagaimana tercantum dalam akta No. 27 tanggal 30 Agustus 2013 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp75.000. Seluruh penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh PLN.

*Based on Deed of Circular Decision of shareholder No. 27 dated August 30, 2013 of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders are agreed to increase issued and fully paid in capital amounting to Rp75,000. All of the paid-in capital was paid by PLN.*

Berdasarkan akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp100.000 terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 per saham dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000 yang terbagi atas 25.000 saham.

*Based on Deed No. 36 dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, the Company's authorised capital stock amounted to Rp100,000 consisting of 100,000 shares with par value of Rp1 per share and the subscribed and paid-up capital amounted to Rp25,000 which consists of 25,000 shares.*

Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang tercantum dalam akta No. 34 tanggal 16 Mei 2018 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 58.573 juta dan telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2018 dan 22 November 2018 kepada PT PLN (Persero) dan YPK PLN.

*Based on the Company's Annual General Stockholders Meeting as stated in notarial deed No. 34 dated May 16, 2018 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved the distribution of dividends from outstanding balance of retained earnings as of December 31, 2017 amounting to Rp 58,573 million which was paid on November 1, 2018 and November 22, 2018 to PT PLN (Persero) and YPK PLN.*

**20. Kepentingan Non-pengendali**

**20. Non Controlling Interests**

	2018 Rp	2017 Rp	
<b>a. Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak</b>			<b>a. Non-controlling interests in net assets of a subsidiary</b>
HPI	24,251	20,824	HPI
<b>b. Kepentingan non-pengendali atas laba bersih entitas anak</b>			<b>b. Non-controlling interests in net income of a subsidiary</b>
HPI	3,427	5,326	HPI

**21. Pendapatan**

**21. Revenues**

**a. Berdasarkan jenis pekerjaan**

**a. By type of works**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Operasi dan pemeliharaan			<i>Operation and maintenance services</i>
Pelayanan jasa teknik	1,321,188	1,086,278	<i>Technical services</i>
Pelayanan jasa non-teknik	463,358	208,047	<i>Non-technical services</i>
Lainnya	288,772	401,901	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>2,073,318</b>	<b>1,696,226</b>	<b>Total</b>

**b. Berdasarkan pelanggan**

**b. By customers**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Pihak berelasi (Catatan 25)			<i>Related parties (Note 25)</i>
PLN dan anak perusahaan	2,069,433	1,692,685	<i>PLN and subsidiaries</i>
PT Cogindo Daya Bersama	3,475	2,546	<i>PT Cogindo Daya Bersama</i>
PT Jambi Prima Coal	410	--	<i>PT Jambi Prima Coal</i>
EPI	--	757	<i>EPI</i>
Pihak ketiga	--	238	<i>Third parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b>2,073,318</b>	<b>1,696,226</b>	<b>Total</b>

Pelayanan jasa teknik meliputi penertiban penggunaan tenaga listrik, operator dan teknisi pemeliharaan pembangkit, dan layanan teknik lainnya. Pelayanan jasa non-teknik meliputi tenaga administrasi, pengemudi, satpam, layanan kebersihan dan layanan non-teknik lainnya.

*Technical services include monitoring the use of electric power, plant operators and maintenance technicians, and other technical services. Non-technical services include administrative personnel driver, security, janitorial services and other non technical services.*

**22. Beban Pokok Pendapatan**

**22. Cost of Revenue**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Jasa tenaga kerja langsung	1,498,983	1,185,362	<i>Direct labour</i>
Kendaraan operasional	114,473	123,485	<i>Operational vehicles</i>
Pemakaian alat kerja dan material	57,775	62,772	<i>Labour and material usage tool</i>
Imbalan kerja (Catatan 17)	31,386	37,032	<i>Employee benefits (Note 17)</i>
Denda operasional	24,494	14,265	<i>Operational penalty</i>
Subkontraktor	19,256	7,076	<i>Subcontractor</i>
Pemeliharaan dan penunjang operasional	3,082	8,235	<i>Maintenance and overhead</i>
Lainnya	72,550	49,087	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1,821,999</b>	<b>1,487,314</b>	<b>Total</b>

**23. Beban Umum dan Administrasi**

**23. General and Administration Expenses**

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp	
Kepegawaian	21,142	26,588	Personnel
Honorarium	16,358	13,351	Honorarium
Pemeliharaan	5,151	3,679	Maintenance
Imbalan kerja (Catatan 17)	68	314	Employee benefits (Note 17)
Penyusutan	7,797	3,942	Depreciation
Lainnya	789	1,223	Others
<b>Jumlah</b>	<b><u>51,305</u></b>	<b><u>49,097</u></b>	<b>Total</b>

**24. Beban Lain-lain – Bersih**

**24. Other Expenses – Net**

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp	
Denda dan biaya terkait	162	(6,338)	Penalty and related expenses
Pendapatan reward	132	--	Reward income
Pendapatan klaim asuransi	1	3,412	Insurance claim income
Beban pajak	(11,291)	(3,057)	Tax expenses
Sumbangan pengembangan masyarakat	(20)	(67)	Community development donation
Beban STP	(18)	(89)	STP expenses
Lainnya	(8,468)	(7,614)	Others
<b>Jumlah</b>	<b><u>(19,796)</u></b>	<b><u>(13,753)</u></b>	<b>Total</b>

**25. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi**

**25. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties**

**Sifat Hubungan Berelasi**

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").
- PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN merupakan pemegang saham Perusahaan.
- EPI merupakan entitas asosiasi Perusahaan.
- IP, PJB, PLN Batam, ICON, PLNE, PLN Batubara dan PLN Tarakan merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

**Transaksi Pihak Berelasi**

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

**Nature of Related Parties**

- Government of the Republic of Indonesia, the stockholder of PLN and State-Owned Enterprises ("SOE").
- PLN and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN are the stockholders of the Company.
- EPI is the Company's associate.
- IP, PJB, PLN Batam, ICON, PLNE, PLN Batubara and PLN Tarakan are companies which have the same principal stockholder and or management as the Company.
- Board of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company and its subsidiary.

**Transactions with Related Parties**

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

<b>Pihak-pihak Berelasi/ Related parties</b>	<b>Sifat hubungan/ Nature of relationship</b>	<b>Sifat Transaksi/ Nature of transaction</b>
PLN	Pemegang saham Perusahaan/ <i>Ultimate shareholders</i>	Piutang usaha, utang usaha, piutang dan utang lain-lain dan pendapatan/ <i>Trade receivable, trade payable, other receivable and payable and revenue</i>
Bank Negara Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ <i>SOE Owned by Minister of Finance</i>	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank</i>
Bank Mandiri	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ <i>SOE Owned by Minister of Finance</i>	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka <i>Placement of cash in bank and time deposit</i>
Bank Rakyat Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ <i>SOE Owned by Minister of Finance</i>	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank</i>
BPJS	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ <i>SOE Owned by Minister of Finance</i>	Utang lain-lain/ <i>Other payable</i>
PLN Batam	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha, utang lain-lain dan pendapatan/ <i>Trade receivable, other payable dan revenue</i>
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLN Tarakan")	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivable and revenue</i>
PT Indonesia Comnet Plus	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha, utang lain-lain dan pendapatan/ <i>Trade receivable, other payable dan revenue</i>
PT Indonesia Power	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivable and revenue</i>
PT Pembangkitan Jawa Bali	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivable and revenue</i>
PT PLN Batubara	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivable and revenue</i>
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivable and revenue</i>
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Bank Negara Indonesia ("DPLK BNI")	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ <i>SOE Owned by Minister of Finance</i>	Utang lain-lain/ <i>Other payable</i>
Dana Pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ <i>Post-employment benefit plan</i>	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti dan utang lain-lain/ <i>Payment of defined benefit program contributions and other payable</i>
PT Cogindo Daya Bersama	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan/ <i>Revenue</i>
PT Jambi Prima Coal	Perusahaan Sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan/ <i>Revenue</i>

**Transaksi-transaksi pihak berelasi**

**Transactions with related parties**

	2018		2017		
	Rp	%*)	Rp	%*)	
Kas dan setara kas					Cash and cash equivalents
Bank Negara Indonesia	283,348	34.35	256,316	35.67	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	87,273	10.58	10,850	1.51	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	8,625	1.05	8,082	1.12	Bank Rakyat Indonesia
Subjumlah	<b>379,246</b>	<b>45.98</b>	<b>275,248</b>	<b>38.30</b>	Subtotal
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya					Restricted cash in bank
Bank Mandiri	52,388	6.35	--	0.00	
Bank Negara Indonesia	2,813	0.34	1,308	0.18	Bank Negara Indonesia
Jumlah	<b>55,201</b>	<b>6.69</b>	<b>1,308</b>	<b>0.18</b>	Total
Piutang usaha					Trade receivables
PLN	177,567	21.53	181,377	25.24	PLN
ICON	15,247	1.85	25,856	3.60	ICON
PLN Batam	13,091	1.59	9,553	1.33	PLN Batam
IP	6,788	0.82	5,678	0.79	IP
PJB	4,188	0.51	3,964	0.55	PJB
PLNE	829	0.10	2,231	0.31	PLNE
PLN Batubara	517	0.06	2,105	0.29	PLN Batubara
EPI	134	0.02	864	0.12	EPI
PT Jambi Prima Coal	121	0.01	--	0.00	PT Jambi Prima Coal
PLN Tarakan	--	0.00	539	0.08	
Subjumlah	<b>218,482</b>	<b>26.49</b>	<b>232,167</b>	<b>32.31</b>	Subtotal

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018		2017		
	Rp	%)	Rp	%)	
Piutang lain-lain					Other receivables
EPI	34	0.00	12	0.00	EPI
PLN	--	0.00	--	0.00	PLN
Lain-lain	166	0.02	14	0.00	Others
Subjumlah	<b>200</b>	<b>0.02</b>	<b>26</b>	<b>0.00</b>	Subtotal
Utang usaha					Trade payables
PLN	1,355	0.64	3,195	1.78	PLN
ICON	63	0.03	88	0.05	ICON
Subjumlah	<b>1,418</b>	<b>1.83</b>	<b>3,283</b>	<b>1.83</b>	Subtotal
Utang lain-lain					Other payables
DPLK - BNI	12,884	6.09	4,356	2.42	DPLK - BNI
BPJS Ketenagakerjaan	22	0.01	3,316	1.84	BPJS Ketenagakerjaan
PLN	15	0.01	565	0.31	PLN
Dana Pensiun PLN	7	0.00	45	0.03	Dana Pensiun PLN
PLN Batam	--	0.00	15	0.01	PLN Batam
Lain-lain	415	0.20	346	0.19	Others
Subjumlah	<b>13,343</b>	<b>6.30</b>	<b>8,643</b>	<b>4.80</b>	Subtotal
Pendapatan					Revenue
PLN	1,867,261	90.06	1,507,627	88.88	PLN
PLN Batam	67,324	3.25	64,300	3.79	PLN Batam
ICON	68,891	3.32	55,702	3.28	ICON
IP	31,613	1.52	24,860	1.47	IP
PJB	17,663	0.85	19,468	1.15	PJB
PLN Batubara	8,781	0.42	7,612	0.45	PLN Batubara
PLNE	5,755	0.28	6,635	0.39	PLNE
PLN Tarakan	2,145	0.10	6,481	0.38	PLN Tarakan
PT Cogindo Daya Bersama	3,475	0.17	2,546	0.15	PT Cogindo Daya Bersama
PT Jambi Prima Coal	410	0.02	--	0.00	PT Jambi Prima Coal
EPI	--	0.00	757	0.04	EPI
Subjumlah	<b>2,073,318</b>	<b>99.99</b>	<b>1,695,988</b>	<b>99.98</b>	Subtotal

\*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan yang bersangkutan

\*) Percentage to related total assets/ liabilities/ revenue

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa gaji, fasilitas, tunjangan, dan tantiem masing-masing sebesar Rp9.654 dan Rp11.126.

On December 31, 2018 and 2017, the Company provided compensation to its Commissioners and Directors, which includes salaries, facilities, allowances, and bonus amounting to Rp9,654 and Rp11,126, respectively.

## 26. Ikatan dan Kontijensi

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan dan entitas anak memiliki komitmen terhadap sewa peralatan dan kendaraan dengan nilai total sebesar Rp105.738 and Rp89.700.

## 26. Commitments and Contingencies

As of December 31, 2018 and 2017, the Company and its subsidiary have total commitments for rental equipment and vehicle with the total amount of Rp105,738 and Rp89,700, respectively.

**27. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko  
Keuangan dan Risiko Modal**

**27. Financial Instruments, Financial Risk and  
Capital Risk Management**

**a. Kategori dan klasifikasi instrumen  
keuangan**

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

**a. Categories and classes of financial  
instruments**

The following table discloses the details of the Company and its subsidiary's financial instruments based on financial instruments classification:

2018			
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instruments classification</i>			
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ <i>Total financial asset and liabilities</i>	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial assets</b>
<b>Aset keuangan lancar</b>			<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	383,545	--	383,545
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	55,569	--	55,569
Piutang usaha			
Pihak berelasi	218,482	--	218,482
Pihak ketiga	20	--	20
Piutang lain-lain	14,344	--	14,344
<b>Jumlah aset keuangan lancar</b>	<b>671,960</b>	<b>--</b>	<b>671,960</b>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>671,960</b>	<b>--</b>	<b>671,960</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<b>Liabilitas keuangan jangka pendek</b>			<b>Current financial liabilities</b>
Utang usaha			
Pihak berelasi	--	1,492	1,492
Pihak ketiga	--	18,832	18,832
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	--	13,343	13,343
Pihak ketiga	--	8,686	8,686
Biaya masih harus dibayar	--	44,694	44,694
<b>Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek</b>	<b>--</b>	<b>87,047</b>	<b>87,047</b>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>--</b>	<b>87,047</b>	<b>87,047</b>
2017			
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instruments classification</i>			
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ <i>Total financial asset and liabilities</i>	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial assets</b>
<b>Aset keuangan lancar</b>			<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	306,750	--	306,750
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	50,647	--	50,647
Piutang usaha			
Pihak berelasi	232,167	--	232,167
Pihak ketiga	42	--	42
Piutang lain-lain	4,206	--	4,206
<b>Jumlah aset keuangan lancar</b>	<b>593,812</b>	<b>--</b>	<b>593,812</b>
<b>Aset keuangan tidak lancar</b>			<b>Non-current assets</b>
Piutang lain-lain	80	--	80
<b>Jumlah aset keuangan tidak lancar</b>	<b>80</b>	<b>--</b>	<b>80</b>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>593,892</b>	<b>--</b>	<b>593,892</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<b>Liabilitas keuangan jangka pendek</b>			<b>Current financial liabilities</b>
Utang usaha			
Pihak berelasi	--	1,492	1,492
Pihak ketiga	--	18,832	18,832
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	--	13,343	13,343
Pihak ketiga	--	8,686	8,686
Biaya masih harus dibayar	--	44,694	44,694
<b>Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek</b>	<b>--</b>	<b>87,047</b>	<b>87,047</b>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>--</b>	<b>87,047</b>	<b>87,047</b>

2017			
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instruments classification</i>			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total <i>financial asset and liabilities</i>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<b>Liabilitas keuangan jangka pendek</b>			<b>Current financial liabilities</b>
Utang usaha			<i>Trade payables</i>
Pihak berelasi	--	3,283	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	--	30,512	<i>Third parties</i>
Utang lain-lain			<i>Other payables</i>
Pihak berelasi	--	8,575	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	--	1,340	<i>Third parties</i>
Biaya masih harus dibayar	--	35,745	<i>Accrued expenses</i>
<b>Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek</b>	<b>--</b>	<b>79,455</b>	<b>Total current financial liabilities</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>			<b>Non-current liabilities</b>
Utang lain-lain	--	68	<i>Other payables</i>
<b>Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang</b>	<b>--</b>	<b>68</b>	<b>Total non-current liabilities</b>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>--</b>	<b>79,523</b>	<b>Total financial liabilities</b>

**b. Manajemen risiko modal**

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 19), tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

**b. Capital risk management**

*The Company and its subsidiary manages capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consist of equity shareholders that consist of capital stock (Note 19), additional paid-in capital and retained earnings.*

*Directors of the Company and its subsidiary periodically review the Company capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.*

*The Company and its subsidiaries seeks to minimize the cost of capital, in order to maximize their value. Therefore, the Company and its subsidiary policy to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.*

**c. Financial risk management objectives and policies**

*The Company and its subsidiary overall financial risk management and policies is to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to financial risk, which are market risk (including interest rate risk), credit risk and liquidity risks. The Company and its subsidiary operate within the defined policy that are approved by the Directors.*



Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Perusahaan dan entitas anak telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Operasional Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

*In performing the risk management, the Company and its subsidiary have established a guidance in the form of Risk Management Operational Manual. This manual provides guidance to managed harmonization between business operational function and financial risk management.*

Risiko keuangan utama Perusahaan dan entitas anak adalah pada risiko pasar (termasuk risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan dan entitas anak menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

*The main financial risks of the Company and its subsidiary are market risk (including interest rate risk) credit risk and liquidity risk. The management evaluate and established policies for managing each of these risks. The Company and its subsidiary applies the financial risk management policies to minimize the impact of the unpredictability of financial risk on the Company and its subsidiary financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:*

**i. Manajemen risiko tingkat suku bunga**

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko arus kas tingkat suku bunga. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

**i. Interest rate risk management**

*The Company and its subsidiary have transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rate are exposed to interest rate risk. The Company and its subsidiary manage the risk by maintaining the appropriate fixed and floating rate financial instruments.*

Perusahaan dan entitas anak tidak mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga tetap dan yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar melalui laba rugi atau dimiliki untuk dijual, sehingga eksposur atas risiko tingkat suku bunga tidak timbul untuk instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga tetap dan yang tidak dikenakan bunga karena perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki dampak terhadap laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

*The Company and its subsidiary do not classify any fixed rate and non-interest bearing financial instruments as at fair value through profit or loss or available-for-sale, as such exposure to interest rate risk does not arise for fixed rate and non-interest bearing financial instruments since a change in interest rate would not affect profit or loss and other comprehensive income.*

**Profil suku bunga**

Profil tingkat suku bunga Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga atas aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

**Interest rate profile**

*The interest rate profile of the Company and its subsidiary's financial assets and liabilities is as follows:*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
31 Desember 2018 dan 2017  
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**  
December 31, 2018 and 2017  
And For The Years  
then Ended  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018				
	Tingkat bunga Mengambang/ Floating rate Rp	Tingkat bunga tetap/Fixed rate Rp	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing Rp	Jumlah/ Total Rp	
<b>Aset keuangan lancar</b>					
Kas dan setara kas	382,587	--	958	383,545	<b>Current financial assets</b> Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	55,569	--	--	55,569	Restricted cash in banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak berelasi	--	--	218,482	218,482	Related parties
Pihak ketiga	--	--	20	20	Third parties
Piutang lain-lain	--	--	14,344	14,344	Other receivables
<b>Jumlah</b>	<b>438,156</b>	<b>--</b>	<b>233,804</b>	<b>671,960</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan lancar</b>					
Utang usaha					<b>Current financial liabilities</b> Trade payables
Pihak berelasi	--	--	1,492	1,492	Related parties
Pihak ketiga	--	--	18,832	18,832	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	--	--	13,343	13,343	Related parties
Pihak ketiga	--	--	8,686	8,686	Third parties
Biaya masih harus dibayar	--	--	44,694	44,694	Accrued expense
<b>Jumlah</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>87,047</b>	<b>87,047</b>	<b>Total</b>
<b>2017</b>					
	Tingkat bunga Mengambang/ Floating rate Rp	Tingkat bunga tetap/Fixed rate Rp	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing Rp	Jumlah/ Total Rp	
<b>Aset keuangan lancar</b>					
kas dan setara kas	305,984	--	766	306,750	<b>Current financial assets</b> Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	50,647	--	--	50,647	Restricted cash in banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak berelasi	--	--	232,167	232,167	Related parties
Pihak ketiga	--	--	42	42	Third parties
Piutang lain-lain	--	--	4,206	4,206	Other receivables
<b>Aset keuangan tidak lancar</b>					
Piutang lain-lain	--	--	80	80	<b>Non-current financial assets</b> Other receivables
<b>Jumlah</b>	<b>356,631</b>	<b>--</b>	<b>237,261</b>	<b>593,892</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan lancar</b>					
Utang usaha					<b>Current financial liabilities</b> Trade payables
Pihak berelasi	--	--	3,283	3,283	Related parties
Pihak ketiga	--	--	30,512	30,512	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	--	--	8,575	8,575	Related parties
Pihak ketiga	--	--	1,340	1,340	Third parties
Biaya masih harus dibayar	--	--	35,745	35,745	Accrued expense
<b>Liabilitas keuangan tidak lancar</b>					
Utang lain-lain	--	--	68	68	<b>Non-current financial liabilities</b> Other payables
<b>Jumlah</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>79,523</b>	<b>79,523</b>	<b>Total</b>

**Sensitivitas tingkat suku bunga**

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat suku bunga yang relevan dengan seluruh variabel lain

**Interest rate sensitivity**

The sensitivity analysis below have been determined based on the Company and its subsidiary's exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the reporting period end date was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis point increase or

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomis saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat suku bunga pada tanggal tersebut mengalami kenaikan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan akan lebih tinggi Rp37. Sebaliknya jika tingkat suku bunga mengalami penurunan 50 basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan akan lebih rendah Rp37.

**ii. Manajemen risiko kredit**

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai Perusahaan yang melayani infrastruktur publik, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kolektibilitas piutang, misalnya penerapan kebijakan kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap satu atau kelompok pelanggan tertentu yang mempunyai karakteristik yang sama.

*decrease represents the management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.*

*As of December 31, 2018, if the interest rate at that time had increased by 50 basis points, with all other variables constant, the income for the year increase by Rp37. Otherwise if the interest rate decreased by 50 basis points, with all other variables constant, the income for the year would decrease by Rp37.*

**ii. Credit risk management**

*Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations, resulting in a loss to the Company and its subsidiary. As a public infrastructure company, the Company and its subsidiary are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimising the risk of uncollectible receivables, the Company and its subsidiary will mitigate by the management through a series of actions to improve receivables collection, such as implementing a credit policy. For cash and cash equivalents, the Company and its subsidiary maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.*

*The carrying amounts of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for impairment losses represents the Company and its subsidiary's exposure to credit risk.*

*The Company and its subsidiary do not have significant credit risk exposure to any single or group of customers that having similar characteristics.*

**iii. Manajemen risiko likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Perusahaan dan entitas anak.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Tanggal jatuh tempo kontraktual didasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar.

**iii. Liquidity risk management**

*Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiary will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiary's funding and liquidity management requirements.*

*The following table details the Company and its subsidiary's remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment period as of December 31, 2018 and 2017. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiary are required to pay. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company and its subsidiary may be required to pay.*

	2018				Jumlah/ Total Rp	
	Dalam satu tahun/ one year Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three year but not longer than five years Rp	Lebih dari lima tahun/Over five years Rp		
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	1,492	--	--	--	1,492	Related parties
Pihak ketiga	18,749	83	--	--	18,832	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak berelasi	13,343	--	--	--	13,343	Related parties
Pihak ketiga	8,686	--	--	--	8,686	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	44,694	--	--	--	44,694	Accrued expenses
<b>Jumlah</b>	<b>86,964</b>	<b>83</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>87,047</b>	<b>Total</b>

	2017				Jumlah/ Total Rp	
	Dalam satu tahun/ <i>Within one year</i> Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ <i>Over one year but not longer than three years</i> Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ <i>Over three year but not longer than five years</i> Rp	Lebih dari lima tahun/ <i>Over five years</i> Rp		
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	3,283	--	--	--	3,283	Related parties
Pihak ketiga	30,291	221	--	--	30,512	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak berelasi	8,642	133	48	--	8,823	Related parties
Pihak ketiga	1,197	143	--	--	1,340	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	35,745	--	--	--	35,745	Accrued expenses
<b>Jumlah</b>	<b>79,158</b>	<b>497</b>	<b>48</b>	<b>--</b>	<b>79,703</b>	<b>Total</b>

**d. Nilai wajar instrumen keuangan**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar.

**d. Fair value of financial instruments**

The management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market interest rate.

**28. Transaksi Non-Kas**

**28. Non-Cash Transaction**

	2018 Rp	2017 Rp	
Dividen kepada kepentingan non-pengendali yang belum dibayarkan	--	212	Dividend to non-controlling interest that has not been paid

**29. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian**

**29. Reissuance of Consolidated Financial Statements**

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

The Company has reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018.

Tambahan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut adalah informasi tambahan yang terdiri atas:

Additional presentation and disclosures in the consolidated financial statements of the Company is on the supplementary information that consists of:

- Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Entitas Induk
- Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk

- Parent Entity Statements of Financial Position
- Parent Entity Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
- Parent Entity Statements of Changes in Equity

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

31 Desember 2018 dan 2017

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal tersebut

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Laporan Arus Kas Entitas Induk
- Catatan atas Laporan Keuangan Entitas Induk

**30. Tanggung Jawab Manajemen dan  
Persetujuan atas Laporan Keuangan  
Konsolidasian**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 60 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2019. Informasi tambahan dari halaman 61 sampai 103 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 30 April 2019.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

December 31, 2018 and 2017

And For The Years  
then Ended

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Parent Entity Statement of Cash Flows
- Notes to the Parent Entity Financial Statements

**30. Managements Responsibility and Approval  
of Consolidated Financial Statements**

*The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 60 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issuance on March 29, 2019. Supplementary Information on pages 61 to 103 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issuance on April 30, 2019.*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN POSISI  
KEUANGAN ENTITAS INDUK NOMOR (1/43)  
31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**SUPPLEMENTARY INFORMATION PARENT ENTITY  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION NUMBER (1/43)  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5	231,319	189,457	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	6	52,756	49,339	Restricted cash in bank
Piutang usaha	7			Trade receivables
Pihak berelasi		70,967	96,174	Related parties
Pihak ketiga		20	10	Third parties
Piutang lain-lain	12	12,703	4,279	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	8	25,678	23,318	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	9	5,642	3,404	Prepaid expenses and advances
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>399,085</b>	<b>365,981</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap - bersih	11	21,621	5,589	Fixed assets - net
Aset tidak berwujud		5	263	Intangible assets
Investasi pada entitas anak dan asosiasi	10	24,136	24,136	Investments in subsidiary and associate
Piutang lain-lain	12	--	80	Other receivables
Aset pajak tangguhan		41	46	Deferred tax assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>45,803</b>	<b>30,114</b>	<b>Total Non-current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>444,888</b>	<b>396,095</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	13			Trade payables
Pihak berelasi		2,798	25,577	Related parties
Pihak ketiga		9,206	19,714	Third parties
Utang lain-lain	15			Other payables
Pihak berelasi		47,888	10,126	Related parties
Pihak ketiga		4,486	44	Third parties
Utang pajak	16	5,533	9,473	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	14	27,666	19,395	Accrued expenses
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>97,577</b>	<b>84,329</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan kerja	17	162	185	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain - Pihak berelasi	15	--	68	Other payables - Related parties
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>162</b>	<b>253</b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>97,739</b>	<b>84,582</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - par value of
Rp1 per saham				Rp1 per share
Modal dasar - 100.000 saham				Authorized -100,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham masing-masing pada				Subscribed and fully paid-up 100,000 shares as of
31 Desember 2018 dan 2017	19	100,000	100,000	December 31, 2018 and 2017, respectively
Penghasilan komprehensif lain		162	107	Other comprehensive income
Saldo laba		246,987	211,406	Retained earnings
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>347,149</b>	<b>311,513</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>444,888</b>	<b>396,095</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\* ) Investasi pada entitas anak dan asosiasi dicatat pada biaya perolehan. Lihat Catatan 3.a atas laporan keuangan.

\* ) Investments in subsidiary and associate recorded based on the acquisition cost. See Note 3.a of the financial statements.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan entitas induk secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these parent entity financial statements as a whole



**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK NOMOR (2/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
PARENT ENTITY STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME NUMBER (2/43)**

For the Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
<b>PENDAPATAN</b>	20	1,130,067	822,354	<b>REVENUES</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	21	943,962	687,503	<b>COST OF REVENUES</b>
<b>LABA KOTOR</b>		186,105	134,851	<b>GROSS PROFIT</b>
Penghasilan keuangan		5,565	5,157	Financial income
Beban umum dan administrasi	22	(42,549)	(25,881)	General and administration expenses
Beban keuangan		(31)	(162)	Financial cost
Pendapatan dividen		2,293	4,944	Dividend revenue
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	23	(14,146)	(1,427)	Other income (expense) - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		137,237	117,482	<b>INCOME BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	18	(43,084)	(40,087)	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>94,153</b>	<b>77,395</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan</b>				<b>Other comprehensive income for the year</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		73	89	Remeasurement of defined benefit plans
Manfaat (beban) pajak terkait		(18)	(22)	Related income tax benefit (expense)
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>		<b>55</b>	<b>67</b>	<b>Other comprehensive income for the year after tax</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>94,208</b>	<b>77,462</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

\*) Investasi pada entitas anak dan asosiasi dicatat pada biaya perolehan. Lihat Catatan 3.a atas laporan keuangan.

\*) Investments in subsidiary and associate recorded based on the acquisition cost. See Note 3.a of the financial statements.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan entitas induk secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these parent entity financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK NOMOR (3/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY NUMBER (3/43)**  
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal disetor/ <i>Paid-up capital stock</i> Rp	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i> Rp	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i> Rp	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i> Rp	
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>100,000</b>	<b>134,011</b>	<b>40</b>	<b>234,051</b>	<b>Balance as of December 31, 2016</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan *)	--	77,395	67	77,462	<i>Total comprehensive income for the year *)</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>100,000</b>	<b>211,406</b>	<b>107</b>	<b>311,513</b>	<b>Balance as of December 31, 2017</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan *)	--	94,153	55	94,208	<i>Total comprehensive income for the year *)</i>
Dividen	--	(58,572)	--	(58,572)	<i>Dividends</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>100,000</b>	<b>246,987</b>	<b>162</b>	<b>347,149</b>	<b>Balance as of December 31, 2018</b>

\*) Investasi pada entitas anak dan asosiasi dicatat pada biaya perolehan. Lihat Catatan 3.a atas laporan keuangan.

\*) Investments in subsidiary and associate based on the acquisition cost. See Note 3.a of the financial statements.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan entitas induk secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these parent entity financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
LAPORAN ARUS KAS  
ENTITAS INDUK NOMOR (4/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CASH FLOWS  
OF CASH FLOWS NUMBER (4/43)**

For the Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In million of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	1,155,264	774,955	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(192,424)	(123,681)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(799,591)	(553,732)	Cash paid to employees
Kas diperoleh dari operasi	163,249	97,542	Cash provided by operations
Penerimaan bunga	5,565	5,157	Interest received
Pembayaran bunga	(31)	(162)	Payment of interest
Pembayaran pajak penghasilan	(45,650)	(29,479)	Payment of income taxes
Pembayaran imbalan pasca kerja	(19)		Payment of post employment benefit
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>123,114</b>	<b>73,058</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	2,293	1,128	Dividend receipt from associate
Perolehan aset tetap	(21,556)	(2,279)	Acquisition of property and equipment
Penarikan (penempatan) rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(3,417)	4,069	Withdrawal (placement) of restricted cash in bank
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(22,680)</b>	<b>2,918</b>	<b>Net cash provided by (used in) investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran dividen	(58,572)	-	Dividend payment
<b>Kas Bersih Digunakan Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(58,572)</b>	<b>--</b>	<b>Net Cash Used in Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>41,862</b>	<b>75,976</b>	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>189,457</b>	<b>113,481</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>231,319</b>	<b>189,457</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Tambahan informasi transaksi non-kas  
disajikan di Catatan 25

Additional information of non-cash  
transaction is presented in Note 25

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan entitas induk secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these  
parent entity financial statements as a whole

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (5/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (5/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Haleyora Power ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51226.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan No.72182.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 104 tanggal 27 November 2017 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan kepengurusan Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0196200 tanggal 30 November 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha pembangkitan tenaga listrik dan usaha usaha lain yang terkait dengan ketenagalistrikan, ekspor dan impor peralatan listrik, menyelenggarakan usaha dalam bidang pembangunan dan pemasangan, pemeliharaan peralatan dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan dan menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beralamat di Kindo Square Blok A 15 - 16, Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.

**b. Susunan pengurus dan informasi lain**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

**1. General**

**a. Establishment and General Information**

*PT Haleyora Power ("the Company") was established based on deed No. 36 dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-51226.AH.01.01. Year 2011 dated October 21, 2011 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93 dated November 20, 2012, Supplement No.72182.*

*The Company's articles of association have been amended several times, recently by notarial deed No. 104 dated November 27, 2017 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, related to changes of the Company's management composition. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0196200 dated November 30, 2017.*

*According to article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to run electricity generation and other business related to electricity, export and import of electricity tools, business of development and installation, maintenance of equipment and expansion of electricity technology, and business of inspection services and electricity installation testing services.*

*The Company is domiciled in Jakarta and located at Kindo Square Blok A 15 – 16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.*

**b. Management and other information**

*As of December 31, 2018 and 2017, the Company's management consists of the following:*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (6/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (6/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
Komisaris Utama	Fahmi El Amruzi D	Fahmi El Amruzi D	President Commissioner
Komisaris	Karyawan Aji Purnama Tioria Sianturi	Okto Rinaldi S	Commissioner
Direktur Utama	Achmad Taufik Haji	Achmad Taufik Haji	President Director
Direktur Keuangan dan SDM	Sutrisno Samad	Sutrisno Samad	Director of Finance and HCM
PLT Direktur Operasi	Sinung Triwulandari	Sinung Triwulandari	Task Executor Director of Operation

Berdasarkan akta notaris No. 47 tanggal 25 September 2018 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Karyawan Aji dan Purnama Tioria Sianturi diangkat sebagai Komisaris. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0246532 tanggal 26 September 2018.

Based on notarial deed No. 47 dated September 25, 2018 from Muhammad Hanafi, S.H, notary in Jakarta about Statement of Shareholders' Decision, Karyawan Aji and Purnama Tioria Sianturi was appointed as Commissioner. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0246532 dated September 26, 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2018 and 2017, the composition of Audit Committee are as follows:

	2018	2017	
<b>Komite Audit</b>			<b>Audit Committee</b>
Ketua	Fahmi El Amruzi D	Fahmi El Amruzi D	Chairman
Anggota	Purnama Tioria Sianturi	Zulhendri	Member
Anggota	Zulhendri		Member

Jumlah karyawan Perusahaan termasuk karyawan yang diperbantukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The total number of employees of the Company including the employees who are assigned by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") are as follows (unaudited):

	2018	2017	
	<u>Orang/Employees</u>	<u>Orang/Employees</u>	
Karyawan non-proyek	43	56	Non-project employees
Karyawan tugas karya PLN	16	16	Employees seconded from PLN
<b>Jumlah</b>	<b><u>59</u></b>	<b><u>72</u></b>	<b>Total</b>

**2. Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018**

**2. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2018**

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2018, for which early adoption is permitted, namely:

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (7/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 2 (Amandemen): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, yang mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.
- PSAK 13 (Amandemen): Properti Investasi tentang pengalihan properti investasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
- PSAK 16 (Amandemen): Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif, tentang klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap.
- PSAK 46 (Amandemen): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, tentang klarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi.
- PSAK 53 (Amandemen): Pembayaran Berbasis Saham, tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK 67 (Amandemen): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, tentang kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan.
- PSAK 69: Agrikultur
- PSAK 111: Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (7/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

- *SFAS 2 (Amendment): Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative, which requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.*
- *SFAS 13 (Amendment): Investment Property, regarding transfer of investment property.*
- *SFAS 15 (Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, regarding long term interest in associates and joint ventures.*
- *SFAS 16 (Amendment): Property, Plant and Equipment-Agriculture: Bearer Plants, regarding clarification on biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets.*
- *SFAS 46 (Amendment): Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, regarding clarification on the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses.*
- *SFAS 53 (Amendment): Share-based Payment, regarding classification and measurement of share-based payment transactions.*
- *SFAS 67 (Amendment): Disclosures of Interest in Other Entities, regarding interests in entities classified as held-for-sale except for summarised financial information.*
- *SFAS 69: Agriculture*
- *SFAS 111: Wa'd Accounting*

*Interpretation to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application is permitted:*

- *SFAS 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*

*Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application is permitted are:*

- *SFAS 15 (Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (8/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (8/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

- SFAS 62 (Amendment): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contracts
- SFAS 71: Financial Instruments
- SFAS 71 (Amendment): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation
- SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers
- SFAS 73: Leases

*Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application is permitted are:*

- SFAS 112: Wakaf Accounting

*As of the authorization date of these financial statements, the Company are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company financial statements.*

**3. Kebijakan Akuntansi Penting**

**a. Penyajian Laporan Keuangan Tersendiri**

Laporan keuangan entitas induk Perusahaan merupakan laporan keuangan entitas induk PT Haleyora Power yang terdiri atas laporan posisi keuangan entitas induk tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas induk, laporan perubahan ekuitas entitas induk dan laporan arus kas entitas induk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan entitas induk Perusahaan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, kecuali untuk investasi pada entitas anak dan asosiasi yang dicatat berdasarkan biaya perolehan.

Dasar penyusunan laporan keuangan entitas induk, kecuali untuk laporan arus kas entitas induk, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan

**3. Significant Accounting Policies**

**a. Presentation of Separate Financial Statements**

*The Company's parent entity financial statements are the parent entity financial statements of PT Haleyora Power which comprise the parent entity statements of financial position as of December 31, 2018, and the parent entity statements of profit or loss and other comprehensive income, parent entity statement of changes in equity, and parent entity statements of cash flows for the year then ended. The Company's parent entity financial statements are prepared in accordance with Indonesian financial accounting standards, except for investment to subsidiary and associate which is recorded based on acquisition cost.*

*The Company's parent entity financial statements, except for the parent entity statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the*



**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (9/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

entitas induk adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Laporan keuangan tersendiri tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas entitas induk disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk keperluan pengungkapan laporan keuangan entitas induk ini, catatan mengenai sifat dan transaksi dengan pihak berelasi, catatan mengenai instrumen keuangan, manajemen risiko keuangan dan risiko modal tidak diungkapkan.

**b. Kombinasi Bisnis**

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (9/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*preparation of the parent entity financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the functional currency of the Company. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.*

*The parent entity statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.*

*In regard to parent entity financial statements disclosure, notes to the nature of relationship and transactions with related parties, notes to financial instruments, financial risk and capital risk management are not disclosed.*

**b. Business Combinations**

*Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Company, liabilities incurred by the Company to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.*

*At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.*

*Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (10/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (10/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis.*

*Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.*

*When the consideration transferred by the Company in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.*

*The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (11/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (11/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

- c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**  
Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):
- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
    - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
    - ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
    - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
  - b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
    - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).

*When a business combination is achieved in stages, the Company previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.*

*If the initial accounting for a business combination is incompleting by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleting. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.*

- c. Transactions with Related Parties**  
*A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):*
- a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
    - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
    - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
    - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
  - b. *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:*
    - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (12/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas,

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (12/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

- ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
- iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
- iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
- v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
- vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a), or*
- vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
- viii. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

*A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.*

*Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia,*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (13/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**d. Aset Keuangan**

**Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan**

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

**i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")**

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (13/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*represented by the Ministry of State Owned Enterprise as shareholder's representative.*

*All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.*

**d. Financial Assets**

**Initial Recognition and Measurement**

*All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.*

**Subsequent Measurement of Financial Assets**

*The Company's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.*

**i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")**

*Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (14/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

**ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (“AFS”)**

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (14/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.*

**ii. Loans and Receivables**

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:*

- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

*After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.*

**iii. Available-for-Sale Financial Assets (“AFS”)**

*On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (15/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (15/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

*income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.*

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

*The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.*

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

*Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company rights to receive the dividends are established.*

**Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**Effective Interest Method**

*The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.*

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

*Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.*

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan

**Impairment of Financial Assets**

*Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are*



**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (16/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (16/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.*

*For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.*

*For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:*

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.*
- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

*For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (17/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (17/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.*

*The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.*

*When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.*

*With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.*

*In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (18/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (18/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif

**Derecognition of Financial Assets**

*The Company derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.*

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.*

*On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (19/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

**Reklasifikasi**

Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (19/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.*

**Reclassification**

*The Company shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company as at fair value through profit or loss. The Company may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.*

*If, as a result of a change in the Company intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for-sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (20/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (20/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**Fair Value Measurement**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.*

*The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.*

*Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:*

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

*When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company use observable market data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.*

*Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company at the end of the reporting period during of which the change occurred.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (21/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (21/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**e. Liabilitas Keuangan dan Instrumen  
Ekuitas**

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas  
Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**f. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan  
Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas induk tersendiri jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**e. Financial Liabilities and Equity  
Instruments**

Classification as liabilities or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company is classified accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are initially recognized at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective interest rate.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company derecognize financial liabilities if, and only if, the Company obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

**f. Netting of Financial Assets and  
Financial Liabilities**

The Company only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the parent entity only statements of financial position where they:

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (22/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**g. Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3.d.

**h. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**i. Investasi pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode biaya sesuai dengan PSAK 4 (Revisi 2015), Laporan Keuangan Tersendiri.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014) sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (22/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**g. Cash and Cash Equivalents**

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivable. Refer to Note 3.d for the accounting policy on loans and receivables.

**h. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**i. Investment in Associate**

Associates are all entities over which the Company have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the historical method of accounting in accordance with SFAS 4 (Revised 2015), Separate Financial Statements.

The Company determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 (Revised 2014) to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.



**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (23/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (23/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**j. Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	20	Buildings
Kendaraan bermotor	8	Motor vehicles
Perlengkapan umum	4	General equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

**k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang

**j. Fixed Assets**

Fixed assets held for use in the supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized as a write off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or to service an item of fixed assets are recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

**k. Impairment of Non-Financial Assets**

Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (24/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (24/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

**I. Sewa Operasi**

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessor

Sewa di mana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga

*circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.*

*Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.*

**I. Operating Leases**

*Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.*

As lessor

*Lessee where the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset ownership are classified as operating leases.*

As lessee

*Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (25/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

**m. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari penyediaan jasa diakui pada saat jasa diberikan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

**n. Imbalan Kerja**

Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan entitas induk tersendiri sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (25/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.*

*Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.*

*In the event that lease incentives are received when entering into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.*

**m. Revenue and Expense Recognition**

*Revenue from services are recognized when the services are delivered.*

*Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.*

**n. Employee Benefits**

Post-employment Benefits

*The Company established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company's policies.*

*The liability recognized in the parent entity only statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (26/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (26/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan entitas induk tersendiri merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

**o. Provisi**

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

*The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.*

*Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.*

*Past service costs are recognized immediately in profit or loss.*

Long-term Benefits

*Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company recognize gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.*

*Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the period in which they occur.*

*The long-term employee benefit liabilities recognized in the parent entity only statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.*

**o. Provisions**

*Provisions are recognized when the Company have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (27/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Bila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**p. Pajak Penghasilan**

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (27/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.*

*When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.*

**p. Income Tax**

*Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.*

*Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.*

*For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (28/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan tersendiri dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (28/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.*

*Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.*

*A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:*

- a. the initial recognition of goodwill; or*
- b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the separate financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (29/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (29/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.*

*The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.*

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*



**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (30/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (30/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan  
Estimasi Akuntansi yang Signifikan**

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

**Sumber Ketidakpastian Estimasi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

**Imbalan Pascakerja**

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 17.

**4. Critical Accounting Judgments and  
Significant Accounting Estimates**

*In the application of the Company accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.*

*The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.*

**Sources of Estimation Uncertainty**

*The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:*

**Post-employment Benefits**

*The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company' post-employment benefit liabilities.*

*Assumptions used in the calculation of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 17.*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (31/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (31/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Pajak Penghasilan**

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negoisasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

**Income Tax**

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income to provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

**5. Kas dan Setara Kas**

**5. Cash and Cash Equivalents**

	2018 Rp	2017 Rp	
Kas	769	636	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi			Related parties
Bank Negara Indonesia	172,877	151,197	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	168	40	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	4	83	Bank Mandiri
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin	1	30,001	Bank Bukopin
Subjumlah kas dan bank	173,819	181,957	Subtotal cash on hand and in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi			Related parties
Bank Mandiri	50,000	--	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	7,500	7,500	Bank Rakyat Indonesia
Subjumlah deposito berjangka	57,500	7,500	Subtotal time deposits
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>231,319</b>	<b>189,457</b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	4.75% - 6.75%	4.75% - 6.75%	Interest rate per annum on time deposits
Jangka waktu	1 - 3 bulan/ months	1 - 3 bulan/ months	Maturity

INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (32/43)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (32/43)

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya 6. Restricted Cash in Bank

	2018 Rp	2017 Rp	
<b>Rekening tabungan bisnis</b>			<b>Business account</b>
Bank Mandiri	52,388	--	Bank Mandiri
Bank Bukopin	368	49,339	Bank Bukopin
<b>Jumlah</b>	<b>52,756</b>	<b>49,339</b>	<b>Total</b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	8.25%	8.25%	Interest rate per annum on time deposits

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo rekening bank yang dijadikan sebagai jaminan (*cash collateral*) atas bank garansi yang diterbitkan oleh pihak Bank untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan pelanggan. Rekening tabungan bisnis merupakan rekening penyimpanan atas dana untuk pembelian saham pada entitas asosiasi.

Restricted cash in bank represents bank account balances pledged as collateral (*cash collateral*) for bank guarantees issued by the Bank to guarantee the implementation of specific work with customers. Business account represents the savings account for share purchase in associate.

7. Piutang Usaha

7. Trade Receivables

a. Berdasarkan langganan

a. By debtor

	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak berelasi			Related parties
PLN	70,955	96,174	PLN
PT Haleyora Powerindo	12	--	PT Haleyora Powerindo
Pihak ketiga	20	10	Third parties
<b>Jumlah</b>	<b>70,987</b>	<b>96,184</b>	<b>Total</b>

b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya

b. By age category of receivables that are not impaired

	2018 Rp	2017 Rp	
Belum jatuh tempo	52,162	48,928	Not yet due
Lewat jatuh tempo			Past due
1 - 90 hari	18,517	44,552	1 - 90 days
91 - 360 hari	18	2,256	91 - 360 days
Lebih dari 360 hari	290	448	More than 360 days
<b>Jumlah</b>	<b>70,987</b>	<b>96,184</b>	<b>Total</b>

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Company do not provide allowance for doubtful accounts as management believes that all receivables are collectible.

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (33/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (33/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. Pajak Dibayar Dimuka**

Pajak dibayar dimuka terdiri atas Pajak pertambahan nilai ("PPN") Perusahaan di tahun 2018 dan 2017.

**8. Prepaid Taxes**

Prepaid taxes consist of Value added tax ("VAT") in 2018 and 2017.

**9. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya dibayar dimuka			Prepaid expenses
Sewa kantor	5,003	2,088	Rent office
Premi asuransi	639	695	Insurance
Subjumlah	<u>5,642</u>	<u>2,783</u>	Subtotal
Uang muka	--	621	Advances
<b>Jumlah</b>	<b><u>5,642</u></b>	<b><u>3,404</u></b>	<b>Total</b>

**9. Prepaid Expenses and Advances**

**10. Investasi pada Entitas Anak dan Asosiasi**

**a. Entitas anak**

Perusahaan memiliki saham entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak/ <i>Subsidiary</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Tahun operasi komersial/ <i>commercial operations year</i>	Persentase penyertaan/ <i>Percentage of ownership 2017 dan/ and 2016</i>
PT Haleyora Powerindo ("HPI")	Bandung	Layanan teknik dan pemeliharaan/ <i>Technical and maintenance service</i>	2002	90.00%

**a. Subsidiary**

The Company has ownership interests, in the following:

**b. Entitas asosiasi**

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Asosiasi/ <i>Associate</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Tahun operasi komersial/ <i>commercial operations year</i>	Persentase penyertaan/ <i>Percentage of ownership 2017 dan/ and 2016</i>
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyediaan dan Pendistribusian Tenaga Listrik Wilayah Pelabuhan/ <i>Supply and Distribution of Electric Power Port Region</i>	2013	45.00%

**b. Associate**

Details of investment in associate is as follows:

Investasi pada entitas asosiasi merupakan investasi Perusahaan di EPI yang dicatat berdasarkan biaya perolehan.

Investment in associate represent the Company's investment in EPI which recorded at historical cost.

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (34/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (34/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

EPI didirikan untuk penyediaan pasokan listrik dengan layanan yang prima bagi konsumen di wilayah pelabuhan dan/atau kawasan lainnya di Indonesia.

*EPI was established to supply electricity with the best services for consumers in the area of the port and/or other areas in Indonesia.*

**11. Aset Tetap**

**11. Fixed Assets**

		2018			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Tanah	--	1,331	--	1,331	Land
Bangunan	--	985	--	985	Buildings
Kendaraan bermotor	131	1,283	--	1,414	Motor vehicles
Perlengkapan umum	11,277	17,957	--	29,234	General equipment
Subjumlah	<u>11,408</u>	<u>21,556</u>	<u>--</u>	<u>32,964</u>	Subtotal
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	--	38	--	38	Buildings
Kendaraan bermotor	44	110	--	154	Motor vehicles
Perlengkapan umum	5,775	5,376	--	11,151	General equipment
Subjumlah	<u>5,819</u>	<u>5,524</u>	<u>--</u>	<u>11,343</u>	Subtotal
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b><u>5,589</u></b>			<b><u>21,621</u></b>	<b>Net Carrying Value</b>
		2017			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Kendaraan bermotor	131	--	--	131	Motor vehicles
Perlengkapan umum	8,998	2,279	--	11,277	General equipment
Subjumlah	<u>9,129</u>	<u>2,279</u>	<u>--</u>	<u>11,408</u>	Subtotal
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Kendaraan bermotor	28	16	--	44	Motor vehicles
Perlengkapan umum	3,271	2,504	--	5,775	General equipment
Subjumlah	<u>3,299</u>	<u>2,520</u>	<u>--</u>	<u>5,819</u>	Subtotal
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b><u>5,830</u></b>			<b><u>5,589</u></b>	<b>Net Carrying Value</b>

Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian karena kebakaran dan lainnya.

*The Company do not insure their fixed assets against losses due to fire and other risks.*

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

*Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment of fixed assets at the reporting date.*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (35/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (35/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. Piutang Lain-lain**

**12. Other Receivables**

	<b>2018 Rp</b>	<b>2017 Rp</b>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
HPI	2,531	4,219	<i>HPI</i>
EPI	34	12	<i>EPI</i>
Lain-lain	30	2	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>2,595</u>	<u>4,233</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Surya Sudeco	474	--	<i>PT Surya Sudeco</i>
Karyawan	18	126	<i>Employees</i>
Lain-lain	9,616		<i>Others</i>
Subjumlah	<u>10,108</u>	<u>4,233</u>	<i>Subtotal</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>12,703</u></b>	<b><u>8,466</u></b>	<b><i>Total</i></b>
Dikurangi bagian tidak lancar	--	80	<i>Less non-current portion</i>
<b>Bagian lancar</b>	<b><u>12,703</u></b>	<b><u>4,279</u></b>	<b><i>Current portion</i></b>

**13. Utang Usaha**

**13. Trade Payables**

Akun ini merupakan utang usaha sehubungan dengan pembelian barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan sebagai berikut:

*This accounts represents payables in relation to purchase of goods and services to support the operations of the Company as follows:*

	<b>2018 Rp</b>	<b>2017 Rp</b>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
HPI	1,985	22,391	<i>HPI</i>
PLN	676	3,098	<i>PLN</i>
PT Indonesia Comnets Plus	63	88	<i>PT Indonesia Comnets Plus</i>
Lain-lain	74	--	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>2,798</u>	<u>25,577</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga	<u>9,206</u>	<u>19,714</u>	<i>Third Parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>12,004</u></b>	<b><u>45,291</u></b>	<b><i>Total</i></b>

**14. Biaya Masih Harus Dibayar**

**14. Accrued Expenses**

	<b>2018 Rp</b>	<b>2017 Rp</b>	
Bonus dan insentif kerja	23,325	16,783	<i>Bonus and incentive</i>
Gaji dan tunjangan	4,158	1,578	<i>Salaries and allowances</i>
Lainnya	183	1,034	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>27,666</u></b>	<b><u>19,395</u></b>	<b><i>Total</i></b>

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (36/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (36/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. Utang Lain-lain**

**15. Other Payables**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
HPI	47,432	9,507	HPI
PLN	348	553	PLN
Dana Pensiun PLN	22	45	<i>Dana Pensiun PLN</i>
PLN Batam	15	--	<i>PLN Batam</i>
Lain-lain	71	89	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>47,888</u>	<u>10,194</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga	<u>4,486</u>	<u>44</u>	<i>Third parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>52,374</u></b>	<b><u>10,238</u></b>	<b>Total</b>
Dikurangi bagian jangka panjang			<i>Less non-current portion</i>
Pihak berelasi	--	68	<i>Related parties</i>
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b><u>52,374</u></b>	<b><u>10,170</u></b>	<b>Current portion</b>

**16. Utang Pajak**

**16. Taxes Payable**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Pajak kini (Catatan 18)	3,433	5,987	<i>Current tax (Note 18)</i>
Pajak Penghasilan:			<i>Income Taxes:</i>
Pasal 21	241	1,226	<i>Article 21</i>
Pasal 23	193	93	<i>Article 23</i>
Pasal 4 (2)	31	59	<i>Article 4 (2)</i>
Pasal 25	1,635	2,099	<i>Article 25</i>
Pajak pertambahan nilai	--	9	<i>Value added tax</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>5,533</u></b>	<b><u>9,473</u></b>	<b>Total</b>

**17. Liabilitas Imbalan Kerja**

**17. Employee Benefits Liabilities**

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja tanpa pendanaan berupa uang pesangon kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

*The Company provide unfunded post-employment benefit to their employees in accordance with the Company's regulation which is based on Labour Law No. 13/2003.*

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan masing-masing oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah dan PT Quattro Asia Consulting dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

*On December 31, 2018 and 2017, the Company recorded a provision for post-employment benefits based on an independent actuarial calculation performed by PT Binaputera Jaga Hikmah and PT Quattro Asia Consulting, respectively, using the Projected Unit Credit method with the following assumptions:*



**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (37/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (37/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Tabel mortalita	CSO 58	CSO 58	<i>Mortality table</i>
Usia pensiun normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	<i>Normal retirement age</i>
Tingkat diskonto per tahun	8.76%	7.30%	<i>Discount rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.20%	<i>Salary increase rate per annum</i>

Kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan tersendiri adalah sebagai berikut: *Post-employment benefit obligations recognized in the separate statement of financial position are as follows:*

	<u>2018 Rp</u>	<u>2017 Rp</u>	
Nilai kini dari kewajiban yang tidak didanai	<u>162</u>	<u>185</u>	<i>Present value of unfunded obligation</i>

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: *Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:*

	<u>2018 Rp</u>	<u>2017 Rp</u>	
Pada awal tahun	185	199	<i>At beginning of year</i>
Biaya jasa kini (Catatan 21 & 22)	55	59	<i>Current service cost (Note 21 &amp; 22)</i>
Biaya bunga (Catatan 21 & 22)	14	17	<i>Interest expense (Note 21 &amp; 22)</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurement:</i>
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi aktuari	(73)	(90)	<i>Gain from changes in actuarial assumptions</i>
Pembayaran imbalan	(19)	--	<i>Benefit and contributions paid</i>
<b>Pada akhir tahun</b>	<b><u>162</u></b>	<b><u>185</u></b>	<b><i>At the end of year</i></b>

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut: *The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal assumption is as follows:*

**Dampak atas kewajiban imbalan pasti/  
Impact on defined benefit obligation**

	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</u>	
Tingkat diskonto	1,00%	Penurunan sebesar/ <i>Decrease by</i> 10,42%	Kenaikan sebesar/ <i>Increase by</i> 28,9%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1,00%	Kenaikan sebesar/ <i>Increase by</i> 28,41%	Penurunan sebesar/ <i>Decrease by</i> 10,64%	<i>Salary increase rate</i>

Analisa sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Pada prakteknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi dan perubahan-perubahan dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan. Ketika melakukan perhitungan sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti ke asumsi aktuarial yang signifikan, metode yang sama (nilai kini

*The sensitivity analyses are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and the changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculation with the projected*

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (38/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (38/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dari kewajiban imbalan pasti yang dihitung menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti saat menghitung kewajiban pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas induk tersendiri.

*unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the parent entity only statement of financial position.*

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

*Expected maturity analysis of undiscounted pension and post-employment medical benefits is as follow:*

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i> Rp	1 sampai 2 tahun/ <i>Between 1- 2 years</i> Rp	2 sampai 5 tahun/ <i>Between 2- 5 years</i> Rp	Lebih dari 5 tahun/ <i>Over 5 years</i> Rp	Jumlah/ <i>Total</i> Rp	
Imbalan pensiun	--	120	--	224	344	<i>Pension benefits</i>

**18. Pajak Penghasilan**

**18. Income Tax**

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

*Tax expense of the Company consists of the following:*

	2018 Rp	2017 Rp	
Beban pajak kini	43,096	35,464	<i>Current tax expenses</i>
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(12)	4,623	<i>Deferred tax expense (income)</i>
<b>Jumlah beban pajak</b>	<b>43,084</b>	<b>40,087</b>	<b><i>Total tax expense</i></b>

**a. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas induk tersendiri dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

**a. Current Tax**

*A reconciliation between profit before tax per parent entity only statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:*

	2018 Rp	2017 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	137,237	117,482	<i>Income before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Koreksi fiskal:			<i>Fiscal correction:</i>
Imbalan kerja	50	76	<i>Employee benefits</i>
Beban/(pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			<i>Nondeductible expense (nontaxable income):</i>
Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan	40,577	28,167	<i>Employees' welfare and tax allowance</i>
Pembayaran manfaat pesangon	(1,772)		<i>Payment of severance benefits</i>
Bantuan dan sumbangan	20	68	<i>Assistance and donation</i>
Beban penyusutan	14	--	<i>Depreciation expense</i>
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(5,565)	(5,156)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Efek penyesuaian ekuitas pada asosiasi	(2,293)	(1,128)	<i>Equity method adjustment in associate</i>
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	4,115	2,347	<i>Other nondeductible expense</i>
<b>Jumlah</b>	<b>172,383</b>	<b>141,856</b>	<b><i>Total</i></b>

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (39/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (39/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perhitungan beban dan pajak penghasilan lebih bayar adalah sebagai berikut:

*Current tax expense and income tax overpayment are as follows:*

	2018 Rp	2017 Rp	
Beban pajak kini	43,096	35,464	<i>Current tax expenses</i>
Pembayaran pajak di muka			<i>Prepayment of taxes</i>
Pasal 23	22,578	15,840	<i>Article 23</i>
Pasal 25	17,085	13,637	<i>Article 25</i>
<b>Utang pajak kini</b>	<b>3,433</b>	<b>5,987</b>	<b><i>Current tax payable</i></b>

**b. Pajak tangguhan**

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

**b. Deferred tax**

*The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:*

	1 January/ January 1, 2018 Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ credited to income for the period Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b><i>Deferred tax asset</i></b>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	46	12	(18)	40	<i>Employment benefits obligations</i>
Penyusutan Aset Tetap	--	--	--	--	<i>Depreciation of fixed assets</i>
<b>Aset pajak tangguhan akhir tahun</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>(18)</b>	<b>40</b>	<b><i>Deferred tax asset at the end of the year</i></b>

	1 January/ January 1, 2017 Rp	Dibebankan ke laporan laba rugi/ charged to income for the period Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b><i>Deferred tax asset</i></b>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	4,691	(4,623)	(22)	46	<i>Employment benefits obligations</i>
<b>Aset pajak tangguhan akhir tahun</b>	<b>4,691</b>	<b>(4,623)</b>	<b>(22)</b>	<b>46</b>	<b><i>Deferred tax asset at the end of the year</i></b>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:*

	2018 Rp	2017 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	137,237	117,482	<i>Income before tax per statement of comprehensive income</i>
Beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku	34,309	29,371	<i>Income tax at effective tax rate</i>

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (40/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (40/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
Pengaruh pajak atas			<i>Tax effect on</i>
Beban/(penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			<i>Non-deductible expenses/ (no-taxable income):</i>
Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan	10,144	7,042	<i>Employees' welfare and tax allowance</i>
Pembayaran manfaat pesangon	(443)	--	<i>Tax Expense</i>
Pengaruh pajak atas			<i>Tax effect on</i>
Pendapatan dividen dari entitas asosiasi dapat diperhitungkan menurut fiskal	(573)	(282)	<i>Dividend income from associate (non-taxable income)</i>
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(1,391)	(1,289)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Beban penyusutan	4	--	<i>Accrual revenue and cost</i>
Manfaat aset pajak yang tidak diakui	--	4,642	<i>Unrecognized deferred tax income</i>
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	1,034	603	<i>Other non deductible expense</i>
<b>Jumlah</b>	<b>43,084</b>	<b>40,087</b>	<b>Total</b>

**c. Surat Ketetapan Pajak**

Selama tahun 2018, Perusahaan menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN dan Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN untuk tahun fiskal 2013, 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp18, Rp2.300, Rp1.645 dan Rp451.

Selama tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN dan Surat Tagihan Pajak ("STP") PPN untuk tahun fiskal 2016 masing-masing sebesar Rp13 dan Rp2.

Perusahaan juga menerima berbagai STP PPH 21 untuk tahun fiskal 2017-2018 dengan nilai total sebesar Rp13 dan STP PPh Badan tahun fiskal 2017 dengan nilai total sebesar Rp18.

**c. Tax Assessments**

In 2017, the Company has received Tax Assessment Letter Less Payment ("SKPKB") in relation to VAT and Tax Collection Letter ("STP") VAT for 2013, 2014, 2015 and 2016 fiscal year amounted to Rp18, Rp2,300, Rp1,645 and Rp451, respectively.

In 2017, the Company has received Tax Assessment Letter Less Payment ("SKPKB") in relation to VAT and Tax Collection Letter ("STP") VAT for 2016 fiscal year amounted to Rp13 and Rp2, respectively.

Moreover, the Company also received several STP income tax article 21 for 2017-2018 fiscal year amounting to Rp13 and STP for the 2017 fiscal year in relation to corporate income tax amounting to Rp18.

**19. Modal Saham**

**19. Capital Stock**

	2018 dan/ and 2017			
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital Rp	
Nama pemegang saham				<i>Name of stockholders</i>
PLN	99,999	99.99%	99,999	<i>PLN</i>
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	1	0.01%	1	<i>Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN</i>
<b>Jumlah</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,000</b>	<b>Total</b>

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (41/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (41/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak untuk membawa satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.

*The shares issued and fully paid are ordinary shares which entitle the holder to carry one vote per share and to participate in dividends.*

Berdasarkan keputusan rapat pemegang saham secara sirkular sebagaimana tercantum dalam akta No. 27 tanggal 30 Agustus 2013 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp75.000. Seluruh penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh PLN.

*Based on the Deed of Circular Decision of shareholder No. 27 dated August 30, 2013 of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders are agreed to increase issued and fully paid in capital amounting to Rp75,000. All of the paid-in capital was paid by PLN.*

Berdasarkan akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp100.000 terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 per saham dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000 yang terbagi atas 25.000 saham.

*Based on the Deed No. 36 dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, the Company's authorized capital stock amounting to Rp100,000 consisting of 100,000 shares with par value of Rp1 per share and the subscribed and paid-up capital amounting to Rp25,000 which consists of 25,000 shares.*

**20. Pendapatan**

**20. Revenues**

**a. Berdasarkan jenis pekerjaan**

**a. By type of works**

	<b>2018 Rp</b>	<b>2017 Rp</b>	
Operasi dan pemeliharaan			<i>Operation and maintenance services</i>
Pelayanan jasa teknik	927,406	686,507	<i>Technical services</i>
Pelayanan jasa non-teknik	14,399	135,529	<i>Non-technical services</i>
Lainnya	188,262	318	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1,130,067</b>	<b>822,354</b>	<b>Total</b>

**b. Berdasarkan pelanggan**

**b. By customers**

	<b>2018 Rp</b>	<b>2017 Rp</b>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PLN	1,130,067	822,275	<i>PLN</i>
Pihak ketiga	--	79	<i>Third parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1,130,067</b>	<b>822,354</b>	<b>Total</b>

Pelayanan jasa teknik meliputi penertiban penggunaan tenaga listrik, operator dan teknisi pemeliharaan pembangkit, dan layanan teknik lainnya. Pelayanan jasa non-teknik meliputi tenaga administrasi, pengemudi, satpam, layanan kebersihan dan layanan non-teknik lainnya.

*Technical services include monitoring the use of electric power, plant operators and maintenance technicians, and other technical services. Non-technical services include administrative personnel driver, security, janitorial services and other non technical services.*

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (42/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (42/43)**

For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**21. Beban Pokok Pendapatan**

**21. Cost of Revenues**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Jasa tenaga kerja langsung	778,381	541,375	<i>Direct labour</i>
Kendaraan operasional	63,666	66,505	<i>Operational vehicles</i>
Pemakaian alat kerja dan material	30,708	33,420	<i>Labour and material usage tool</i>
Denda operasional	13,770	7,629	<i>Operational penalty</i>
Pemeliharaan dan penunjang Operasional	2,531	7,458	<i>Maintenance and overhead</i>
Subkontraktor	19,201	5,682	<i>Subcontractor</i>
Imbalan kerja (Catatan 17)	69	75	<i>Employee benefits (Note 17)</i>
Lainnya	35,635	25,359	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>943,962</b>	<b>687,503</b>	<b>Total</b>

**22. Beban Umum dan Administrasi**

**22. General and Administration Expenses**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Kepegawaian	21,209	12,356	<i>Personnel</i>
Honorarium	10,076	8,152	<i>Honorarium</i>
Pemeliharaan	4,896	2,490	<i>Maintenance</i>
Imbalan kerja (Catatan 17)	--	1	<i>Employee benefits (Note 17)</i>
Lainnya	6,368	2,882	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>42,549</b>	<b>25,881</b>	<b>Total</b>

**23. Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih**

**23. Other Income (Expense) – Net**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Pendapatan klaim asuransi	1	3,412	<i>Insurance claim income</i>
Pendapatan reward	132		<i>Reward income</i>
Denda dan biaya terkait	162	(6,338)	<i>Penalty and related expenses</i>
Beban pajak	(5,832)	(1,819)	<i>Tax expenses</i>
Beban STP	(18)	(86)	<i>STP expenses</i>
Sumbangan pengembangan masyarakat	(20)	(67)	<i>Community development donation</i>
Lainnya	(8,571)	3,471	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>(14,146)</b>	<b>(1,427)</b>	<b>Total</b>

**24. Ikatan dan Kontijensi**

**24. Commitments and Contingencies**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki komitmen terhadap sewa peralatan dan kendaraan dengan nilai total sebesar Rp91.018.

As of December 31, 2018, the Company has total commitments for rental equipment and vehicle amounting to Rp91,018.

**PT HALEYORA POWER  
(ENTITAS INDUK)**

**PT HALEYORA POWER  
(PARENT ENTITY)**

**INFORMASI TAMBAHAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
ENTITAS INDUK NOMOR (43/43)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**SUPPLEMENTARY INFORMATION  
NOTES TO THE PARENT ENTITY FINANCIAL  
STATEMENTS NUMBER (43/43)**

*For The Years Ended  
December 31, 2018 and 2017  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**25. Transaksi Non-Kas**

**25. Non-Cash Transaction**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Dividen dari entitas anak yang belum dibayarkan	--	3,816	<i>Dividend from subsidiary that has not been paid</i>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

This page is intentionally left blank



Laporan Tahunan 2018 Annual Report

## **TRANSFORMASI LAYANAN MENUJU PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN**

Services Transformation Towards Sustainable Growth

**KANTOR PUSAT/Head Office**

Kindo Square, Blok A15–A16

Jalan Duren Tiga Raya No. 101

Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan

Tel. : (021) 7919 2517

Fax. : (021) 7919 2516